



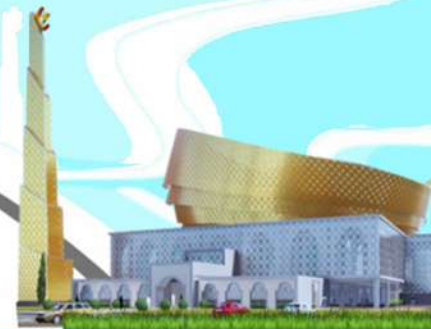
LAPORAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH

# LPPD

## KABUPATEN BINTAN



SELAMAT DATANG  
DIBANDAR SERI BENTAN



TAHUN 2021



# LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BINTAN

# DAFTAR ISI



## LPPD 2021

# DAFTAR ISI

<b>MAKNA LAMBANG DAERAH MOTTO DAN SLOGAN KABUPATEN BINTAN</b>	
<b>KATA PENGANTAR</b>	i
<b>DAFTAR ISI</b>	ii
<b>DAFTAR TABEL</b>	vi
<b>DAFTAR GRAFIK</b>	xiv
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang	1
1.1.1 Penjelasan Umum	1
A. Undang-Undang Pembentukan Daerah	1
B. Kondisi Geografis Wilayah	7
C. Jumlah Penduduk	8
D. Jumlah Kecamatan dan Kelurahan/Desa	13
E. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah	16
1. Perangkat Daerah dan Unit Kerja	16
2. Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kabupaten Bintang	20
F. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	25
1. Pendapatan Daerah	39
2. Belanja Daerah	43
a. Belanja Operasi	47
b. Belanja Modal	49
c. Belanja Tak terduga	50
d. Belanja Transfer	52
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah	53
A. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah	53
B. Visi Dan Misi Kepala Daerah	57
1. Visi Kabupaten Bintang	58
2. Misi Kabupaten Bintang	61
C. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah	65
D. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan	81
1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal	121
<b>BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN</b>	<b>127</b>
2.1 Capaian Kinerja Makro	128
2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	152

2.2.2	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	197
2.2.3	Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	209
2.3	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	210
2.3.1	Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bintan	211
2.3.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021	214
2.3.3	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama	216
2.3.4	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	217
2.3.5	Analisa Efisiensi Sumber Daya terhadap Pencapaian Kinerja Daerah	338
2.3.6	Analisa Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Kinerja	356
<b>BAB III</b>	<b>CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN</b>	<b>371</b>
3.1	Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten	376
3.2	Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten	377
3.3	Permasalahan dan Kendala	378
3.4	Saran dan Tindak Lanjut	380
3.5	Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan bersumber dari Dana Alokasi Khusus	381
3.6	Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan bersumber dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Bintan	390
<b>BAB IV</b>	<b>PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL</b>	<b>399</b>
4.1	Urusan Pendidikan	400
4.1.1	Jenis Pelayanan Dasar	400
4.1.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	401
4.1.3	Realisasi	401
4.1.4	Alokasi Anggaran	402
4.1.5	Dukungan Personil	406
4.1.6	Permasalahan dan Solusi	406
4.2	Urusan Kesehatan	407
4.2.1	Jenis Pelayanan Dasar	407
4.2.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	409
4.2.3	Realisasi	411
4.2.4	Alokasi Anggaran	414
4.2.5	Dukungan Personil	420
4.2.6	Permasalahan dan Solusi	421
4.3	Urusan Pekerjaan Umum	426
4.3.1	Jenis Pelayanan Dasar	426
4.3.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	426

4.3.3	Realisasi	427
4.3.4	Alokasi Anggaran	428
4.3.5	Dukungan Personil	429
4.3.6	Permasalahan dan Solusi	430
4.4	Urusan Perumahan Rakyat	431
4.4.1	Jenis Pelayanan Dasar	431
4.4.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	432
4.4.3	Realisasi	433
4.4.4	Alokasi Anggaran	434
4.4.5	Dukungan Personil	435
4.4.6	Permasalahan dan Solusi	436
4.5	Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	437
4.5.1	Jenis Pelayanan Dasar	437
4.5.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	438
4.5.3	Realisasi	439
4.5.4	Alokasi Anggaran	441
4.5.5	Dukungan Personil	443
4.5.6	Permasalahan dan Solusi	445
4.6	Urusan Sosial	446
4.6.1	Jenis Pelayanan Dasar	446
4.6.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	447
4.6.3	Realisasi	448
4.6.4	Alokasi Anggaran	449
4.6.5	Dukungan Personil	451
4.6.6	Permasalahan dan Solusi	452
4.7	Program dan Kegiatan	455
4.7.1	Program dan Kegiatan Urusan Pendidikan	455
4.7.2	Program dan Kegiatan Urusan Kesehatan	457
4.7.3	Program dan Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum	460
4.7.4	Program dan Kegiatan Urusan Perumahan Rakyat	461
4.7.5	Program dan Kegiatan Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	461
4.7.6	Program dan Kegiatan Urusan Sosial	463
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	<b>466</b>



**LAPORAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH  
KABUPATEN BINTAN**

**DAFTAR  
TABEL**



**LPPD 2021**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Uraian</b>	<b>Hal</b>
Tabel 1.1	Sebaran Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Bintan	8
Tabel 1.2	Tingkat Kepadatan Penduduk di Kabupaten Bintan Tahun 2017-2021	10
Tabel 1.3	Persebaran Penduduk berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Bintan Tahun 2020-2021	11
Tabel 1.4	Kecamatan, Kelurahan dan Desa di Kabupaten Bintan	14
Tabel 1.5	Susunan dan Klasifikasi Tipe Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Bintan	17
Tabel 1.6	Jumlah Unit Kerja Per Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan	18
Tabel 1.7	Rekapitulasi PNS berdasarkan Jenis Kelamin dan Usia di Kabupaten Bintan	20
Tabel 1.8	Rekapitulasi Persebaran PNS Berdasarkan Unit Organisasi di Kabupaten Bintan	21
Tabel 1.9	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan (Untuk Tahun Anggaran Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2021 Dan 2020)	28
Tabel 1.10	Realisasi Anggaran Belanja Berdasarkan Alokasi Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2021	33
Tabel 1.11	Capaian Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2021	40
Tabel 1.12	Capaian Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2021	46
Tabel 1.13	Permasalahan Strategis Daerah Kabupaten Bintan	54
Tabel 1.14	Perkembangan Capaian Indikator Makro Kabupaten Bintan	63
Tabel 1.15	Program Pembangunan Kabupaten Bintan	65
Tabel 1.16	Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan Tahun 2021	81
Tabel 1.17	Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan Tahun 2021	81
Tabel 1.18	Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bintan Tahun 2021	91
Tabel 1.19	Program dan Kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan Tahun 2021	92
Tabel 1.20	Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan Tahun 2021	93
Tabel 1.21	Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bintan Tahun 2021	93
Tabel 1.22	Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021	94
Tabel 1.23	Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Bintan Tahun 2021	95

<b>Tabel</b>	<b>Uraian</b>	<b>Hal</b>
Tabel 1.24	Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintang Tahun 2021	96
Tabel 1.25	Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintang Tahun 2021	97
Tabel 1.26	Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2021	98
Tabel 1.27	Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bintang Tahun 2021	99
Tabel 1.28	Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintang Tahun 2021	100
Tabel 1.29	Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bintang Tahun 2021	100
Tabel 1.30	Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bintang Tahun 2021	101
Tabel 1.31	Program dan Kegiatan Dinas Koperasi, Usaha, Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bintang Tahun 2021	102
Tabel 1.32	Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintang Tahun 2021	102
Tabel 1.33	Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintang Tahun 2021	103
Tabel 1.34	Program dan Kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintang Tahun 2021	104
Tabel 1.35	Program dan Kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2021	104
Tabel 1.36	Program dan Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Bintang Tahun 2021	105
Tabel 1.37	Program dan Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Bintang Tahun 2021	105
Tabel 1.38	Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bintang Tahun 2021	106
Tabel 1.39	Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Bintang Tahun 2021	106
Tabel 1.40	Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tahun 2021	107
Tabel 1.41	Program dan Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintang Tahun 2021	107
Tabel 1.42	Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintang Tahun 2021	108
Tabel 1.43	Program dan Kegiatan Dinas Koperasi, Usaha, Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bintang Tahun 2021	109
Tabel 1.44	Program dan Kegiatan Dinas Koperasi, Usaha, Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bintang Tahun 2021	109
Tabel 1.45	Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Bintang Tahun 2021	110



<b>Tabel</b>	<b>Uraian</b>	<b>Hal</b>
Tabel 1.46	Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Bintang Tahun 2021	110
Tabel 1.47	Program dan Kegiatan Kecamatan Bintang Timur Kabupaten Bintang Tahun 2021	111
Tabel 1.48	Program dan Kegiatan Kecamatan Bintang Pesisir Kabupaten Bintang Tahun 2021	112
Tabel 1.49	Program dan Kegiatan Kecamatan Bintang Utara Kabupaten Bintang Tahun 2021	112
Tabel 1.50	Program dan Kegiatan Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintang Tahun 2021	113
Tabel 1.51	Program dan Kegiatan Kecamatan Mantang Kabupaten Bintang Tahun 2021	114
Tabel 1.52	Program dan Kegiatan Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintang Tahun 2021	115
Tabel 1.53	Program dan Kegiatan Kecamatan Tambelan Kabupaten Bintang Tahun 2021	116
Tabel 1.54	Program dan Kegiatan Kecamatan Teluk Bintang Kabupaten Bintang Tahun 2021	116
Tabel 1.55	Program dan Kegiatan Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintang Tahun 2021	117
Tabel 1.56	Program dan Kegiatan Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintang Tahun 2021	118
Tabel 1.57	Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Bintang Tahun 2021	119
Tabel 1.58	Program dan Kegiatan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bintang Tahun 2021	119
Tabel 1.59	Program dan Kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintang Tahun 2021	120
Tabel 1.60	Program dan Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintang Tahun 2021	120
Tabel 1.61	Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bintang Tahun 2021	120
Tabel 1.62	Program dan Kegiatan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bintang Tahun 2021	121
Tabel 1.63	SPM Kabupaten Bintang 2021	122
Tabel 2.1	Capaian Kinerja Makro	129
Tabel 2.2	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bintang menurut Komponen Tahun 2016-2021	132
Tabel 2.3	Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Bintang Tahun 2021	140
Tabel 2.4	Kondisi Makro Ekonomi Kabupaten Bintang Tahun 2020-2021	143
Tabel 2.5	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bintang Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) Tahun 2016-2021	145
Tabel 2.6	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bintang Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) Tahun 2016-2021	147
Tabel 2.7	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bintang Atas Dasar Harga Konstan	150

<b>Tabel</b>	<b>Uraian</b>	<b>Hal</b>
	(ADHK) Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2016-2021	
Tabel 2.8	Indikator Kinerja Kunci Keluaran Kabupaten Bintang Tahun 2021	152
Tabel 2.9	Indikator Kinerja Kunci Hasil Kabupaten Bintang Tahun 2021	197
Tabel 2.10	Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bintang Tahun 2021	209
Tabel 2.11	Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bintang Tahun 2016-2021	213
Tabel 2.12	Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2021	215
Tabel 2.13	Perbandingan Capaian Kinerja Utama Kabupaten Bintang Tahun 2020-2021	216
Tabel 2.14	Capaian Indikator Kinerja Utama Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2021	218
Tabel 2.15	Capaian Indikator Kinerja Utama Realisasi Investasi (PMA/PMDN) Tahun 2021	219
Tabel 2.16	Program dan Kegiatan Pendukung Realisasi Investasi (PMA/PMDN) Tahun 2021	220
Tabel 2.17	Capaian Indikator Kinerja Utama Kunjungan Wisatawan Tahun 2021	222
Tabel 2.18	Program dan Kegiatan Pendukung Kunjungan Wisatawan Tahun 2021	223
Tabel 2.19	Capaian Indikator Kinerja Utama Peningkatan Produksi Perikanan Kabupaten Bintang Tahun 2021	225
Tabel 2.20	Produksi Perikanan Budidaya dan Tangkap Kabupaten Bintang Tahun 2021	226
Tabel 2.21	Program dan Kegiatan Pendukung Produksi Perikanan Budidaya dan Tangkap Tahun 2021	226
Tabel 2.22	Capaian Indikator Kinerja Utama Tingkat Kemantapan Jalan (Mantap Sempurna) Tahun 2021	228
Tabel 2.23	Program dan Kegiatan Pendukung Tingkat Kemantapan Jalan (Mantap Sempurna) Tahun 2021	229
Tabel 2.24	Capaian Indikator Kinerja Utama Pulau Berpenghuni yang Tercukupi Jaringan Transportasi Tahun 2021	231
Tabel 2.25	Program dan Kegiatan Pendukung Pulau Berpenghuni yang Tercukupi Jaringan Transportasi Tahun 2021	232
Tabel 2.26	Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2021	233
Tabel 2.27	Program dan Kegiatan Pendukung Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2021	235
Tabel 2.28	Capaian Indikator Kinerja Utama Total Fertility Rate Tahun 2021	256
Tabel 2.29	Program dan Kegiatan Pendukung Total Fertility Rate Tahun 2021	256
Tabel 2.30	Capaian Indikator Kinerja Utama Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2021	260
Tabel 2.31	Program dan Kegiatan Pendukung Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2021	261

<b>Tabel</b>	<b>Uraian</b>	<b>Hal</b>
Tabel 2.32	Capaian Indikator Kinerja Utama Peraturan yang Mendukung Kelestarian Nilai dan Seni Budaya Melayu Kabupaten Bintan Tahun 2021	263
Tabel 2.33	Program dan Kegiatan Pendukung Peraturan yang Mendukung Kelestarian Nilai dan Seni Budaya Melayu Tahun 2021	265
Tabel 2.34	Capaian Indikator Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bintan Tahun 2021	266
Tabel 2.35	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bintan Tahun 2016–2021	267
Tabel 2.36	Program dan Kegiatan Pendukung Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2021	270
Tabel 2.37	Capaian Indikator Kinerja Utama Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bintan Tahun 2021	293
Tabel 2.38	Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bintan Tahun 2010–2021	294
Tabel 2.39	Program dan Kegiatan Pendukung Tingkat Kemiskinan Tahun 2021	295
Tabel 2.40	Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Bintan Tahun 2021	317
Tabel 2.41	Program dan Kegiatan Pendukung Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2021	319
Tabel 2.42	Capaian Indikator Kinerja Utama Organisasi Kepemudaan yang Aktif Kabupaten Bintan Tahun 2021	321
Tabel 2.43	Program dan Kegiatan Pendukung Organisasi Kepemudaan yang Aktif Tahun 2021	322
Tabel 2.44	Capaian Indikator Kinerja Utama Ketersediaan Pangan Masyarakat Kabupaten Bintan Tahun 2021	324
Tabel 2.45	Capaian Produksi Pangan Kabupaten Bintan Tahun 2021	325
Tabel 2.46	Program dan Kegiatan Pendukung Ketersediaan Pangan Masyarakat Tahun 2021	326
Tabel 2.47	Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Kualitas Air Kabupaten Bintan Tahun 2021	331
Tabel 2.48	Program dan Kegiatan Pendukung Indeks Kualitas Air Tahun 2021	332
Tabel 2.49	Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Kualitas Udara Kabupaten Bintan Tahun 2021	336
Tabel 2.50	Program dan Kegiatan Pendukung Indeks Kualitas Udara Tahun 2021	337
Tabel 2.51	Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2021	344
Tabel 2.52	Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2021	349
Tabel 2.53	Alokasi Anggaran Berdasarkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kabupaten Bintan Tahun 2021	350
Tabel 2.54	Rekap Realisasi Keuangan Kegiatan APBD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2021 Posisi Triwulan IV	352
Tabel 2.55	Capaian Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2021	356
Tabel 2.56	Uraian Program dan Kegiatan Pendukung Kinerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021	357

<b>Tabel</b>	<b>Uraian</b>	<b>Hal</b>
Tabel 3.1	Alokasi Anggaran dan Realisasi Tugas Pembantuan Tahun 2021	377
Tabel 3.2	Penyerapan Dak Fisik Kabupaten Bintang Tahun Anggaran 2021	388
Tabel 3.3	Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Bintang Tahun 2021	392
Tabel 3.4	Indeks Desa Membangun (IDM) Berdasarkan Katagori Desa di Kabupaten Bintang Tahun 2021	395
Tabel 3.5	Rekapitulasi Indeks Desa Membangun di Kabupaten Bintang Tahun 2021	395
Tabel 4.1	Target SPM Kabupaten Bintang Bidang Pendidikan Tahun 2021	401
Tabel 4.2	Realisasi SPM Kabupaten Bintang Bidang Pendidikan Tahun 2021	402
Tabel 4.3	Alokasi Anggaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bintang dalam Pelaksanaan SPM Bidang Pendidikan tahun 2021	403
Tabel 4.4	Dukungan Personil dalam Pelaksanaan SPM Bidang Pendidikan tahun 2021	406
Tabel 4.5	Permasalahan dan Solusi dalam Pelaksanaan SPM Bidang Pendidikan Tahun 2021	407
Tabel 4.6	Penerima Layanan SPM Bidang Kesehatan	408
Tabel 4.7	Target SPM Kabupaten Bintang Bidang Kesehatan Tahun 2021	409
Tabel 4.8	Realisasi SPM Kabupaten Bintang Bidang Kesehatan Tahun 2021	411
Tabel 4.9	Alokasi Anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bintang dalam Pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan Tahun 2021	415
Tabel 4.10	Dukungan Personil dalam Pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan Tahun 2021	420
Tabel 4.11	Permasalahan dan Solusi dalam Pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan Tahun 2021	422
Tabel 4.12	Penerima Layanan SPM Bidang Pekerjaan Umum	426
Tabel 4.13	Target SPM Kabupaten Bintang Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2021	427
Tabel 4.14	Realisasi SPM Kabupaten Bintang Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2021	427
Tabel 4.15	Alokasi Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bintang dalam Pelaksanaan SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2021	429
Tabel 4.16	Dukungan Personil dalam Pelaksanaan SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2021	430
Tabel 4.17	Permasalahan dan Solusi dalam Pelaksanaan SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2021	430
Tabel 4.18	Target SPM Kabupaten Bintang Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2021	433
Tabel 4.19	Realisasi SPM Kabupaten Bintang Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2021	434

<b>Tabel</b>	<b>Uraian</b>	<b>Hal</b>
Tabel 4.20	Alokasi Anggaran pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan dalam Pelaksanaan SPM Bidang Perumahan Rakyat tahun 2021	435
Tabel 4.21	Dukungan Personil dalam Pelaksanaan SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2021	436
Tabel 4.22	Permasalahan dan Solusi dalam Pelaksanaan SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2021	436
Tabel 4.23	Target SPM Kabupaten Bintan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2021	438
Tabel 4.24	Realisasi SPM Kabupaten Bintan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2021	440
Tabel 4.25	Alokasi Anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bintan dalam Pelaksanaan SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2021	442
Tabel 4.26	Dukungan Personil dalam Pelaksanaan SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2021	444
Tabel 4.27	Permasalahan dan Solusi dalam Pelaksanaan SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2021	445
Tabel 4.28	Target SPM Kabupaten Bintan Sosial Tahun 2021	447
Tabel 4.29	Realisasi SPM Kabupaten Bintan Bidang Sosial Tahun 2021	448
Tabel 4.30	Alokasi Anggaran pada Dinas Sosial Kabupaten Bintan dalam Pelaksanaan SPM Bidang Sosial Tahun 2021	450
Tabel 4.31	Dukungan Personil dalam Pelaksanaan SPM Bidang Sosial Tahun 2021	451
Tabel 4.32	Permasalahan dan Solusi dalam Pelaksanaan SPM Bidang Sosial Tahun 2021	452
Tabel 4.33	Program dan Kegiatan dalam Pelaksanaan SPM Bidang Pendidikan Tahun 2021	455
Tabel 4.34	Program dan Kegiatan dalam Pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan Tahun 2021	457
Tabel 4.35	Program dan Kegiatan dalam Pelaksanaan SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2021	460
Tabel 4.36	Program dan Kegiatan dalam Pelaksanaan SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2021	461
Tabel 4.37	Program dan Kegiatan dalam Pelaksanaan SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2021	462
Tabel 4.38	Program dan Kegiatan dalam Pelaksanaan SPM Bidang Sosial Tahun 2021	463



# LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BINTAN

# DAFTAR GRAFIK



**LPPD 2021**

## DAFTAR GRAFIK

<b>Grafik</b>	<b>Uraian</b>	<b>Hal</b>
Grafik 1.1	Rekapitulasi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintang berdasarkan Tingkat Pendidikan tahun 2021	22
Grafik 1.2	Rekapitulasi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintang berdasarkan Golongan Ruang tahun 2021	23
Grafik 1.3	Rekapitulasi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintang berdasarkan Eselon dan Jenis Jabatan tahun 2021	24
Grafik 2.1	Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota dan Provinsi Se-Kepulauan Riau Tahun 2019-2021	136
Grafik 2.2	Perbandingan Persentase Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Bintang, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2016-2021	148
Grafik 2.3	Distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bintang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2021	149
Grafik 3.1	DM Berdasarkan Kategori Desa Kabupaten Bintang Tahun 2020 dan 2021	397



# LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BINTAN

# DAFTAR GAMBAR



# LPPD 2021



## DAFTAR GAMBAR

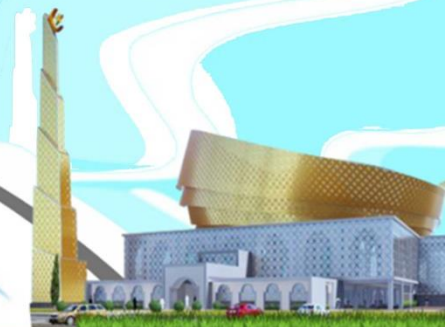
<b>Gambar</b>	<b>Uraian</b>	<b>Hal</b>
Gambar 1.1	Karakteristik Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin - Tahun 2020-2021 di Kabupaten Bintan	9
Gambar 1.2	Komposisi Penduduk Kabupaten Bintan menurut Generasi	12
Gambar 1.3	Peta Administratif Kabupaten Bintan	15
Gambar 1.4	Gambaran Realisasi APBD Kabupaten Bintan Tahun 2021	27
Gambar 1.5	Kontribusi Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Komponen	41
Gambar 1.6	Proporsi Belanja Daerah Kabupaten Bintan Berdasarkan Komponen Belanja Tahun Anggaran 2021	47
Gambar 1.7	Komponen pembentuk Belanja Operasi di Kabupaten Bintan Tahun 2021	48
Gambar 1.8	Komponen pembentuk Belanja Modal di Kabupaten Bintan Tahun 2021	50
Gambar 2.1	Potret Pembangunan Manusia di Kabupaten Bintan 2021	130
Gambar 2.2	APM dan APK di Kabupaten Bintan pada Tahun 2021	134
Gambar 2.3	Indikator Makro Kemiskinan Kabupaten Bintan Tahun 2019-2021	138
Gambar 2.4	Kinerja Pendapatan daerah Kabupaten Bintan tahun 2021	346
Gambar 2.5	Kinerja APBD Kabupaten Bintan tahun 2021	349



LAPORAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH

# LPPD

## KABUPATEN BINTAN



TAHUN 2021

# MAKNA LAMBANG DAERAH, MOTTO DAN SLOGAN KABUPATEN BINTAN



## 1. Makna Lambang Daerah Kabupaten Bintan

Lingkar tali bersimpul lima berwarna coklat kekuning - kuningan melambangkan Kesatuan Bangsa Berdasarkan Pancasila.

- **Kolek berwarna kuning emas dan layar putih**, mengandung arti penghidupan dan darah pelaut penduduk Kabupaten Bintan.
- **Gelombang tiga lapis berwarna putih**, melambangkan geografis Kabupaten Bintan.
- **Cerana berwarna kuning kemerah-merahan**, melukiskan adat-istiadat dan keramah-tamahan penduduknya.
- **Huruf Arab "Alif" dan "Ya" berwarna hitam**, melambangkan Bahasa Melayu Riau sumber utama Bahasa Indonesia.
- **Mayang kelapa berwarna hijau kekuning-kuningan**, mengandung arti sumber kehidupan dan harapan dimasa depan.

## 2. MOTTO Kabupaten Bintan

**"LAYAR TERKEMBANG"**

memiliki arti ataupun singkatan pe**L**ayanan Mas**Y**arakat untuk **TER**capainya **KEM**ajuan dan pem**BANG**unan.

## 3. SLOGAN Kabupaten Bintan

Selendang berwarna kuning emas bertulis : **"Tak Berganjak Berat Sama Dipikul Ringan Sama Dijinjing"** mengandung makna kebesaran jiwa, kemuliaan dan semangat yang tak tergoyahkan serta semangat kebersamaan untuk membangun.





LAPORAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH

**LPPD**

**KABUPATEN BINTAN**



**TAHUN 2021**



## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas taufiq dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Bintan Tahun 2021 ini dapat diselesaikan atas partisipasi serta kolaborasi aktif dari tim penyusun dan seluruh perangkat daerah.

Penyusunan LPPD Kabupaten Bintan dilakukan sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. LPPD 2021 menjadi potret kinerja tahunan bagi Pemerintah Kabupaten Bintan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Melalui LPPD ini menggambarkan capaian kinerja makro daerah, capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) *Output*, *IKK Outcome*, capaian akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan serta perkembangan standar pelayanan minimum.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2021, merupakan tahun penuh tantangan bagi kita semua saat pandemik Covid-19 masih melanda dunia termasuk Kabupaten Bintan. Kami menyadari sepenuhnya segala keterbatasan dan kemampuan dalam pelaksanaan kinerja daerah, selain itu juga masih terdapat beberapa tantangan pencapaiannya. LPPD tahun 2021 akan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan serta perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun selanjutnya.

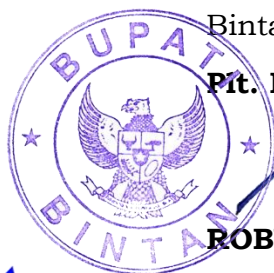
Selanjutnya, izinkan saya mengucapkan terimakasih kepada semua yang terlibat didalam proses penyusunan LPPD Kabupaten Bintan tahun 2021. Seluruh hasil kinerja ini merupakan wujud kerjasama antara eksekutif, legislative daerah serta peran aktif masyarakat dalam mewujudkan Bintan Rumah Kita yang Gemilang.

Demikian LPPD Kabupaten Bintan tahun 2021 ini kami sampaikan, Semoga Allah S.W.T senantiasa memberikan perlindungan, melimpahkan rahmat serta meridhoi kerja keras kita semua.

Terimakasih

Bintan Buyu, Maret 2022

Pt. BUPATI BINTAN



ROBY KURNIAWAN, S.P.W.K



LPPD 2021



# LPPD 2021

LAPORAN  
PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH  
KABUPATEN BINTAN

# BAB I

## PENDAHULUAN





# B A B I P E N D A H U L U A N

## 1.1 Latar Belakang

### 1.1.1 Penjelasan Umum

#### A. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Kabupaten Bintan sebelumnya merupakan Kabupaten Kepulauan Riau. Wilayah Kabupaten Kepulauan Riau mempunyai ciri khas yakni terdiri dari ribuan pulau baik besar maupun kecil yang tersebar di Laut Cina Selatan. Pada kurun waktu 1722-1911, terdapat dua Kerajaan Melayu yang berkuasa dan berdaulat yaitu Kerajaan Riau Lingga yang pusat kerajaannya di Daik dan Kerajaan Melayu Riau di Pulau Bintan. Jauh sebelum ditandatanganinya *Treaty of London*, kedua Kerajaan Melayu tersebut dilebur menjadi

satu sehingga menjadi semakin kuat. Wilayah kekuasaannya pun tidak hanya terbatas di Kepulauan Riau saja, tetapi telah meliputi daerah Johor dan Malaka (Malaysia), Singapura dan sebagian kecil wilayah Indragiri Hilir. Pusat kerajaannya terletak di Pulau Penyengat dan menjadi terkenal di Nusantara dan kawasan Semenanjung Malaka. Setelah Sultan Riau meninggal pada tahun 1911, Pemerintah Hindia Belanda menempatkan amir-amirnya sebagai *Districh Thoarden* untuk daerah yang besar dan *Onder Districh Thoarden* untuk daerah yang agak kecil.

Pemerintah Hindia Belanda akhirnya menyatukan wilayah Riau Lingga dengan Indragiri untuk dijadikan sebuah keresidenan yang dibagi menjadi dua Afdelling yaitu:

1. Afdelling Tanjungpinang yang meliputi Kepulauan Riau–Lingga, Indragiri Hilir dan Kateman yang berkedudukan di Tanjungpinang dan sebagai penguasa ditunjuk seorang Residen.
2. Afdelling Indragiri yang berkedudukan di Rengat dan diperintah oleh Asisten Residen (dibawah) perintah Residen. Pada 1940 Keresidenan ini dijadikan Residente Riau dengan dicantumkan Afdelling Bengkalis (Sumatera Timur) dan sebelum tahun 1945–1949 berdasarkan Besluit Gubernur General Hindia Belanda tanggal 17 Juli 1947 No. 9 dibentuk daerah Zelf Bestur (daerah Riau).

Undang-Undang No. 10 Tahun 1948 tentang Pembagian Sumatera Dalam Tiga Propinsi yang disahkan pada 15 April 1948 wilayah Sumatera dibagi atas 3 (tiga) propinsi yaitu Propinsi Sumatera Utara, Sumatera Tengah dan Sumatera Selatan (*Buku Propinsi Sumatera Tengah, 1953*). Berdasarkan Pasal 2 Undang-



Undang Nomor 10 Tahun 1948 maka Propinsi Sumatera Tengah terdiri atas wilayah Keresidenan-Keresidenan Sumatera Barat, Riau, dan Jambi. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1948, dinyatakan bahwa untuk mempersiapkan pembentukan pemerintahan propinsi dan pembentukan daerah-daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam lingkungan propinsi, maka oleh karena itu diadakanlah suatu Komisariat Pemerintah Pusat yang terdiri dari Komisaris Negara yang susunannya dan tugas kewajibannya lebih lanjut ditetapkan dengan peraturan lain.

Hal ini kemudian di atur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1948 tentang Komisariat Sumatera. Maka di dalam Propinsi Sumatera Tengah dibentuklah sebuah instansi yang disebut dengan Komisariat Pemerintahan Pusat (Kompempus) yang dipimpin oleh bekas Gubernur Sumatera Mr. T. M Hassan (*Buku Propinsi Sumatera Tengah, 1953*). Tanggal 2 Oktober 1948 dibentuklah suatu panitia yang disebut dengan Panitia Desentralisasi Sumatera Tengah. Panitia Desentralisasi Sumatera Tengah berkeinginan bahwa 31 Desember 1948 seluruh wilayah di Propinsi Sumatera Tengah sudah harus otonom, dan akan menghapus residensi. Namun rencana ini dimajukan pada tanggal 25 Nopember 1948. 5 (lima) hari kemudian tepatnya pada hari Selasa, tanggal 30 Nopember 1948 berdasarkan usul Panitia Desentralisasi Sumatera Tengah, maka Kompempus mengeluarkan sebuah peraturan yaitu Peraturan Komisaris Pemerintah Pusat di Bukit Tinggi Tanggal 30 Nopember 1948 Nomor 81/Kom/U tentang Pembentukan Kabupaten Dalam Propinsi Sumatera Tengah yang ditetapkan tanggal 30 Nopember 1948 dan mulai berlaku 1 Desember 1948.

Di dalam peraturan tersebut ditetapkan 11 wilayah Kabupaten di dalam Propinsi Sumatera Tengah yang salah satunya merupakan Kabupaten Kepulauan Riau (Saat ini adalah Kabupaten Bintan) dengan ibukota Tanjungpinang,

Berdasarkan Peraturan Kompempus No.81/Kom/U tahun 1948 ini Kabupaten Kepulauan Riau telah muncul secara *de jure* sebagai sebuah daerah otonom di bawah Propinsi Sumatera Tengah berdasarkan Undang-Undang No.10 tahun 1948 meski di dalam Undang-Undang tersebut, wilayah Kabupaten Kepulauan Riau masih berada di bawah Keresidenan Riau. Namun Kabupaten Kepulauan Riau yang pada saat itu sudah menjadi salah satu daerah otonom di Propinsi Sumatera Tengah, secara *de facto* pemerintahan tidak dapat dilakukan sepenuhnya karena masih dikuasai oleh Pemerintahan Belanda yaitu di bawah kekuasaan *Residentie Van Riouw*. Dengan arti kata lain, daerah Kabupaten Kepulauan Riau belum dapat sepenuhnya menjalankan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah-Daerah yang berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri yang ditetapkan pada 10 Juli 1948. Namun di dalam tata wilayah republik saat itu, maka Kabupaten Kepulauan Riau sudah resmi ada secara hukum, namun tata Kelola pemerintahan masih berada di bawah naungan Belanda yang dijalankan oleh *Dewan Riau*.

Berdasarkan surat Keputusan delegasi Republik Indonesia, Provinsi Sumatera Tengah tanggal 18 Mei 1950 No.9/Deprt. menggabungkan diri ke dalam Republik Indonesia dan Kepulauan Riau diberi status daerah Otonom Tingkat II yang dikepalai oleh Bupati sebagai kepala daerah dengan membawahi empat kewedanan sebagai berikut:

1. Kewedanaan Tanjungpinang meliputi wilayah Kecamatan Bintan Selatan (termasuk Kecamatan Bintan Timur, Galang, Tanjungpinang Barat dan Tanjungpinang Timur sekarang).
2. Kewedanaan Karimun meliputi wilayah Kecamatan Karimun, Kundur dan Moro.
3. Kewedanaan Lingga meliputi wilayah Kecamatan Lingga, Singkep dan Senayang.
4. Kewedanaan Pulau Tujuh meliputi wilayah Kecamatan Jemaja, Siantan, Midai, Serasan, Tambelan, Bunguran Barat dan Bunguran Timur.

Kemudian berdasarkan Surat Keputusan No. 26/K/1965 dengan berpedoman pada Instruksi Gubernur Riau tanggal 10 Februari 1964 No. 524/A/1964 dan Instruksi No. 16/V/1964 dan Surat Keputusan Gubernur Riau tanggal 9 Agustus 1964 No. UP/247/5/1965, tanggal 15 Nopember 1965 No. UP/256/5/1965 menetapkan terhitung mulai 1 Januari 1966 semua daerah Administratif kewedanaan dalam Kabupaten Kepulauan Riau dihapuskan.

Pada tahun 1983, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1983, telah dibentuk Kota Administratif Tanjungpinang yang membawahi 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Tanjungpinang Barat dan Kecamatan Tanjungpinang Timur, dan pada tahun yang sama sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1983 telah pula dibentuk Kotamadya Batam. Dengan adanya pengembangan wilayah tersebut, maka Batam tidak lagi menjadi bagian Kabupaten Kepulauan Riau.

Berdasarkan Undang-Undang No. 53 tahun 1999 dan UU No. 13 Tahun 2000, Kabupaten Kepulauan Riau dimekarkan menjadi 3 kabupaten yang terdiri dari: Kabupaten Kepulauan Riau, Kabupaten Karimun dan Kabupaten Natuna. Wilayah kabupaten Kepulauan Riau hanya meliputi 9 kecamatan, yaitu: Singkep, Lingga, Senayang, Teluk Bintan, Bintan Utara, Bintan Timur, Tambelan, Tanjungpinang Barat dan Tanjungpinang Timur. Kecamatan Teluk Bintan merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Galang. Sebahagian wilayah Galang dicakup oleh Kota Batam. Kecamatan Teluk Bintan terdiri dari 5 desa yaitu Pangkil, Pengujan, Penaga, Tembeling dan Bintan Buyu.

Dikeluarkannya Undang-Undang No. 5 Tahun 2001, merubah Kota Administratif Tanjungpinang menjadi Kota Tanjungpinang yang statusnya sama dengan kabupaten. Sejalan dengan perubahan administrasi wilayah pada akhir tahun 2003, maka dilakukan pemekaran kecamatan yaitu Kecamatan Bintan Utara menjadi Kecamatan Teluk Sebong dan Bintan Utara. Kecamatan Lingga menjadi Kecamatan Lingga Utara dan Lingga.

Pada akhir tahun 2003 dibentuk Kabupaten Lingga sesuai dengan UU No. 31/2003, maka dengan demikian wilayah Kabupaten Kepulauan Riau meliputi 6 Kecamatan yaitu Bintan Utara, Bintan Timur, Teluk Bintan, Gunung Kijang, Teluk Sebong dan Tambelan. Kemudian, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2006 tertanggal 23 Februari 2006, Kabupaten Kepulauan Riau berubah nama menjadi Kabupaten Bintan.

## **B. Kondisi Geografis Wilayah**

Secara keseluruhan luas wilayah Kabupaten Bintan mencapai 87.393, 01 km<sup>2</sup>. Dimana wilayah lautan lebih luas dibandingkan daratannya. Dengan rincian luas daratan 1.318,21 km<sup>2</sup> (1,5%) sedangkan luas lautannya mencapai 86.417,20 km<sup>2</sup> (98,5%).

Kecamatan terluas daratannya adalah Kecamatan Gunung Kijang dan kecamatan yang terkecil adalah Kecamatan Tambelan. Kabupaten Bintan berdasarkan Badan Informasi Geospasial terdiri atas 240 buah Pulau besar dan pulau kecil, yang sudah memiliki nama. Dari 240 buah pulau yang ada 49 diantaranya merupakan pulau yang telah dihuni oleh masyarakat setempat (sebagian sudah dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, khususnya usaha perkebunan) dan sisanya 191 yang tidak berpenghuni/kosong.

Kabupaten Bintan terletak antara 1<sup>o</sup>05'03.94" Lintang Utara dan 104<sup>o</sup>28'56.23" Bujur Timur, dengan batas wilayah meliputi:

- a. Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Natuna
- b. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Lingga
- c. Sebelah Barat : berbatasan dengan Kota Tanjungpinang dan Kota Batam
- d. Sebelah Timur : berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Barat

Bandar Seri Bentan merupakan Ibu Kota Kabupaten Bintan yang terletak di Kecamatan Teluk Bintan. Secara administratif, wilayah Kabupaten Bintan terbagi menjadi 10 Kecamatan, seperti disajikan pada Tabel I.1 di bawah ini:

**Tabel 1.1**  
**Sebaran Luas Wilayah Kecamatan di**  
**Kabupaten Bintan**

No	Kecamatan	Luas (km <sup>2</sup> )
1	Teluk Bintan	125,44
2	Bintan Utara	43,26
3	Teluk Sebong	285,72
4	Seri Kuala Lobam	123,50
5	Bintan Timur	100,18
6	Gunung Kijang	192,89
7	Mantang	63,61
8	Bintan Pesisir	116,11
9	Toapaya	176,48
10	Tambelan	91,02

*Sumber: Bintan dalam Angka 2022*

Berdasarkan pada data tabel di atas, Kecamatan Teluk Sebong merupakan kecamatan dengan wilayah terluas, sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Bintan Utara.

### **C. Jumlah Penduduk**

Penduduk merupakan modal sosial dalam pembangunan wilayah, keadaan penduduk kemudian menggambarkan kondisi perkembangan daerah serta penduduk menjadi potensi dalam kemajuan dan keberhasilan Kabupaten Bintan. Hasil sensus penduduk tahun 2020 nasional (SP2020) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik di Kabupaten Bintan menunjukkan bahwa total jumlah penduduk pada tahun tersebut terdapat 159.518 jiwa dengan proporsi jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki sebesar 82.190 jiwa serta jenis kelamin perempuan sebesar 77.328

jiwa. Sedangkan pada tahun 2021, penduduk dengan jenis kelamin laki-laki berjumlah 83761 Jiwa (51,53 %) dan berjenis kelamin perempuan sebesar 78800 Jiwa (48,87 %) (Gambar 1.4). Dari hasil sensus tersebut juga diketahui bahwa rasio jenis kelamin sebesar 106 dan persentase penduduk lansia sebesar 6,83 % (BPS Bintan, tahun 2021).

**Gambar 1.1**  
**Karakteristik Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin -**  
**Tahun 2020-2021 di Kabupaten Bintan**



Sumber: Sensus Penduduk 2020-Badan Pusat Statistik Kabupaten Bintan, Tahun 2022

Selanjutnya untuk usia produktif penduduk di Kabupaten Bintan sebesar 79,42 % serta laju pertumbuhan sebesar 1,91 % pada tahun 2021. Ini menunjukkan bahwa Bintan sedang pada fase “Bonus Demografi” yang tentunya mesti dimanfaatkan momentum ini secara serius diiringi dengan program-program strategis guna mendukung perkembangan masyarakat di era revolusi industri 4.0.

*Sex Ratio* pada tahun 2021 di Kabupaten Bintan sebesar 1,11 artinya dalam 106 laki-laki terdapat 100 perempuan. Di samping itu juga berkenaan dengan kepadatan penduduk di

wilayah Kabupaten Bintan pada tahun 2021 sebesar 123,32 penduduk/Km<sup>2</sup>.

**Tabel 1.2**  
**Tingkat Kepadatan Penduduk di Kabupaten Bintan**  
**Tahun 2017-2021**

No	Tahun	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km <sup>2</sup> )
1	2017	120
2	2018	121
3	2019	122
4	2020	121,01
5	2021	123,31

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bintan, Tahun 2022*

Dengan total jumlah penduduk sebanyak 162.561 Jiwa (7,67%) menempatkan Kabupaten Bintan pada posisi keempat untuk jumlah populasi di Provinsi Kepulauan Riau setelah Batam (1,23 Juta Jiwa/58,07%), Karimun (259,45 Ribu Jiwa/12,25%) dan Tanjungpinang (233,37 Ribu Jiwa/11,02). Karakteristik wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan kekhasan Kabupaten Bintan yang terdiri dari 10 Kecamatan, 36 Desa dan 15 Kelurahan.

Persebaran dari penduduk Kabupaten Bintan berdasarkan kecamatan menempatkan wilayah Kecamatan Bintan Timur merupakan pemukiman penduduk paling besar dengan jumlah 46.975 jiwa atau menempati 28,09 persen (%) dari total jumlah penduduk di Kabupaten Bintan pada tahun 2021. Jumlah ini tumbuh dari tahun sebelumnya yaitu 45.929 jiwa di tahun 2020. Sedangkan jumlah penduduk paling sedikit pada tahun 2021 adalah Kecamatan Mantang dengan jumlah penduduk 4.217 Jiwa atau 2,59 persen (%), untuk persebaran penduduk di Kabupaten Bintan sebagaimana terdapat pada tabel dibawah ini:



**Tabel 1.3**  
**Persebaran Penduduk berdasarkan Kecamatan**  
**di Kabupaten Bintan Tahun 2020-2021**

NO	KECAMATAN	TAHUN 2020				TAHUN 2021			
		JENIS KELAMIN		TOTAL	%	JENIS KELAMIN		TOTAL	%
		Laki-Laki	Perempuan			Laki-Laki	Perempuan		
1	Kecamatan Gunung Kijang	7,777	7,019	14,796	9.28	7.961	7.243	15.204	9,35
2	Kecamatan Bintan Timur	23,561	22,368	45,929	28.79	24.073	22.907	46.980	28,90
3	Kecamatan Bintan Utara	11,395	11,132	22,527	14.12	11.549	11.259	22.808	14,03
4	Kecamatan Teluk Bintan	6,055	5,312	11,367	7.13	6.244	5.474	11.718	7,21
5	Kecamatan Tambelan	2,537	2354	4,891	3.07	6.765	6.406	13.171	8,10
6	Kecamatan Telok Sebong	9,455	8,779	18,234	11.43	9.617	8.971	18.588	11,43
7	Kecamatan Toapaya	6,624	6,219	12,843	8.05	6.765	6.406	13.171	8,10
8	Kecamatan Mantang	2,203	1,959	4,162	2.61	2.225	1.991	4.216	2,59
9	Kecamatan Bintan Pesisir	3,566	3,291	6,857	4.30	3.590	3.310	6.900	4,24
10	Kecamatan Seri Kuala Lobam	9,017	8,895	17,912	11.23	9.183	8.871	18.054	11,11
<b>Kabupaten Bintan</b>		<b>82.190</b>	<b>77.328</b>	<b>159,518</b>	<b>100</b>	<b>83.761</b>	<b>78.800</b>	<b>162.561</b>	<b>100</b>

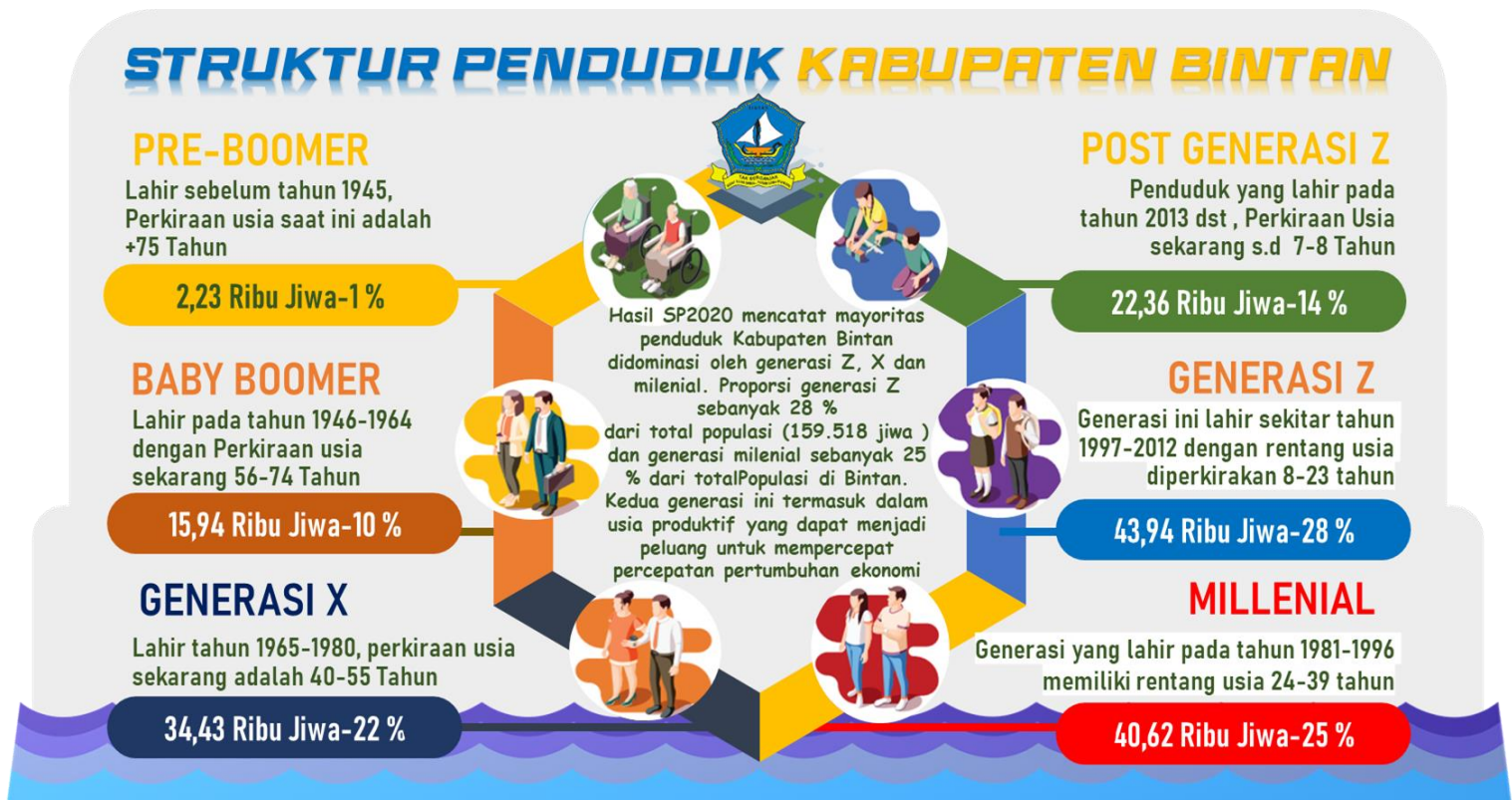
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bintan, Tahun 2022

Jumlah penduduk pada tahun 2021 yang mengalami pertumbuhan merupakan bonus demografi yang terlihat dari komposisi struktur penduduk kabupaten bintan.

Struktur komposisi penduduk Kabupaten Bintan dilihat dari komposisi generasi pada dasarnya dapat menjadi salah satu modal

pembangunan ketika jumlah penduduk usia produktif sangat besar. Hal ini dapat terlihat pada gambar dibawah ini:

**Gambar 1.2**  
**Komposisi Penduduk Kabupaten Bintan menurut Generasi**



Dengan total usia produktif rentang 15-64 Tahun yang mencapai 79,42 % arah kebijakan dari Grand Design Pembangunan Kependudukan mesti benar-benar terwujud khususnya Kesehatan, Pendidikan serta kondisi sosial-kesejahteraan penduduk. Merujuk pada hasil SP2020 Bintan tercatat bahwa mayoritas penduduk Kabupaten Bintan sangat didominasi oleh pertumbuhan penduduk pada generasi Z, Millennial dan Gen X (Gambar 1.5).

Akumulasi ketiganya menyentuh angka 75 % dari total penduduk Kabupaten Bintan, ini berarti peluang bonus demografi serta usia produktif akan menjadi modal pembangunan sumber daya manusia

yang berkualitas bagi daerah ini karena bonus demografi bisa menjadi peluang atau keuntungan karena gen Z dan milenial merupakan usia produktif. Tren ini selaras dengan SP2020 di Indonesia dimana jumlah generasi Z dan milenial mendominasi penduduk Indonesia. Proporsi generasi Z sebanyak 27,94 persen dari total populasi dan milenial sebanyak 25,87 persen dari total populasi penduduk Indonesia.

#### **D. Jumlah Kecamatan dan Kelurahan/Desa**

Dalam perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kabupaten Bintan mengalami penataan kecamatan serta desa maupun kelurahan. Potret daripada administrasi wilayah Kabupaten Bintan yang dahulunya merupakan Kabupaten Kepulauan Riau merupakan bagian penting proses pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. Saat ini Kabupaten Bintan terdiri dari 10 kecamatan, 15 kelurahan dan 36 desa.

Keberadaan pemerintah kecamatan, desa serta kelurahan merupakan perpanjangan tangan daripada pemerintah daerah kabupaten bintan dalam optimalisasi kinerja pemerintahan khususnya dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat pada pelayanan publik yang berkualitas. Peran daripada pemerintah kecamatan desa serta kelurahan begitu penting tidak hanya bagi pemerintah daerah namun juga menjadi ujung tombak bagi pemerintah pusat dalam mengoptimalkan program-program nasional bagi masyarakat.

Untuk lebih jelasnya perkembangan administrasi pemerintahan wilayah dan mengenai hal tersebut dan letak dari kecamatan,

kelurahan dan desa dapat dilihat pada tabel I.3 dan gambar I.1 berikut ini:

**Tabel 1.4**  
**Kecamatan, Kelurahan dan Desa di Kabupaten Bintan**

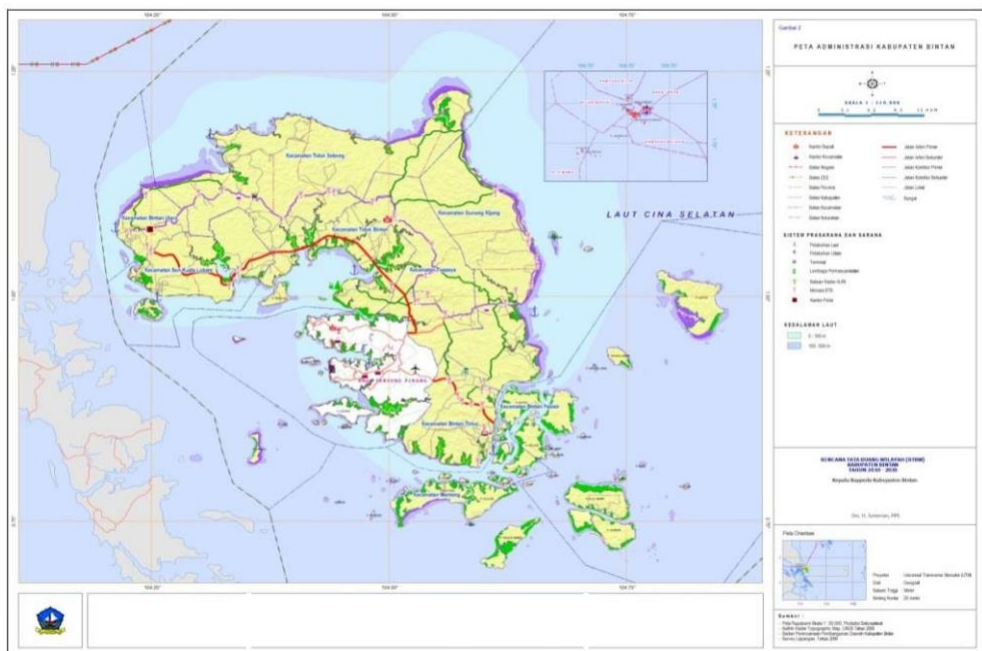
No	Kecamatan	Kelurahan	Desa
1	Teluk Bintan	1. Tembeling Tanjung	1. Tembeling 2. Bintan Buyu 3. Penaga 4. Pengujan 5. Pangkil
2	Bintan Utara	1. Tanjung Uban Selatan 2. Tanjung Uban Kota 3. Tanjung Uban Utara 4. Teluk Lobam	1. Lancang Kuning
3	Teluk Sebong	1. Kota Baru	1. Sebong Perih 2. Sebong Lagoi 3. Ekang Anculai 4. Sri Bintan 5. Pengudang 6. Berakit
4	Seri Kuala Lobam	1. Teluk Lobam 2. Tanjung Permai	1. Kuala Sempang 2. Busung 3. Teluk Sasah
5	Bintan Timur	1. Kijang Kota 2. Sei Lekop 3. Gunung Lengkuas 4. Sei Enam	-
6	Gunung Kijang	1. Kawal	1. Gunung Kijang 2. Teluk Bakau 3. Malang Rapat
7	Mantang	-	1. Mantang Lama 2. Mantang Besar 3. Mantang Baru 4. Dendun
8	Bintan Pesisir	-	1. Mapur 2. Numbing 3. Kelong 4. Air Glubi
9	Toapaya	1. Toapaya Asri	1. Toapaya 2. Toapaya Selatan 3. Toapaya Utara
10	Tambelan	1. Teluk Sekuni	1. Batu Lepuk 2. Kampung Melayu 3. Kampung Hilir 4. Pulau Pinang 5. Mentebung 6. Pengikik 7. Kukup

Sumber: Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Bintan, 2021

Sebagai salah satu Kabupaten yang masuk di dalam lokasi prioritas pembangunan daerah perbatasan, Kabupaten Bintan secara

geografis memiliki tantangan tersendiri karena masuk di dalam lintas batas antar negara. Berdekatan dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, Kabupaten Bintan merupakan daerah yang berbatasan secara laut. Potensi kewilayahan SDA dari maritim khususnya kebaharian membuat daerah perbatasan ini menjadi jalur sutra di Kawasan ASEAN. Kondisi geografis ini memberikan tantangan serta dampak tersendiri bagi pemerintah Kabupaten Bintan serta masyarakat. Namun begitu kepala daerah dalam hal ini Bupati Kabupaten Bintan dengan penyelarasan agenda pembangunan “Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia” merupakan karakteristik kewilayahan Kabupaten Bintan yang juga terdiri dari pulau-pulau dan wilayah pesisir.

**Gambar 1.3**  
**Peta Administratif Kabupaten Bintan**



Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan 2020 – 2040

## **E. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah**

Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu bupati/wali kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. Hal ini tidak mengalami perubahan signifikan ketika terbit Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana yang diamatkan Pasal 232 ayat (l) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

### **1. Perangkat Daerah dan Unit Kerja**

Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pada Daerah Kabupaten/Kota, Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan. Perangkat Daerah dibentuk oleh masing-masing Daerah berdasarkan pertimbangan karakteristik, potensi, dan kebutuhan Daerah. Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah setempat dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah.

Komposisi Susunan serta klasifikasi tipe perangkat daerah pada Pemerintahan Kabupaten Bintan diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan

Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan daerah tersebut, susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bintan meliputi 2 Sekretariat yaitu: Sekretariat Daerah Kabupaten Tipe A dan Sekretariat Daerah DPRD Tipe C, 1 Inspektorat Kabupaten dan 20 Dinas meliputi:

**Tabel 1.5**

**Susunan dan Klasifikasi Tipe Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Bintan**

<b>No</b>	<b>Nama Organisasi Perangkat Daerah</b>	<b>Klasifikasi Tipe</b>
1	Sekretariat Daerah	Tipe A
2	Sekretariat DPRD	Tipe C
3	Inspektorat Daerah	Tipe A
4	Dinas Pendidikan	Tipe A
5	Dinas Kesehatan	Tipe A
6	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Tipe B
7	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	Tipe C
8	Dinas Sosial	Tipe B
9	Dinas Tenaga Kerja	Tipe C
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Tipe A
11	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	Tipe A
12	Dinas Lingkungan Hidup	Tipe A
13	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Tipe A
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Tipe B
15	Dinas Perhubungan	Tipe B
16	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Tipe A
17	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian Dan Perdagangan	Tipe A
18	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Tipe A
19	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	Tipe C
20	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	Tipe A
21	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah	Tipe B
22	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Tipe A

No	Nama Organisasi Perangkat Daerah	Klasifikasi Tipe
23	Satuan Polisi Pamong Praja	Tipe A
24	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Tipe A
25	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	Tipe A
26	Badan Pendapatan Daerah	Tipe B
27	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Tipe B
28	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Tipe A
29	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tipe A

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan, Tahun 2021

Unit Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bintan hingga tahun 2021 meliputi 20 Dinas dan 6 Badan terdiri juga atas Bagian/Bidang dan Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD), sebagaimana tertera dalam tabel berikut ini.

**Tabel 1.6**  
**Jumlah Unit Kerja Per Perangkat Daerah**  
**di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan**

No	Nama OPD	Bidang/Bagian	UPTD
1	Sekretariat Daerah	3	-
2	Asisten Administrasi Pemerintah	3	-
3	Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan	4	-
4	Asisten Administrasi Umum	3	-
5	Sekretariat Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	3	-
6	Inspektorat Daerah	5	-
7	Dinas Pendidikan	4	-
8	Dinas Kesehatan	4	17
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4	2
10	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	2	-
11	Dinas Sosial	3	-
12	Satuan Polisi Pamong Praja	4	-
13	Dinas Tenaga Kerja	2	-



No	Nama OPD	Bidang/Bagian	UPTD
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4	-
15	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	5	2
16	Dinas Lingkungan Hidup	5	2
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4	-
18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3	-
19	Dinas Perhubungan	3	1
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	4	-
21	Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan	4	-
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4	-
23	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2	-
24	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	4	-
25	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	3	-
26	Dinas Perikanan	4	6
27	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	4	-
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3	-
29	Badan Pendapatan Daerah	3	3
30	Badan Keuangan dan Aset Daerah	3	-
31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3	-
32	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3	3

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan, Tahun 2021

Selain itu juga terdapat 10 Kecamatan yaitu:

1. Kecamatan Teluk Bintan
2. Kecamatan Bintan Utara
3. Kecamatan Teluk Sebong
4. Kecamatan Seri Kuala Lobam
5. Kecamatan Bintan Timur
6. Kecamatan Gunung Kijang
7. Kecamatan Mantang
8. Kecamatan Bintan Pesisir
9. Kecamatan Toapaya
10. Kecamatan Tambelan

## 2. Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kabupaten Bintan

Pemerintah Kabupaten Bintan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah didukung dengan sumber daya aparatur untuk peningkatan kinerja serta optimalisasi urusan pemerintahan. Secara keseluruhan terdapat total 3163 ASN hingga tahun 2021.

Adapun jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan berdasarkan jenis kelamin yang dibagi atas 56 Unit Organisasi Kabupaten Bintan dengan jenis kelamin Pria sebanyak 1441 Orang dan jenis kelamin Wanita sebanyak 1731 orang.

**Tabel 1.7**  
**Rekapitulasi PNS berdasarkan Jenis Kelamin dan Usia di Kabupaten Bintan**

NO	JENIS KELAMIN		USIA	JUMLAH
	PRIA	WANITA		
1	114	144	20-30 Tahun	<b>258</b>
2	374	587	31-40 Tahun	<b>961</b>
3	541	526	41-50 Tahun	<b>1067</b>
4	412	465	51-60 Tahun	<b>877</b>
	<b>1441</b>	<b>1722</b>		<b>3163</b>

Sumber: BKPSDM Kabupaten Bintan, Tahun 2022

Untuk rentang usia Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Bintan terdiri atas rentang usia 20-30 Tahun berjumlah 258 Orang, rentang usia 31-40 Tahun berjumlah 961 orang, rentang usia 41-50 Tahun berjumlah 1067 orang dan rentang usia 51-60 Tahun berjumlah 877 orang.

Berdasarkan persebaran PNS di Kabupaten Bintan dari data yang dilansir oleh BKPSDM Kabupaten Bintan, pada tahun 2021-unit organisasi dengan jumlah tenaga PNS terbesar adalah Dinas Pendidikan dimana terdapat 1.225 orang yang terdiri dari tenaga

administrasi serta guru. Kemudian Dinas Kesehatan terdiri dari 441 orang yang terdiri dari tenaga administrasi perkantoran baik di OPD Dinas Kesehatan maupun tenaga medis yang terdapat di pusat layanan kesehatan masyarakat, pelayanan terpadu kesehatan yang tersebar di desa/kelurahan maupun kecamatan di Kabupaten Bintan.

**Tabel 1.8**  
**Rekapitulasi Persebaran PNS Berdasarkan Unit Organisasi di Kabupaten Bintan**

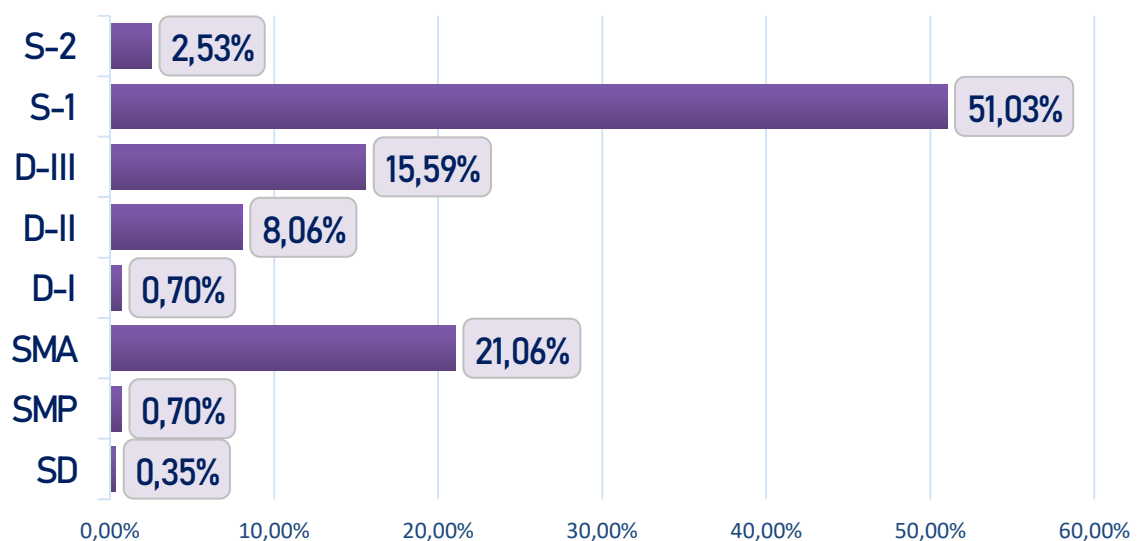
NO	UNIT ORGANISASI	JUMLAH PNS	NO	UNIT ORGANISASI	JUMLAH PNS
1	SEKRETARIAT DAERAH	106	30	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	17
2	SEKRETARIAT DPRD	42	31	KECAMATAN BINTAN PESISIR	5
3	INSPEKTORAT DAERAH	40	32	KECAMATAN BINTAN TIMUR	9
4	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	31	33	KECAMATAN BINTAN UTARA	10
5	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	27	34	KECAMATAN GUNUNG KIJANG	9
6	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	61	35	KECAMATAN MANTANG	9
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	44	36	KECAMATAN SERI KUALA LOBAM	9
8	BADAN PENDAPATAN DAERAH	55	37	KECAMATAN TAMBELAN	3
9	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	49	38	KECAMATAN TELUK BINTAN	7
10	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	32	39	KECAMATAN TELUK SEBONG	10
11	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	21	40	KECAMATAN TOAPAYA	7
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	27	41	KELURAHAN GUNUNG LENGKUAS	3
13	DINAS KESEHATAN	441	42	KELURAHAN KAWAL	5
14	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	60	43	KELURAHAN KIJANG KOTA	4
15	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	36	44	KELURAHAN KOTA BARU	3
16	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	35	45	KELURAHAN SUNGAI ENAM	5
17	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	36	46	KELURAHAN SUNGAI LEKOP	3
18	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	56	47	KELURAHAN TANJUNG PERMAI	1
19	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	6	48	KELURAHAN TANJUNG UBAN KOTA	5

NO	UNIT ORGANISASI	JUMLAH PNS	NO	UNIT ORGANISASI	JUMLAH PNS
20	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	23	49	KELURAHAN TANJUNG UBAN SELATAN	3
21	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	23	50	KELURAHAN TANJUNG UBAN TIMUR	3
22	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	26	51	KELURAHAN TANJUNG UBAN UTARA	2
23	DINAS PENDIDIKAN	1225	52	KELURAHAN TELUK LOBAM	4
24	DINAS PERHUBUNGAN	46	53	KELURAHAN TELUK SEKUNI	2
25	DINAS PERIKANAN	50	54	KELURAHAN TEMBELING TANJUNG	5
26	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	20	55	KELURAHAN TOAPAYA ASRI	4
27	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	31	56	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	14
28	DINAS SOSIAL	21	57	SEKRETARIAT KPU	1
29	DINAS TENAGA KERJA	18			

Sumber: BKPSDM Kabupaten Bintan, Tahun 2022

Dari sisi Pendidikan saat ini juga sebagian besar ASN sedang menempuh pembelajaran di institusi pendidikan tinggi sebagai usaha peningkatan kualitas SDM serta jalur peningkatan kompetensi daripada ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan baik dalam negeri.

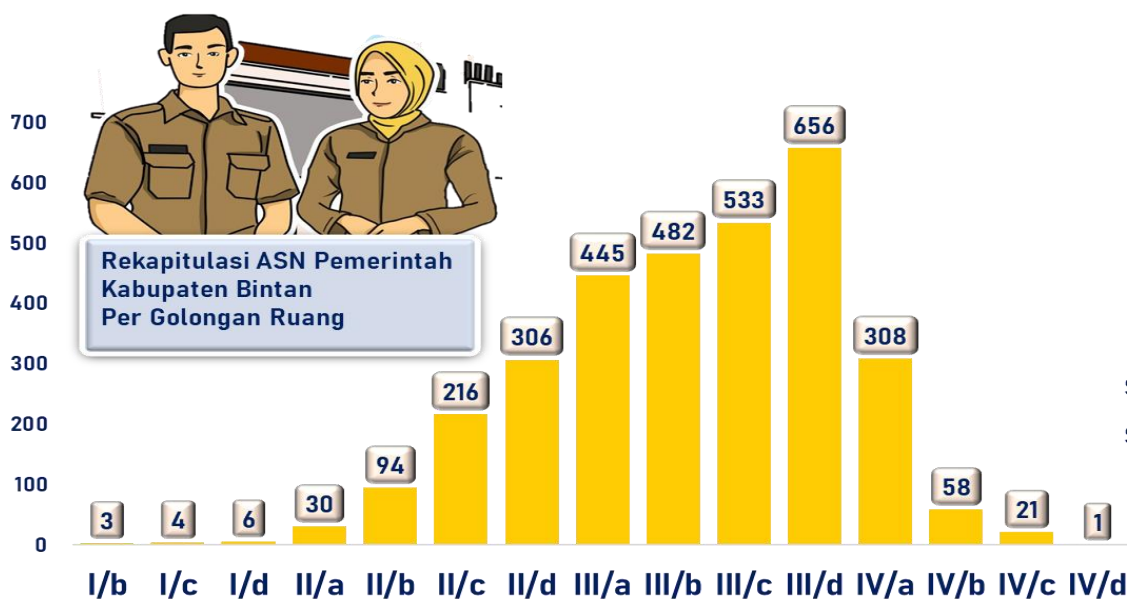
**Grafik 1.1**  
**Rekapitulasi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan berdasarkan Tingkat Pendidikan tahun 2021**



Sumber: BKPSDM Kabupaten Bintan, Tahun 2022

kondisi eksisting daripada tingkat pendidikan ASN di Kabupaten Bintan saat ini yang berpendidikan tinggi mulai dari jenjang diploma hingga strata-2 sudah mencapai 77,90% meningkat dari sebelumnya pada tahun 2020 sebesar 76.26 persen (%) atau 2464 ASN. Sedangkan selebihnya tercatat berpendidikan SD 0,35 %, SMP 0,70 % dan SMA sebesar 21.06 persen.

**Grafik 1.2**  
**Rekapitulasi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan**  
**berdasarkan Golongan Ruang tahun 2021**

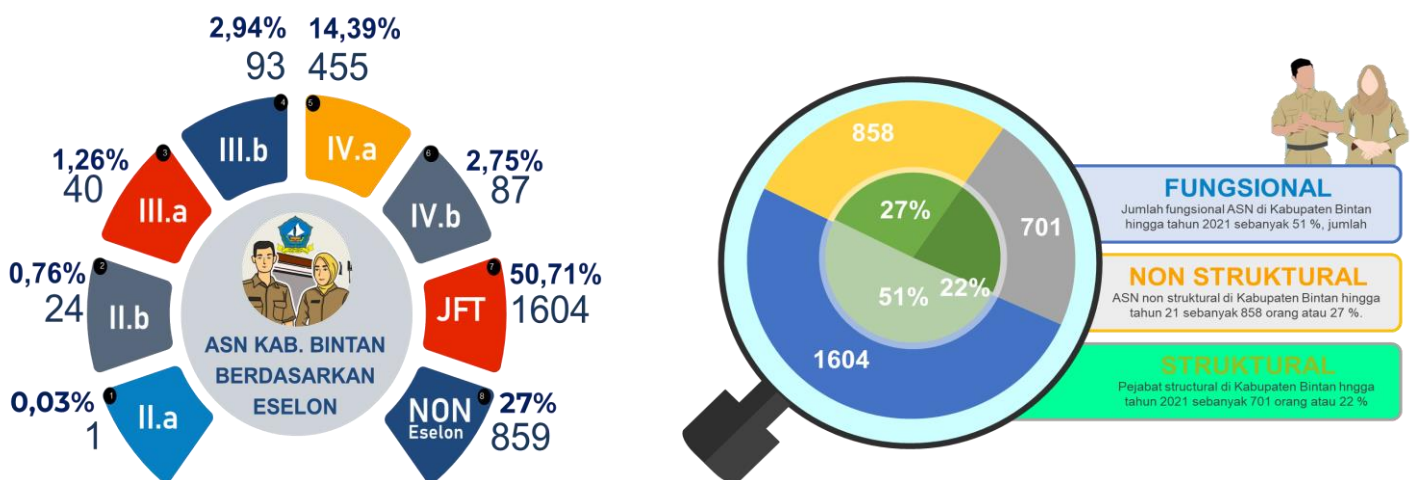


Sumber: BKPSDM Kabupaten Bintan, Tahun 2022

Berdasarkan data jumlah golongan ruang Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan yang terbagi atas Golongan, Golongan Ruang I/b berjumlah 3 Orang, Golongan Ruang I/c berjumlah 4 Orang, Golongan Ruang I/d berjumlah 6 Orang, Golongan Ruang II/a berjumlah 30 Orang, Golongan Ruang II/b berjumlah 94 Orang, Golongan Ruang II/c berjumlah 216 Orang, Golongan Ruang II/d Berjumlah 306 Orang, Golongan Ruang III/a berjumlah 445 Orang, Golongan Ruang III/b berjumlah

482 Orang, Golongan Ruang III/c berjumlah 533 Orang, Golongan Ruang III/d berjumlah 656 orang, Golongan Ruang IV/a berjumlah 308 Orang, Golongan Ruang IV/b berjumlah 58 Orang, Golongan Ruang IV/c berjumlah 21 Orang dan Golongan Ruang IV/d berjumlah 1 orang.

**Grafik 1.3**  
**Rekapitulasi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan berdasarkan Eselon dan Jenis Jabatan tahun 2021**



Sumber: BKPSDM Kabupaten Bintan, Tahun 2022

Berkenaan dengan jumlah tenaga fungsional di Kabupaten Bintan ini merupakan amanat yang dilaksanakan sebagaimana ketentuan di dalam PermenPANRB 22 tahun 2021 tentang Pola Karier PNS merupakan aturan pelaksanaan Pasal 188 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil serta untuk menjamin keselarasan potensi Pegawai Negeri Sipil dengan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan.

## **F. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah bagian dari rencana keuangan pemerintahan di tingkat daerah yang berlaku selama satu tahun. Fungsi APBD secara umum adalah sarana komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya. Komunikasi perencanaan APBD dilakukan oleh pemerintah daerah dengan pihak legislatif seperti DPRD.

Beberapa peraturan yang berkaitan dengan APBD diantaranya Undang-Undang No. 32 Tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah; dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Tata Cara Pengawasan, Penyusunan, dan Perhitungan APBD maka manajemen pengelolaan keuangan daerah yang lebih adil, rasional, transparan, partisipatif dan akuntabel telah mengalami perubahan fundamental yang signifikan pada berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kebijakan keuangan daerah erat sekali kaitannya dengan keberhasilan program pembangunan daerah. Penyusunan APBD Kabupaten Bintan di Tahun Anggaran 2021 pada menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengalokasikan dana dalam konteks pengelolaan keuangan daerah.

Di dalam praktik, keseimbangan secara teknis akuntansi antara sisi pendapatan dan belanja daerah sebagaimana yang dipersyaratkan dalam prinsip anggaran berimbang, seringkali sulit diterapkan secara absolut. Dalam pelaksanaannya tidak dapat dihindari adanya surplus yang terjadi ketika pendapatan daerah melebihi belanja, atau terjadi defisit yang terjadi ketika realisasi belanja melebihi pendapatan daerah. Meskipun Pemerintah telah merencanakan dengan baik sumber-sumber penerimaan pembiayaan untuk membiayai defisit anggaran, namun pada akhir tahun anggaran sangat dimungkinkan terjadi sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) yaitu realisasi pembiayaan anggaran lebih besar dari realisasi defisit,

Dinamika pengelolaan APBD pada tahun 2021 beradaptasi seiring perkembangan pandemi Covid-19 yang belum mereda. Pemerintah Kabupaten Bintan mengikuti perkembangan arahan daripada Pemerintah Pusat yang menetapkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Implementasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah pada tahun anggaran 2021 berpedoman pada Permendagri No. 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019. Fokus masa pemulihan ekonomi dan ketahanan ekonomi kerakyatan pada tahun anggaran 2021 mengedepankan efektifitas dan optimalitas pengelolaan keuangan daerah. Untuk merealisasikan kebijakan



tersebut dilakukan melalui serangkaian program-program optimalisasi dai sisi pendapatan dan juga belanja daerah pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Bintan.

Kebijakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran tahun 2021 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. Kemudian dirubah melalui Peraturan Bupati Kabupaten Bintan Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

**Gambar 1.4**

**Gambaran Realisasi APBD Kabupaten Bintan Tahun 2021**



Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan, Tahun 2022

**Tabel 1.9**  
**Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan**  
**(Untuk Tahun Anggaran Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2021 Dan 2020)**

No Urut	URAIAN	REFF CALK	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Pendapatan</b>	<b>7.5.1.1</b>	-	-		-
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>7.5.1.1.1</b>	-	-		-
1.1.1	Pendapatan pajak daerah	7.5.1.1.1.1)	144.285.785.000,00	130.059.598.323,77	90,14	107.816.743.354,99
1.1.2	Pendapatan retribusi daerah	7.5.1.1.1.2)	8.567.875.000,00	8.220.915.191,00	95,95	7.761.066.224,00
1.1.3	Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	7.5.1.1.1.3)	10.477.231.219,00	11.411.312.907,00	108,92	8.959.879.482,00
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	7.5.1.1.1.4)	36.553.168.343,00	46.210.438.123,15	126,42	66.974.339.476,46
	<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>		<b>199.884.059.562,00</b>	<b>195.902.264.544,92</b>	<b>98,01</b>	<b>191.512.028.537,45</b>
<b>1.2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>7.5.1.1.2</b>				
<b>1.2.1</b>	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan</b>	<b>7.5.1.1.2.1)</b>				
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil	7.5.1.1.2.1.1)	57.097.237.576,00	98.171.066.468,00	171,94	193.742.270.873,00
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum		476.841.183.000,00	476.841.183.000,00	100,00	486.117.569.000,00
1.2.1.3	Dana Alokasi Khusus - Fisik		98.679.016.000,00	90.479.520.346,00	91,69	82.333.109.139,00
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik		62.011.394.000,00	56.162.194.000,00	90,57	59.385.951.319,00
	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan</b>		<b>694.628.830.576,00</b>	<b>721.653.963.814,00</b>	<b>103,89</b>	<b>821.578.900.331,00</b>

No Urut	URAIAN	REF KALK	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2.2</b>	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya</b>					
1.2.2.1	Dana Insentif Daerah	7.5.1.1.2.1.2)	44.420.166.000,00	44.420.166.000,00	100,00	47.935.489.000,00
1.2.2.2	Dana Otonomi Khusus		-	-	-	-
1.2.2.3	Dana Keistimewaan		-	-	-	-
1.2.2.4	Dana Desa	7.5.1.1.2.1.3)	40.708.009.000,00	40.186.161.200,00	98,72	39.163.570.000,00
	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya</b>		<b>85.128.175.000,00</b>	<b>84.606.327.200,00</b>	<b>99,39</b>	<b>87.099.059.000,00</b>
<b>1.2.3</b>	<b>Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>	<b>7.5.1.1.2.2)</b>	-	-		
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil	7.5.1.1.2.2.1)	68.746.363.754,00	63.898.047.803,00	92,95	61.807.106.031,00
1.2.3.2	Bantuan Keuangan	7.5.1.1.2.2.2)	-	-	-	500.000.000,00
	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>		<b>68.746.363.754,00</b>	<b>63.898.047.803,00</b>	<b>92,95</b>	<b>62.307.106.031,00</b>
	<b>Total Pendapatan Transfer</b>		<b>848.503.369.330,00</b>	<b>870.158.338.817,00</b>	<b>102,55</b>	<b>970.985.065.362,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Lain-lainnya Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>7.5.1.1.3</b>	-	-		
1.3.1	Pendapatan Hibah	7.5.1.1.3.1)	-	-	-	43.630.021.987,00
	Pendapatan Dana Darurat					
1.3.3	Pendapatan lainnya	7.5.1.1.3.3)	29.257.526.000,00	40.086.631.395,00	137,01	-
	<b>Jumlah Lain-lainnya Pendapatan Daerah yang Sah</b>		<b>29.257.526.000,00</b>	<b>40.086.631.395,00</b>	<b>137,01</b>	<b>43.630.021.987,00</b>

No Urut	URAIAN	REFE CALK	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
1	2	3	4	5	6	7
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>1.077.644.954.892,00</b>	<b>1.106.147.234.756,92</b>	<b>102,64</b>	<b>1.206.127.115.886,45</b>
<b>2</b>	<b>Belanja</b>	<b>7.5.1.2</b>	-	-		-
<b>2.1</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>7.5.1.2.1</b>	-	-		-
2.1.1	Belanja pegawai	7.5.1.2.1.1)	505.700.609.688,68	476.580.586.274,00	94,24	452.027.038.929,00
2.1.2	Belanja barang	7.5.1.2.1.2)	381.489.167.191,00	327.401.939.670,98	85,82	376.828.103.333,82
2.1.3	Belanja bunga	7.5.1.2.1.3)	-	-	-	-
2.1.4	Belanja subsidi	7.5.1.2.1.4)	-	-	-	-
2.1.5	Belanja hibah	7.5.1.2.1.5)	48.816.713.755,00	45.560.989.228,00	93,33	57.292.591.880,00
2.1.6	Belanja bantuan sosial	7.5.1.2.1.6)	4.080.000.000,00	3.939.600.000,00	96,56	5.530.925.108,00
	<b>Jumlah Belanja Operasi</b>		<b>940.086.490.634,68</b>	<b>853.483.115.172,98</b>	<b>90,79</b>	<b>891.678.659.250,82</b>
<b>2.2</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>7.5.1.2.2</b>	-	-		-
2.2.1	Belanja tanah	7.5.1.2.2.1)	6.416.283.204,00	994.839.115,00	15,50	228.080.000,00
2.2.2	Belanja peralatan dan mesin	7.5.1.2.2.2)	42.791.731.754,00	39.826.077.526,00	93,07	55.685.195.183,00
2.2.3	Belanja gedung dan bangunan	7.5.1.2.2.3)	68.527.121.372,00	63.060.135.647,33	92,02	88.506.594.506,42
2.2.4	Belanja jalan, irigasi dan jaringan	7.5.1.2.2.4)	45.989.192.144,00	43.580.037.497,00	94,76	41.930.206.113,00
2.2.5	Belanja aset tetap lainnya	7.5.1.2.2.5)	78.251.399,00	14.256.000,00	18,22	5.634.208.496,00
2.2.6	Belanja aset lainnya	7.5.1.2.2.6)	2.252.356.807,00	1.943.002.040,00	86,27	99.979.000,00

No Urut	URAIAN	REFE CALK	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Jumlah Belanja Modal</b>		<b><u>166.054.936.680,00</u></b>	<b><u>149.418.347.825,33</u></b>	<b><u>89,98</u></b>	<b><u>192.084.263.298,42</u></b>
<b>2.3</b>	<b>Belanja Tak Terduga</b>	<b>7.5.1.2.3)</b>	-	-		-
2.3.1	Belanja Tak Terduga	7.5.1.2.3)	10.189.062.247,00	5.674.118.343,00	55,69	68.340.725.092,00
	<b>Jumlah Belanja Tak Terduga</b>		<b><u>10.189.062.247,00</u></b>	<b><u>5.674.118.343,00</u></b>	<b><u>55,69</u></b>	<b><u>68.340.725.092,00</u></b>
<b>2.4.1</b>	<b>Belanja Transfer</b>		-	-		-
2.4.1.1	Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Kabupaten/kota		15.285.366.000,00	15.285.365.800,00	100,00	-
2.4.1.2	Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Kabupaten/kota Daerah Provinsi					
2.4.1.3	Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Provinsi atau Kabupaten/kota Kepada Desa		93.517.892.700,00	92.996.547.466,00	99,44	109.107.128.560,00
	<b>Jumlah Belanja Transfer</b>		<b><u>108.803.258.700,00</u></b>	<b><u>108.281.913.266,00</u></b>	<b><u>99,52</u></b>	<b><u>109.107.128.560,00</u></b>
	<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b><u>1.225.133.748.261,68</u></b>	<b><u>1.116.857.494.607,31</u></b>	<b><u>91,16</u></b>	<b><u>1.261.210.776.201,24</u></b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>		<b><u>(147.488.793.369,68)</u></b>	<b><u>(10.710.259.850,39)</u></b>	<b><u>7,26</u></b>	<b><u>(55.083.660.314,79)</u></b>
<b>3</b>	<b>Pembiayaan</b>	<b>7.5.1.4</b>				
<b>3.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>7.5.1.4.1)</b>	<b><u>149.088.793.369,68</u></b>	<b><u>149.093.793.369,68</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>206.172.453.684,47</u></b>
3.1.1	Penggunaan SiLPA	7.5.1.4.1)	149.088.793.369,68	149.088.793.369,68	100,00	206.170.203.684,47
3.1.2	Pencairan dana cadangan		-	-	-	-

No Urut	URAIAN	REFE CALK	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
1	2	3	4	5	6	7
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	7.5.1.4.1)	-	-	-	-
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah		-	-	-	-
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah		-	-	-	-
3.1.6	Penerimaan piutang daerah		-	-	-	-
3.1.7	Pengembalian Pokok Dana Bergulir	7.5.1.4.1)	-	5.000.000,00	100,00	2.250.000,00
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>		<b>149.088.793.369,68</b>	<b>149.093.793.369,68</b>	<b>100,00</b>	<b>206.172.453.684,47</b>
<b>3.2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>7.5.1.4.2)</b>	<b>1.600.000.000,00</b>	<b>1.600.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.000.000.000,00</b>
3.2.1	Pembentukan dana cadangan		-	-	-	-
3.2.2	Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah	7.5.1.4.2)	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	100,00	2.000.000.000,00
3.2.3	Pembayaran pokok utang		-	-	-	-
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah		-	-	-	-
3.2.5	Pemberian Pinjaman Dana Bergulir	7.5.1.4.2)	-	-	-	-
	<b>Jumlah</b>		<b>1.600.000.000,00</b>	<b>1.600.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.000.000.000,00</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>		<b>147.488.793.369,68</b>	<b>147.493.793.369,68</b>	<b>100,00</b>	<b>204.172.453.684,47</b>
<b>3.3</b>	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)</b>	<b>7.5.1.5</b>	<b>-</b>	<b>136.783.533.519,29</b>	<b>-</b>	<b>149.088.793.369,68</b>

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021 (Unaudited)

Tabel 1.10

**Realisasi Anggaran Belanja Berdasarkan Alokasi Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bintan  
Tahun Anggaran 2021**

Uraian	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Kesehatan</b>	<b>251.763.878.620</b>	<b>22,54</b>
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	42.367.179.335	3,79
DINAS KESEHATAN	209.396.699.285	18,75
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat</b>	<b>26.490.012.955</b>	<b>2,37</b>
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	7.472.456.914	0,67
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	19.017.556.041	1,70
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>60.262.213.298</b>	<b>5,40</b>
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	60.262.213.298	5,40
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Pendidikan</b>	<b>272.454.437.501</b>	<b>24,39</b>
DINAS PENDIDIKAN	272.454.437.501	24,39
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman</b>	<b>43.425.991.145</b>	<b>3,89</b>
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	43.425.991.145	3,89

Uraian	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Sosial</b>	<b>10.725.842.460</b>	<b>0,96</b>
DINAS SOSIAL	10.725.842.460	0,96
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Administrasi Kependudukan dan Capil</b>	<b>7.464.211.554</b>	<b>0,67</b>
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	7.464.211.554	0,67
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Kebudayaan</b>	<b>6.745.575.494</b>	<b>0,60</b>
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	6.745.575.494	0,60
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Kepemudaan dan Olah Raga</b>	<b>7.497.123.075</b>	<b>0,67</b>
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	7.497.123.075	0,67
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Komunikasi dan Informatika</b>	<b>9.492.677.978</b>	<b>0,85</b>
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	9.492.677.978	0,85
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>	<b>6.617.017.587</b>	<b>0,59</b>
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	6.617.017.587	0,59
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Lingkungan Hidup</b>	<b>21.946.454.772</b>	<b>1,97</b>
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	21.946.454.772	1,97



Uraian	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Pangan</b>	<b>10.414.811.445</b>	<b>0,93</b>
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	10.414.811.445	0,93
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>	<b>6.110.857.264</b>	<b>0,55</b>
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	6.110.857.264	0,55
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>	<b>5.122.926.424</b>	<b>0,46</b>
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	5.122.926.424	0,46
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Penanaman Modal</b>	<b>6.537.828.940</b>	<b>0,59</b>
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	6.537.828.940	0,59
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>	<b>2.454.100.413</b>	<b>0,22</b>
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.454.100.413	0,22
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Perhubungan</b>	<b>16.053.162.153</b>	<b>1,44</b>
DINAS PERHUBUNGAN	16.053.162.153	1,44
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Perpustakaan</b>	<b>4.761.001.058</b>	<b>0,43</b>
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	4.761.001.058	0,43

Uraian	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Persandian</b>	<b>21.669.920</b>	<b>0,0019</b>
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	21.669.920	0,0019
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Pertanahan</b>	<b>27.180.450</b>	<b>0,0024</b>
SEKRETARIAT DAERAH	27.180.450	0,0024
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Statistik</b>	<b>24.613.657</b>	<b>0,0022</b>
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	24.613.657	0,0022
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Tenaga Kerja</b>	<b>3.764.070.210</b>	<b>0,34</b>
DINAS TENAGA KERJA	3.764.070.210	0,34
<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Kepegawaian</b>	<b>11.248.702.314</b>	<b>1,01</b>
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	11.248.702.314	1,01
<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Keuangan</b>	<b>122.255.753.881</b>	<b>10,95</b>
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	108.033.650.656	9,67
BADAN PENDAPATAN DAERAH	14.222.103.225	1,27
<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Penelitian dan Pengembangan</b>	<b>1.008.784.292</b>	<b>0,09</b>
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.008.784.292	0,09

Uraian	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Pengelola Perbatasan Daerah</b>	<b>133.776.675</b>	<b>0,01</b>
SEKRETARIAT DAERAH	133.776.675	0,01
<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Perencanaan</b>	<b>11.865.568.558</b>	<b>1,06</b>
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	11.865.568.558	1,06
<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN Kelautan dan Perikanan</b>	<b>22.263.144.827</b>	<b>1,99</b>
DINAS PERIKANAN	22.263.144.827	1,99
<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN Pariwisata</b>	<b>1.346.809.196</b>	<b>0,12</b>
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1.346.809.196	0,12
<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN Perdagangan</b>	<b>637.509.816</b>	<b>0,06</b>
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	637.509.816	0,06
<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN Perindustrian</b>	<b>5.259.081.910</b>	<b>0,47</b>
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	5.259.081.910	0,47
<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN Pertanian</b>	<b>4.001.147.658</b>	<b>0,36</b>
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	4.001.147.658	0,36
<b>UNSUR KEWILAYAHAN Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)</b>	<b>58.325.036.757</b>	<b>5,22</b>
KECAMATAN BINTAN PESISIR	2.696.012.097	0,24

Uraian	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
KECAMATAN BINTAN TIMUR	10.665.368.804	0,95
KECAMATAN BINTAN UTARA	10.062.112.578	0,90
KECAMATAN GUNUNG KIJANG	6.331.992.648	0,57
KECAMATAN MANTANG	2.744.709.839	0,25
KECAMATAN SERI KUALA LOBAM	6.520.445.681	0,58
KECAMATAN TAMBELAN	3.888.650.475	0,35
KECAMATAN TELUK BINTAN	4.971.138.725	0,45
KECAMATAN TELUK SEBONG	5.098.630.719	0,46
KECAMATAN TOAPAYA	5.345.975.191	0,48
<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM Kesatuan Bangsa dan Politik</b>	<b>5.779.898.890</b>	<b>0,52</b>
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	5.779.898.890	0,52
<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN Sekretariat Daerah</b>	<b>54.560.539.380</b>	<b>4,89</b>
SEKRETARIAT DAERAH	54.560.539.380	4,89
<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN Sekretariat DPRD</b>	<b>29.017.837.083</b>	<b>2,60</b>
SEKRETARIAT DPRD	29.017.837.083	2,60
<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN Inspektorat</b>	<b>8.976.244.997</b>	<b>0,80</b>
INSPEKTORAT DAERAH	8.976.244.997	0,80

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan, Tahun 2022

## 1. Pendapatan Daerah

Pemerintah daerah Kabupaten Bintan pada tahun 2021 mengambil Kebijakan dan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan jumlah penerimaan pendapatan daerah pada tingkat yang maksimal guna membiayai belanja daerah, kebijakan dimaksud disesuaikan dengan asumsi-asumsi makro ekonomi dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya serta mempertimbangkan fluktuasi yang ditimbulkan dari kondisi pembatasan sosial ditengah masyarakat serta pandemi covid-19 dalam kerangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bintan. Pendapatan daerah berdasarkan Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 13 merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.

Stabilitas pendapatan daerah Kabupaten Bintan sepanjang tahun 2021 dari sisi optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah menjadi tolak ukur kemandirian daerah ditengah arus dampak pandemi serta konstelasi kebijakan pemerintah pusat berkenaan pembatasan pergerakan masyarakat dan eskalasi global pada sektor-sektor pendukung potensial pendapatan daerah Kabupaten Bintan.

Optimalisasi pendapatan daerah Kabupaten Bintan pada tahun anggaran 2021 juga dilakukan dengan sinergitas kelembagaan dengan melakukan kerjasama dengan Lembaga vertikal maupun juga dengan melakukan intensifikasi serta ekstensifikasi pendapatan daerah. Perkembangan pendapatan daerah Kabupaten Bintan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.11**  
**Capaian Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan**  
**Tahun Anggaran 2021**

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI	(%)	REALISASI 2020
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>1.077.644.954.892,00</b>	<b>1.106.147.234.756,92</b>	<b>102,64</b>	<b>1.206.127.115.886,45</b>
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>199.884.059.562,00</b>	<b>195.902.264.544,92</b>	<b>98,01</b>	<b>191.512.028.537,45</b>
1.1.1	Pendapatan pajak daerah	144.285.785.000,00	130.059.598.323,77	90,14	107.816.743.354,99
1.1.2	Pendapatan retribusi daerah	8.567.875.000,00	8.220.915.191,00	95,95	7.761.066.224,00
1.1.3	Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	10.477.231.219,00	11.411.312.907,00	108,92	8.959.879.482,00
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	36.553.168.343,00	46.210.438.123,15	126,42	66.974.339.476,46
<b>1.2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>848.503.369.330,00</b>	<b>870.158.338.817,00</b>	<b>102,55</b>	<b>970.985.065.362,00</b>
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	694.628.830.576,00	721.653.963.814,00	103,89	821.578.900.331,00
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil	57.097.237.576,00	98.171.066.468,00	171,94	193.742.270.873,00
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	476.841.183.000,00	476.841.183.000,00	100,00	486.117.569.000,00
1.2.1.3	Dana Alokasi Khusus - Fisik	98.679.016.000,00	90.479.520.346,00	91,69	82.333.109.139,00
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	62.011.394.000,00	56.162.194.000,00	90,57	59.385.951.319,00
1.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	85.128.175.000,00	84.606.327.200,00	99,39	87.099.059.000,00
1.2.2.1	Dana Insentif Daerah	44.420.166.000,00	44.420.166.000,00	100,00	47.935.489.000,00
1.2.2.2	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
1.2.2.3	Dana Keistimewaan	-	-	-	-
1.2.2.4	Dana Desa	40.708.009.000,00	40.186.161.200,00	98,72	39.163.570.000,00
1.2.3	Pendapatan Transfer Antar Daerah	68.746.363.754,00	63.898.047.803,00	92,95	62.307.106.031,00
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil	68.746.363.754,00	63.898.047.803,00	92,95	61.807.106.031,00
1.2.3.2	Bantuan Keuangan	-	-	-	500.000.000,00
<b>1.3</b>	<b>Lain-lainnya Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>29.257.526.000,00</b>	<b>40.086.631.395,00</b>	<b>137,01</b>	<b>43.630.021.987,00</b>
1.3.1	Pendapatan Hibah	-	-	-	43.630.021.987,00
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-
1.3.3	Pendapatan lainnya	29.257.526.000,00	40.086.631.395,00	137,01	-

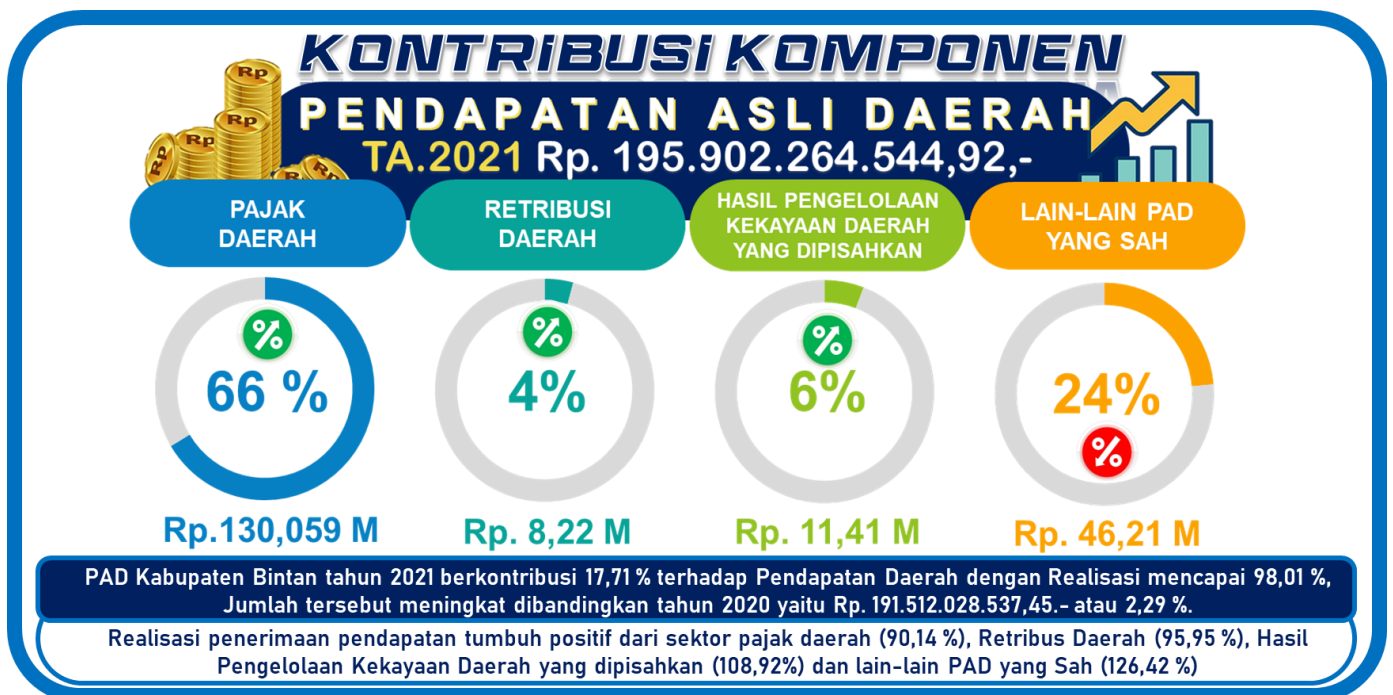
Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bintan (Unaudited) Tahun Anggaran 2021

Potret Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) TA 2021 pada target

capaian Rp. 1.077.644.954.892,00 dan terealisasi mencapai Rp. 1.106.147.234.756,92 atau 102,64%. Pendapatan tersebut menurun dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp 1.206.234.728.662,50,-. Perkembangan positif ditunjukkan dari peningkatan dari komponen PAD dari sebelumnya Rp. 178, 150 M pada tahun 2020 meningkat hingga 195,902 Milyar Rupiah pada tahun 2021. Penurunan pendapatan daerah terjadi pada komponen Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan daerah yang sah.

**Gambar 1.5**

**Kontribusi Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Komponen**



Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bintan (Unaudited) Tahun Anggaran 2021

Ditinjau dari sisi kontribusi pembentuk pendapatan daerah menunjukkan situasi membaik pada sisi pendapatan asli daerah di tahun 2021 yang mencapai Rp. 195.902.264.544,92 dibandingkan tahun 2020 Rp. 191.512.028.537,45 dengan pertumbuhan 2,29 %. Dari komponen PAD meningkat realisasi kecuali sektor lain-lain PAD yang sah menurun pada tahun

2021. Selanjutnya kebijakan daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Bintan, antara lain sebagai berikut:

1. Diadakan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum tentang pajak daerah secara intensif dan berkesinambungan kepada masyarakat dengan dilanjutkan upaya penegakan hukum (law enforcement) secara periodik bersama-sama Tim Pembina Samsat Provinsi Kepulauan Riau (Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Direktorat Lalu lintas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau dan PT. Jasa Raharja di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau);
2. Peningkatan pelaksanaan online system dalam akurasi data wajib pajak khususnya terhadap pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah yang memberikan dampak terhadap pelayanan kepada masyarakat;
3. Peningkatan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah penghasil terutama dalam penyediaan sarana dan prasarana dalam menunjang pemungutan retribusi daerah serta dalam rangka menggali potensi retribusi baru.
4. Peningkatan koordinasi dengan instansi Pemerintah Pusat antara lain : Kementerian Keuangan, Ditjen Pajak, Kementerian ESDM, BP Migas dan Kantor Perwakilan Pajak di Batam dan Kota Tanjungpinang.

Sektor pajak dan retribusi daerah khususnya di Kabupaten Bintan sepanjang tahun 2021 dapat dikatakan tidak lepas dari situasi tekanan berat yang dihadapi perekonomian daerah, kebijakan pendapatan daerah khususnya dari sisi perpajakan juga



diprioritaskan untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi daerah sejalan dengan penyelamatan lapangan usaha. Salah satu kebijakan pemerintah sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai target, adalah memberikan fasilitas perpajakan bagi sektor-sektor usaha tertentu dan kegiatan-kegiatan tertentu.

Pendapatan yang merupakan penyumbang terbesar bagi PAD masih bersumber dari pendapatan daerah yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan. Sedangkan untuk pendapatan redistribusi Kabupaten Bintan, penyumbang yang relatif besar masih berasal dari obyek Redistribusi Jasa Usaha.

## **2. Belanja Daerah**

Saat Covid-19 menjadi pandemi yang ditetapkan oleh WHO dan berdampak terhadap konisi penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta agar pemerintah daerah melakukan relaksasi pajak bagi dunia usaha. Hal ini untuk meringankan beban dunia usaha di tengah ekonomi yang lesu akibat wabah Covid-19. Relaksasi ini juga dilakukan di Kabupaten Bintan mengikuti arahan pemerintah pusat dalam menyusun berbagai stimulus atau insentif untuk sektor usaha yang terdampak massive covid-19. Analisis proyeksi belanja dan pengeluaran yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan belanja dan pengeluaran pembiayaan daerah selama kurun waktu lima tahun. Analisis dilakukan dengan proyeksi 5 tahun ke depan untuk penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah.

Arah kebijakan belanja daerah Kabupaten Bintan tahun 2021 dan sebagaimana PP No 12 tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- 1) Belanja digunakan untuk belanja operasi, belanja modal dan belanja tak terduga. Belanja operasi digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, hibah dan belanja bantuan social. Belanja modal digunakan untuk belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Belanja tak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.
- 2) Pendanaan dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal untuk 6 urusan.
- 3) Pendanaan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.
- 4) Penyediaan anggaran anggaran yang menunjang program penanggulangan kemiskinan antara lain : peningkatan kualitas SDM dibidang perekonomian potensial di Kabupaten Bintan.
- 5) Fungsi Pendidikan Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan Sekurang-kurangnya 20% dari APBD
- 6) Anggaran Kesehatan Minimal 10% dari Total Belanja Daerah diluar Gaji
- 7) Anggaran Infrastruktur yang Bersumber Dari Dana Transfer Umum Sebesar 25%
- 8) Anggaran Peningkatan Kapasitas SDM Sekurang-kurangnya 0,34% Untuk Pemerintah Provinsi Dan 0,16% Untuk Pemerintah Kabupaten/Kota Dari Total Belanja Daerah

Mengacu pada tema, fokus, dan sasaran pembangunan tahun 2021, maka arah kebijakan yang akan ditempuh pada RKP 2021 adalah percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial dengan menitikberatkan pelaksanaan pembangunan pada pemulihan industri dan perdagangan, pariwisata, dan investasi; reformasi sistem kesehatan nasional melalui penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), health security, dan sumber daya sektor kesehatan; reformasi sistem perlindungan sosial melalui peningkatan akurasi penyaluran dan integrasi berbagai program bantuan dan jaminan sosial; serta reformasi sistem ketahanan bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan di masa prabencana dan penguatan sistem operasi tanggap darurat, baik bencana alam maupun bencana nonalam

Berkaitan dengan itu, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus mendukung prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah, mengingat keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi yang dituangkan dalam RKPD.

Meskipun begitu Pemerintah Kabupaten Bintang dapat dengan sedaya upaya melakukan kehati-hatian dalam fokus belanja tahun 2021. Adapun uraian daripada realisasi belanja daerah di Kabupaten Bintang pada tahun anggaran 2021 tertera pada tabel dibawah ini:

**Tabel 1.12**  
**Capaian Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Bintan**  
**Tahun Anggaran 2021**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>	<b>LEBIH / (KURANG)</b>
<b>1</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>1.225.133.748.261,68</b>	<b>1.116.857.494.607,31</b>	<b>(108.276.253.654,37)</b>
<b>1.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>940.086.490.634,68</b>	<b>853.483.115.172,98</b>	<b>(86.603.375.461,70)</b>
1.1.1	Belanja Pegawai	505.700.609.688,68	476.580.586.274,00	(29.120.023.414,68)
1.1.2	Belanja Barang dan Jasa	381.489.167.191,00	327.401.939.670,98	(54.087.227.520,02)
1.1.5	Belanja Hibah	48.816.713.755,00	45.560.989.228,00	(3.255.724.527,00)
1.1.6	Belanja Bantuan Sosial	4.080.000.000,00	3.939.600.000,00	(140.400.000,00)
<b>2.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>166.054.936.680,00</b>	<b>149.418.347.825,33</b>	<b>(16.636.588.854,67)</b>
2.2.1	Belanja Modal Tanah	6.416.283.204,00	994.839.115,00	(5.421.444.089,00)
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	68.527.121.372,00	63.060.135.647,33	(5.466.985.724,67)
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	45.989.192.144,00	43.580.037.497,00	(2.409.154.647,00)
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.327.608.206,00	1.954.288.040,00	(373.320.166,00)
2.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	3.000.000,00	2.970.000,00	(30.000,00)
<b>2.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>10.189.062.247,00</b>	<b>5.674.118.343,00</b>	<b>(4.514.943.904,00)</b>
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	10.189.062.247,00	5.674.118.343,00	(4.514.943.904,00)
<b>2.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>108.803.258.700,00</b>	<b>108.281.913.266,00</b>	<b>(521.345.434,00)</b>
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	15.285.366.000,00	15.285.365.800,00	(200,00)

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bintan (Unaudited) Tahun Anggaran 2021

Secara umum adapun gambaran daripada kondisi realisasi Belanja daerah Kabupaten Bintan pada tahun anggaran 2021 sebesar Rp. Rp 1.116.857.494.607,31 atau 91,16 % yang terdiri dari 3 (Tiga) Komponen utama yaitu belanja operasional, belanja modal dan belanja tak terduga.

**Gambar 1.6**  
**Proporsi Belanja Daerah Kabupaten Bintan Berdasarkan**  
**Komponen Belanja Tahun Anggaran 2021**



*Sumber: BKAD Kabupaten Bintan, Tahun 2022*

#### **a. Belanja Operasi**

Adapun untuk Anggaran Belanja Operasi TA 2021 sebesar Rp 940.086.490.634,68 dan terealisasi sebesar Rp 853.483.115.172,98 atau 90,78 %. Dari sisi nilai belanja dibandingkan TA 2020 sebesar 108.139.102.637,84.

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran belanja untuk mendukung kegiatan rutin Pemerintah Daerah yang memberi manfaat dalam satu periode akuntansi. Pada tahun anggaran 2021 Proporsi Belanja Operasi mencapai 76,42% terhadap belanja daerah. Target pada saat penyusunan awal penjabaran APBD Kabupaten Bintan sebagaimana tercantum Peraturan Bupati Kabupaten Bintan Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 semula Anggaran belanja direncanakan sebesar Rp. 945.116.823.019.- (Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Milyar Seratus Enam Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Sembilan Belas Rupiah) menjadi Rp. 940.086.490.634,68,- (Sembilan Ratus Empat Puluh Milyar Delapan Puluh Enam Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah) pada saat penyesuaian target anggaran tahun 2021.

Adapun uraian dari masing-masing komponen pembentuk belanja operasi adalah sebagai berikut:

**Gambar 1.7**  
**Komponen pembentuk Belanja Operasi di Kabupaten Bintan Tahun 2021**



Sumber: BKAD Kabupaten Bintan, Tahun 2022

## **b. Belanja Modal**

Sedangkan untuk Realisasi Belanja Modal TA 2021 sebesar Rp 149.418.347.825,33 atau 90 % dari anggaran sebesar Rp166.054.936.680,00. Nilai belanja modal tersebut menurun dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp192.192.656.074,42.

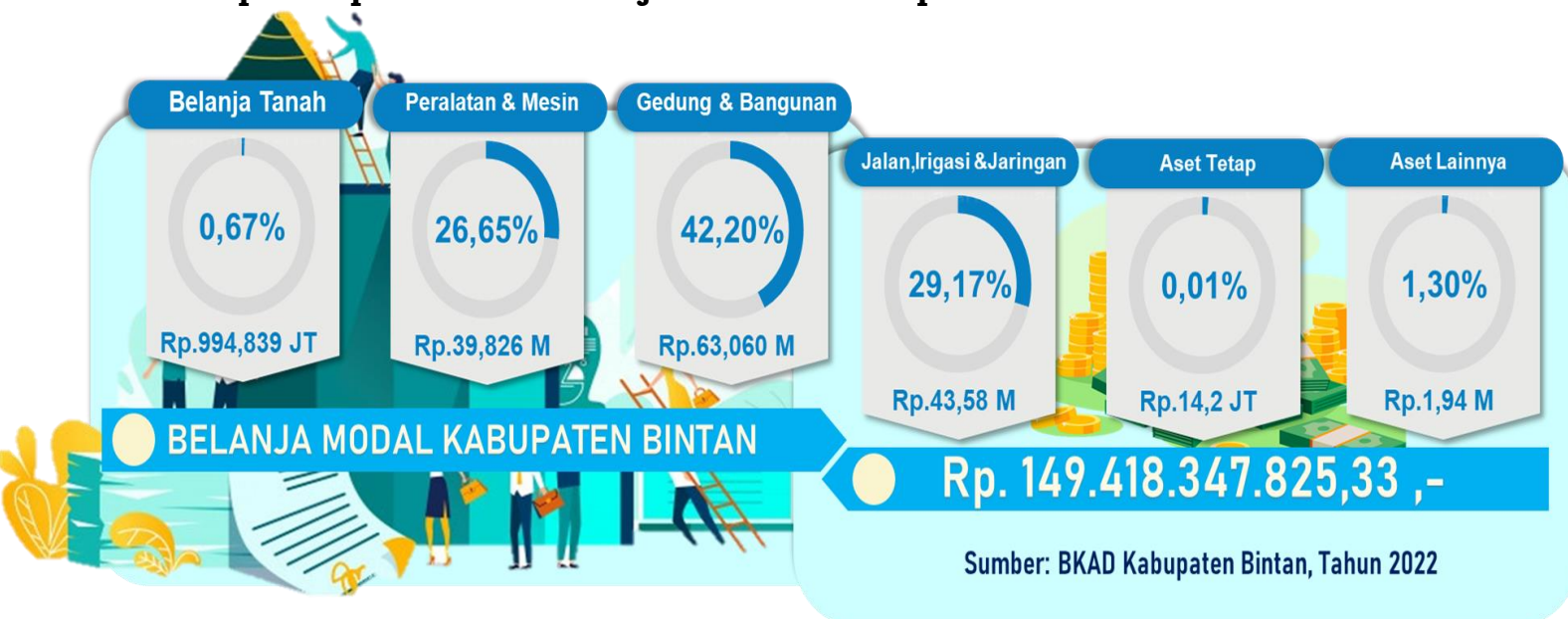
Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran belanja untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Pengelolaan belanja langsung diarahkan kepada peningkatan pelayanan pada masyarakat dengan sasaran peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan prioritas mendanai kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, peningkatan infrastruktur, dan penanggulangan kemiskinan, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan dengan memperhatikan azas efisiensi dan efektivitas.

Pada tahun anggaran 2021 Proporsi Belanja Modal mencapai 13,% terhadap belanja daerah. Target pada saat penyusunan awal penjabaran APBD Kabupaten Bintan sebagaimana tercantum Peraturan Bupati Kabupaten Bintan Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 semula Anggaran belanja Modal direncanakan sebesar Rp.153.535.488.228,- (Seratus Lima Tiga Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah) meningkat menjadi 166.054.936.680,00 (Seratus Enam Puluh Enam Milyar Lima Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Rupiah) pada saat penyesuaian target anggaran tahun 2021. Hal ini terjadi pada pada proses berjalannya tahun

anggaran atas perubahan situasional kemampuan fiskal daerah maka terdapat penyesuaian kebijakan melalui Peraturan Bupati Bintang Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2021 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun uraian dari masing-masing komponen pembentuk belanja operasi adalah sebagai berikut:

**Gambar 1.8**  
**Komponen pembentuk Belanja Modal di Kabupaten Bintang Tahun 2021**



**c. Belanja Tak terduga**

Selanjutnya, untuk realisasi Belanja Tak Terduga TA 2021 sebesar Rp 5.674.118.343,00 atau 55,68% dari anggaran sebesar Rp. 10.189.062.247,00. Belanja tersebut menurun dibandingkan dengan realisasi TA 2020 yang mencapai Rp 68.340.725.092,00,00.



Untuk Belanja Transfer di Kabupaten Bintan pada tahun anggaran 2021 terdapat anggaran sebesar Rp 108.803.258.700,00 dengan realisasi mencapai Rp. 108.281.913.266,00 atau sebesar 99,52 %. Pada tahun anggaran 2021 Proporsi Belanja Tak Terduga mencapai 0,51% terhadap belanja daerah. Target pada saat penyusunan awal penjabaran APBD Kabupaten Bintan sebagaimana tercantum Peraturan Bupati Kabupaten Bintan Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 semula target awal Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c direncanakan sebesar Rp. 8.140.064.200. (Delapan Milyar Seratus Empat Puluh Juta Enam Puluh Empat Ribu Dua Ratus Rupiah) meningkat menjadi Rp. 10.189.062.247,00 (Sepuluh Milyar Seratus Delapan Puluh Sembilan Enam Puluh Dua Ribu Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu). Hal ini terjadi pada proses berjalannya tahun anggaran atas perubahan situasional kemampuan fiskal daerah maka terdapat penyesuaian kebijakan melalui Peraturan Bupati Bintan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Selanjutnya dari penyesuaian target tercapai realisasi pada tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 5.674.118.343,00, - atau 55,69 %. Pada dasarnya jumlah ini menurun dibandingkan dari tahun 2020 yaitu Rp. 68.340.725.092,00-. Penurunan jumlah Belanja Tak Terduga pada tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 62.666.606.749,00 dengan persentase lebih dari 100 %.

Sebagai bagian integral Pemerintah Kabupaten Bintan berupaya untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang partisipatif, transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan daerah

telah ditetapkan arah dan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah. Arah dan kebijakan umum belanja daerah tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja daerah dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah. Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dari sisi perencanaan belanja, ditunjukkan dari alokasi belanja berdasarkan bidang urusan pemerintahan maupun kelompok belanja.

#### **d. Belanja Transfer**

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d direncanakan sebesar Rp. 118.264.912.500,- (Seratus Delapan Belas Milyar Dua Ratus Enam Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Bagi Hasil direncanakan sebesar Rp. 23.169.293.000,- (Dua Puluh Tiga Milyar Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah).

Selanjutnya dilakukan penyesuaian target menjadi Rp. 15.285.366.000,00,- dengan capaian realisasi pada tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 15.285.365.800,00, - atau 99,99 %. Adapun alokasi belanja pegawai pada tahun anggaran 2021 meliputi 2 (Dua) komponen yakni: a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa (Rp. 14.428.578.500,00); dan b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa (Rp. 856.787.500,00).

- b. Belanja Bantuan Keuangan direncanakan sebesar Rp.

95.095.619.500.- (Sembilan Puluh Lima Milyar Sembilan Puluh Lima Juta Enam Ratus Sembilan Belas Ribu Lima Ratus Rupiah). Selanjutnya dilakukan penyesuaian target menjadi Rp. 93.517.892.700,00,-. dengan capaian realisasi pada tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 92.996.547.466,000, - atau 99,44 %. Jumlah realisasi ini lebih rendah dari tahun 2020 yaitu 109.107.128.560,00. Penurunan jumlah Belanja Bantuan Keuangan pada tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 16.110.581.094,00 dengan persentase penurunan mencapai 14,77 %. Proporsi belanja bantuan keuangan terhadap belanja transfer pada tahun anggaran 2021 mencapai 85,88 %. Adapun alokasi belanja pegawai pada tahun anggaran 2021 meliputi Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.

### **1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah**

#### **A. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah**

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum digunakan secara optimal, kelemahan yang tidak belum dapat diatasi, peluang yang tidak mampu dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan sinergi antara pemerintah daerah dalam hal ini Kepala Daerah bersama segenap Organisasi Perangkat Daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Berikut ini merupakan kebijakan strategis yang dilakukan secara bersama antara Kepala Daerah, Organisasi

Perangkat daerah dan DPRD untuk mengatasi permasalahan pembangunan di Kabupaten Bintan.

**Tabel 1.13**  
**Permasalahan Strategis Daerah Kabupaten Bintan**

No	Identifikasi Permasalahan Strategis Daerah
1	<p><b>Kualitas SDM yang semakin memiliki daya saing dan berkeadilan</b></p> <p>a. Pemerataan kualitas pendidikan (sarana dan prasarana), meningkatkan partisipasi masyarakat untuk bersekolah dalam rangka mewujudkan tujuan 4 dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs, dan perwujudan target SPM sebagaimana Permendikbud Nomor 32 tahun 2018.</p> <p>b. Mewujudkan pelayanan kesehatan baik primer atau Fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun rujukan (sarana dan prasarana), meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat, promosi kesehatan dalam rangka menekan kematian baik karena melahirkan maupun penyakit, meningkatkan perbaikan gizi pada masyarakat dalam rangka mengurangi dan mengendalikan stunting dan gizi buruk, mewujudkan tujuan berkelanjutan sebagaimana tujuan 2 dan 3 dalam dokumen SDGs, melaksanakan SPM Kesehatan sebagaimana Permenkes Nomor 4 tahun 2019.</p> <p>c. Mengurangi kesenjangan sosial dengan prioritas pada penanganan kemiskinan dan PMKS. Pemberian bantuan langsung pada keluarga melalui PKH dan jaminan perlindungan dan social sebagaimana amanat SPM dalam Permensos Nomor 9 tahun 2018 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada tujuan 2.</p> <p>d. Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender dengan prioritas pada penyusunan dokumen perencanaan responsive gender,</p>

No	Identifikasi Permasalahan Strategis Daerah
	<p>peningkatan perlindungan perempuan dan anak dalam tindak kekerasan, peningkatan kualitas hidup perempuan rentan. Ini dalam rangka melaksanakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) tujuan 5.</p> <p>e. Peningkatan kualitas pemuda dan olahraga dalam pembangunan, peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan budaya melayu dan memajukan budaya melayu, mengurangi tingkat pengangguran dengan meningkatkan ketrampilan sesuai kebutuhan perusahaan dan pelaksanaan kartu pra kerja.</p> <p>f. Peningkatan partisipasi masyarakat di desa dan kelurahan dalam peningkatan daya saing daerah. Pengembangan kelembagaan desa, kelurahan, kecamatan dan kabupaten Bintan.</p>
2	<p><b>Kualitas infrastruktur dalam rangka mengurangi kesenjangan antar wilayah</b></p> <p>a. Peningkatan kualitas jalan dan jembatan terutama pada daerah penghubung akses pendidikan, kesehatan, ekonomi dan pariwisata.</p> <p>b. Peningkatan akses air bersih dan sanitasi layak. Ini dalam rangka mewujudkan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan juga Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di tujuan 6.</p> <p>c. Peningkatan kualitas perhubungan terutama perhubungan antar pulau, meningkatkan keselamatan dan kenyamanan perhubungan, meningkatkan peran masyarakat dalam perhubungan</p> <p>d. Peningkatan akses masyarakat pada kepemilikan rumah layak huni sebagaimana amanat dalam SPM bidang perumahan dan permukiman</p>

No	Identifikasi Permasalahan Strategis Daerah
3	<p><b>Kualitas perekonomian dengan fokus pada pemulihan perekonomian dari Pandemi COVID 19</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan ketersediaan pangan dan menjamin distribusi pangan, meningkatkan produksi pertanian dalam arti luas melalui inovasi pembibitan dan penanaman dengan lahan terbatas, pemanfaatan pekarangan meningkatkan kecukupan konsumsi ikan, kualitas perikanan tangkap dan budidaya, serta pengolahan ikan dan system pemasaran.</li> <li>b. Meningkatkan inovasi dan kualitas UMKM, baik produksi, pemasaran, meningkatkan inovasi produk, memudahkan akses permodalan, serta pendataan usaha mikro yang menjadi unggulan daerah.</li> <li>c. Meningkatkan kualitas industri kecil dengan pengembangan sentra industri dan klaster IKM.</li> <li>d. Meningkatkan sarana-rasarana perdagangan pelaksanaan dan metrologi yang baik.</li> </ul>
4	<p><b>Reformasi birokrasi dan pelayanan publik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. peningkatan kualitas dan disiplin kepegawaian, pengawasan, persandian, perpustakaan dan perencanaan</li> <li>b. Peningkatan peran kewilayahan (kecamatan dan kelurahan) dalam pembangunan berkelanjutan dan pemerataan</li> <li>c. Peningkatan ketentraman, perlindungan masyarakat sebagaimana SPM bidang ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat</li> <li>d. Peningkatan kemandirian keuangan dengan peningkatan pendapatan asli daerah, peningkatan kualitas pengelolaan asset.</li> <li>e. Mempermudah pelayanan masyarakat dengan berbasis elektronik menuju kabupaten pintar.</li> </ul>

No	Identifikasi Permasalahan Strategis Daerah
	f. Peningkatan reformasi birokrasi dengan mewujudkan good government, dan implementasi SPBE (Sistem Pembangunan Berbasis Elektronik)

*Sumber: Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021*

### **B. Visi Dan Misi Kepala Daerah**

Pada penyusunan LPPD tahun 2021 ini menggunakan RPJMD tahun 2016-2021 yang disahkan pada tanggal 28 Desember 2018 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bintan 2016-2021.

Bintan Gemilang 2025 secara visioner dalam rangkaianannya memiliki agenda penting yaitu membangun manusia secara utuh sehingga mencapai derajat sejahtera lahir maupun batin.



Kepemimpinan Bupati Bintan pada tahun 2021 merupakan tahun kelima dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah

(RPJPMMD) tahun 2016-2021 sekaligus proses perencanaan pembangunan daerah 2021-2026. Upaya mencapai seluruh perencanaan dan kinerja pembangunan daerah diharapkan akan mengakselerasi daya saing daerah, peningkatan kualitas kehidupan masyarakat serta agenda reformasi birokrasi dinamis dengan dukungan bersama elemen-elemen daerah di Kabupaten Bintan guna mewujudkan visi dan misi kepala daerah.

### **1. Visi Kabupaten Bintan**

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Bintan 2016-2021 merupakan penjabaran dari visi bupati dan wakil bupati terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Kabupaten Bintan. Berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Bintan sampai dengan tahun 2021 difokuskan untuk mewujudkan visi tersebut.

Kabupaten Bintan yang lebih sejahtera adalah cita-cita dan harapan bersama dengan tekad melakukan sejumlah perubahan-perubahan mendasar untuk mempersiapkan pondasi yang kuat bagi pembangunan Kabupaten Bintan pada periode 2016-2021, guna menyongsong terwujudnya Kabupaten Bintan Gemilang pada 2025. Dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, dirumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah maka Visi Kabupaten Bintan tahun 2016-2021 adalah:



**TERWUJUDNYA KABUPATEN BINTAN YANG  
MADANI DAN SEJAHTERA MELALUI  
PENCAPAIAN BINTAN GEMILANG 2025  
(Gerakan Melangkah Maju di Bidang Kelautan,  
Pariwisata, dan Kebudayaan)**



Adapun penjelasan visi **TERWUJUDNYA KABUPATEN BINTAN YANG MADANI DAN SEJAHTERA MELALUI PENCAPAIAN BINTAN GEMILANG 2025** (Gerakan Melangkah Maju di Bidang Kelautan, Pariwisata, dan Kebudayaan) tersebut berdasarkan kata kunci adalah sebagai berikut:

**Madani** merupakan perwujudan dari masyarakat yang beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, yang maju dalam penguasaan ilmu pengetahuan, dan teknologi.



Konsep Madani merupakan wujud dari masyarakat demokratis dimana para anggotanya menyadari akan hak-hak dan kewajibannya dalam menyuarakan pendapat dan mewujudkan kepentingan-kepentingannya; dimana pemerintahannya memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi kreatifitas warga negara untuk mewujudkan program-program pembangunan di wilayahnya. Namun demikian, masyarakat madani bukanlah masyarakat yang sekali jadi, yang hampa udara, *taken for granted*. Masyarakat madani adalah konsep yang dibentuk dari proses sejarah yang panjang dan perjuangan yang terus menerus.

Pemaknaan masyarakat madani yang menyasar minimal pada 5 hal penting sebagaimana terdapat pada gambar diatas tentu menjadi agenda strategis daerah yang kemudian mesti dilaksanakan Bersama oleh masyarakat kabupaten bintan didukung penuh melalui program, kegiatan pemerintah daerah serta kolaborasi aktif daripada dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Bintan.

Bagian daripada visi yang diusung pada tahun 2016-2021 dalam RPJM adalah Masyarakat Bintan yang sejahtera. Ini merupakan cita-cita luhur yang dilakukan secara terus-menerus dan menjadi concern Bersama para leadingsector serta stakeholder daerah.

**Sejahtera** yang ingin diwujudkan merupakan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bintan yang berbasis pada ketahanan keluarga dan lingkungan sebagai dasar pengokohan sosial.



Masyarakat sejahtera tidak hanya dalam konteks lahiriah dan materi saja, melainkan juga sejahtera jiwa dan batiniah. Kesejahteraan dalam artinya yang sejati adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya, meliputi ruhani, akal, dan jasad. Kesatuan elemen ini diharapkan mampu saling berinteraksi dalam melahirkan masa depan yang cerah, adil

dan makmur. Keterpaduan antara sejahtera lahiriah dan batiniah adalah manifestasi dari sejahtera yang paripurna. Kesejahteraan yang seperti inilah yang akan membentuk kepercayaan diri yang tinggi pada masyarakat Kabupaten Bintan untuk mencapai kualitas kehidupan yang semakin baik, hingga menjadi teladan bagi daerah lainnya.

Selanjutnya adalah “**Gerakan Melangkah Maju**”, Memiliki arti penting bahwa gerakan yang dimaksud merupakan gerakan pembangunan yang dilakukan secara terencana dan bertahap.

### **BINTAN GEMILANG 2025 GERAKAN MELANGKAH MAJU DI BIDANG:**



**Bintan Gemilang** merupakan modal sosial dan sumber daya yang dimiliki untuk lebih maju yang melibatkan secara aktif seluruh pihak di kabupaten Bintan dengan jangka waktu target capaian sampai tahun 2025. Pembangunan dikembangkan sesuai potensi dan **keunggulan kabupaten Bintan, yaitu sektor kelautan dan pariwisata sebagai core dan sekaligus sebagai driver activity. Serta dengan melestarikan dan memajukan seluruh hasil kegiatan** dan penciptaan akal budi masyarakat seperti kesenian, dan adat istiadat dengan bersandar pada Budaya Melayu.

#### **2. Misi Kabupaten Bintan**

Dalam mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Bintan tahun 2016-2021, sebagai berikut:

1. Mewujudkan Kabupaten Bintan sebagai daerah tujuan investasi yang berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi ekonomi lokal terutama di bidang pariwisata dan kelautan.
2. Mewujudkan pelayanan infrastruktur daerah yang berkualitas, terintegrasi dan merata.
3. Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan demokratis.
4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan serta kualitas SDM agar bisa bersaing dalam kompetisi global.
5. Mewujudkan pembangunan karakter masyarakat yang religius dan berbudaya Melayu sebagai landasan pembangunan masyarakat.
6. Mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat, mewujudkan kesejahteraan sosial dan pengarusutamaan gender dalam berbagai aspek pembangunan.
7. Memberdayakan pemuda sebagai pelopor pembangunan di Kabupaten Bintan.
8. Mewujudkan ketahanan pangan dan meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Untuk menggambarkan kemajuan pembangunan daerah dalam jangka menengah dan jangka panjang digunakan indikator makro pembangunan yang terdiri dari Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pertumbuhan Ekonomi, Laju Pertumbuhan Penduduk, dan Indeks Gini. Indikator tersebut merupakan indikator yang bersifat dampak (*impact*) dari pelaksanaan program/kegiatan yang bersifat lokal, regional dan nasional sehingga diperlukan sinergi antara Pemerintah Pusat,

Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta pelaku pembangunan lainnya.

Penetapan tujuan dan sasaran misi RPJMD Kabupaten Bintang Tahun 2016-2021 ini merupakan bagian dari upaya pencapaian target indikator makro pembangunan.

Capaian Indikator Makro Kabupaten Bintang disajikan pada Tabel berikut ini.

**Tabel 1.14**  
**Perkembangan Capaian Indikator Makro Kabupaten Bintang**

No	Indikator	Satuan	Tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	poin	72,38	72,91	73,41	73,98	74,13	<b>74,57</b>
2	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	persen	2,3	3,65	1,19	1,13	1,11	<b>1,91</b>
3	Persentase Penduduk Miskin	persen	6,43	6,01	6,61	6,37	6,36	<b>6,42</b>
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	persen	7,69	8,08	5,89	7,03	8,86	<b>8,62</b>
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi	persen	5,05	4,94	4,85	4,71	-4,28	<b>0,23</b>
6	Indeks Gini	poin	0,33	-	-	-	0,31	<b>0,27</b>
7	Pendapatan Per Kapita	juta rupiah	81,64	84,72	87,92	91,22	86,49	<b>86,49</b>

Sumber: BPS Kabupaten Bintang, 2022

Perkembangan IPM Kabupaten Bintang dari tahun 2016 hingga tahun 2020 terus mengalami kenaikan, yaitu pada tahun 2016 sebesar 72,38 dan pada tahun 2021 meningkat menjadi menjadi

74,57. Kondisi IPM Kabupaten Bintan selama kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 relevan terhadap perkembangan IPM Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional.

Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bintan, pada tahun 2016 tercatat sebesar 2,3% sedangkan tahun 2017 tercatat sebesar 3,65% dan tahun 2019 sebesar 1,13%. Namun kembali mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 1,91%. Perkembangan persentase penduduk miskin Kabupaten Bintan pada tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi hingga pada tahun 2021 menjadi 6,42%, Kondisi tersebut relevan dengan Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional. Kabupaten Bintan merupakan Kabupaten dengan persentase kemiskinan yang cukup rendah berada di posisi ke-3 di Provinsi Kepulauan Riau.

Perkembangan TPT Kabupaten Bintan dalam kurun waktu tahun 2016-2020 terjadi perkembangan fluktuatif cenderung meningkat, yaitu pada tahun 2016 sebesar 5,61% meningkat sebesar 8,08% pada tahun 2017 dan di tahun 2018 menurun sebesar 5,89% kemudian meningkat kembali menjadi sebesar 7,03% pada tahun 2019 dan kembali meningkat pada tahun 2020 menjadi 8,86% namun kembali mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 8,62%. Hal ini disebabkan karena pandemi covid-19 sehingga banyak perusahaan yang menjalankan usahanya di Kabupaten Bintan terpaksa harus tutup dan memberhentikan para pekerjanya.

Pergerakan ekonomi daerah pada tahun 2021 dari sisi pertumbuhan ekonomi berjibaku dengan pemulihan luka ekonomi akibat pandemi covid-19 dan juga efek akibat terkendalanya aktivitas serta mobilitas masyarakat untuk bertransaksi. Kondisi laju pertumbuhan ekonomi *Year on Year* Kabupaten Bintan pada tahun 2021 menunjukkan sinyalemen positif ditengah kondisi

ketidakpastian global maupun nasional imbas dari pandemic, dimana laju pertumbuhan ekonomi (LPE) tahun ini mengalami rebound (tumbuh) sebesar 0,23%.

Pada tahun 2016, PDRB per kapita Kabupaten Bintan berada pada angka 81,64 juta rupiah, Angka ini terus meningkat pada tahun 2018 menjadi 87,92 juta rupiah kemudian pada tahun 2019 menjadi 91,22 juta rupia. Pada tahun 2020 berada pada angka 86,49 juta rupiah yang menurun akibat pandemi Covid-19 dan tahun 2021 masih mengalami kontraksi akibat dari Scarring Effect Covid-19 dalam usaha pemulihan menyentuh angka 85.70 Juta Rupiah.

### **C. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah**

Mengacu pada RPJMD Kabupaten Bintan tahun 2016-2021 Program Pemerintah Kabupaten Bintan pada tahun 2021 adalah program yang mendukung Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Bintan. Adapun sasaran, strategi, arah kebijakan dan program dari masing-masing misi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 1.15**  
**Program Pembangunan Kabupaten Bintan**

<b>Misi 1: Mewujudkan Kabupaten Bintan sebagai Daerah Tujuan Investasi yang Berdaya Saing dengan Mengoptimalkan Potensi Ekonomi Lokal Terutama di Bidang Pariwisata dan Kelautan</b>				
<b>No</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>	<b>Program</b>
1	Meningkatnya realisasi investasi dan pelayanan perijinan serta peningkatan pertumbuhan ekonomi	Meningkatkan kerjasama investasi di Kabupaten Bintan	Peningkatan kerjasama investasi di tingkat lokal, regional maupun nasional dengan menjaga investasi yang sudah ada serta melalui promosi Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Program Peningkatan	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi  Program Peningkatan

			Daya Saing Penanaman Modal	Daya Saing Penanaman Modal
		Optimalisasi pelayanan perijinan	Perbaikan kualitas pelayanan perijinan dengan menyederhanakan proses birokrasi	Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal
2	Meningkatnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap perda Penataan Ruang	Peningkatan mekanisme dan peran pemangku kepentingan dalam perencanaan penataan ruang	Penyelenggaraan forum konsultasi publik dalam penyusunan dokumen perencanaan penatataan ruang	Program Perencanaan Tata Ruang
		Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan tata ruang wilayah yang efisien, berkelanjutan dan konsisten Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian yang mengacu pada instrumen tata ruang Program Peningkatan Kualitas dan Penataan Kawasan Daerah sesuai Rencana Tata Ruang	Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan tata ruang wilayah yang efisien, berkelanjutan dan konsisten Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian yang mengacu pada instrumen tata ruang Program Peningkatan Kualitas dan Penataan Kawasan Daerah sesuai Rencana Tata Ruang	Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan tata ruang wilayah yang efisien, berkelanjutan dan konsisten Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian yang mengacu pada instrumen tata ruang Program Peningkatan Kualitas dan Penataan Kawasan Daerah sesuai Rencana Tata Ruang
3	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara Memberdayakan potensi masyarakat lokal serta Optimalisasi potensi ekonomi lokal dibidang pariwisata Pembangunan Destinasi wisata dengan memberdayakan potensi ekonomi maupun kebudayaan lokal Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara Memberdayakan potensi masyarakat lokal serta Optimalisasi potensi ekonomi lokal dibidang pariwisata Pembangunan Destinasi wisata dengan memberdayakan potensi ekonomi maupun kebudayaan lokal Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara Memberdayakan potensi masyarakat lokal serta Optimalisasi potensi ekonomi lokal dibidang pariwisata Pembangunan Destinasi wisata dengan memberdayakan potensi ekonomi maupun kebudayaan lokal Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara Memberdayakan potensi masyarakat lokal serta Optimalisasi potensi ekonomi lokal dibidang pariwisata Pembangunan Destinasi wisata dengan memberdayakan potensi ekonomi maupun kebudayaan lokal



				Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
		Meningkatkan promosi dan pemasaran pariwisata	Promosi dan Program Pengembangan Pemasaran wisata melalui penyelenggaraan even berskala nasional maupun internasional	Promosi dan Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
4	Meningkatnya pengembangan usaha dan industri pariwisata melalui kemitraan dan pembinaan BUMD	Memfasilitasi pembentukan organisasi usaha industri pariwisata serta pengembangan kemitraan	Fasilitasi terbentuknya forum kerjasama antar usaha pariwisata	Program Pengembangan Usaha dan Industri Pariwisata
			Mengembangkan pola-pola kemitraan industri pariwisata lintas sektor	Program Pengembangan Kemitraan
		Mengembangkan usaha ekonomi produktif melalui peningkatan cluster yang aktif	Pengembangan usaha ekonomi produktif serta peningkatan jumlah wirausaha baru	Program Peningkatan Kemampuan Kewirausahaan bagi Koperasi dan UMKM
			Program Peningkatan Daya Saing Usaha bagi Koperasi dan Usaha Mikro	
Mengembangkan pengelolaan aset dan peluang di bidang kelautan dan pariwisata	Melakukan revitalisasi terhadap BUMD dengan difokuskan pada bidang kelautan dan pariwisata	Program Pembinaan BUMD		
5	Meningkatnya jumlah produksi perikanan	Meningkatkan produksi hasil perikanan budidaya dan tangkap	Peningkatan produksi perikanan budidaya	Program pengembangan budidaya perikanan
			Mengoptimalkan pengembangan potensi ekonomi masyarakat pesisir melalui pemberdayaan masyarakat	Program pencegahan dan penanggulangan hama penyakit ikan
				Program Pengembangan Perikanan Tangkap
				Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir

6	Berkembangnya industri pengolahan dan terjaganya stabilitas harga kebutuhan pokok	Mendorong tumbuhnya industri pengolahan	Memberdayakan koperasi dan UMKM serta pemberian insentif untuk mendorong tumbuhnya Industri pengolahan	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro
		Menjaga stabilitas harga dan distribusi barang kebutuhan pokok	Meningkatkan volume operasi pasar serta pengawasan barang beredar	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan Program Pengembangan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan

**Misi 2: Mewujudkan Pelayanan Infrastruktur Daerah yang Berkualitas, Terintegrasi dan Merata**

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
1	Meningkatnya kualitas Jaringan jalan dan prasarana transportasi serta kapasitas dan fungsi sanitasi, air bersih/minum	Meningkatkan keandalan sistem jaringan jalan melalui pengembangan jaringan infrastruktur transportasi jalan bagi peningkatan kelancaran mobilitas barang dan manusia serta aksesibilitas wilayah	Peningkatan kualitas dan kuantitas jaringan infrastruktur transportasi dengan fokus jalan dan jembatan	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
		Meningkatkan jangkauan pelayanan air bersih di lingkungan permukiman serta meningkatkan rumah tinggal bersanitasi	Peningkatan jangkauan pelayanan air bersih serta peningkatan rumah tinggal bersanitasi melalui pembangunan jaringan air bersih serta peningkatan kualitas lingkungan perumahan yang bersanitasi	Program Sarana Infrastruktur Sumber Daya Air dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Program Pengembangan Kinerja Air Limbah
		Rehabilitasi kawasan kumuh melalui penataan lingkungan	Peningkatan kualitas kawasan permukiman melalui pembangunan infrastruktur dasar	Program Penyehatan Lingkungan Permukiman Program

	perkotaan dan perdesaan			<p>Pengembangan Sarana prasarana Perumahan Dan Permukiman</p> <p>Program Peningkatan Infrastruktur Bangunan Gedung dan Prasarana Pemerintahan</p> <p>Program Peningkatan Kualitas Sistem Informasi dan Pelayanan Jasa Konstruksi Serta Verifikasi Perizinan</p> <p>Program Sertifikasi Perumahan dan Permukiman</p>
3	Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan jaringan pengairan	Meningkatkan kualitas pengelolaan jaringan pengairan melalui pembangunan, rehabilitasi, dan pengelolaan sarana prasarana pengairan	Peningkatan kualitas jaringan pengairan dengan melakukan normalisasi saluran/ sungai serta pembangunan drainase jalan	<p>Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya</p> <p>Program Pengendalian Banjir</p> <p>Program Pembangunan Drainase dan GorongGorong Jalan</p>
4	Terhubungnya aktivitas antar pulau	Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan darat, laut dan udara, dan pengembangan sistem manajemen transportasi	Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana perhubungan darat, laut dan udara	<p>Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan</p> <p>Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan</p> <p>Program Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan</p> <p>Program Peningkatan</p>

				Pelayanan Angkutan
				Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas
				Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
				Program Pengembangan Wilayah Perbatasan

**Misi 3: Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) dan Demokratis**

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
1	Meningkatnya profesionalitas aparatur, akuntabilitas kinerja pemerintahan serta pengelolaan keuangan dan aset daerah	Menata sistem seleksi pejabat dari sistem tertutup menjadi sistem seleksi terbuka secara bertahap	Peningkatan kapasitas, kompetensi dan profesionalitas pegawai dan pejabat pemerintah Daerah	Program Pendidikan Kedinasan
				Program Peningkatan Administrasi dan Mutasi Kepegawaian Daerah
		Meningkatkan kualitas aparatur pengawasan dan pembinaan akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah	Peningkatan akuntabilitas dan kinerja Pemerintah Daerah melalui pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan pembangunan	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
				Program Penataan dan Pembinaan Pemerintahan Umum dan Daerah Bawahan
				Program Pengawasan dan Pengendalian Internal dan Eksternal
				Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur
				Program Pembinaan dan Pengawasan serta Peningkatan Akuntabilitas Pembangunan Daerah

				Program Pengelolaan Administrasi Wilayah Perbatasan
		Penataan, Ketatalaksanaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah	Mewajibkan kepada semua SKPD untuk menyusun SOP sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya	Program Penataan, Ketatalaksanaan dan peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur
		Meningkatkan penataan peraturan perundangundangan oleh pemerintah daerah	Meningkatkan peran pemerintah daerah dalam pembinaan tentang hukum maupun bantuan hukum	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Program Pembinaan Pertanahan
		Meningkatkan penataan kebijakan bidang perekonomian, kualitas pelayanan informasi publik, administrasi pembangunan dan pembinaan pemerintahan daerah bawahan	Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait tentang kebijakan bidang perekonomian, kualitas pelayanan informasi publik, administrasi pembangunan dan pembinaan pemerintahan daerah bawahan	Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian Program Pembinaan BUMD Program Peningkatan Administrasi Pembangunan Daerah Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik dan Keprotokolan Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
		Mengurangi risiko bencana, meningkatkan ketangguhan	Peningkatan	Program Penanggulangan Bencana

		pemerintah dan peran serta masyarakat terhadap bencana, serta memperkuat kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	pemantauan kualitas dan daya dukung lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan pasca bencana	Program Mitigasi Bencana
		Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan produk legislasi daerah	Membangun harmonisasi antara legislatif dan eksekutif melalui peningkatan kualitas produk legislasi daerah	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
		Memperbaiki sistem perpajakan, meningkatkan pengendalian pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, serta pembinaan pengelolaan keuangan Daerah	Peningkatan intensifikasi pajak, retribusi daerah dan pemanfaatan aset daerah dalam peningkatan pendapatan daerah, serta peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
				Program Manajemen Aset Daerah
				Program Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan Daerah
			Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi terhadap pengelolaan keuangan pemerintah desa	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
		Mewujudkan perencanaan yang berkualitas dan akuntabel	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, aplikatif dan responsif	Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan
		Mewujudkan integrasi/konektivitas data melalui pengelolaan satu data pembangunan	Mewujudkan pengelolaan data yang akurat, relevan dan terkini dengan membangun koneksi data SKPD untuk mendukung proses perencanaan pembangunan	Program Pengembangan Data dan Informasi
				Program Pengembangan Data, Informasi Statistik Sektoral
				Program Penelitian

				Perencanaan Pembangunan
				Program Pengembangan Perencanaan Pembangunan
		Meningkatkan konsistensi perencanaan pembangunan daerah	Menjabarkan perencanaan pembangunan yang ada di tingkat yang lebih tinggi ke dalam perencanaan pembangunan di bawahnya	Program Perencanaan Pembangunan Daerah
				Program perencanaan pembangunan ekonomi
				Program perencanaan pembangunan infrastruktur dan SDA
				Program Perencanaan Sosial Budaya
				Program Perencanaan Pembangunan Daerah Bawahan
		Meningkatkan kapasitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah dengan melibatkan semua instansi terkait sesuai dengan SOP	Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
		Meningkatkan kualitas aparatur serta sarana prasarana pendukung	Melakukan pengembangan kapasitas terhadap aparatur yang melakukan pelayanan publik serta mengoptimalkan fungsi sarana prasarana pendukung	Program Pembinaan Masyarakat Kecamatan
				Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan Kelurahan
				Program Pembinaan Masyarakat Kecamatan
		Meningkatkan jumlah jaringan sistem kependudukan di seluruh kecamatan	Peningkatan akurasi data informasi kependudukan, Catatan Sipil melalui pembangunan sistem informasi kependudukan yang berkualitas	Program Penataan Administrasi Kependudukan
			Meningkatkan	

			kepemilikan akte kelahiran dan KTP-el dengan menyederhanakan birokrasi	
		Meningkatkan pelayanan di bidang kearsipan dan perpustakaan	Meningkatkan pengelolaan arsip secara baku serta peningkatan SDM pengelola kearsipan dan pustaka	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Program perbaikan sistem administrasi kearsipan Program Penyelenggaraan Kearsipan Daerah Program Pengembangan Perpustakaan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
		Meningkatnya kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam penerapan produk hukum	Meningkatkan cakupan penegakan penerapan peraturan daerah dan perkada	Program Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Program Penegakan Peraturan Daerah dan Pengembangan Kapasitas Pol PP Program Pembinaan Potensi Ketahanan dan Perlindungan Masyarakat
		Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban politik serta wawasan kebangsaan	Membekali masyarakat tentang wawasan kebangsaan, serta meningkatkan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik
<b>Misi 4: Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan serta Kualitas SDM agar Bisa Bersaing dalam Kompetisi Global</b>				
No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
1	Meningkatnya keluasan dan	Meningkatkan	Peningkatan ketersediaan dan	Program Pengembangan



	kemerataan akses PAUD bermutu	mutu pendidikan anak usia dini untuk pembangunan berkelanjutan	kualitas tenaga pendidik PAUD yang merata di Kecamatan	Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-Kanak
2	Meningkatnya Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar (SD/MI/SLB/Paket A dan SMP/MTS/Paket B)	Peningkatan pelayanan pendidikan dasar bagi seluruh anak Kabupaten Bintan dengan memberikan peluang yang lebih besar bagi anak dari keluarga kurang mampu	Melaksanakan wajib belajar 9 Tahun dengan cara melanjutkan upaya gratis biaya sekolah dari tingkat pendidikan dasar sampai dengan tingkat menengah	Program Pendidikan Dasar (Wajib Belajar 9 Tahun) Program Non Formal
3	Meningkatnya kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan yang berdampak pada kualitas hasil belajar siswa	Peningkatan profesionalisme, kualitas serta akuntabilitas guru dan tenaga kependidikan melalui pengutan sistem uji kompetensi guru dan tenaga kependidikan sebagai bagian dari proses penilaian hasil belajar siswa	Meningkatkan kualifikasi akademik, sertifikasi guru dan tenaga kependidikan dengan perbaikan desain program keselarasan disiplin ilmu	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
4	Meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu, anak dan lansia serta pengendalian penyakit menular dan tidak menular	Peningkatan Upaya Kesehatan masyarakat melalui Puskesmas serta melaksanakan bina gizi dan kesehatan bagi ibu dan anak serta Peningkatan Penyehatan Lingkungan	Meningkatkan Pembinaan Upaya Kesehatan masyarakat, usaha pelayanan kesehatan lansia dan Penyehatan Lingkungan	Program Upaya Kesehatan Masyarakat
			Meningkatkan Pembinaan Upaya Bina Gizi Masyarakat, serta Kesehatan Ibu dan Anak	Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
		Peningkatan Upaya Pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular	Meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
		Peningkatan pemberdayaan desa / kelurahan dan CSR dari perusahaan untuk program kesehatan serta promosi kesehatan kepada masyarakat	Meningkatkan Pelaksanaan Pemberdayaan dan Promosi Kesehatan kepada Masyarakat	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
5	Meningkatnya kualitas infrastruktur	Peningkatan akses pelayanan kesehatan	Meningkatkan Kualitas, kuantitas	Program Peningkatan

	pelayanan kesehatan dan Tersedianya Jaminan pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat	dasar dan rujukan serta peningkatan kefarmasian, pengawasan obat dan makanan	dan Standarisasi Akreditasi Sarana Prasarana pelayanan kesehatan Dasar dan Rujukan serta Meningkatkan SDM kesehatan	Sumber Daya Kesehatan
			Meningkatkan Akses dan Mutu Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan	Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan
		Peningkatan cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat	Meningkatkan Cakupan Jaminan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan bagi masyarakat	Program Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
6	Terkendalinya pertumbuhan penduduk penduduk	Meningkatkan kualitas dan kuantitas peserta KB	Meningkatkan Kelestarian dan kemandirian peserta KB	Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Peningkatan Ketahanan dan pemberdayaan keluarga	Pembentukan, Pembinaan dan Pengembangan Bina Keluarga	Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga
7	Meningkatnya kualitas, daya saing dan penempatan tenaga kerja	Mengembangkan program kemitraan antara pemerintah dengan dunia usaha, dan penataan lembaga pelatihan berbasis kompetensi.	Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja diutamakan untuk para pemuda Bintang yang belum bekerja dan tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi	Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja
				Program Peningkatan Kompetensi dan Produktifitas Tenaga Kerja
				Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
				Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
8	Meningkatnya perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	Mengupayakan hubungan industrial harmonis, dinamis dan berkeadilan, kelangsungan usaha serta peningkatan kesejahteraan pekerja dan perlindungan tenaga kerja	Perbaiki Iklim Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial yang harmonis	

**Misi 5: Mewujudkan Pembangunan Karakter Masyarakat yang Religius dan Berbudaya Melayu sebagai Landasan Pembangunan Masyarakat**

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
1	Meningkatnya kelestarian nilai-nilai dan seni budaya melayu sebagai kekayaan budaya daerah	Memberdayakan lembaga-lembaga adat terutama adat melayu untuk melestarikan nilai-nilai budaya melayu dalam kehidupan masyarakat	Peningkatan kegiatan budaya, penyelenggaraan festival seni budaya, serta Cagar Budaya	Program Pengelolaan Keragaman Budaya Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
2	Terwujudnya toleransi antar umat beragama	Meningkatkan kerukunan umat bergama	Peningkatan kualitas pemahaman, pengamalan dan kerukunan umat beragama melalui komunikasi lintas Agama	Program Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Umat Beragama Program Pemenuhan Kebutuhan Sarana Peribadatan Program Pembinaan Keagamaan
3	Terwujudnya pemahaman dan pengamalan agama sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing	Pengembangan pendidikan agama di masyarakat dan sekolah	Pelaksanaan kegiatan keagamaan di masyarakat dan sekolah-sekolah dan pembangunan rumah tahfiz di setiap kecamatan	Program Pembinaan Kesejahteraan Rakyat

**Misi 6: Mengoptimalkan Pemberdayaan Masyarakat, Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dan Pengarusutamaan Gender dalam Berbagai Aspek Pembangunan**

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
1	Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan	Menerapkan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG), dan Memperkuat sistem perlindungan anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO), dengan melakukan berbagai upaya pencegahan dan penindakan	Peningkatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan, serta Peningkatan upaya pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi terhadap anak, perempuan, dan kelompok marjinal	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Program Perlindungan anak
2	Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	Memperbaiki program perlindungan sosial, meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar, Pemberdayaan kelompok masyarakat miskin serta menciptakan pembangunan yang inklusif	Peningkatan implementasi program-program penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan	Program Penanganan Fakir Miskin Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

		Meningkatkan pembudayaan kesetiakawanan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Peningkatan pemberdayaan dan pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Program Pemberdayaan Sosial Program Rehabilitasi Sosial
3	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Memperkuat Kelembagaan, Pengembangan Partisipasi masyarakat dan Peningkatan pemberdayaan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat	Penguatan Kelembagaan Masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan serta peningkatan keswadayaan masyarakat	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan
4	Meningkatnya pengelolaan pembangunan oleh pemerintah desa			Program Perencanaan Pembangunan Daerah Bawah Program Pengembangan Lembaga ekonomi desa Program peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Keuangan desa

#### Misi 7: Memberdayakan Pemuda sebagai Pelopor Pembangunan di Kabupaten Bintan

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
1	Meningkatkan peran generasi muda dan prestasi olah raga	Meningkatkan kualitas dan kuantitas generasi muda melalui pembinaan dan peningkatan prestasi olah raga	Meningkatkan kualitas generasi muda dan olah raga	Program Peningkatan peran serta Kepemudaan
		Meningkatkan pemberdayaan pemuda dalam pembangunan diperbatasan	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana olah raga	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga
				Program peningkatan sarana dan prasarana Olahraga

#### Misi 8: Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
1	Meningkatnya jumlah produksi dan produktivitas pertanian,	Peningkatan Produktivitas perkebunan melalui revitalisasi penyuluhan dan pemberdayaan	Meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan	Program Peningkatan Produksi Produktivitas dan

perkebunan dan peternakan	kelompok tani secara berkelanjutan	berkelanjutan melalui pengembangan komoditas, SDM, Kelembagaan dan Kemitraan usaha, Investasi usaha perkebunan sesuai dengan kaedah pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Mutu Produk Tanaman Perkebunan Berkelanjutan
	Peningkatan produktivitas Pertanian Tanaman Pangan melalui revitalisasi penyuluhan dan pemberdayaan kelompok tani secara berkelanjutan	Meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu tanaman pangan melalui Pengembangan komoditas, SDM, Kelembagaan dan Kemitraan usaha, Investasi usaha perkebunan sesuai dengan kaedah pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Produk Tanaman Pangan
	Peningkatan produktivitas Pertanian Tanaman Hortikultura ramah lingkungan melalui revitalisasi penyuluhan dan pemberdayaan kelompok tani secara berkelanjutan	Meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu tanaman hortikultura ramah lingkungan melalui pengembangan komoditas, SDM, Kelembagaan dan Kemitraan usaha, Investasi usaha perkebunan sesuai dengan kaedah pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu hasil Tanaman Hortikultura Ramah Lingkungan
	Peningkatan penyediaan dan pengembangan Prasarana dan sarana Pertanian melalui revitalisasi penyuluhan dan pemberdayaan kelompok tani secara berkelanjutan	Meningkatkan penyediaan dan pengembangan Prasarana dan Sarana pertanian melalui pengembangan komoditas, SDM, Kelembagaan dan Kemitraan usaha, Investasi usaha	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian
	Peningkatan produktivitas peternakan melalui revitalisasi penyuluhan dan pemberdayaan	Meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu ternak berkelanjutan melalui	Program Pemenuhan keamanan pangan Asal ternak dan

		kelompok peternak secara berkelanjutan	pengembangan komoditas, SDM, Kelembagaan dan Kemitraan usaha, Investasi usaha peternakan sesuai dengan kaedah pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Agribisnis peternakan rakyat
2	Meningkatnya ketersediaan pangan masyarakat di seluruh wilayah	Meningkatkan kerjasama dengan lembaga yang bergerak dalam bidang distribusi pangan untuk memastikan ketersediaan pasokan pangan dan stabilitas harga pangan pokok	Peningkatan cadangan pangan, pemantauan harga, distribusi dan keamanan pangan, serta penganekaragaman konsumsi pangan secara merata di seluruh wilayah	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Lapangan
3	Meningkatnya kebersihan lingkungan serta upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan	Meningkatkan kualitas lingkungan yang menyeluruh melalui Penguatan sistem pemantauan kualitas lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan, dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
			Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
				Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
				Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
				Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Persampahan
4	Terpenuhinya standar luas ruang terbuka hijau yang dikelola	Meningkatkan/ Mempertahankan luas ruang terbuka hijau dan pengelolaan tempat pemakaman umum	Pengelolaan ruang terbuka hijau dan tempat pemakaman umum dengan memperhatikan lingkungan yang berkelanjutan	Program Peningkatan Prasarana Penerangan Jalan Umum
				Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
				Program Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum

#### D. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Kegiatan-kegiatan yang mendukung Program Pemerintah Kabupaten Bintang tahun 2021 berdasarkan Dokumen Perencanaan adalah:

**Tabel 1.16**  
**Program dan Kegiatan**  
**Dinas Pendidikan Kabupaten Bintang Tahun 2021**

No	Program dan Kegiatan
<b>Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar</b>	
<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan</b>	
<b>Dinas Pendidikan</b>	
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>
1.1	<b>Kegiatan</b> Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
1.2	<b>Kegiatan</b> Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
1.3	<b>Kegiatan</b> Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
1.4	<b>Kegiatan</b> Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN</b>
2.1	<b>Kegiatan</b> Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
2.2	<b>Kegiatan</b> Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat

**Tabel 1.17**  
**Program dan Kegiatan**  
**Dinas Kesehatan Kabupaten Bintang Tahun 2021**

No	Program dan Kegiatan
<b>Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar</b>	
<b>Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan</b>	
<b>Dinas Kesehatan</b>	
<b>1</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (DINAS KESEHATAN)</b>
1.1	<b>Kegiatan</b>

No	Program dan Kegiatan
<b>Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan</b>	
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
1.2	<b>Kegiatan</b> Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1.3	<b>Kegiatan</b> Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
1.4	<b>Kegiatan</b> Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN (DINAS KESEHATAN)</b>
2.1	<b>Kegiatan</b> Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
2.2	<b>Kegiatan</b> Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3	<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN (DINAS KESEHATAN )</b>
3.1	<b>Kegiatan</b> Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
3.2	<b>Kegiatan</b> Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
3.3	<b>Kegiatan</b> Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
3.4	<b>Kegiatan</b> Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
4	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN (DINAS KESEHATAN )</b>
4.1	<b>Kegiatan</b> Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
4.2	<b>Kegiatan</b> Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
4.3	<b>Kegiatan</b> Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota



No	Program dan Kegiatan
<b>Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan</b>	
5	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS BERAKIT)</b>
	<b>Kegiatan</b>
5.1	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
5.2	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi *
6	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN (PUSKESMAS BERAKIT)</b>
6.1	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota *
7	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN (PUSKESMAS BERAKIT)</b>
	<b>Kegiatan</b>
7.1	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota *
7.2	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota *
7.3	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota *
8	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS TOAPAYA)</b>
	<b>Kegiatan</b>
8.1	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
8.2	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi *
9	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN (PUSKESMAS TOAPAYA)</b>
9.1	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
10	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN (PUSKESMAS TOPAYA)</b>
	<b>Kegiatan</b>
10.1	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
10.2	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
10.3	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota *

No	Program dan Kegiatan
<b>Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan</b>	
11	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS TELUK SASAH)</b>
11.1	<b>Kegiatan</b> Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
11.2	<b>Kegiatan</b> Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
12	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN (PUSKESMAS TELUK SASAH)</b>
12.1	<b>Kegiatan</b> Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
13	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN (PUSKESMAS TELUK SASAH)</b>
13.1	<b>Kegiatan</b> Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
13.2	<b>Kegiatan</b> Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
13.3	<b>Kegiatan</b> Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
14	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS KIJANG )</b>
14.1	<b>Kegiatan</b> Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
14.2	<b>Kegiatan</b> Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
15	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN (PUSKESMAS KIJANG)</b>
15.1	<b>Kegiatan</b> Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
16	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN PUSKESMAS KIJANG</b>
16.1	<b>Kegiatan</b> Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
16.2	<b>Kegiatan</b> Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
16.3	<b>Kegiatan</b>

No	Program dan Kegiatan
<b>Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan</b>	
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
17	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (TANJUNG UBAN )</b>
	<b>Kegiatan</b>
17.1	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
17.2	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi *
18	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TANJUNG UBAN</b>
	<b>Kegiatan</b>
18.1	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
19	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN TANJUNG UBAN</b>
	<b>Kegiatan</b>
19.1	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	<b>Kegiatan</b>
19.2	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	<b>Kegiatan</b>
19.3	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
20	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT SEI LEKOP</b>
	<b>Kegiatan</b>
20.1	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	<b>Kegiatan</b>
20.2	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
21	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN SEI LEKOP</b>
	<b>Kegiatan</b>
21.1	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
22	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN SEI LEKOP</b>
	<b>Kegiatan</b>
22.1	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	<b>Kegiatan</b>
22.2	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

No	Program dan Kegiatan
<b>Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan</b>	
22.3	<b>Kegiatan</b> Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
23	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT NUMBING</b>
23.1	<b>Kegiatan</b> Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
23.2	<b>Kegiatan</b> Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
24	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN NUMBING</b>
24.1	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota *
25	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN NUMBING</b>
25.1	<b>Kegiatan</b> Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
25.2	<b>Kegiatan</b> Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
25.3	<b>Kegiatan</b> Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota *
26	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT KELONG</b>
26.1	<b>Kegiatan</b> Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
26.2	<b>Kegiatan</b> Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
27	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN KELONG</b>
27.1	<b>Kegiatan</b> Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
28	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN KELONG</b>
28.1	<b>Kegiatan</b> Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
28.2	<b>Kegiatan</b>

No	Program dan Kegiatan
<b>Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar</b>	
<b>Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan</b>	
<b>Dinas Kesehatan</b>	
	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
28.3	<b>Kegiatan</b> Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
29	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT KAWAL</b>
29.1	<b>Kegiatan</b> Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
29.2	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi *
30	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN (KAWAL)</b>
30.1	<b>Kegiatan</b> Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
31	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN (KAWAL)</b>
31.1	<b>Kegiatan</b> Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
31.2	<b>Kegiatan</b> Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
31.3	<b>Kegiatan</b> Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
32	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN TELUK BINTAN</b>
32.1	<b>Kegiatan</b> Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
32.2	<b>Kegiatan</b> Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
33	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TELUK BINTAN</b>
33.1	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota *
34	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN TELUK BINTAN</b>
34.1.	<b>Kegiatan</b> Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
34.2.	<b>Kegiatan</b>

No	Program dan Kegiatan
<b>Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan</b>	
	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
34.3.	<b>Kegiatan</b> Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
35	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT SRI BINTAN</b>
35.1.	<b>Kegiatan</b> Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
35.2	<b>Kegiatan</b> Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
36	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN SRI BINTAN</b>
36.1	<b>Kegiatan</b> Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
37	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN SRI BINTAN</b>
37.1	<b>Kegiatan</b> Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
37.2	<b>Kegiatan</b> Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
37.3.	<b>Kegiatan</b> Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
38	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT TAMBELAN</b>
38.1	<b>Kegiatan</b> Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
38.2	<b>Kegiatan</b> Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
39	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TAMBELAN</b>
39.1	<b>Kegiatan</b> Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
40	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN TAMBELAN</b>
40.1	<b>Kegiatan</b>

No	Program dan Kegiatan
<b>Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan</b>	
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
40.2	<b>Kegiatan</b> Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
40.3	<b>Kegiatan</b> Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
41	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT KUALA SEMPANG</b>
41.1	<b>Kegiatan</b> Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
41.2	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi *
42	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN KUALA SEMPANG</b>
42.1	<b>Kegiatan</b> Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
43	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN KUALA SEMPANG</b>
43.1	<b>Kegiatan</b> Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
43.2	<b>Kegiatan</b> Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
43.3	<b>Kegiatan</b> Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
44	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT MANTANG</b>
44.1	<b>Kegiatan</b> Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
44.2	<b>Kegiatan</b> Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
45	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN MANTANG</b>
45.1	<b>Kegiatan</b> Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
46	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN MANTANG</b>

No	Program dan Kegiatan
<b>Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan</b>	
46.1	<b>Kegiatan</b> Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
46.2	<b>Kegiatan</b> Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
46.3	<b>Kegiatan</b> Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
47	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT TELUK SEBONG</b>
48.1	<b>Kegiatan</b> Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
48.2	<b>Kegiatan</b> Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
49	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TELUK SEBONG</b>
49.1	<b>Kegiatan</b> Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
50	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN TELUK SEBONG</b>
50.1	<b>Kegiatan</b> Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
50.2	<b>Kegiatan</b> Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
50.3	<b>Kegiatan</b> Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
51	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT RSUD</b>
51.1	<b>Kegiatan</b> Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
51.2	<b>Kegiatan</b> Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
51.3	<b>Kegiatan</b> Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
51.4	<b>Kegiatan</b> Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota



No	Program dan Kegiatan
<b>Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan</b>	
52	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN RSUD</b>
52.1	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota *
52.2	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota *
53	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN (RSUD)</b>
53.1	<b>Kegiatan</b> Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
54	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (UPT BALAI PENGELOLAAN FARMASI DAN ALKES)</b>
54.1	<b>Kegiatan</b> Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
54.2	<b>Kegiatan</b> Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

**Tabel 1.18**  
**Program dan Kegiatan**  
**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bintan**  
**Tahun 2021**

No	Program dan Kegiatan
<b>Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	
1	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>
1.1	<b>Kegiatan</b> Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>
2.1	<b>Kegiatan</b> Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
3	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>
3.1	<b>Kegiatan</b> Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
4	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>

No	Program dan Kegiatan
4.1	<b>Kegiatan</b> Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
5	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>
5.1	<b>Kegiatan</b> Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
6	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>
6.1	<b>Kegiatan</b> Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
7	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>
7.1	<b>Kegiatan</b> Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
7.2	<b>Kegiatan</b> Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
8	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>
8.1	<b>Kegiatan</b> Kordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
8.2	<b>Kegiatan</b> Kordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
8.3	<b>Kegiatan</b> Kordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

**Tabel 1.19**  
**Program dan Kegiatan**  
**Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan**  
**Tahun 2021**

No	Uraian Program dan Kegiatan
<b>Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar</b> <b>Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman</b> <b>Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman</b>	
1	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>
1.1	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
2	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>
2.1	<b>Kegiatan</b> Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
2.2	<b>Kegiatan</b> Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

No	Uraian Program dan Kegiatan
<b>Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman</b>	
2.3	<b>Kegiatan</b> Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
3	<b>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH</b>
3.1	<b>Kegiatan</b> Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
4	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>
4.1	<b>Kegiatan</b> Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

**Tabel 1.20  
Program dan Kegiatan  
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintang Tahun 2021**

No	Program dan Kegiatan
<b>Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja</b>	
1.	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>
1.1	<b>Kegiatan</b> Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
1.2	<b>Kegiatan</b> Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota

**Tabel 1.21  
Program dan Kegiatan  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bintang Tahun  
2021**

No	Program dan Kegiatan
<b>Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bintang</b>	
1	<b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>
1.1	<b>Kegiatan</b>

No	Program dan Kegiatan
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
2	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>
2.1	<b>Kegiatan</b> Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
3	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>
3.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
4	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>
4.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
5	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>
5.1	<b>Kegiatan</b> Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

**Tabel 1.22**  
**Program dan Kegiatan**  
**Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bintan**  
**Tahun 2021**

No	Program dan Kegiatan
<b>Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar</b> <b>Urusan Pemerintahan Ketentraman, Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat</b> <b>Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah</b>	
1	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>
1.1	<b>Kegiatan</b> Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
1.2	<b>Kegiatan</b> Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
1.3	<b>Kegiatan</b> Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
2	<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>
2.1	<b>Kegiatan</b> Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

No	Program dan Kegiatan
	<b>Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Urusan Pemerintahan Ketentraman, Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah</b>
2.2	<b>Kegiatan</b> Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran

**Tabel 1.23  
Program dan Kegiatan  
Dinas Sosial Kabupaten Bintang Tahun 2021**

No	Program dan Kegiatan
	<b>Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Dinas Sosial</b>
1	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>
	<b>Kegiatan</b>
1.1	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
2	<b>PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN</b>
	<b>Kegiatan</b>
2.1	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal
3	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>
	<b>Kegiatan</b>
3.1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
	<b>Kegiatan</b>
3.2	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
4	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>
	<b>Kegiatan</b>
4.1	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar
	<b>Kegiatan</b>
4.2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
5	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>
	<b>Kegiatan</b>
5.1	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
6	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>
	<b>Kegiatan</b>
6.1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional

**Tabel 1.24**  
**Program dan Kegiatan**  
**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,**  
**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten**  
**Bintan Tahun 2021**

No	Program dan Kegiatan
<b>Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</b> <b>Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan</b> <b>Perlindungan Anak</b> <b>Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian</b> <b>Penduduk dan Keluarga Berencana</b>	
1	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>
	<b>Kegiatan</b>
1.1	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
	<b>Kegiatan</b>
1.2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
	<b>Kegiatan</b>
1.3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
2	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>
	<b>Kegiatan</b>
2.1	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
3	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>
	<b>Kegiatan</b>
3.1	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	<b>Kegiatan</b>
3.2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
4	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>
	<b>Kegiatan</b>
4.1	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
	<b>Kegiatan</b>
4.2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
5	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>
	<b>Kegiatan</b>
5.1	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

No	Program dan Kegiatan
<b>Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar            Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan            Perlindungan Anak            Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian            Penduduk dan Keluarga Berencana</b>	
5.2	<b>Kegiatan</b> Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
5.3	<b>Kegiatan</b> Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

**Tabel 1.25**  
**Program dan Kegiatan**  
**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,**  
**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten**  
**Bintan Tahun 2021**

No	Program dan Kegiatan
<b>Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar            Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga            Berencana            Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian            Penduduk dan Keluarga Berencana</b>	
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>
1.1	<b>Kegiatan</b> Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
1.2	<b>Kegiatan</b> Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
<b>2</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>
2.1	<b>Kegiatan</b> Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
2.2	<b>Kegiatan</b> Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
2.3	<b>Kegiatan</b>

No	Program dan Kegiatan
<b>Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</b> <b>Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana</b> <b>Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>	
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
2.4	<b>Kegiatan</b> Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
3	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>
3.1	<b>Kegiatan</b> Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

**Tabel 1.26**  
**Program dan Kegiatan**  
**Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2021**

No	Program dan Kegiatan
<b>Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</b> <b>Urusan Pemerintahan Bidang Pangan</b> <b>Dinas Ketahanan Pangan</b>	
1	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN</b>
1.1	<b>Kegiatan</b> Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
2	<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>
2.1	<b>Kegiatan</b> Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
2.2	<b>Kegiatan</b> Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan
2.3	<b>Kegiatan</b> Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
3	<b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN*</b>
3.1.	<b>Kegiatan*</b> Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota



**Tabel 1.27**  
**Program dan Kegiatan**  
**Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan Tahun 2021**

No	Program dan Kegiatan
<b>Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</b>	
<b>Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup</b>	
<b>Dinas Lingkungan Hidup</b>	
1	<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>
	<b>Kegiatan</b>
1.1	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
	<b>Kegiatan</b>
1.2	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
2	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>
	<b>Kegiatan</b>
2.1	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan
	<b>Kegiatan</b>
2.2	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
3	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>
	<b>Kegiatan</b>
3.1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
4	<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)*</b>
	<b>Kegiatan *</b>
4.1.1	Penyimpanan Sementara Limbah B3
5	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)*</b>
	<b>Kegiatan *</b>
5.1	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
6	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT*</b>
	<b>Kegiatan *</b>
6.1	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
7	<b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT*</b>
	<b>Kegiatan *</b>
7.1	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
8	<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP*</b>
	<b>Kegiatan *</b>
8.1	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
9	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>
9.1	<b>Kegiatan</b>

No	Program dan Kegiatan
	<b>Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup</b>
	Pengelolaan Sampah

**Tabel 1.28**  
**Program dan Kegiatan**  
**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan**  
**Tahun 2021**

No	Program dan Kegiatan
	<b>Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>
1.	<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>
1.1.	<b>Kegiatan</b> Pelayanan Pendaftaran Penduduk
1.2.	<b>Kegiatan</b> Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
2.	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>
2.1.	<b>Kegiatan</b> Pelayanan Pencatatan Sipil
2.2.	<b>Kegiatan</b> Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
3.	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>
3.1.	<b>Kegiatan</b> Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

**Tabel 1.29**  
**Program dan Kegiatan**  
**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bintan**  
**Tahun 2021**

No	Program dan Kegiatan
	<b>Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>
1	<b>PROGRAM PENATAAN DESA*</b>
1.1	<b>Kegiatan *</b> Penyelenggaraan Penataan Desa
2	<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA</b>
2.1	<b>Kegiatan</b> Fasilitasi Kerja sama antar Desa
3	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>

No	Program dan Kegiatan
<b>Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>	
3.1	<b>Kegiatan</b> Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
<b>4</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>
4.1	<b>Kegiatan</b> Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

**Tabel 1.30**  
**Program dan Kegiatan**  
**Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan Tahun 2021**

No	Program dan Kegiatan
<b>Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Dinas Perhubungan</b>	
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>
1.1	<b>Kegiatan</b> Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten
1.2	<b>Kegiatan</b> Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
1.3	<b>Kegiatan</b> Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
1.4	<b>Kegiatan</b> Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
1.5	<b>Kegiatan</b> Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
1.6	<b>Kegiatan</b> Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
1.7	<b>Kegiatan</b> Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</b>
2.1	<b>Kegiatan</b> Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota
2.2	<b>Kegiatan</b> Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal

**Tabel 1.31**  
**Program dan Kegiatan**  
**Dinas Koperasi, Usaha, Mikro, Perdagangan dan Perindustrian**  
**Kabupaten Bintan Tahun 2021**

No	Program dan Kegiatan
<b>Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</b> <b>Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi. Usaha. Mikro. Perdagangan dan Perindustrian</b> <b>Dinas Koperasi, Usaha, Mikro, Perdagangan dan Perindustrian</b>	
1.	<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>
	<b>Kegiatan</b>
1.1.	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi. Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
2.	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>
	<b>Kegiatan</b>
2.1.	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
3.	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>
	<b>Kegiatan</b>
3.1.	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
4.	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH. USAHA KECIL. DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>
	<b>Kegiatan</b>
4.1.	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan. Kemitraan. Kemudahan Perizinan. Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
5.	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>
	<b>Kegiatan</b>
5.1.	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil

**Tabel 1.32**  
**Program dan Kegiatan**  
**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**  
**Kabupaten Bintan Tahun 2021**

No	Program dan Kegiatan
<b>Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</b> <b>Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal</b> <b>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten</b>	
1	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL*</b>
1.1	<b>Kegiatan</b>

No	Program dan Kegiatan
<b>Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten</b>	
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
<b>2</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>
	<b>Kegiatan</b>
2.1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>
	<b>Kegiatan</b>
3.1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>
4.1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

**Tabel 1.33**  
**Program dan Kegiatan**  
**Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan Tahun 2021**

No	Program dan Kegiatan
<b>Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja</b>	
<b>1.</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA</b>
1.1.	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
<b>2.</b>	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>
	<b>Kegiatan</b>
2.1.	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
<b>3.</b>	<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>
	<b>Kegiatan</b>
3.1	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota
	<b>Kegiatan</b>
3.2	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
<b>4.</b>	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>
	<b>Kegiatan</b>
4.1.	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
	<b>Kegiatan</b>
4.2.	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota

**Tabel 1.34**  
**Program dan Kegiatan**  
**Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan Tahun**  
**2021**

No	Program dan Kegiatan
<b>Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</b>	
<b>Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan</b>	
<b>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata</b>	
1.	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>
	<b>Kegiatan</b>
1.1.	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
	<b>Kegiatan</b>
1.2.	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
	<b>Kegiatan</b>
1.3.	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota
2.	<b>PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA</b>
	<b>Kegiatan</b>
2.1.	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
3.	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN</b>
	<b>Kegiatan</b>
3.1.	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota

**Tabel 1.35**  
**Program dan Kegiatan**  
**Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2021**

No	Program dan Kegiatan
<b>Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</b>	
<b>Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	
<b>Dinas Kepemudaan dan Olahraga</b>	
1	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>
	<b>Kegiatan</b>
1.1	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
	<b>Kegiatan</b>
1.2	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>
	<b>Kegiatan</b>
2.1	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
	<b>Kegiatan</b>
2.2	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

No	Program dan Kegiatan
<b>Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Dinas Kepemudaan dan Olahraga</b>	
2.3	<b>Kegiatan</b> Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
3	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN</b>
3.1	<b>Kegiatan</b> Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan

**Tabel 1.36**  
**Program dan Kegiatan**  
**Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Bintan Tahun 2021**

No	Program dan Kegiatan
<b>Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Arsip</b>	
1	<b>PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>
1.1	<b>Kegiatan</b> Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1.2	<b>Kegiatan*</b> Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah

**Tabel 1.37**  
**Program dan Kegiatan**  
**Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Bintan Tahun 2021**

No	Program dan Kegiatan
<b>Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Arsip</b>	
1	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP</b>
1.1	<b>Kegiatan</b> Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
1.2	<b>Kegiatan</b> Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota

**Tabel 1.38**  
**Program dan Kegiatan**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika Kabuapten Bintang Tahun**  
**2021**

No	Program dan Kegiatan
<b>Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</b>	
<b>Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika</b>	
<b>Dinas Komunikasi dan Informatika</b>	
1	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>
	<b>Kegiatan</b>
1.1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2	<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>
	<b>Kegiatan</b>
2.1	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2.2	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
3	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>
	<b>Kegiatan</b>
3.1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
4	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>
	<b>Kegiatan</b>
4.1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

**Tabel 1.39**  
**Program dan Kegiatan**  
**Sekretariat Daerah Kabupaten Bintang Tahun 2021**

No	Program dan Kegiatan
<b>Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</b>	
<b>Urusan Pemerintahan Bidang Sekretariat Daerah</b>	
<b>Sekretariat Daerah</b>	
1	<b>PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN</b>
	<b>Kegiatan</b>
1.1	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota
2.	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>
	<b>Kegiatan</b>
2.1.	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota



**Tabel 1.40**  
**Kegiatan dan Sub Kegiatan**  
**Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tahun Tahun**  
**2021**

No	Program dan Kegiatan
<b>Urusan Pemerintahan Pilihan</b> <b>Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata</b> <b>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata</b>	
1.	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>
1.1.	<b>Kegiatan</b> Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
1.2.	<b>Kegiatan</b> Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
2.	<b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>
2.1.	<b>Kegiatan</b> Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
3.	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>
3.1.	<b>Kegiatan</b> Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
3.2.	<b>Kegiatan</b> Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif

**Tabel 1.41**  
**Program dan Kegiatan**  
**Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan Tahun 2021**

No	Program dan Kegiatan
<b>Urusan Pemerintahan Wajib Pilihan</b> <b>Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan</b> <b>Dinas Kelautan dan Perikanan</b>	
1	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>
1.1	<b>Kegiatan</b> Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
1.2	<b>Kegiatan</b> Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota
2	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>
2.1	<b>Kegiatan</b> Pemberdayaan Pembudi Daya ikan Kecil
2.2	<b>Kegiatan</b> Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

No	Program dan Kegiatan
<b>Urusan Pemerintahan Wajib Pilihan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan</b>	
3.	<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN *</b>
3.1	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil *
3.2	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil *

**Tabel 1.42**  
**Program dan Kegiatan**  
**Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan**  
**Tahun 2021**

No	Program dan Kegiatan
<b>Urusan Pemerintahan Wajib Yang Pelayanan Dasar Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian</b>	
1	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>
1.1	<b>Kegiatan</b> Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
1.2	<b>Kegiatan</b> Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
1.3	<b>Kegiatan</b> Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain
2	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>
2.1	<b>Kegiatan</b> Pengembangan Prasarana Pertanian
2.2	<b>Kegiatan</b> Pembangunan Prasarana Pertanian
2.3	<b>Kegiatan</b> Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota
3	<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>
3.1	<b>Kegiatan</b> Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten
3.2	<b>Kegiatan</b> Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota
3.3	<b>Kegiatan</b> Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
4	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN *</b>
4.1	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota *

No	Program dan Kegiatan
<b>Urusan Pemerintahan Wajib Yang Pelayanan Dasar</b> <b>Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian</b> <b>Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian</b>	
5	<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>
5.1	<b>Kegiatan</b> Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

**Tabel 1.43**  
**Program dan Kegiatan**  
**Dinas Koperasi, Usaha, Mikro, Perdagangan dan Perindustrian**  
**Kabupaten Bintan Tahun 2021**

No	Uraian Program dan Kegiatan
<b>Urusan Pemerintahan Pilihan</b> <b>Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian</b> <b>Dinas Koperasi, Usaha, Mikro, Perdagangan dan Perindustrian</b>	
1.	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>
	<b>Kegiatan</b>
1.1.	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
2.	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>
	<b>Kegiatan</b>
2.1.	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota

**Tabel 1.44**  
**Program dan Kegiatan**  
**Dinas Koperasi, Usaha, Mikro, Perdagangan dan Perindustrian**  
**Kabupaten Bintan Tahun 2021**

No	Program dan Kegiatan
<b>Urusan Pemerintahan Pilihan</b> <b>Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan</b> <b>Dinas Koperasi, Usaha, Mikro, Perdagangan dan Perindustrian</b>	
1.	<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>
	<b>Kegiatan</b>
1.1.	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
2.	<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>
	<b>Kegiatan</b>
2.1.	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
3.	<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>
	<b>Kegiatan</b>
3.1.	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

**Tabel 1.45**  
**Program dan Kegiatan**  
**Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021**

No	Program dan Kegiatan
<b>Unsur Pemerintahan Fungsi Penunjang</b> <b>Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Pemerintahan</b> <b>Sekretariat Daerah</b>	
1	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>
1.1	<b>Kegiatan</b> Administrasi Tata Pemerintahan
1.2	<b>Kegiatan</b> Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
1.3	<b>Kegiatan</b> Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
1.4	<b>Kegiatan</b> Fasilitasi Kerjasama Daerah
2	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>
2.1	<b>Kegiatan</b> Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
2.2	<b>Kegiatan</b> Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
2.3	<b>Kegiatan</b> Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
3	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN</b>
3.1	<b>Kegiatan</b> Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama
3.2	<b>Kegiatan</b> Monitoring dan Evaluasi Kewilayahan Perbatasan

**Tabel 1.46**  
**Program dan Kegiatan**  
**Sekretariat DPRD Kabupaten Bintan Tahun 2021**

No	Program & Kegiatan
<b>Unsur Pemerintahan Fungsi Penunjang</b> <b>Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Pemerintahan</b> <b>Sekretariat DPRD</b>	
1.	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>
1.1	<b>Kegiatan</b> Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
1.2.	<b>Kegiatan</b> Pembahasan Kebijakan Anggaran
1.3	<b>Kegiatan</b> Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
1.4	<b>Kegiatan</b> Peningkatan Kapasitas DPRD
1.5	<b>Kegiatan</b> Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
1.6	<b>Kegiatan</b> Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
1.7	<b>Kegiatan</b> Fasilitasi Tugas DPRD

**Tabel 1.47**  
**Program dan Kegiatan**  
**Kecamatan Bintang Timur Kabupaten Bintang Tahun 2021**

No	Program dan Kegiatan
<b>Urusan Pemerintahan Umum</b> <b>Urusan Pemerintahan Bidang Kecamatan Bintang Timur</b>	
1.	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>
	<b>Kegiatan</b>
1.1.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
1.2.	<b>Kegiatan</b> Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
2.	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>
2.1.	<b>Kegiatan</b> Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
2.2.	<b>Kegiatan</b> Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
3.	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>
3.1.	<b>Kegiatan</b> Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
4.	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>
4.1.	<b>Kegiatan</b> Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
5.	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>
5.1.	<b>Kegiatan</b> Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
6.	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>
6.1.	<b>Kegiatan</b> Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>
7.1.	<b>Kegiatan</b> Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
8.	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>
8.1.	<b>Kegiatan</b> Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

**Tabel 1.48**  
**Program dan Kegiatan**  
**Kecamatan Bintang Pesisir Kabupaten Bintang Tahun 2021**

No	Program dan Kegiatan
<b>Urusan Pemerintahan Umum</b> <b>Urusan Pemerintahan Bidang Kecamatan Bintang Pesisir</b>	
1	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>
	<b>Kegiatan</b>
1.1.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
1.2.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
2.	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>
	<b>Kegiatan</b>
2.1.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
3.	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>
	<b>Kegiatan</b>
3.1.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
4.	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>
	<b>Kegiatan</b>
4.1.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

**Tabel 1.49**  
**Program dan Kegiatan**  
**Kecamatan Bintang Utara Kabupaten Bintang Tahun 2021**

No	Program dan Kegiatan
<b>Urusan Pemerintahan Umum</b> <b>Urusan Pemerintahan Bidang Kecamatan Bintang Utara</b>	
1	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>
	<b>Kegiatan</b>
1.1.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
1.2.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
2	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>
	<b>Kegiatan</b>
2.1	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
3.	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>

No	Program dan Kegiatan
<b>Urusan Pemerintahan Umum</b> <b>Urusan Pemerintahan Bidang Kecamatan Bintang Utara</b>	
3.1.	<b>Kegiatan</b> Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
4.	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>
4.1.	<b>Kegiatan</b> Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
5.	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>
5.1.	<b>Kegiatan</b> Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
5.2.	<b>Kegiatan</b> Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
6.	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>
6.1.	<b>Kegiatan</b> Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
6.2.	<b>Kegiatan</b> Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
7.	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>
7.1.	<b>Kegiatan</b> Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.2.	<b>Kegiatan</b> Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
8.	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>
8.1.	<b>Kegiatan</b> Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
8.2.	<b>Kegiatan</b> Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

**Tabel 1.50**  
**Program dan Kegiatan**  
**Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintang Tahun 2021**

No	Uraian Program & Kegiatan
<b>Urusan Pemerintahan Umum</b> <b>Urusan Pemerintahan Kecamatan Gunung Kijang</b>	
1.	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>
1.1.	<b>Kegiatan</b> Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
1.2.	<b>Kegiatan</b> Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

No	Uraian Program & Kegiatan
<b>Urusan Pemerintahan Umum</b> <b>Urusan Pemerintahan Kecamatan Gunung Kijang</b>	
2.	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>
2.1.	<b>Kegiatan</b> Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
2.2	<b>Kegiatan</b> Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
2.3	<b>Kegiatan</b> Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
3	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>
3.1	<b>Kegiatan</b> Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
4	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>
4.1	<b>Kegiatan</b> Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
5	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>
5.1	<b>Kegiatan</b> Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

**Tabel 1.51**  
**Program dan Kegiatan**  
**Kecamatan Mantang Kabupaten Bintang Tahun 2021**

No	Program dan Kegiatan
<b>Urusan Pemerintahan Umum</b> <b>Urusan Pemerintahan kecamatan Mantang</b>	
1.	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>
1.1.	<b>Kegiatan</b> Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
1.2	<b>Kegiatan</b> Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
2.	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>
2.1.	<b>Kegiatan</b> Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
3	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>
3.1	<b>Kegiatan</b> Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
4	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>
4.1	<b>Kegiatan</b>



No	Program dan Kegiatan
<b>Urusan Pemerintahan Umum</b> <b>Urusan Pemerintahan kecamatan Mantang</b>	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

**Tabel 1.52**  
**Program dan Kegiatan**  
**Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan Tahun**  
**2021**

No	Program dan Kegiatan
<b>Urusan Pemerintahan Umum</b> <b>Urusan Pemerintahan Kecamatan Seri Kuala Lobam</b>	
1.	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>
	<b>Kegiatan</b>
1.1.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
1.2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
2.	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>
2.1.	<b>Kegiatan</b> Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
2.2.	<b>Kegiatan</b> Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
3	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>
	<b>Kegiatan</b>
3.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
4	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>
	<b>Kegiatan</b>
4.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
5.	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>
5.1.	<b>Kegiatan</b> Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
6.	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>
	<b>Kegiatan</b>
6.1.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

**Tabel 1.53**  
**Program dan Kegiatan**  
**Kecamatan Tambelan Kabupaten Bintang Tahun 2021**

No	Program dan Kegiatan
<b>Urusan Pemerintahan Umum</b> <b>Urusan Pemerintahan Bidang Kecamatan Tambelan</b>	
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>
	<b>Kegiatan</b>
1.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
1.2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
<b>2</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>
2.1	<b>Kegiatan</b> Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
<b>3</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>
3.1	<b>Kegiatan</b> Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
<b>4</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>
4.1	<b>Kegiatan</b> Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
<b>5</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>
5.1	<b>Kegiatan</b> Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

**Tabel 1.54**  
**Program dan Kegiatan**  
**Kecamatan Teluk Bintang Kabupaten Bintang Tahun 2021**

No	Program dan Kegiatan
<b>Urusan Pemerintahan Umum</b> <b>Urusan Pemerintahan Bidang Kecamatan Teluk Bintang</b>	
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>
1.1	<b>Kegiatan</b> Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
1.2	<b>Kegiatan</b> Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

No	Program dan Kegiatan
2	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>
2.1	<b>Kegiatan</b> Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
3	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>
3.1	<b>Kegiatan</b> Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
4	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>
4.1	<b>Kegiatan</b> Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
5	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>
5.1	<b>Kegiatan</b> Kegiatan pemberdayaan kelurahan

**Tabel 1.55**  
**Program dan Kegiatan**  
**Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintang Tahun 2021**

No	Program dan Kegiatan
<b>Urusan Pemerintahan Umum</b> <b>Urusan Pemerintahan Bidang Kecamatan Teluk Sebong</b>	
1	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>
1.1	<b>Kegiatan</b> Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
1.2	<b>Kegiatan</b> Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
2	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>
2.1	<b>Kegiatan</b> Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
2.2	<b>Kegiatan</b> Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
2.3	<b>Kegiatan</b> Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
3	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>
3.1	<b>Kegiatan</b> Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

No	Program dan Kegiatan
4	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>
4.1	<b>Kegiatan</b> Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
5	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>
5.1	<b>Kegiatan</b> Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

**Tabel 1.56**  
**Program dan Kegiatan**  
**Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintang Tahun 2021**

No	Program dan Kegiatan
<b>Urusan Pemerintahan Umum</b> <b>Urusan Pemerintahan Bidang Kecamatan Toapaya</b>	
1	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>
1.1	<b>Kegiatan</b> Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan
1.2	<b>Kegiatan</b> Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan
2	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>
2.1	<b>Kegiatan</b> Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
2.2	<b>Kegiatan</b> Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
3	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>
3.1	<b>Kegiatan</b> Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum
4	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>
4.1	<b>Kegiatan</b> Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
5	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>
5.1	<b>Kegiatan</b> Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

**Tabel 1.57**  
**Program dan Kegiatan**  
**Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021**

No	Program dan Kegiatan
<b>Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang</b> <b>Urusan Pemerintahan Bidang Pengawasan</b> <b>Inspektorat Daerah</b>	
1.	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>
1.1.	<b>Kegiatan</b> Penyelenggaraan Pengawasan Internal
1.2.	<b>Kegiatan</b> Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
2.	<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>
2.1.	<b>Kegiatan</b> Pendampingan dan Asistensi

**Tabel 1.58**  
**Program dan Kegiatan**  
**Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah**  
**Kabupaten Bintan Tahun 2021**

No	Program dan Kegiatan
<b>Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar</b> <b>Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan</b> <b>Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah</b>	
1	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>
1.1	<b>Kegiatan</b> Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
1.2	<b>Kegiatan</b> Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
1.3	<b>Kegiatan</b> Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
2	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>
2.1	<b>Kegiatan</b> Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
2.2	<b>Kegiatan</b> Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
2.3	<b>Kegiatan</b> Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

**Tabel 1.59**  
**Program dan Kegiatan**  
**Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan Tahun**  
**2021**

No	Program dan Kegiatan
<b>Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang</b> <b>Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan</b> <b>Badan Keuangan dan Aset Daerah</b>	
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>
1.1	<b>Kegiatan</b> Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
1.2	<b>Kegiatan</b> Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
1.3	<b>Kegiatan</b> Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
1.4	<b>Kegiatan</b> Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1.5	<b>Kegiatan</b> Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>
2.1	<b>Kegiatan</b> Pengelolaan Barang Milik Daerah

**Tabel 1.60**  
**Program dan Kegiatan**  
**Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021**

No	Program dan Kegiatan
<b>Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang</b> <b>Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan</b> <b>Badan Pendapatan Daerah</b>	
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>
1.1	<b>Kegiatan</b> Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah

**Tabel 1.61**  
**Program dan Kegiatan**  
**Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia**  
**Kabupaten Bintan Tahun 2021**

No	Program dan Kegiatan
<b>Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang</b> <b>Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian</b> <b>Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia</b>	
<b>1.</b>	<b>PRORAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>
1.1.	<b>Kegiatan</b> Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN

No	Program dan Kegiatan
1.2.	<b>Kegiatan</b> Mutasi dan Promosi ASN
1.3.	<b>Kegiatan</b> Pengembangan Kompetensi ASN
1.4.	<b>Kegiatan</b> Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

**Tabel 1.62**  
**Program dan Kegiatan**  
**Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah**  
**Kabupaten Bintan Tahun 2021**

No	Program dan Kegiatan
<b>Urusan Pemerintahan Penunjang</b>	
<b>Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pembangunan</b>	
<b>Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah</b>	
1	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>
1.1	<b>Kegiatan</b> Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
1.2	<b>Kegiatan</b> Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
1.3	<b>Kegiatan</b> Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
1.4	<b>Kegiatan</b> Pengembangan Inovasi dan Teknologi

### 1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, pengertian Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Adapun jenis pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten, meliputi: SPM Bidang Pendidikan; SPM

Bidang Kesehatan; SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan SPM Bidang Sosial.

Komitmen Pemerintah Kabupaten Bintan dalam penerapan SPM dapat dilihat pada bab IV LPPD ini.

**Tabel 1.63**  
**SPM Kabupaten Bintan 2021**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program Perangkat Daerah Terkait Pelaksanaan Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Perangkat Daerah
<b>I. SPM Bidang Pendidikan</b>				
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah warga negara Usia 5- 6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Dinas Pendidikan
2	Pendidikan Dasar	Pengelolaan Pendidikan Dasar; dan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah warga negara usia 7 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	Dinas Pendidikan
3	Pendidikan Kesetaraan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Dinas Pendidikan
<b>II. SPM Bidang Kesehatan</b>				
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Program Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	Dinas Kesehatan



No	Jenis Pelayanan Dasar	Program Perangkat Daerah Terkait Pelaksanaan Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Perangkat Daerah
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Program Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	Dinas Kesehatan
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Program Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	Dinas Kesehatan
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Program Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	Dinas Kesehatan
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Program Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	Dinas Kesehatan
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Program Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	Dinas Kesehatan
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Program Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	Dinas Kesehatan
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Program Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	Dinas Kesehatan
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Program Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan	Dinas Kesehatan
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan	Program Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat	Dinas Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program Perangkat Daerah Terkait Pelaksanaan Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Perangkat Daerah
	Gangguan Jiwa Berat	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	yang terlayani kesehatan	
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Program Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	Dinas Kesehatan
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia ( <i>Human Immunodeficiency Virus</i> )	Program Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia ( <i>Human Immunodeficiency Virus</i> ) yang mendapatkan layanan kesehatan	Dinas Kesehatan
<b>III. SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>				
1	Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah yang mendapatkan layanan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
<b>IV. SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</b>				
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten		Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program		Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program Perangkat Daerah Terkait Pelaksanaan Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Perangkat Daerah
	Pemerintah Daerah Kabupaten		rumah yang layak huni	
<b>V. SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>				
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	Satpol pp
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Program Penanggulangan Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	BPBD
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Program Penanggulangan Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	BPBD
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Penanggulangan Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	BPBD
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Penanggulangan Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	BPBD
<b>VI. SPM Bidang Sosial</b>				
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti	Program Rehabilitasi Sosial	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Dinas Sosial
2	Rehabilitasi Sosial Dasar	Program Rehabilitasi Sosial	Jumlah anak telantar yang memperoleh	Dinas Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program Perangkat Daerah Terkait Pelaksanaan Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Perangkat Daerah
	Anak Telantar di Luar Panti		rehabilitasi sosial diluar panti	
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Program Rehabilitasi Sosial	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Dinas Sosial
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Program Rehabilitasi Sosial	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	Dinas Sosial
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat Tanggap dan Paska Bencana bagi Korban Bencana Kabupaten	Program Penanganan Bencana Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	Dinas Sosial



# LPPD 2021

LAPORAN  
PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH  
KABUPATEN BINTAN

## BAB II

### CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN





## B A B II

# CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Pada bab ini akan menjabarkan perkembangan kinerja penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Bintan pada tahun 2021 yang meliputi kinerja makro, pelaksanaan kinerja urusan pemerintahan dan akuntabilitas pemerintah daerah. Dalam optimalisasi pencapaian kinerja ini seluruh komponen daerah memiliki peran penting yang teraktualisasi pada pelaksanaan pencapaian visi dan misi daerah. Penjabaran secara komprehensif ini akan menjadi tolak ukur pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan selanjutnya.

## **2.1 Capaian Kinerja Makro**

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah meliputi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD), dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD). PP Nomor 13 Tahun 2019 juga menjelaskan bahwa LPPD, LKPJ, RLPPD, serta EPPD disusun berdasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, akurasi, dan objektif.

LPPD sendiri adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran. LPPD memuat satu kesatuan hasil pengukuran kinerja Pemerintah Daerah yang terdiri atas capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan.

Menurut PP Nomor 13 Tahun 2019, capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terdiri atas capaian kinerja makro, capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, dan capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah. Sementara capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan, terdiri atas capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah kabupaten/kota dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah provinsi.

Sebagaimana diketahui, bagian pertama yang perlu dilaporkan dalam LPPD adalah capaian kinerja makro. Capaian kinerja makro

merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Capaian kinerja makro meliputi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), angka kemiskinan, angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, dan ketimpangan pendapatan.

Capaian kinerja makro Kabupaten Bintan Tahun 2020 menggunakan indikator kinerja makro sebagaimana Tabel 2.1. sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Capaian Kinerja Makro**

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2020	Capaian Kinerja Tahun 2021	Perubahan (%)
1	Indeks Pembangunan Manusia	74,13	74,57	0,59%
2	Angka Kemiskinan	6,36	6,42	0,94%
3	Angka Pengangguran	8,86	8,62	2,71%
4	Pertumbuhan Ekonomi	-4,28	0,23	105,37%
5	Pendapatan Per Kapita	86,49 Juta	86,49 Juta	0%
6	Ketimpangan Pendapatan	0,31	0,27	12,90%

Sumber: BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2022

### **Indeks Pembangunan Manusia**

Upaya pemerintah Kabupaten Bintan dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dapat tergambarkan melalui kondisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan indeks komposit mencakup tiga bidang pembangunan manusia yang dilihat dari kualitas fisik dan non fisik, meliputi indeks pendidikan, indeks kesehatan, dan indeks ekonomi. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas



hidup manusia (masyarakat/penduduk), serta merupakan data strategis sebagai ukuran kinerja pemerintah.

**Gambar 2.1.**  
**Potret Pembangunan Manusia di Kabupaten Bintan 2021**



Sumber: Diolah dari Data Makro Capaian Indikator Pembangunan Kabupaten Bintan-BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2022

Perkembangan capaian IPM Kabupaten Bintan Bintan pada tahun 2021 meningkat menjadi 74,57 dari sebelumnya 74,13 di tahun 2020. Tren positif ini terus dijaga oleh Pemerintah Kabupaten Bintan selama lebih dari 8 (delapan) tahun berturut-turut berdasarkan pertumbuhan capaian IPM. Pencapaian IPM ini dilakukan dengan strategi dan kebijakan pembangunan berbagai bidang-bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi sesuai dengan agenda “sejahtera” dan didukung oleh peran serta dari seluruh lapisan di masyarakat dengan mengutamakan kesetaraan gender.

Tingkat pencapaian pembangunan manusia diukur melalui indikator-indikator IPM yang merupakan indeks gabungan dari tiga komponen yang terdiri dari bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi yang mengindikasikan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Bintan. Jika ketiga komponen tersebut memiliki nilai yang baik, tentunya sumber daya manusia secara umum juga memiliki kualitas yang baik dengan mengacu pada kategori IPM yang telah ditetapkan. IPM dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, yakni:  $IPM < 60$  (rendah),  $60 \leq IPM < 70$  (sedang),  $70 \leq IPM < 80$  (tinggi),  $IPM \geq 80$  (sangat tinggi). Bagi suatu wilayah, angka IPM yang diperoleh menggambarkan kemajuan pembangunan manusia di daerah tersebut dan merupakan tantangan yang harus dihadapi serta upaya apa yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia.

Secara umum, pembangunan manusia Kabupaten Bintan terus menunjukkan perkembangan positif mulai dari periode 2016 hingga 2021 dengan kenaikan selama tahun tersebut sebesar 2,19 poin indeks. IPM Kabupaten Bintan meningkat dari 72,38 pada tahun 2014 menjadi 74,57 pada tahun 2021. Selama periode tersebut, IPM Kabupaten Bintan rata-rata tumbuh sebesar 0,56 persen per tahun. Pada periode 2020 hingga 2021, IPM Kabupaten Bintan tumbuh 0,44 persen. Pertumbuhan pada periode tersebut lebih baik bila dibandingkan dengan kenaikan pada periode 2019 hingga 2020.

Oleh karena itu, peningkatan capaian IPM tidak terlepas dari peningkatan setiap komponennya. Seiring dengan meningkatnya angka IPM, indeks masing-masing komponen IPM juga menunjukkan pertumbuhan setiap tahunnya sebagaimana terdapat pada pada Tabel:

**Tabel 2.2**  
**Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten**  
**Bintan menurut Komponen Tahun 2016-2021**

Komponen IPM		Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	AHH (Tahun)	70,02	70,12	70,21	70,30	70,38	70,46
2	HLS (Tahun)	12,27	12,6	12,75	12,95	13,10	13,24
3	RLS (Tahun)	8,33	8,34	8,35	8,36	8,44	8,67
4	PPP (Rp. 000)	13.667	13.828	14.256	14.730	14.482	14.393
<b>IPM</b>		<b>72,38</b>	<b>72,91</b>	<b>73,41</b>	<b>73,98</b>	<b>74,13</b>	<b>74,57</b>
<b>Peningkatan IPM (%)</b>		<b>0,64</b>	<b>0,73</b>	<b>0,69</b>	<b>0,78</b>	<b>0,20</b>	<b>0,44</b>

*Sumber: BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2016-2022*

Selama periode 5 tahun pembangunan daerah, dari tahun 2016 hingga 2021, IPM Kabupaten Bintan menunjukkan kemajuan yang besar dan pembangunannya berstatus “tinggi”. Jika dibandingkan dengan Kabupaten lain, IPM Kabupaten Bintan berada pada posisi ketiga teratas dari tujuh Kabupaten/Kota.

Disamping itu, terkait dengan peningkatan Angka Harapan Hidup (AHH) meningkat menjadi 70,46 tahun di tahun 2021 dari sebelumnya pada tahun 2020 sebesar 70,38 tahun, dapat merepresentasikan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Bintan yang semakin baik yang terlihat dari panjang umur dan hidup sehat. Peningkatan pada Angka Harapan Sekolah (HLS) pada tahun 2021 menunjukkan pertumbuhan menjadi 13,26 Tahun dari sebelumnya 13,10 tahun. Hal ini juga diikuti komponen Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) pada tahun 2021 menjadi 8,67 tahun dari sebelumnya 8,44 tahun pada tahun 2020. Tiga komponen tersebut menjadi gambaran positif bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah dan tamat dari sekolah, yang pada akhirnya

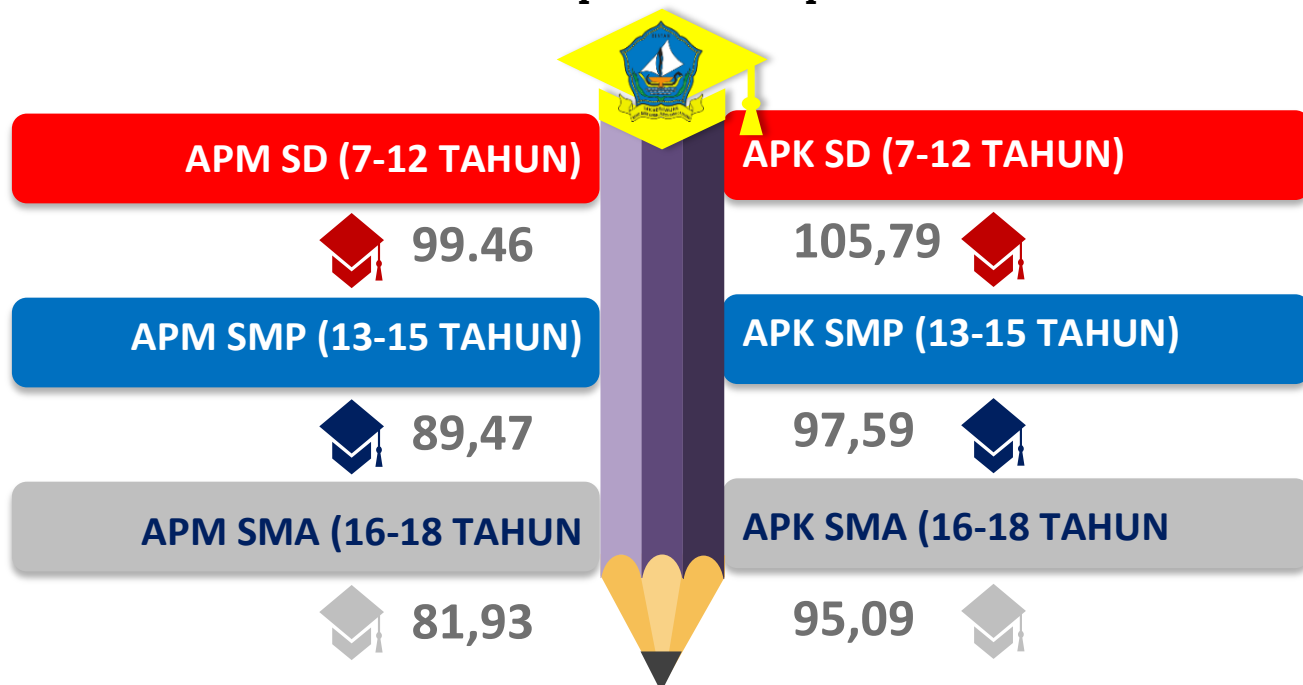
memberikan pengaruh positif terhadap kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Bintan.

Meskipun begitu, Kabupaten Bintan masih tetap berpotensi untuk meningkatkan angka IPM melalui berbagai usaha secara simultan, baik melalui pendekatan sektoral pendidikan, kesehatan dan ekonomi, maupun secara terintegrasi melalui pemanfaatan pada sisi anggaran pemerintah, partisipasi swadaya masyarakat serta peran serta dunia usaha, atau kemitraan antara pemerintah, masyarakat yang pada gilirannya dapat meningkatkan capaian IPM menjadi sangat tinggi serta meningkatkan kondisi pembangunan manusia. Arah terhadap program-program pembangunan manusia mesti ditempatkan sebagai tujuan utama dari pembangunan daerah yang berkualitas. Pada sisi lainnya, pencapaian terkait dengan pendidikan di Kabupaten Bintan, khususnya untuk Angka Melek Huruf/AMH (penduduk usia 15 tahun ke atas) pada tahun 2021 berdasarkan rilis BPS Kabupaten Bintan adalah sebesar 97,06%.

Selanjutnya, perkembangan pendidikan di Kabupaten Bintan dapat dilihat dari perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Bintan yang menunjukkan peningkatan sepanjang tahun 2021 sebagaimana terdapat pada gambar di bawah ini:

**Gambar 2.2**

**APM dan APK di Kabupaten Bintan pada Tahun 2021**



*Sumber: BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2022*

Untuk APM SD dengan rentang usia (7-12 tahun), SMP (13-15 tahun) kemudian SMA (16-18 tahun) dorongan Pemerintah Kabupaten Bintan kepada kelompok proporsi penduduk yang masih bersekolah tidak dapat dipungkiri bukan hanya menjadi skala prioritas di dalam pencapaian tujuan daerah namun menjadi tanggung jawab serta motivasi tersendiri pimpinan daerah Kabupaten Bintan di dalam mencerdaskan anak-anak daerah agar unggul dan berdaya saing secara intelektualitas maupun juga pada dunia kerja kedepannya. Pencapaian APM dan APK pada tahun 2021 Kabupaten Bintan akan menjadi titik tolak bagi tahap perkembangan kinerja pendidikan.

**Kemiskinan**

Dari berbagai upaya pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, pemerintahan dan sosial kemasyarakatan telah

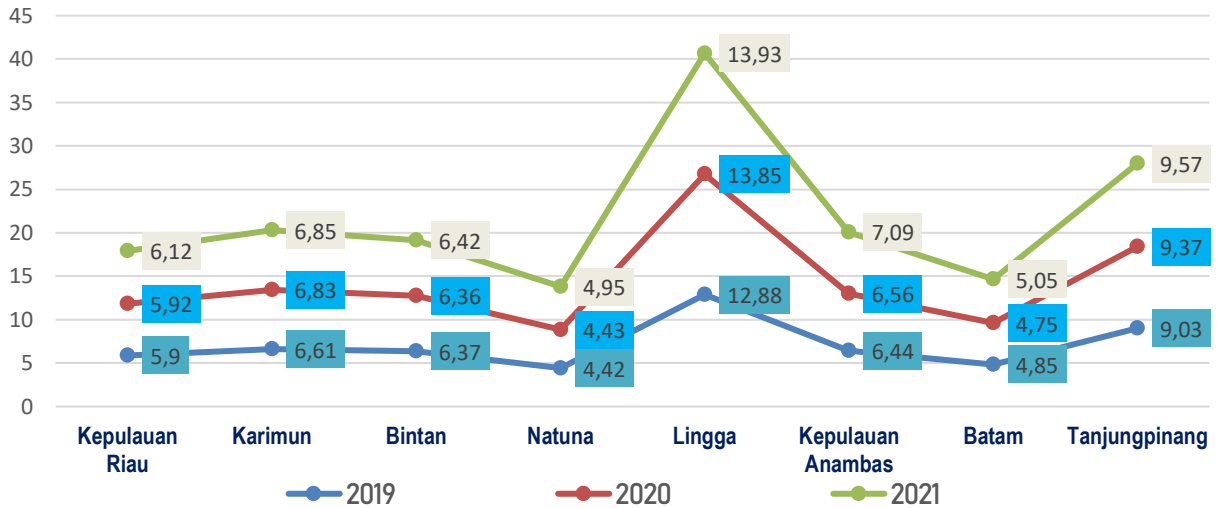
menunjukkan manfaat (*outcome*) dalam menekan angka kemiskinan. Kondisi pada tahun 2021 ini ditengarai merupakan efek simultan dari pandemi Covid-19 yang mengharuskan pembatasan pergerakan sehingga menyebabkan penurunan kondisi perekonomian, penduduk kehilangan mata pencaharian utama, dan perbaikan kondisi ekonomi rumah tangga masih berlanjut.

Kondisi kemiskinan di Kabupaten Bintan sepanjang tahun 2021 dipengaruhi juga kondisi pemulihan ekonomi yang masih banyak terdampak. Pada tahun 2021, angka penduduk miskin berjumlah 10.540 jiwa. Hal ini, ditambah dengan gejolak ekonomi global, memberikan dampak negatif terhadap kondisi makro ekonomi nasional-regional dan kondisi sosial-ekonomi kemasyarakatan. Selain berdampak terhadap laju pertumbuhan ekonomi, dampak negatif pandemi Covid-19 juga mempengaruhi perkembangan struktur PDRB serta memberikan efek domino terhadap kondisi ekonomi riil masyarakat.

Namun begitu, penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bintan merupakan sinergitas kelembagaan multisektoral. Hal ini dapat terlihat dari persentase penduduk miskin yang tidak mengalami kenaikan signifikan selama pandemi Covid-19. Berdasarkan rilis data dari Badan Pusat Statistik, persentase penduduk miskin di Kabupaten Bintan masih dapat ditekan berkat upaya pemerintah melalui intervensi kebijakan tingkat lokal sehingga jumlahnya tidak mengalami lonjakan tajam.

**Grafik 2.1**

**Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota dan Provinsi Se-Kepulauan Riau Tahun 2019-2021**



Sumber: BPS Kepulauan Riau, Tahun 2020-2022; BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2020-2022

Upaya optimal dari Pemerintah Kabupaten Bintan dalam menekan angka kemiskinan sebelum dan pada saat pandemi begitu besar tantangannya, terutama akibat dampak dari pandemi Covid-19. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Bintan terus berupaya untuk menekan jumlah penduduk miskin melalui program dan kegiatan baik itu dari pusat maupun kebijakan strategis daerah yang menyasar langsung ke target penduduk miskin.

Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota termasuk Provinsi Kepulauan Riau, maka Kabupaten Bintan dapat dikategorikan berada pada tempat terbaik kedua dalam menekan lonjakan penduduk miskin. Seluruh upaya pada tahun 2021 untuk intervensi kemiskinan daerah oleh Kabupaten Bintan lebih baik daripada daerah lain di Provinsi Kepulauan Riau.

Terobosan menekan laju penduduk yang terdampak agar tidak masuk ke dalam lingkaran kemiskinan adalah dengan usaha pemulihan melalui beragam kebijakan maupun bantuan sosial serta asistensi ekonomi kerakyatan kepada masyarakat. Intervensi kebijakan ini berkolaborasi antara pemerintah pusat serta pemerintah provinsi sekaligus pengalokasian dari sumber pembiayaan APBD Kabupaten Bintan sejak 2020 hingga tahun 2021. Upaya-upaya maksimal ini dilakukan dengan:

- a. Pada tahun 2021 penerima bantuan BLT Lansia yang tersalurkan sebanyak 4.200 lansia, data diverifikasi dan divalidasi oleh 54 pendamping lansia yang tersebar di 51 Desa/Kelurahan.
- b. Sumber pembiayaan merupakan alokasi yang bersumber dari APBD Kabupaten Bintan dengan total anggaran senilai Rp 3,780 miliar.
- c. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan sasaran warga terdampak Covid-19 (BLT Tunai) dengan jumlah sasaran Kepala Keluarga (KK) pada tahun 2020 sebanyak 30.405 KK dengan total nilai Rp. 51.921.600.000 (Milyar) yang bersumber dari APBD Kabupaten Bintan.
- d. Bantuan Sosial kepada Keluarga Miskin melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Pangan (Sembako)/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Pangan Non Tunai - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (BPNT-PPKM) kepada 17.715 Keluarga.
- e. Bantuan Usaha melalui Usaha Ekonomi Produktif dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) kepada 144 KPM.
- f. Optimalisasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) kepada 1.057 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)



dengan total nilai BLT DD dalam satu tahun sebesar Rp. 4.075 Miliar.

- g. Fasilitasi indentifikasi dan pendaftaran bantuan produktif usaha mikro (BPUM).
- h. Pemberian BPUM pada tahun 2021 untuk di Kabupaten Bintang diberikan kepada 6.463 UMKM dengan total Rp. 7,7 Miliar.

Secara umum, indikator makro kemiskinan Kabupaten Bintang dapat dilihat dari empat indikator berikut, yaitu tingkat kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan, indeks keparahan kemiskinan, serta garis kemiskinan:

**Gambar 2.3**  
**Indikator Makro Kemiskinan Kabupaten Bintang**  
**Tahun 2019-2021**

INDIKATOR	2019	2020	2021
GARIS KEMISKINAN (Rp/Kapita/Bulan)	384.396	417.654	424.426
INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN	0.63	0.81	0.65
INDEKS KEPARAHAN KEMISKINAN	0.09	0.17	0.11
TINGKAT KEMISKINAN	6.37	6.36	6.42
Jumlah penduduk miskin pada tahun 2021 di Kabupaten Bintang 10.5 Ribu orang dari kondisi sebelumnya 10.2 Ribu orang di tahun 2020. Dampak massive pandemic covid-19 masih begitu besar terhadap situasi pemulihan ekonomi serta sector lapangan usaha utama penopang ketenagakerjaan di Kabupaten Bintang dan perkembangan dari kemampuan belanja dan pendapatan asli masyarakat.			

Sumber: Diolah Bintang dalam Angka 2022-BPS Kabupaten Bintang, Tahun 2021-2022

Pemerintah Kabupaten Bintang, dengan dukungan legislatif serta seluruh stakeholder daerah dan bersama komponen masyarakat, terus berupaya untuk menekan jumlah penduduk miskin melalui terobosan program dan kegiatan baik itu fasilitasi dari pemerintah

pusat maupun kebijakan strategis daerah yang menysasar langsung ke target penduduk miskin. Seluruh upaya ini dapat terlaksana di Kabupaten Bintan karena efek pandemi Covid-19 merupakan *concern* bersama yang mesti diperhatikan agar mengurangi kerentanan sosial ditengah masyarakat.

Adanya stimulus ekonomi dan bantuan sosial selama pandemi Covid-19 meringankan beban rumah tangga dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah Kabupaten Bintan berupaya melakukan perluasan kebijakan bantuan sosial yang sedang berjalan saat ini dari segi nominal, jangkauan, dan penyaluran yang lebih tepat sasaran. Sinergi BLT yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan ini didukung dengan program pemerintah pusat seperti pemberian keringanan pembayaran listrik golongan 450 VA dan 900 VA, memperluas jangkauan dan menaikkan nominal bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), serta memberikan Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Bantuan Sosial Sembako (BSS) bagi keluarga bukan penerima PKH dan BPNT.

Aktualisasi sinergitas *government to government* (G2G) daripada Pemerintah Kabupaten Bintan bersama Provinsi Kepulauan Riau maupun Pemerintah Pusat terus dilakukan dalam upaya penting untuk menekan angka kemiskinan melalui program-program percepatan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan dengan (1) mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin; (2) meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin; (3) mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil (UKM); (4) mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

## Ketenagakerjaan

Kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Bintan pada tahun 2021 mengalami perkembangan positif dibandingkan posisi tahun 2020. Hal ini ditunjukkan dari penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada periode 2021 yang menurun menjadi 8,62 %. Seiring dengan hal tersebut posisi penduduk usia kerja di Kabupaten Bintan terdapat 69.950 jiwa atau 91,38 % merupakan kategori bekerja dan 6.601 masuk dalam kategori pengangguran terbuka. Sedangkan untuk jumlah angkatan kerja di Kabupaten Bintan berjumlah 76.551 jiwa dan bukan angkatan kerja sebesar 44.586 jiwa (BPS Bintan, 2022).

Penurunan TPT pada tahun 2021, didorong oleh terbukanya kesempatan kerja dari sektor swasta maupun aktivitas belanja pemerintah untuk perekonomian kerakyatan. Proporsi pekerja di sektor usaha yang terdampak Covid-19 pada tahun 2021 dapat ditekan dengan adanya bantuan BPUM sebagai *social safety net* serta stimulan Pemerintah Kabupaten Bintan melalui optimalisasi bantuan daerah, provinsi, maupun pemerintah pusat. Adapun indikator ketenagakerjaan Kabupaten Bintan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.3**  
**Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Bintan**  
**Tahun 2021**

No.	Indikator	Satuan	Tahun 2021
1	Penduduk Usia Kerja (15 tahun keatas)	Orang	122.519
2	Penduduk Angkatan Kerja	Orang	77.428
3	Penduduk Bekerja (15 tahun keatas)	Orang	69.950
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	63,2

No.	Indikator	Satuan	Tahun 2021
5	Pengangguran terbuka	Orang	6676
6	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	8,62

Sumber: BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2022

Peningkatan angkatan kerja yang bekerja disektor formal, dari tahun ke tahun tetap menjadi titik perhatian pemerintah dengan menggandeng sektor swasta dalam rangka penyerapan tenaga kerja. Usaha ini dilakukan dengan inovasi daerah Penempatan Tenaga Kerja Lokal Terintegrasi (PENTALOGI) serta kerjasama Pemerintah Kabupaten Bintan bersama sektor usaha. Selain itu juga, untuk mendorong ekonomi kerakyatan, khususnya UMKM, adanya replikasi *business model* diikuti dengan penanaman modal bagi masyarakat ditambah menjaga iklim usaha.

Berkaitan dengan angka pencari kerja serta tingkat pengangguran terbuka, polarisasi pekerja sektor informal di era digital ini masih belum dapat seluruhnya teridentifikasi, ditambah lagi dengan pertumbuhan peralihan dari usaha konvensional seperti usaha mikro yang lebih mengandalkan sistem elektronik dalam mekanisme pemasaran produk. Dalam perkembangannya hal ini masih perlu dijangkau, terutama dalam hal indikator pendataan pemerintah. Penyediaan lapangan kerja merupakan sinergitas lintas OPD dan sektor industri dibawah arahan Kepala Daerah Pemerintah Kabupaten Bintan. Hal ini dilaksanakan secara berkelanjutan dalam rangka perluasan kesempatan kerja yang menjadi tugas pokok dan fungsi yang mesti terus dilakukan. Walaupun ditengah pandemi, Pemerintah Kabupaten Bintan terus mendorong pertumbuhan serapan tenaga kerja pada sektor industri pengolahan, pariwisata, makanan dan minuman, yang juga

berkontribusi terhadap pendapatan daerah serta menjadi lumbung penyerapan lapangan kerja lokal.

### **Perekonomian Daerah**

Salah satu indikator kinerja pembangunan suatu daerah diukur melalui indikator-indikator makro ekonomi. Pencapaian perekonomian suatu daerah merupakan gambaran dari prestasi pemerintahan daerah dalam memanfaatkan potensi yang ada di daerah tersebut, serta usaha dalam mengatasi kendala-kendala yang ada di daerah. Beberapa indikator makro pencapaian pembangunan ekonomi adalah: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Investasi, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dan tingkat inflasi.

Kondisi perkembangan ekonomi daerah pada tahun 2021 masih fluktuatif akibat pandemi Covid-19 serta usaha pemulihan ekonomi nasional maupun daerah. Kondisi global ini termasuk dampaknya yang dirasakan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan. Pandemi Covid-19 merupakan kejadian luar biasa yang membutuhkan respon kebijakan dan upaya penanganan yang luar biasa untuk memitigasi dampak distorsifnya terhadap berbagai aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi masyarakat. Semua negara di dunia, termasuk Indonesia berusaha sekuat tenaga dalam menghadapi dampak pandemi Covid-19 dan merespon dengan berbagai kebijakan penanganan.

Secara umum gambaran kondisi makro ekonomi pada tahun 2020-2021 di Kabupaten Bintan dapat dilihat pada tabel yang tertera dibawah ini:

**Tabel 2.4**  
**Kondisi Makro Ekonomi Kabupaten Bintan Tahun 2020-2021**

No.	Indikator	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021
1	PDRB ADHB <sup>1</sup>	Milyar Rupiah	20.743.70	21.251,13
2	PDRB ADHK <sup>1</sup>	Milyar Rupiah	13902,16	13.933,49
3	Realisasi Investasi <sup>2</sup>	Rupiah	18.975.363.093.573	1.550.497.032 USD (Rp. 22.237.228.437.353)
3.a	Nilai Investasi PMDN <sup>2</sup> (Realisasi)	Rupiah	2.913.308.756.011	1.128.417.048.837,-
3.b	Nilai Investasi PMA <sup>2</sup> (Realisasi)	USD	1.118.378.420 (Rp. 16,062,054,337,561.65)	1,469,777,067.90,- (Rp. 21.108.811.388.516)
4	Inflasi <sup>1</sup>	Persen	1.66	0,86
5	Pertumbuhan Ekonomi <sup>1</sup>	Persen	-4.20	0,23
6	Tingkat Pengangguran <sup>1</sup>	Persen	8.86	8,62

Sumber: <sup>1</sup>BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2021-2022 dan <sup>2</sup>DPMPTSP Kabupaten Bintan, Tahun 2021-2022

Dampak dari pandemi Covid-19, ditambah dengan fluktuasi kondisi ekonomi global mengakumulasi tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Bintan, seperti: perlambatan pertumbuhan ekonomi, menurunnya konsumsi rumah tangga, rendahnya daya beli masyarakat, menurunnya sektor UMKM, sampai dengan tidak tercapainya realisasi pendapatan dari sektor perpajakan. Akumulasi tantangan tersebut juga diperparah dengan kondisi beberapa sektor di Kabupaten Bintan yang terimbas pandemi Covid-19 serta masih dalam pemulihan. Meningkatnya kolaborasi antara sektor swasta dan program pemerintah untuk pemulihan ekonomi nasional sepanjang tahun 2021, diharapkan akan terus berlanjut kedepannya sehingga dapat memberikan efek positif bagi perekonomian Kabupaten Bintan.

Pencapaian realisasi investasi pada tahun 2021 adalah sebesar 1.550.497.032 USD (Rp. 22.237.228.437.353,-) dengan rincian: PMA sebesar Rp. 21.108.811.388.516,- dan PMDN sebesar Rp. 1.128.417.048.837,-. Realisasi kegiatan penanaman modal ini meningkat dari tahun 2020, yakni sebesar Rp. 18.975.363.093.573,-. Besaran realisasi ini dianggap sangat baik, terutama pada saat pandemi Covid-19 seperti yang saat ini sedang dihadapi oleh Kabupaten Bintan. Sebagian besar dari investasi tersebut bersumber dari realisasi investasi PT. BAI (KEK). Realisasi investasi tersebut merupakan sinyal positif di tengah kondisi guncangan ekonomi. Hal ini juga dikarenakan Pemerintah Kabupaten Bintan masih mendapatkan kepercayaan dari investor untuk tetap melakukan aktivitas penanaman modal.

Untuk sektor manufaktur dan perdagangan, diperkirakan mulai berproduksi secara normal dengan didukung oleh reformasi struktural melalui perbaikan regulasi dan birokrasi, khususnya melalui implementasi dari Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sektor-sektor yang terkena imbas pandemi Covid-19 yang dalam, seperti sector transportasi dan pariwisata, diperkirakan akan mulai bangkit pada tahun 2022.

Selanjutnya, PDRB ADHB adalah indikator yang dapat menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Adapun uraian perkembangan PDRB ADHB Kabupaten Bintan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.5**  
**Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bintan**  
**Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha**  
**(Miliar Rupiah) Tahun 2016-2021**

No.	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020*	2021**
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1052.65	1147.53	1231.32	1316.94	1430.74	1512,45
2	Pertambangan dan Penggalian	1833.19	1583.20	1313.73	1240.98	990.87	971,58
3	Industri Pengolahan	6515.20	7059.79	7657.43	8331.31	8379.23	8690,85
4	Pengadaan Listrik dan Gas	21.83	23.6	24.01	25.05	26.09	26,43
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9.35	10.44	11.43	12.20	12.72	12,95
6	Konstruksi	2853.20	3342.7	4067.02	4652.21	4665.07	4772,32
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1479.55	1629.63	1798.19	1967.03	1938.71	1980,38
8	Transportasi dan Pergudangan	378.72	409.42	445.21	486.05	447.06	468,45
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	863.35	1026.66	1164.88	1244.82	763.4	761,86
10	Informasi dan Komunikasi	193.81	208.69	226.17	245.97	249.69	250,59
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	268.59	306.58	321.86	340.64	339.69	340,13
12	Real Estate	184.52	201.28	216.52	229.94	238.72	239,85
13	Jasa Perusahaan	0.15	0.16	0.17	0.17	0.16	0,16
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	436.28	485.57	536.71	582.19	616.28	562,26
15	Jasa Pendidikan	320.52	348.07	368.23	389.73	396.43	402,19
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	155.26	167.76	181.28	202.2	217.16	226,49
17	Jasa lainnya	30.22	31.57	33.65	35.58	31.68	32,19
<b>PDRB ADHB (Miliar Rupiah)</b>		<b>16.596.40</b>	<b>17.982.66</b>	<b>19.597.81</b>	<b>21.303.01</b>	<b>20.743.70</b>	<b>21.251,13</b>

*Sumber: BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2022*



Berdasarkan data BPS, maka PDRB ADHB di Kabupaten Bintan pada tahun 2021 mencapai Rp. 21.251,13 (miliar Rupiah). Pertumbuhan ini menunjukkan perkembangan positif jika dibandingkan dengan PDRB ADHB tahun 2020, yaitu sebesar Rp. 20.743,70 (miliar Rupiah) yang diukur dari tujuh belas sektor lapangan usaha. Adapun kinerja sektor ekonomi pembentuk PDRB dapat terlihat dari Nilai PDRB yang besar sehingga menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar pula.

Kondisi pada tahun 2021, pada dasarnya dipengaruhi oleh sisi permintaan maupun juga ketersediaan pada 17 sektor lapangan usaha yang mengalami ragam perkembangan. Beberapa sektor dapat dikatakan dalam proses pemulihan dan menunjukkan pertumbuhan, namun tidak signifikan seperti tahun sebelumnya. Namun begitu, tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat perlambatan sebagai efek dari menurunnya permintaan pasar, produksi barang dan jasa, diikuti juga dengan pembatasan mobilitas orang dan barang di daerah selama pandemi Covid-19. Apalagi sesuai dengan target Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia pada saat mensosialisasikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, dalam Rancangan Rencana Induk Pengembangan (RIP) KPBPB Batam, Bintan dan Karimun (BBK), Kabupaten Bintan difokuskan pada sektor pariwisata, industri MRO, industri transportasi (alumina), pengolahan makanan, maritim *defense*, dan olahraga.

Selanjutnya, PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau pada setiap kategori dari tahun ke tahun. Adapun

kondisi PDRB ADHK Kabupaten Bintan pada tahun 2021 tertera pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.6**  
**Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bintan**  
**Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Lapangan Usaha**  
**(Miliar Rupiah) Tahun 2016-2021**

No	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020	2021**
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	758,67	818,85	838,93	865,83	914,27	933,66
2	Pertambangan dan Penggalian	1.537,93	1314,58	1068,11	957,67	760,84	667,28
3	Industri Pengolahan	4.868,47	5106,84	5356,75	5.590,14	5.488,02	5.587,47
4	Pengadaan Listrik dan Gas	18,70	20,00	19,91	20,30	20,88	21,15
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,59	8,22	8,31	8,42	8,63	8,77
6	Konstruksi	2.089,85	2391,23	2.777,20	3.040,00	3.044,85	3.050,92
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.194,54	1265,83	1.332,79	1.405,95	1.345,12	1.360,79
8	Transportasi dan Pergudangan	282,51	299,71	316,71	335,45	303,82	314,92
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	620,93	695,30	779,86	824,90	530,58	527,90
10	Informasi dan Komunikasi	183,77	194,77	205,39	214,18	221,12	222,59
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	222,18	239,76	248,36	261,27	258,92	258,96
12	Real Estate	147,75	158,66	167,18	175,55	180,65	180,99
13	Jasa Perusahaan	0,13	0,13	0,14	0,14	0,12	0,12
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	298,55	321,08	342,13	367,23	379,11	347,55
15	Jasa Pendidikan	243,28	255,05	261,89	273,20	268,71	268,98

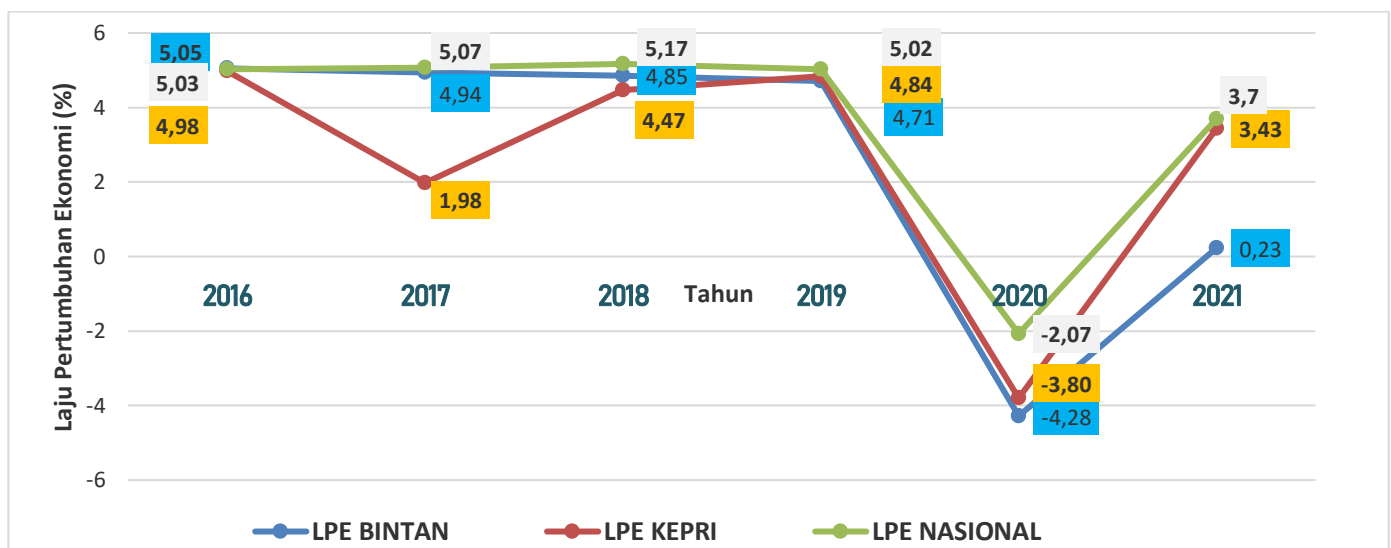
No	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020	2021**
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	121,81	129,93	137,20	145,73	153,88	158,56
17	Jasa lainnya	23,45	24,13	25,23	26,13	22,64	22,86
	PDRB ADHK (Miliar Rupiah)	12.620,1 2	13.244,0 4	13.886,0 9	14.540,0 7	14.512,0 7	13.902,1 6

Sumber: BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2022

Laju Pertumbuhan Ekonomi *year-on-year* Kabupaten Bintan pada tahun 2021, menunjukkan sinyal positif di tengah kondisi ketidakpastian global maupun nasional sebagai akibat imbas dari pandemi Covid-19. LPE Kabupaten Bintan tahun ini mengalami pertumbuhan sebesar 0,23%. Hal serupa juga dialami oleh LPE Provinsi Kepulauan Riau dan LPE Nasional yang mengalami pertumbuhan pada tahun 2021.

**Grafik 2.2**

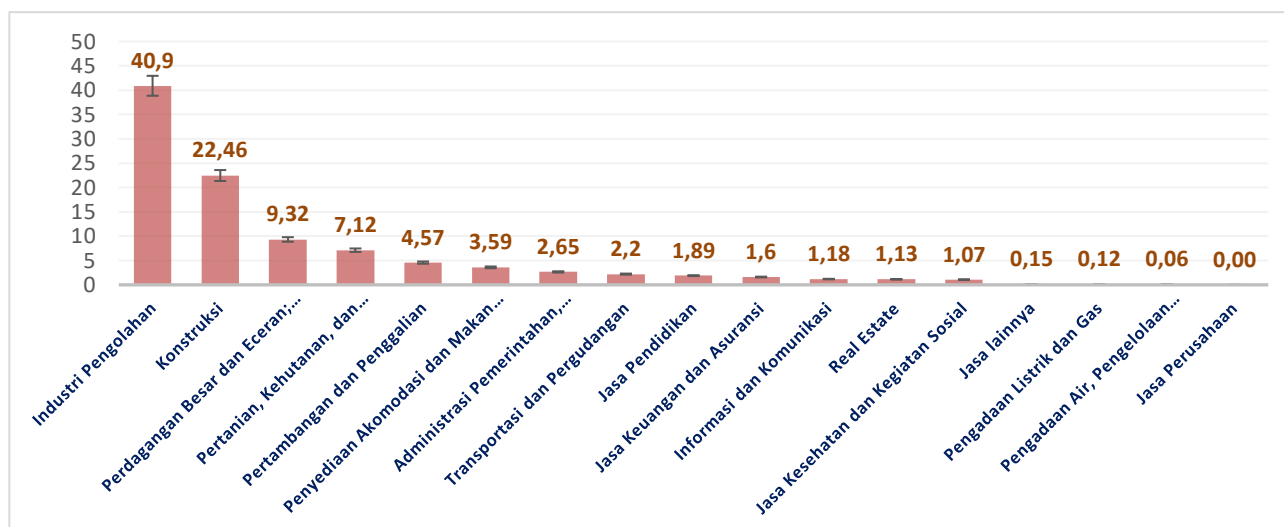
**Perbandingan Persentase Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2016-2021**



Sumber: Diolah dari Bintan dalam Angka 2021-BPS Bintan dan Kepulauan Riau dalam Angka 2021-BPS Kepri, Tahun 2022

Berdasarkan pada tinjauan daripada laporan Bank Indonesia (BI) terhadap kondisi perbaikan pertumbuhan ekonomi domestik, diperkirakan perbaikan pertumbuhan ekonomi akan terus berlangsung secara bertahap dan akan meningkat pada tahun 2022. Perkembangan tersebut terindikasi pada berlanjutnya kinerja positif sejumlah indikator seperti mulai berjalannya mobilitas masyarakat di beberapa daerah, berlanjutnya perbaikan PMI Manufaktur, dan menguatnya keyakinan serta ekspektasi konsumen terhadap penghasilan, ketersediaan lapangan kerja, dan kegiatan usaha. Untuk Kabupaten Bintan, pada tahun 2021 *share* PDRB yang memberikan andil terhadap pertumbuhan ekonomi adalah industri pengolahan, konstruksi dan perdagangan.

**Grafik 2.3**  
**Distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten**  
**Bintan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha**  
**(Persen) Tahun 2021**



Sumber: BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2022

Prospek perekonomian domestik yang membaik tersebut juga didukung oleh berbagai langkah kebijakan yang diarahkan untuk mendorong: (i) pembukaan sektor-sektor produktif dan aman secara nasional maupun di masing-masing daerah; (ii) akselerasi stimulus

fiskal; (iii) penyaluran kredit perbankan dari sisi permintaan dan penawaran; (iv) berlanjutnya stimulus moneter dan makroprudensial; serta (v) percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan, khususnya terkait pengembangan UMKM. Adapun perkembangan laju pertumbuhan PDRB ADHK Kabupaten Bintan menurut lapangan usaha selama 5 tahun, tertera pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.7**  
**Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**  
**Kabupaten Bintan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut**  
**Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2016-2021**

No.	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020*	2021**
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.30	7.93	2.45	3,21	5,60	2,12
2	Pertambangan dan Penggalian	-8.77	-14.52	-18.75	-10,34	-20,55	-12,30
3	Industri Pengolahan	6.05	4.90	4.89	4,36	-1,83	1,81
4	Pengadaan Listrik dan Gas	14.77	6.93	-0.43	1,96	2,86	1,31
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.24	8.23	1.11	1,36	2,53	1,60
6	Konstruksi	12.50	14.42	16.14	9,46	0,16	0,20
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8.45	5.97	5.29	5,49	-4,33	1,17
8	Transportasi dan Pergudangan	6.56	6.09	5.67	5,92	-9,43	3,65
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.91	11.98	12.16	5,77	-35,68	-0,51
10	Informasi dan Komunikasi	5.24	5.99	5.45	4,28	3,24	0,67
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	8.56	7.91	3.59	5,20	-0,90	0,02
12	Real Estate	8.18	7.38	5.37	5,01	2,90	0,19
13	Jasa Perusahaan	4.64	3.75	1.22	1,82	-11,03	0,36

No.	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020*	2021**
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7.76	7.55	6.56	7,34	3,23	-8,32
15	Jasa Pendidikan	7.30	4.84	2.68	4,32	-1,64	0,10
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6.53	6.66	5.59	6,22	5,59	3,05
17	Jasa lainnya	3.24	2.89	4.57	3,56	-13,37	0,99
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK (%)		5.05	4.94	4.85	4,51	-4,20	0,23

Sumber: BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2022

Dalam menyikapi perkembangan kondisi perekonomian daerah, Pemerintah Kabupaten Bintan pada dasarnya terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Pusat dan otoritas terkait dalam menempuh langkah-langkah kebijakan lanjutan agar berbagai kebijakan yang ditempuh semakin efektif mendorong pemulihan ekonomi.

## 2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Pada sub bab ini akan menjabarkan 3 (Tiga) hal penting dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bintan pada tahun 2021 meliputi Indikator Kinerja Kunci (IKK) keluaran (Ouput), IKK Hasil (Outcome) dan IKK Fungsi Penunjang Pemerintahan.

Perkembangan IKK ini merupakan kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan meliputi 6 Urusan Wajib Pelayanan Dasar, 17 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, dan 8 Urusan Pilihan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dihadapkan kepada situasi adaptif ditengah pandemi covid-19 sehingga mendorong perubahan pola serta budaya kinerja terutama mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik (*Good Local Governance*).

Melalui IKK dapat memberikan *progress* daripada capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan merupakan gambaran dari

keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan capaian kinerja urusan Pemerintahan Daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang.

Hasil dari IKK ini kemudian menjadi benchmarking kinerja daerah Kabupaten Bintan untuk keberlanjutan rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021-2026 meskipun pada saat ini merupakan akhir dari proses RPJMD 2016-2021.

### 2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Keluaran (Output) Kabupaten Bintan tahun 2021, sebagai berikut:

**Tabel 2.8**  
**Indikator Kinerja Kunci Keluaran Kabupaten Bintan**  
**Tahun 2021**

No	Urusan	No. IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Satuan	LPPD 2021	
					Elemen Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar</b>						
1.	Pendidikan	<b>I</b>	<b>Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>			
		1	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)	Satuan Pendidikan/ Unit	102	102
		2	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Orang	107	107
		3	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Orang	4158	4158

No	Urusan	No. IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Satuan	LPPD 2021	
					Elemen Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)	Orang	552	552
		5	Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)	Orang	538	538
		6	Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	Orang	21	21
		7	Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah	Orang	10	10
		<b>II</b>	<b>Pendidikan Dasar dan Menengah</b>			
		1	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	Unit	114	114
		2	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Orang	3139	3139
		3	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Orang	2683	2683
		4	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Orang	18138	18138



No	Urusan	No. IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Satuan	LPPD 2021	
					Elemen Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		5	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Orang	7989	7989
		6	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	Orang	1097	1097
		7	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	Orang	475	475
		8	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	Orang	1304	1304
		9	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	Orang	685	685
		10	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	Orang	97	97
		11	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	Orang	33	33
		12	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	Orang	97	97
		13	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	Orang	33	33
		14	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Orang	490	490
		15	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah	Orang	288	288

No	Urusan	No. IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Satuan	LPPD 2021	
					Elemen Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik			
		16	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Orang	92	92
		17	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Orang	32	32
		18	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	Orang	207	207
		19	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	Orang	159	159
		<b>III</b>	<b>Pendidikan Kesetaraan</b>			
		1	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)	Unit	9	9
		2	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Orang	400	400
		3	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang	Orang	390	390

No	Urusan	No. IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Satuan	LPPD 2021	
					Elemen Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			menerima pembebasan biaya pendidikan			
		4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	Orang	101	101
		5	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	Orang	36	36
		6	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	Orang	27	27
		7	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah-	Orang	92	92
		8	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1	Orang	10	10
2	Kesehatan	<b>I</b>	<b>Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan</b>			
		1	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat kesehatan (SPA) sesuai standar	Unit	2	2
		<b>II</b>	<b>Rumah Sakit Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang Terakreditasi</b>			
		1	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	Unit	0	0
		<b>III</b>	<b>Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil</b>			
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah	405.931	405.931
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	291	291
		<b>IV</b>	<b>Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Persalinan</b>			
1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah	18.950	18.950		

No	Urusan	No. IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Satuan	LPPD 2021	
					Elemen Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	291	291
		<b>V</b>	<b>Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir</b>			
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah	2.649	2.649
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	291	291
		<b>VI</b>	<b>Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar</b>			
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah	13.524	13.524
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	291	291
		<b>VII</b>	<b>Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</b>			
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah	0	0
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	60	60
		<b>VIII</b>	<b>Orang Usia 15-59 Tahun yang Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar</b>			
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah	0	0
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	45	45
		<b>IX</b>	<b>Warga Negara Usia 60 Tahun ke Atas yang Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar</b>			
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah	51	51
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	45	45
		<b>X</b>	<b>Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</b>			
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah	917.940	917.940
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	90	90
		<b>XI</b>	<b>Penderita DM yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</b>			
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah	62.400	62.400

No	Urusan	No. IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Satuan	LPPD 2021	
					Elemen Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	90	90
		<b>XII</b>	<b>ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar</b>			
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah	641	641
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	15	15
		<b>XIII</b>	<b>Orang Terduga TBC yang Mendapatkan Pelayanan TBC Sesuai Standar</b>			
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah	2.618	2.618
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	30	30
		<b>XIV</b>	<b>Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV yang Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV Sesuai Standar</b>			
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah	297	297
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	30	30
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<b>I</b>	<b>Luas Kawasan Pemukiman Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir</b>			
		1	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	ha	25,09	40,3
		2	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	m	190.899	190.899
		3	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	ha	2	10,2
		4	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	m	95	510
		5	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya	Ada/Tidak	Tidak Ada/0	Tidak Ada/0

No	Urusan	No. IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Satuan	LPPD 2021	
					Elemen Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			air WS kewenangan kabupaten/kota			
		6	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	Ada/Tidak	Tidak Ada/0	Tidak Ada/0
		7	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota	Jumlah	0	2
		<b>II</b>	<b>Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilayani oleh Jaringan Irigasi</b>			
		1	Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	%	0	0
		2	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	%	0	0
		3	Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	%	450	100
		<b>III</b>	<b>Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga di Seluruh Kabupaten/Kota</b>			
		1	Penetapan dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM)	Ada/Tidak	Ada	Ada
		2	Tersusun dan ditetapkannya Kebijakan Strategis Daerah (JAKSTRADA) kabupaten/kota	Ada/Tidak	Tidak Ada/0	Tidak Ada/0
		3	Jumlah BUMD dan atau UPTD kabupaten/kota penyelenggara SPAM	BUMD/UPTD	Ada/41	Ada/41
		4	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	Izin	Tidak Ada/0	Tidak Ada/0
		5	Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain	Kerjasama	Tidak Ada/0	Tidak Ada/0

No	Urusan	No. IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Satuan	LPPD 2021	
					Elemen Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		<b>IV</b>	<b>Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik</b>			
		1	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-S	Rumah	959	959
		2	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	Rumah	0	0
		3	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-S dan SPALD-T	Rumah	959	959
		4	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	Rumah	0	0
		5	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	Rumah	0	0
		6	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	Rumah	959	959
		7	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD-S akses dasar	%	88,65	88,65
		8	Kinerja penyediaan pelayanan IPLT akses aman	%	0	0
		9	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD-T akses aman	%	0	0
		10	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	%	0	0
		11	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	%	0	0

No	Urusan	No. IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Satuan	LPPD 2021	
					Elemen Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		12	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	%	14,29	14,29
		13	Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	%	0	0
		14	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	%	0	0
		<b>V</b>	<b>Rasio Kepatuhan IMB Kabupaten/Kota</b>			
		1	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	%	11	100
		2	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah kabupaten/kota dalam tahun eksisting	Izin	26	26
		3	Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung	Ada/Tidak	Tidak Ada/0	Tidak Ada/0
		4	Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung	Ada/Tidak	Tidak Ada/0	Tidak Ada/0
		5	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	Bangunan	3	3
		6	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah kabupaten/kota	Bangunan	Tidak Ada/0	Tidak Ada/0
		7	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota	Bangunan	99	99
		8	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat	Bangunan	99	99
		<b>VI</b>	<b>Rasio Kemantapan Jalan</b>			
		1	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan kabupaten/kota	km	622.307	622.307



No	Urusan	No. IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Satuan	LPPD 2021	
					Elemen Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		2	Panjang jalan yang dibangun	km	2,15	2,15
		3	Panjang jembatan yg dibangun	m	0	0
		4	Panjang jalan yang ditingkatkan	km	2,69	2,69
		5	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	m	0	0
		6	Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	km	0,5	0,5
		7	Panjang jembatan yang direhabilitasi	m	0	0
		8	Panjang jalan yang dipelihara	km	1,2932	1,2932
		9	Panjang jembatan yang dipelihara	m	936	936
		<b>VII</b>	<b>Rasio Tenaga Kerja Konstruksi yang Terlatih di Wilayah Provinsi yang Dibuktikan dengan Sertifikat Pelatihan Ahli</b>			
		1	Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah kabupaten/kota	Orang	457	457
		2	Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analisis yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	Orang	457	457
		3	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kabupaten/kota	Orang	333	333
		4	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	Ada/Tidak	Ada/1	Ada/1
		5	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota yang bersumber dari APBD kabupaten/kota	Ada/Tidak	Tidak Ada/0	Tidak Ada/0
		6	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota yang bersumber dari APBN	Ada/Tidak	Tidak Ada/0	Tidak Ada/0
		7	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah	Ada/Tidak	Tidak Ada/0	Tidak Ada/0

No	Urusan	No. IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Satuan	LPPD 2021	
					Elemen Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			kabupaten/kota yang bersumber dari pendanaan lainnya			
		8	Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	Ada/Tidak	Tidak Ada/0	Tidak Ada/0
		9	Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	Ada/Tidak	Ada/1	Ada/1
		10	Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabupaten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya	Ada/Tidak	Ada/1	Ada/1
		11	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis	Ada/Tidak	Ada/1	Ada/1
		12	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	Ada/Tidak	Ada/1	Ada/1
		13	Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan	Ada/Tidak	Tidak Ada/0	Tidak Ada/0

No	Urusan	No. IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Satuan	LPPD 2021	
					Elemen Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			pembinaan di wilayah kabupaten/kota			
		14	Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Ada/Tidak	39	39
		15	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada/Tidak	Tidak Ada/0	Tidak Ada/0
		16	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada/Tidak	Tidak Ada/0	Tidak Ada/0
		17	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada/Tidak	Tidak Ada/0	Tidak Ada/0
		18	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kabupaten/kota	Badan Usaha	39	39
		19	Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	Badan Usaha	0	0
		20	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah kabupaten/kota	Badan Usaha	39	39
		21	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	Badan Usaha	Tidak Ada/0	Tidak Ada/0

No	Urusan	No. IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Satuan	LPPD 2021	
					Elemen Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		22	Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	izin	Tidak Ada/0	Tidak Ada/0
		23	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Pengawasan	Tidak Ada/0	Tidak Ada/0
		24	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Kecelakaan Konstruksi	Tidak Ada/0	Tidak Ada/0
		25	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Pengawasan	Tidak Ada/0	Tidak Ada/0
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	<b>I</b>	<b>Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota</b>			
		1	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	Unit	17.220	17.220
		2	Jumlah rumah yang terkena bencana alam	Unit	46	46
		3	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	Orang	46	46
		4	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	Unit	26	26
		5	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	Unit	4	4
		6	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	Unit	0	0

No	Urusan	No. IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Satuan	LPPD 2021	
					Elemen Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		7	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	Unit	0	0
		8	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	Orang	46	46
		9	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	ha	0	0
		<b>II</b>	<b>Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota</b>			
		1	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Rumah Tangga	0	0
		2	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Rumah Tangga	0	0
		3	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Rumah Tangga	0	0
		4	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Rumah Tangga	0	0
		5	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Rumah Tangga	0	0
		6	Jumlah total luasan (ha) pengadaan tanah	ha	0	0
		<b>III</b>	<b>Luas Kawasan Kumuh Dibawah 10 ha yang Ditangani</b>			
		1	Jumlah luasan (ha) kawasan pemukiman kumuh <10 ha	ha	5,31	5,31

No	Urusan	No. IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Satuan	LPPD 2021	
					Elemen Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		2	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	Unit	0	0
		3	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	ha	0	0
		<b>IV</b>	<b>Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)</b>			
		1	Jumlah rumah di kabupaten/kota	Rumah	49.989	49.989
		2	Jumlah unit PK RTLH	Rumah	0	0
		3	Jumlah rumah tidak layak huni	Rumah	2.500	2.500
		4	Jumlah rumah yang tidak dihuni	Rumah	0	0
		5	Rasio rumah dan KK	%	4,72	4,72
		6	Jumlah rumah pembangunan baru	Rumah	45	45
		<b>V</b>	<b>Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)</b>			
		1	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	Perumahan	807	807
		2	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	Rumah	42.920	42.920
		3	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	Rumah	0	0
		4	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site/off site)	Rumah	0	0
		5	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	Perumahan	0	0
		6	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	Rumah	0	0
		7	Jumlah pengembang yang tersertifikasi	Pengembang	0	0
		8	Jumlah pengembang yang teregistrasi	Pengembang	0	0
		9	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	Pengembang	0	0
5.	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	<b>I</b>	<b>Gangguan Trantibum yang Dapat Diselesaikan</b>			
		1	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam kabupaten/kota yang ditangani	Jumlah	264	264
		2	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	Orang	854	854
		3	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	Perda dan Perkada	14	14

No	Urusan	No. IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Satuan	LPPD 2021	
					Elemen Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		4	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	Orang	10	20
		5	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	SOP	8	8
		6	Tersedianya sarana prasarana minimal	Jumlah	3	3
		<b>II</b>	<b>Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana</b>			
		1	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	%	1	100
		2	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	%	168.754	100
		<b>III</b>	<b>Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>			
		1	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	%	0	0
		2	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	%	0	0
		3	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	%	20	100
		4	Persentase warga negara yang ikut pelatihan	%	20	100
		5	Persentase warga negara yang mendapat layanan Pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	%	168.754	100
		6	Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	%	168.754	100
		<b>IV</b>	<b>Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>			
		1	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	%	0	0

No	Urusan	No. IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Satuan	LPPD 2021	
					Elemen Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		2	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	%	2	100
		3	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	%	28	100
		4	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	%	14.366	100
		<b>V</b>	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran</b>			
		1	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	Layanan	332	332
		2	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	Pos	3	3
		3	Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	Orang	0	0
		4	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa	Pos	3	3
		5	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	Sarpras	20	20
		6	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam	Orang	26	26



No	Urusan	No. IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Satuan	LPPD 2021	
					Elemen Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran			
		7	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	Orang	0	0
		8	Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	Kegiatan	26	26
6.	Sosial	<b>I</b>	<b>Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti</b>			
		1	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	Jumlah	1	1
		2	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM	Jumlah	5.453	5.453
		3	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	Jumlah	0	0
		4	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	Jumlah	29	29
		5	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	Jumlah	1	1
		6	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	Jumlah	6.381	6.381
		7	Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	Jumlah	14	14
		8	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak	Jumlah	541	541

No	Urusan	No. IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Satuan	LPPD 2021	
					Elemen Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang			
		9	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	Jumlah	106	106
		10	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/ shelter	Jumlah	34	34
		11	Jumlah paket perbekalan Kesehatan yang tersedia	Jumlah	1.706	1.706
		12	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	Jumlah	1.706	1.706
		13	Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di rumah singgah	Jumlah	2	2
		14	Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	Jumlah	15	15
		15	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	Jumlah	1.766	1.766
		16	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	Jumlah	1.766	1.766
		17	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	Jumlah	16	16

No	Urusan	No. IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Satuan	LPPD 2021	
					Elemen Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		18	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar	Jumlah	2.117	2.117
		19	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	Jumlah	15	15
		20	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	Jumlah	15	15
		21	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	Jumlah	36	36
		<b>II</b>	<b>Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota</b>			
		1	Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan	Orang	17.211	17.211
		2	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	Orang	527	527
		3	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	Penampungan	0	0
		4	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	Paket	0	0
		5	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	Orang	0	0
		6	Jumlah pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	Orang	66	66
<b>Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar</b>						
7.	Tenaga Kerja	<b>I</b>	<b>Kabupaten/Kota yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja</b>			

No	Urusan	No. IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Satuan	LPPD 2021	
					Elemen Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		1	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota		Ada/1	Ada/1
		2	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja.		100	100
		3	Jumlah perusahaan yang Menyusun rencana tenaga kerja		287	287
		<b>II</b>	<b>Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi</b>			
		1	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	%	246	100
		2	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	%	18	100
		3	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	%	18	7,32
		4	Persentase LPK yang terakreditasi	%	2	100
		5	Persentase LPK yang memiliki perizinan	%	2	100
		6	Jumlah penganggur yang dilatih	Jumlah	246	246
		7	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	%	246	100
		8	Persentase penyerapan lulusan	%	246	100
		9	Lulusan bersertifikat kompetensi	%Jumlah	246	246
		10	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CPMI/CTKI) yang diberikan pelatihan	%	0	0
		11	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CPMI/CTKI)	%	0	0
		<b>III</b>	<b>Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja</b>			
		1	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	%	86	30
		2	Data tingkat produktivitas total	Tingkat Produktifitas	Tidak Ada/0	Tidak Ada/0

No	Urusan	No. IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Satuan	LPPD 2021	
					Elemen Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		<b>IV</b>	<b>Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan)</b>			
		1	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	%	70	47
		2	Persentase perusahaan yang telah memiliki PKB	%	9	15
		3	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB diperusahaan yang tercatat, SP/SB diluar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	SP/SB	6	6
		4	Persentase perusahaan yang sudah Menyusun struktur skala upah	%	46	58
		5	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	%	198	69
		6	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	%	11	4
		7	Jumlah mogok kerja	Jumlah	0	0
		8	Jumlah penutupan perusahaan	Jumlah	0	0
		9	Jumlah perselisihan kepentingan	Jumlah	2	2
		10	Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	Jumlah	0	0
		11	Jumlah perselisihan PHK	Jumlah	12	12
		12	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	Jumlah	21	21
		13	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	Jumlah	0	0
		14	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan	Jumlah	1	1
		15	Persentase perselisihan hubungan industrial yang	%	67	67

No	Urusan	No. IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Satuan	LPPD 2021	
					Elemen Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial			
		<b>V</b>	<b>Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>			
		1	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	Jumlah	1.666	1.666
		2	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kabupaten/kota	Jumlah	3.225	3.225
		3	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kabupaten/kota	Jumlah	5	5
		4	Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota	Jumlah	21	21
		5	Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	Jumlah	1	1
		6	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kabupaten/kota	Jumlah	1	1
		7	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh Dinas Bidang Ketenagakerjaan kabupaten/kota	Jumlah	3.097	3.097
		8	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	Jumlah	1.681	1.681
		9	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	Jumlah	1.346	1.346
		10	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	Jumlah	399	399
		11	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang difasilitasi kepulangannya	Jumlah	99	100

No	Urusan	No. IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Satuan	LPPD 2021	
					Elemen Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		12	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	Jumlah	0	0
		13	Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	Jumlah	0	0
		14	Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	Jumlah	0	0
8.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<b>I</b>	<b>ARG pada Belanja Langsung APBD</b>			
		1	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	Jumlah	0	0
		2	Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	Jumlah	135	135
		<b>II</b>	<b>Anak Korban Kekerasan yang Ditangani Instansi Terkait Kabupaten/Kota</b>			
		1	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemprov (Dinas PPPA) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	Jumlah	7	1
		2	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	Jumlah	1	1
		3	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	%	26	100
		4	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	Jumlah	12	12
		5	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota (APBD kabupaten/kota)	Jumlah	0	0

No	Urusan	No. IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Satuan	LPPD 2021	
					Elemen Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		<b>III</b>	<b>Kekerasan Terhadap Perempuan Per 100.000 Anak</b>			
		1	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	Jumlah	0	0
		2	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	Jumlah	0	0
		3	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	Jumlah	0	0
		4	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	Jumlah	0	0
		5	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	Jumlah	5	5
		6	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yang telah terstandarisasi	Jumlah	4	4
		7	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	%	21	100
9.	Pangan	<b>I</b>	<b>Cadangan Pangan</b>			
		1	Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Ada/Tidak	Ada/2	Ada/2
		2	Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	Ada/Tidak	Ada/1	Ada/1
		3	Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	Ada/Tidak	Tidak Ada/0	Tidak ada/0
		4	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan	Ada/Tidak	Ada/1	Ada/1



No	Urusan	No. IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Satuan	LPPD 2021	
					Elemen Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang			
		5	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	Ada/Tidak	Ada/1	Ada/1
		6	Tertanganinya kerawanan pangan	Ada/Tidak	Ada/1	Ada/1
		7	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Ada/Tidak	Ada/1	Ada/1
		8	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	Ada/Tidak	Ada/1	Ada/1
10	Pertanahan	<b>I</b>	<b>Pemanfaatan Tanah yang Sesuai dengan Peruntukkan Tanahnya Diatas Izin Lokasi Dibandingkan dengan Luas Izin Lokasi yang Diterbitkan</b>			
		1	SK Izin Lokasi yang diterbitkan oleh bupati/walikota	Jumlah	6	6
		2	SK bupati/walikota tentang Penetapan Tanah Obyek <i>Land Reform</i> yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee dan Daftar Subyek	Jumlah	0	0
		3	SK bupati/walikota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee	Jumlah	0	0
		4	Dokumen Izin membuka tanah	Jumlah	0	0
		5	Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah kabupaten/kota	Jumlah	0	0
11	Lingkungan Hidup	<b>I</b>	<b>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota</b>			
		<b>1</b>	Indeks Kualitas Air (IKA)	Nilai Indeks	55,56	55,56
		<b>2</b>	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Nilai Indeks	93,43	93,43
		<b>3</b>	Indeks Tutupan Hutan (ITH)	Nilai Indeks	77,94	77,94
		<b>II</b>	<b>Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota</b>			
		1	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	Ada/Tidak	Ada/1	Ada/1

No	Urusan	No. IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Satuan	LPPD 2021	
					Elemen Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		<b>III</b>	<b>Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>			
		1	Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	%	29	74,36
		2	Rasio Pejabat Pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	%	0	0
		3	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/kota. Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih daerah kabupaten/kota	%	0	0
		4	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH.	%	0	0
		5	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	%	5	100
		6	Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota yang ditangani. Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan	%	4	100
12	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	<b>I</b>	<b>Perekaman KTP Elektronik</b>			
		1	Penerbitan akta perkawinan	%	420	420
		2	Penerbitan akta perceraian	%	6	6
		3	Penerbitan akta kematian	%	1600	1600

No	Urusan	No. IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Satuan	LPPD 2021	
					Elemen Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		4	Penyajian data kependudukan	%	2	2
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	<b>I</b>	<b>Peningkatan Status Desa Mandiri</b>			
		<b>1</b>	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	Desa	36	36
		<b>2</b>	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	Desa	10	10
		<b>3</b>	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	Lembaga	4	4
		<b>4</b>	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	Jumlah	38	38
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	<b>I</b>	<b>Total Fertility Rate (TFR)</b>			
		1	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	Ada/Tidak	Tidak Ada/0	Tidak Ada/0
		2	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	Nilai Median	0	0
		3	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun ( <i>Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19</i> )	ASFR	15,78	15,78
		4	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	%	168.754	100
		5	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang	Jumlah	46	46

No	Urusan	No. IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Satuan	LPPD 2021	
					Elemen Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK			
		<b>II</b>	<b>Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)</b>			
		1	Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	%	16	100
		2	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	20.506	82,05
		3	Pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	Jumlah	10	10
		4	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	%	1.352	23,21
		<b>III</b>	<b>Kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)</b>			
		1	Persentase kesertaan KB di kabupaten/kota dengan kesertaan rendah	%	4.486	17,95
		2	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	%	9.751	94,82
15	Perhubungan	<b>I</b>	<b>Konektifitas Kabupaten/Kota</b>			
		1	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C	%	22	64,71
		2	Terlaksananya pelayanan uji berkala	%	155	7,05
		3	Penetapan tariff angkutan orang antar kota dalam kabupaten/kota, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	%	5	100
		4	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota	%	199.963	180,56
16	Komunikasi dan Informatika	<b>I</b>	<b>Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung Dengan Akses Internet yang Disediakan oleh Dinas Kominfo</b>			
		1	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	0	0

No	Urusan	No. IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Satuan	LPPD 2021	
					Elemen Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		2	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	%	39	100
		3	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	Jumlah	Ada/1	Ada/1
		<b>II</b>	<b>Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi</b>			
		1	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara	%	3	100
		2	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	%	19	48,72
		3	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	%	22	56,41
		4	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis	%	3	100

No	Urusan	No. IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Satuan	LPPD 2021	
					Elemen Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			yang telah diimplementasikan secara elektronik			
		5	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	%	1	100
		6	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	%	4	18,18
		7	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	%	3	100
		8	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	%	0	0
		9	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	%	0	0
		10	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	%	0	0
		11	Persentase data yang dapat berbagi pakai	%	7	100
		12	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	%	29	74,36
		13	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	%	4	100
		14	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	Ada/Tidak	Ada/1	Ada/1

No	Urusan	No. IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Satuan	LPPD 2021	
					Elemen Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		<b>III</b>	<b>Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>			
		1	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah kabupaten/kota	%	3	100
		2	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	%	92	100
		3	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	%	92	100
17	Koperasi dan UKM	<b>I</b>	<b>Koperasi yang Berkualitas</b>			
		1	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	%	1	100
		2	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	0	0
		3	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	6	5,19
		4	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang	%	16	10,39

No	Urusan	No. IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Satuan	LPPD 2021	
					Elemen Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota			
		5	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	56	36,36
		6	Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	123	2,02
		7	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	7	4,55
		8	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	%	-	0
		9	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	%	62	40,26
		10	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan daerah kabupaten/kota	%	1	0,65
		11	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan daerah kabupaten/kota	%	2	1,30
		12	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan	%	69	44,81



No	Urusan	No. IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Satuan	LPPD 2021	
					Elemen Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan daerah kabupaten/kota			
		13	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	%	6	3,90
		<b>II</b>	<b>Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha</b>			
		1	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	%	1.338	39,11
		2	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam Online Data System (ODS)	%	1.851	54,11
		3	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	%	106	3,1
		4	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	%	69	2,17
		5	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	%	48	1,51
		6	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	%	100	3,14
		7	Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha	%	178	5,59
18	Penanaman Modal	<b>I</b>	<b>Peningkatan Investasi di Kabupaten/Kota</b>			
		1	Perda mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Ada/Tidak	Tidak Ada/0	Tidak Ada/0
		2	Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan pemberian fasilitas/intensif penanaman modal	Ada/Tidak	Tidak Ada/0	Tidak Ada/0

No	Urusan	No. IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Satuan	LPPD 2021	
					Elemen Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		3	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Jumlah	0	0
		4	Kegiatan seminar bisnis, forum, <i>one-on-one meeting</i>	Jumlah	0	0
		5	Kegiatan pameran penanaman modal	Jumlah	Tidak Ada/0	Tidak Ada/0
		6	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	Jumlah	Tidak Ada/0	Tidak Ada/0
		7	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah	Tidak Ada/0	Tidak Ada/0
		8	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah	33	27
		9	Laporan realisasi penanaman modal	Jumlah	22.237.228 .437.353	22.237.228 .437.353
		10	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota	Jumlah	0	0
		11	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	Jumlah	78	78
		12	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Ada/Tidak	Ada/1	Ada/1
19	Pemuda dan Olahraga	<b>I</b>	<b>Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri</b>			
		1	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	Orang	60	60
		2	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	Orang	0	0
		<b>II</b>	<b>Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan</b>			
		1	Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawan dan kepeloporan pemuda	Orang	70	70
		2	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	Orang	Tidak Ada/0	Tidak Ada/0

No	Urusan	No. IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Satuan	LPPD 2021	
					Elemen Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		<b>III</b>	<b>Prestasi Olahraga</b>			
		1	Jumlah pelatih olahraga yang memiliki kompetensi di satuan-satuan pendidikan	Orang	18	23
		2	Jumlah penyelenggaraan event olahraga prestasi tingkat daerah	Event	0	0
20	Statistik	<b>I</b>	<b>Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah</b>			
		1	Tersedianya buku profil daerah	Ada/Tidak	Ada/1	Ada/1
		2	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	Orang	0	0
		3	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	Orang	0	0
		4	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	Orang	0	0
		5	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	Orang	0	0
		6	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	%	0	0
		7	Persentase kelengkapan metadata indikator sektoral	%	0	0
21	Persandian	<b>I</b>	<b>Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah</b>			
		1	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	%	1	100
		2	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) dan/atau aplikasi persandian dibanding dengan jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	%	62	100

No	Urusan	No. IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Satuan	LPPD 2021	
					Elemen Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		3	Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	%	4	100
		4	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan pada Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS)	%	39	100
22	Kebudayaan	<b>I</b>	<b>Terlestarikannya Cagar Budaya</b>			
		1	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	Jumlah	8	8
		2	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, pengayaan keberagaman)	Jumlah	8	8
		3	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	Jumlah	8	8
		4	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	Orang	0	0
		5	Register cagar budaya (pendaftaran, pengkajian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	Jumlah	3	3
		6	Perlindungan cagar budaya kabupaten/kota (penyelamatan, zonasi,	Jumlah	3	3

No	Urusan	No. IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Satuan	LPPD 2021	
					Elemen Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			pemeliharaan dan pemugaran)			
		7	Layanan perizinan membawa cagar budaya kabupaten/kota ke luar kabupaten/kota dengan dukungan data	Jumlah	0	0
		8	Pengembangan cagar budaya kabupaten/kota (penelitian, revitalisasi, adaptasi),	Jumlah	3	3
		9	Pemanfaatan cagar budaya kabupaten/kota (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	Jumlah	3	3
		10	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	Jumlah	77	77
		11	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum	Jumlah	563	563
		12	Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum	Orang	-	0
		13	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	Tim	0	0
		14	Pembentukan tim ahli cagar budaya kabupaten/kota	Tim	0	0
		15	Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	Tim	0	0
		16	Pemetaan SDM cagar budaya dan permuseuman	Orang	2	2
		17	Peningkatan kompetensi SDM cagar budaya dan permuseuman	Orang	3	3
		18	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	Jumlah	1	1

No	Urusan	No. IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Satuan	LPPD 2021	
					Elemen Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		19	Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	Jumlah	6	6
23	Perpustakaan	<b>I</b>	<b>Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat</b>			
		1	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	%	251.438	149
		2	Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat	%	31.970	18,94
		3	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	%	0	0
		4	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	%	3	1,56
		5	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	Jumlah	0	0
		<b>II</b>	<b>Naskah Kuno</b>			
		1	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya	Jumlah	0	0
		2	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	Jumlah	0	0
		3	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	Jumlah	0	0
24	Kearsipan	<b>I</b>	<b>Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti Sah dan Bahan Pertanggungjawaban Nasional (Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan)</b>			
		1	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	%	17	44
		2	Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	%	17	44
		3	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	%	18	100
		4	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	%	0	0

No	Urusan	No. IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Satuan	LPPD 2021	
					Elemen Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		II	<b>Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Untuk Kepentingan Negara, Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Rakyat</b>			
		1	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	Jumlah	0	0
		2	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	Jumlah	0	0
		3	Penyelamatan arsip perangkat daerah kabupaten/kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK di kabupaten/kota	Jumlah	0	0
		4	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten/kota yang sesuai NSPK	Jumlah	0	0
		5	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	Jumlah	38	38
		6	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK	Jumlah	0	0
<b>Urusan Pilihan</b>						
25	Kelautan dan Perikanan	I	<b>Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi (Sumber Data: One Data KKP)</b>			
		1	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	Jumlah	3.571	3.571
		2	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	%	0	0

Urusan P

No	Urusan	No. IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Satuan	LPPD 2021	
					Elemen Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		3	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah	0	0
		4	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/kemitraan usaha/kemudahan akses Iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)	Jumlah	76	76
		5	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang diproduksi	Jumlah	17.286.000	17.286.000
26	Pariwisata	<b>I</b>	<b>Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara Per Kebangsaan</b>			
		1	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	Jumlah	2	2
		2	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	Jumlah	61	61
		3	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten	Jumlah	11	11
		4	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Jumlah	182	182
		5	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	Jumlah	2	2
		6	Jumlah event luar negeri yang diikuti kabupaten/kota	Jumlah	0	0
		7	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada event promosi pariwisata di dalam negeri	Jumlah	20	20
		8	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	%	2.046	45,71
		9	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	%	284	100
10	Jumlah lokasi yang memperoleh	Jumlah	10	10		



No	Urusan	No. IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Satuan	LPPD 2021	
					Elemen Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat			
27	Pertanian	<b>I</b>	<b>Produktivitas Pertanian Per Hektar Per Tahun</b>			
		1	Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan	Jumlah	142	142
		2	Prasaran pertanian yang digunakan	Jumlah	142	142
		3	Penerbitan Izin Usaha Pertanian	Jumlah	0	0
		4	Persentase prasarana pertanian yang digunakan	%	2	100
		5	Persentase jumlah usulan Izin Usaha Pertanian kabupaten/kota	%	0	0
		<b>II</b>	<b>Fasilitasi Penanggulangan Bencana</b>			
		1	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	%	0	0
28	Kehutanan	<b>I</b>	<b>Kehutanan</b>			
		1	Tersedianya dokumen Rencana Pengelolaan Tahura		0	0
		2	Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga		0	0
		3	Pemulihan ekosistem pada Tahura		0	0
		4	Menurunnya gangguan kawasan Tahura		0	0
29	Energi dan Sumber Daya Mineral	<b>I</b>	<b>Pemanfaatan Panas Bumi yang Memiliki Ijin di Kabupaten</b>			
		1	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kabupaten		0	0
30	Perdagangan	<b>I</b>	<b>Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Dengan Ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)</b>			
		1.a	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin Pusat perbelanjaan	%	0	0
		1.b	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin Toko swalayan	%	100	100
		2	Persentase penerbitan TDG	%	96	100

No	Urusan	No. IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Satuan	LPPD 2021	
					Elemen Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		3	Persentase gudang yang tidak mempunyai TDG	%	20	100
		4	Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu	%	50	2,07
		5	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah kabupaten/kota	%	0	0
		6	Persentase penerbitan SPKA yang tepat waktu	%	1.222	100
		7	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	%	0	0
		8	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	%	0	0
		<b>II</b>	<b>Kinerja Realisasi Pupuk</b>			
		1	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	Jumlah	56.430	56.790
		<b>III</b>	<b>Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku</b>			
		1	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	%	645	100
		2	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	%	0	0
31	Perindustrian	<b>I</b>	<b>Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten/Kota</b>			
		1	Persentase jumlah penetapan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	%	0	0
		<b>II</b>	<b>Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri termasuk turunan Indikator Pembangunan Industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP</b>			
		1	Persentase terselesaikannya dokumen RIPIK sampai	%	100	50

No	Urusan	No. IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Satuan	LPPD 2021	
					Elemen Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			dengan ditetapkannya menjadi Perda			
		<b>III</b>	<b>Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil yang Dikeluarkan oleh Instansi Terkait</b>			
		1	Persentase jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	%	0	100
		<b>IV</b>	<b>Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri Kecil yang Dikeluarkan oleh Instansi Terkait</b>			
		1	Persentase jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi industri kecil dan menengah yang diterbitkan	%	0	0
		<b>V</b>	<b>Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap dan Terkini</b>			
		1	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten/kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasan industri di kabupaten/kota	%	2	66,67
32	Transmigrasi	<b>I</b>	<b>Transmigrasi</b>			
		1	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penempatannya	Jumlah	0	0
		2	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	Jumlah	0	0
		3	Jumlah satuan pemukiman yang dibina	Jumlah	0	0

## 2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)

Tabel. menjabarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Hasil (Outcome) Kabupaten Bintan tahun 2021, sebagai berikut:

**Tabel 2.9**  
**Indikator Kinerja Kunci Hasil Kabupaten Bintan**  
**Tahun 2021**

No	Urusan	No. IKK	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	LPPD 2020	LPPD 2021
				Capaian	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar</b>					
1.	Pendidikan	1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	63,01%	58,27%
		2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	92,43%	83,41%
		3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	79,31%	72,98%
		4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	68,49%	76%
2.	Kesehatan	5	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	0,15%	0,14%
		6	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100%	100%
		7	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	97,14%	97,88%

No	Urusan	No. IKK	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	LPPD 2020	LPPD 2021
				Capaian	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		8	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	94,22%	96,38%
		9	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	98,24%	99,09%
		10	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	80,33%	87,26%
		11	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	83,10%	88,52%
		12	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	61,90%	43,02%
		13	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	28,30%	70,46%
		14	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	82,23%	83,33%
		15	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%
		16	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	92,05%	100%

No	Urusan	No. IKK	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	LPPD 2020	LPPD 2021
				Capaian	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		17	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%	100%
		18	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	91,04%	89,36%
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	19	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan kabupaten/kota	55,32%	96,49%
		20	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten/kota	42,14%	25,31%
		21	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	100%	100%
		22	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	72,84%	73,03%
		23	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh	89,96%	88,65%

No	Urusan	No. IKK	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	LPPD 2020	LPPD 2021
				Capaian	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			layanan pengolahan air limbah domestik		
		24	Rasio kepatuhan IMB kabupaten/kota	100%	100%
		25	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	92,78%	99,10%
		26	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	100%	100%
		27	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100%	100%
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	28	Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100%	92,86%
		29	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	100%	100%
		30	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	34,04%	3,77%
		31	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	3,68%	5%
		32	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	78,26%	1,61%
5.	Ketentraman, Ketertiban Umum dan	33	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	100%

No	Urusan	No. IKK	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	LPPD 2020	LPPD 2021
				Capaian	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Perlindungan Masyarakat	34	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%	100%
		35	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	160.921	168.754
		36	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	160.921	168.754
		37	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	14.366
		38	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%
		39	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	15	15
6.	Sosial	40	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	97,48%	99,20%
		41	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100%	100%



No	Urusan	No. IKK	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	LPPD 2020	LPPD 2021
				Capaian	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			daerah kabupaten/kota		
<b>Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar</b>					
7.	Ketenagakerjaan	42	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100%	100%
		43	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	60,67%	61,47%
		44	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	123.861.402.163,73	116.136.498.664,89
		45	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	72,13%	68,99%
		46	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	48,19%	52,12%
8.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	47	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	45,19%	11,48%
		48	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	0,07%	0,05%
		49	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	0,01%	25,55%
9.	Pangan	50	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya	279,98%	273,61%

No	Urusan	No. IKK	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	LPPD 2020	LPPD 2021
				Capaian	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10	Pertanahan		cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)		
		51	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100%	100%
		52	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	99,31%	100%
		53	Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	100%	100%
		54	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	100%	100%
		55	Tersedianya tanah untuk masyarakat	100%	100%
11	Lingkungan Hidup	56	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100%	100%
		57	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	74,66	75,87
		58	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah kabupaten/kota	95,55%	97,32%
		59	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH	0%	100%

No	Urusan	No. IKK	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	LPPD 2020	LPPD 2021
				Capaian	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota		
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	60	Perekaman KTP Elektronik	99,99%	99,99%
		61	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	68,84%	67,05%
		62	Kepemilikan akta kelahiran	90,35%	91,94%
		63	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	100%	100%
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	64	Persentase pengentasan desa tertinggal	100%	100%
		65	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	12%	13,04%
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	66	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,22	2,25
		67	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	79,53%	82,05%
		68	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	12,99%	11,96%
15	Perhubungan	69	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	85	85
		70	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	0,23	0,23
16	Komunikasi dan Informasi	71	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100%	100%

No	Urusan	No. IKK	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	LPPD 2020	LPPD 2021
				Capaian	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		72	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100%	100
		73	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	68,80%
17 .	Koperasi dan UKM	74	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	60,40%	59,74%
		75	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	39,11%	100
18 .	Penanaman Modal	76	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten /Kota	21,11%	6,67%
19 .	Kepemudaan dan Olahraga	77	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	57,42%	57,81%
		78	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	2,73%	3,08%
		79	Peningkatan Prestasi Olahraga	1	1
20 .	Statistik	80	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	100%
		81	Persentase OPD yang menggunakan	100%	100%

No	Urusan	No. IKK	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	LPPD 2020	LPPD 2021
				Capaian	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah		
21	Persandian	82	Tingkat keamanan informasi pemerintah	66,56%	47,91%
22	Budaya	83	Terlestariannya Cagar Budaya	100%	100%
23	Perpustakaan	84	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	1	0
		85	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	1	0
24	Kearsipan	86	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	47%	47%
		87	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	6,33%	6,33%
<b>Urusan Pilihan</b>					
25	Kelautan dan Perikanan	88	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)	58.822,30	59.372,73
26	Pariwisata	89	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan	11,06%	-99,78%

No	Urusan	No. IKK	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	LPPD 2020	LPPD 2021
				Capaian	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			mancanegara per kebangsaan		
		90	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	-72,51%	-26,50%
		91	Tingkat Hunian Akomodasi	15,02%	100%
		92	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	5,67%	3,81%
		93	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	28,58%	12,40%
27	Pertanian	94	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	1477.78	13,90
		95	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	-18,54%	-19,17%
28	Energi dan Sumber Daya Mineral	96	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kabupaten/kota	100%	100%
29	Perdagangan	97	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	100%	100%
		98	Persentase kinerja realisasi pupuk	5,31%	13,84%
		99	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	100%	100%

No	Urusan	No. IKK	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	LPPD 2020	LPPD 2021
				Capaian	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
30	Perindustrian	100	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	6,94	9,93
		101	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	9%	100%
		102	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100%	35,71%
		103	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0%	0%
		104	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota	0%	0%
		105	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	5	100
31	Transmigrasi	106	-	0	0

### 2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Tabel. menjabarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bintan tahun 2021, sebagai berikut:

**Tabel 2.10**  
**Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bintan Tahun 2021**

No	Urusan	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Pemerintahan	LPPD 2020	LPPD 2021	Sumber Data
				Capaian	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan</b>						
1.	Perencanaan dan Keuangan	1	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	29,13%	24,15%	BKAD
		2	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD)	0,71%	0,94%	BAPENDA
		3	Mauritas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3	3	INSPEKTORAT DAERAH
		4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3	3	INSPEKTORAT DAERAH
		5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi <i>transfer expenditures</i> )	231.20	591.86	BKAD
		6	Opini Laporan Keuangan	10	10	BKAD
2.	Pengadaan	7	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	100%	0%	SEKRETARIAT DAERAH
		8	Persentase jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	3,39	2,36%	SEKRETARIAT DAERAH
		9	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	21,89%	54,62%	SEKRETARIAT DAERAH



No	Urusan	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Pemerintahan	LPPD 2020	LPPD 2021	Sumber Data
				Capaian	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.	Kepegawaian	10	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	321,16%	178,21%	BKPSDM
		11	Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	7,73%	19,05%	BKPSDM
		12	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	15,51%	5,96%	BKPSDM
4.	Manajemen Keuangan	13	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	7,89	8,28	BKAD
		14	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	62,20	29,87	BKAD
		15	<i>Assets Management</i>	4	4	BKAD
		16	Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	10,15%	11,82%	BKAD
5.	Transparansi dan Partisipasi Publik	17	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	92,09%	80,78%	BKAD
		18	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	100%	100%	BKAD

### 2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas adalah suatu wujud pertanggungjawaban dari suatu instansi pemerintah atas kegiatan yang telah dilaksanakan dalam waktu satu tahun yang disusun melalui media pelaporan. Bagian Akuntabilitas Kinerja dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini disusun dalam rangka mengukur

tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan, sasaran, kebijakan, dan program.

Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah juga menginformasikan capaian keberhasilan pemerintah daerah dalam pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah secara terukur, sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja kepala daerah. Informasi capaian akuntabilitas pemerintah daerah memuat: target kinerja dalam perjanjian kinerja; pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja; pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya; pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah; analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai; serta, analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja. Pada bagian ini, disajikan juga capaian terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2016-2021.

Untuk mengukur ketercapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bintan, sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2016-2021, maka, dilakukan pengukuran terhadap IKU secara berkala.

### **2.3.1 Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bintan**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan

penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, maka, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Penetapan IKU dimaksudkan untuk mengukur tingkat pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan Kabupaten Bintan selama lima tahun ke depan. Dengan IKU, dapat diketahui apakah harapan dan kenyataan yang ingin dicapai selama lima tahun ke depan telah berjalan sesuai dengan garis yang ditetapkan atau justru mengalami deviasi sehingga perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan.

Dalam perencanaan daerah, penetapan IKU mutlak diperlukan, karena IKU memiliki fungsi yang komprehensif, antara lain sebagai alat deteksi dini untuk mengetahui permasalahan yang muncul yang mungkin dapat menghambat kinerja selama implementasi dokumen perencanaan dilakukan. Selain itu, adanya IKU juga dapat membantu pemerintah daerah untuk fokus pada tujuan dan target yang telah ditetapkan. IKU juga dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki kapasitas organisasinya berdasarkan pada hasil evaluasi yang dilakukan serta memberikan ruang lebih luas bagi peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik. Tidak hanya itu, IKU juga merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan IKU sebagai suatu prioritas program dan

kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

IKU dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program terhadap tingkat capaian IKU berkenaan setelah program prioritas ditetapkan. Penetapan IKU bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi misi Kepala Perangkat Daerah (Bupati dan Wakil Bupati) dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir periode perencanaan dimana IKU akan menjadi bahan evaluasi kinerja RPJMD. IKU Kabupaten Bintan terdiri dari tiga aspek utama, yaitu Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum, dan Aspek Daya Saing Daerah.

**Tabel 2.11**  
**Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bintan Tahun 2016-2021**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2015)	Target Capaian					Kondisi Akhir RPJMD (2021)
				2016	2017	2018	2019	2020	
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,15	5,96	6,17	≥5	≥5	≥5	≥5
2	Realisasi Investasi PMA/PMDN	Juta USD	1.251	1.251	1.351	1.451	1.551	1.661	1.771
3	Jumlah kunjungan wisatawan	Wisatawan	493.495	574.337	722.284	760.000	780.000	800.000	850.000
4	Persentase pertumbuhan sub sektor perikanan dalam PDRB	%	7,8	≥7	≥7	≥7	≥7	≥7	≥7
5	Persentase tingkat kemantapan jalan (Mantap Sempurna)	%	n/a	42,51	52,05	52,05	52,06	53,02	54,15
6	Jumlah pulau yang berpenghuni yang tercakupi jaringan transportasi	%	8	8	8	9	10	11	11

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2015)	Target Capaian					Kondisi Akhir RPJMD (2021)
				2016	2017	2018	2019	2020	
7	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	n/a	36	38	40	42	44	46
8	Total Fertility Rate (TFR)	%	n/a	3,70	3,65	3,20	3	2,8	2,8
9	Tingkat pengangguran terbuka	%	6,74	8,06	7,44	6,91	6,40	5,89	5,39
10	Peraturan yang mendukung kelestarian nilai dan seni budaya melayu	Jumlah Peraturan	n/a	2	4	6	7	7	7
11	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	71,92	72,38	72,62	≥70	≥70	≥70	≥70
12	Indeks Pembangunan Gender	%	92,41	92,41	92,41	92,41	92,41	92,41	92,41
13	Persentase penduduk miskin	%	6,07	6,43	6,01	<6,5	<6,5	<6,5	<6,50
14	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	%	10	60	65	50	60	70	80
15	Persentase Ketersediaan Pangan Masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100
16	Hasil pengukuran indeks kualitas air	Poin	70	70	70	70	70	70	70
17	Hasil pengukuran indeks kualitas Udara	Poin	1	1	1	1	1	1	1

### 2.3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2021

Pengukuran capaian kinerja Kabupaten Bintang tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target capaian IKU yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Pemerintah

Kabupaten Bintang Tahun 2021 dengan realisasi capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2021.

Capaian IKU Pemerintah Kabupaten Bintang tahun 2021, jika dibandingkan dengan kondisi akhir dalam RPJMD tahun 2016-2021 dan target capaian tahun 2021, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.12**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2021**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Akhir RPJMD (2021)	Target Capaian 2021	Capaian 2021
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	>5	3-5	0,23
2	Realisasi Investasi PMA/ PMDN	Juta USD	1.771	<1.771	1550,49
3	Jumlah kunjungan wisatawan	Wisatawan	850.000	<850.000	88.430
4	Persentase pertumbuhan sub sektor perikanan dalam PDRB	%	>7,0	<7	7
5	Persentase tingkat kemantapan jalan (Mantap Sempurna)	%	54	<54,15	51,64
6	Jumlah Pulau yang berpenghuni yang tercakupi jaringan transportasi	%	11	11	12
7	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	46	46	65,80
8	Total Fertility Rate (TFR)	%	3	3	2,25
9	Tingkat pengangguran terbuka	%	5	5,39	8,86
10	Peraturan yang mendukung kelestarian nilai dan seni budaya melayu	Jumlah Peraturan	7	7	4
11	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	>70	>70	74,57
12	Indeks Pembangunan Gender	%	92	92	93,12
13	Persentase penduduk miskin	%	<6,5	>=6,5	6,42
14	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	%	80	80	85
15	Persentase Ketersediaan Pangan Masyarakat	%	100	100	100
16	Hasil pengukuran indeks kualitas air	Poin	70	70	55,56
17	Hasil pengukuran indeks kualitas Udara	Poin	1	1	93,43

### 2.3.3. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama

Capaian IKU Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021, jika dibandingkan dengan capaian IKU tahun 2020, dapat dilihat pada Tabel. berikut ini:

**Tabel 2.13**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Utama Kabupaten Bintan**  
**Tahun 2020-2021**

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Capaian 2021	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	3-5	-4,28	0,23
2	Realisasi Investasi PMA/ PMDN	Juta USD	<1.771	1.325,42	1550,49
3	Jumlah kunjungan wisatawan	Wisatawan	850.000	202.563	88.430
4	Persentase pertumbuhan sub sektor perikanan dalam PDRB	%	<7	5,55	7
5	Persentase tingkat kemantapan jalan (Mantap Sempurna)	%	<54,15	61,64	51,64
6	Jumlah Pulau yang berpenghuni yang tercakupi jaringan transportasi	%	11	12	12
7	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	46	54,06	65,80
8	Total Fertility Rate (TFR)	%	3	2,22	2,25
9	Tingkat pengangguran terbuka	%	5,39	8,86	8,62
10	Peraturan yang mendukung kelestarian nilai dan seni budaya melayu	Jumlah Peraturan	7	4	4
11	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	>70	74,31	74,57
12	Indeks Pembangunan Gender	%	92	93,10	93,12
13	Persentase penduduk miskin	%	>=6,5	6,36	6,42
14	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	%	80	85	85
15	Persentase Ketersediaan Pangan Masyarakat	%	100	100	100
16	Hasil pengukuran indeks kualitas air	Poin	70	52,71	55,56
17	Hasil pengukuran indeks kualitas Udara	Poin	1	1	93,43

### 2.3.4 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

#### **Sasaran Strategis 1**

Meningkatnya Realisasi Investasi dan Pelayanan Perizinan serta Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi

#### **Indikator Kinerja Utama 1: Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu. Menurut Badan Pusat Statistik, perekonomian Indonesia pada tahun 2021 berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 16.970,8 triliun dan PDB per kapita mencapai Rp. 62,2 juta rupiah dengan laju pertumbuhan ekonomi mencapai 3,7% atau naik 5,80% dari tahun 2020 yang berada pada angka -2,10%.

Kabupaten Bintan pada tahun 2021 menargetkan pertumbuhan ekonomi pada rentang 3-5%. Namun, dalam perjalanannya sejak tahun 2020, pandemi Covid-19 melanda dunia, termasuk Indonesia, dan tidak terkecuali Kabupaten Bintan, sehingga mengakibatkan memburuknya perekonomian global, nasional, dan lokal. Pandemi Covid-19 merupakan kejadian luar biasa yang membutuhkan respon kebijakan dan upaya penanganan yang luar biasa untuk memitigasi dampak distortifnya terhadap berbagai aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi masyarakat. Semua negara di dunia, termasuk Indonesia dan Kabupaten Bintan berusaha sekuat tenaga dalam menghadapi dampak pandemi Covid-19 dan merespon dengan berbagai kebijakan penanganan sebagai Langkah antisipasi penyebaran pandemi Covid-19. Perubahan pola kerja sebagai akibat dari pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang



diterapkan sebagai langkah antisipasi penyebaran Covid-19 juga kemudian berimbas pada sulitnya pelaku usaha untuk menjalankan usaha mereka. Kabupaten Bintan, yang mengandalkan sektor pariwisata, juga terkena dampak yang sangat besar akibat pandemi tersebut.

**Tabel 2.14**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2021**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target		Realisasi		Capaian Kinerja (%)		
			RPJMD	RKPD 2021	2020	2021	T-RPJMD	TS (Terhadap Tahun Sebelumnya)	2021
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	> 5	3-5	-4,28	0,23	4,6	4,51	5,75

*Sumber: BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2021*

Dampak dari pandemi Covid-19, ditambah dengan fluktuasi kondisi ekonomi global mengakumulasi tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Bintan, seperti: perlambatan pertumbuhan ekonomi, menurunnya konsumsi rumah tangga, rendahnya daya beli masyarakat, menurunnya sektor UMKM, sampai dengan tidak tercapainya realisasi pendapatan dari sektor perpajakan.

Seiring dengan berhasilnya penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia, kegiatan perekonomian di Kabupaten Bintan semakin membaik meski belum kembali ke posisi semula. Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bintan menunjukkan pertumbuhan dengan bangkit (*rebound*) ditengah kondisi gejolak ekonomi global, nasional, dan regional yang terdampak pandemi Covid-19. Ekonomi Kabupaten Bintan mampu tumbuh hingga 4,43% *year-on-year* pada tahun 2021, dengan angka pertumbuhan ekonomi sebesar 0,23%. Angka pertumbuhan ekonomi tahun 2021

lebih tinggi dari angka pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020, yakni sebesar -4,20%.

### **Indikator Kinerja Utama 2: Realisasi Investasi (PMA/ PMDN)**

Peningkatan investasi oleh perusahaan, baik Penanam Modal Asing (PMA) maupun Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN), menjadi salah indikator untuk pembangunan daya saing perekonomian Kabupaten Bintan. Capaian pembangunan investasi Kabupaten Bintan yang menjadi IKU adalah Realisasi Investasi (PMA/PMDN) dalam juta USD. Tabel berikut menunjukkan target dan capaian indikator Realisasi Investasi PMA dan PMDN tahun 2021.

**Tabel 2.15**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Realisasi Investasi (PMA/PMDN) Tahun 2021**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target		Realisasi		Capaian Kinerja (%)		
			RPJMD	RKPD 2021	2020	2021	T-RPJMD	TS (Terhadap Tahun Sebelumnya)	2021
1	Realisasi Investasi PMA/ PMDN	Juta USD	1771	< 1771	1325	1550,49	87,54	225,49	87,55

*Sumber: LKPJ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan Tahun 2021*

Nilai realisasi investasi Kabupaten Bintan adalah sebesar USD 1.550.497.032 atau setara dengan Rp. 22.237.228.437.353,- pada tahun 2021. Rincian realisasi investasi tersebut adalah sebagai berikut: realisasi investasi PMA sebesar Rp. 21.108.811.388.516,- dan PMDN sebesar Rp. 1.128.417.048.837,-. Nilai realisasi investasi pada tahun 2021 meningkat dari tahun 2020, yakni sebesar Rp. 18.975.363.093.573,-. Realisasi investasi pada tahun 2021 dapat dikategorikan sangat baik, terutama pada saat ini dimana Kabupaten Bintan masih terdampak pandemi Covid-19.

Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian IKU pada Realisasi Investasi (PMA/PMDN) tahun 2021 adalah:

**Tabel 2.16**  
**Program dan Kegiatan Pendukung**  
**Realisasi Investasi (PMA/PMDN) Tahun 2021**

No.	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	Persentase izin terbit sesuai SOP	Persen	100	100
1.1	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal	Persen	100	100
1.1.1	Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah kunjungan lapangan dalam rangka pemenuhan komitmen	Kali	144	144
2	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	Jumlah nilai investasi perusahaan (PMA/PMDN) Juta USD	Juta USD	1.771	1.550
2.1	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Bintan	Persen	100	100
2.1.1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya pelayanan investasi dan realisasi investasi di kawasan FTZ Bintan	PMDN/UKM	40	40
2.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya pelayanan investasi dan	Kegiatan	7	7

No.	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		realisasi investasi di kawasan FTZ Bintan			
2.1.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya pelayanan investasi dan realisasi investasi di kawasan FTZ Bintan	PMDN/UKM	50	50

Sumber: LKPJ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan Tahun 2021

Pencapaian realisasi penanaman modal di Kabupaten Bintan sangat baik pada saat guncangan pandemi covid 19 seperti ini dan sebagian besar dari realisasi upaya keras seluruh sektor.

Di tengah kondisi guncangan ekonomi, pemerintah Kabupaten Bintan mendapatkan kepercayaan investor untuk tetap melakukan aktivitas penanaman modal. Kinerja perekonomian daerah ini mendapatkan penghargaan dalam hal realisasi investasi dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia. Untuk sektor manufaktur dan perdagangan diperkirakan mulai memproduksi normal didukung reformasi struktural melalui perbaikan regulasi dan birokrasi khususnya implementasi dari undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja. Sektor-sektor yang terkena imbas yang dalam seperti transportasi dan pariwisata, diperkirakan mulai bangkit pada tahun 2022.

## Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara

### Indikator Kinerja Utama 3: Kunjungan Wisatawan

**Tabel 2.17**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Kunjungan Wisatawan Tahun 2021**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target		Realisasi		Capaian Kinerja (%)		
			RPJMD	RKPD 2021	2020	2021	T-RPJMD	TS (Terhadap Tahun Sebelumnya)	2021
1	Jumlah kunjungan wisatawan	Wisatawan	850000	800000	202563	88430	10,40	114.133,00	11,05

Sumber: LKPJ Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2021

Pada tahun 2020, kunjungan wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Bintan adalah sebesar 202.563 wisatawan, yang terdiri dari 120.058 wisatawan nusantara dan 82.505 wisatawan mancanegara. Namun begitu, tren penurunan kunjungan wisatawan terjadi pada tahun 2021 dengan jumlah kunjungan sebesar 88.430 wisatawan. Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara, dengan rincian: kunjungan wisatawan nusantara adalah sebesar 88.248 wisatawan dan 128 wisatawan merupakan wisatawan mancanegara. Jumlah kunjungan tersebut tentunya sangat jauh dari pemenuhan target yang ditetapkan pada tahun 2021, yakni sebesar 850.000 kunjungan wisatawan. Penurunan kunjungan tersebut terjadi karena masih berlakunya pembatasan perjalanan dan pergerakan masyarakat baik di dalam maupun di luar negeri sebagai imbas dari pandemi Covid-19.

Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian IKU Kunjungan Wisatawan tahun 2021 adalah:

**Tabel 2.18**  
**Program dan Kegiatan Pendukung Kunjungan Wisatawan**  
**Tahun 2021**

No.	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>	Persentase Destinasi Wisata yang Dikembangkan	Persen	28,57	28,57
1.1	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Daya Tarik Wisata yang dikelola	Lokasi	400	400
1.1.1	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan	Dokumen	2	2
1.1.2	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Daya Tarik Wisata yang dimonitoring	Lokasi	400	400
1.2	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah pengelolaan destinasi pariwisata unggulan daerah	Lokasi	2	2
1.2.1	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah SDM pariwisata yang dibina	Kegiatan	132	132
1.2.2	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi pemeliharaan sarana dan prasarana	Lokasi	2	3
2	<b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>	Persentase promosi Tourism, Trade and Investment (TTI) terintegrasi	Persen	100	100
2.1	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi dan Pemasaran Pariwisata yang Efektif	Kali	3	3
2.1.1	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah promosi melalui media online (website, IG, Twiter, FB)	Kali	48	48
		Jumlah video pariwisata	Video	1	1
3	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>	% Pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang dibina	Persen	10	10

No.	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.1	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekraf yang dilaksanakan	Kali	4	4
3.1.1	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM pariwisata dan ekraf yg memiliki kompetensi	Orang	64	64
3.1.2	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah SDM Yang Dibina	Orang	88	88
3.1.3	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Monitoring dan Evaluasi	Kali	1	1

Sumber: LKPJ Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2021

### Sasaran Strategis 3

#### Meningkatnya Nilai Produksi Perikanan

#### Indikator Kinerja Utama 4: Meningkatnya Nilai Produksi Perikanan

Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi sumber daya laut yang cukup melimpah. Secara historis, budaya maritim Indonesia sebagai bangsa bahari sangat kuat diwariskan. Oleh karena itu, arah pembangunan ke depan perlu menitikberatkan pada optimalisasi potensi kelautan sebagai upaya meningkatkan perekonomian bangsa, mengingat potensi lestari sumber daya ikan laut Indonesia adalah 73 juta ton per tahun yang tersebar di perairan wilayah Indonesia dan perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Pembangunan berbasis kelautan selain dapat mengoptimalkan pemanfaatan potensi kelautan juga dapat

meningkatkan kualitas hidup nelayan dan kelompok masyarakat pesisir yang menjadikan laut sebagai sumber mata pencaharian.

Kabupaten Bintan sendiri memiliki luas wilayah mencapai 88.038,54 km<sup>2</sup>. Luas wilayah daratannya adalah 2,21% atau 1.946,13 km<sup>2</sup>, sementara 86.092,41 km<sup>2</sup> adalah wilayah laut. Oleh karenanya, dengan potensi kelautan yang sangat besar ini jika dikelola dengan baik dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bintan pada umumnya.

**Tabel 2.19**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Peningkatan Produksi Perikanan Kabupaten Bintan**  
**Tahun 2021**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target		Realisasi		Capaian Kinerja (%)		
			RPJMD	RKPD 2021	2020	2021	T-RPJMD	TS (Terhadap Tahun Sebelumnya)	2021
1	Persentase pertumbuhan sub sektor perikanan dalam PDRB	%	> 7,0	< 7	5,6	7	100	1,40	100

*Sumber: LKPJ Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan Tahun 2021*

Capaian pertumbuhan sub sektor perikanan dalam PDRB tersebut menunjukkan besaran kontribusi dari sub sektor perikanan dalam PDRB di Kabupaten Bintan, yakni sebesar 7% pada tahun 2021. Namun, angka ini merupakan data sangat sementara yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Bintan.

Pertumbuhan Sub sektor Perikanan dalam PDRB dipengaruhi oleh dua faktor, yakni produksi perikanan budidaya dan tangkap.



**Tabel 2.20**  
**Produksi Perikanan Budidaya dan Tangkap Kabupaten Bintan Tahun 2021**

No	Produksi Perikanan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	Produksi perikanan budidaya (Ton)	Ton	2.240,70	2.241,48	100,03%
2.	Produksi perikanan tangkap (Ton)	Ton	56.801	57.131,26	100,58%

*Sumber: LKPJ Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan Tahun 2021*

Produksi Perikanan Budidaya di Kabupaten Bintan pada tahun 2021 adalah sebesar 2.241,48 ton. Jumlah tersebut melebihi target yang telah ditetapkan, yakni 2.240,70 ton. Sementara itu, Produksi Perikanan Tangkap di Kabupaten Bintan pada tahun 2021 adalah sebesar 57.131,26 ton. Sejalan dengan Perikanan Budidaya, Perikanan Tangkap juga melebihi target yang telah ditetapkan, yakni 56.801 ton. Peningkatan angka produksi perikanan budidaya dan tangkap tersebut menunjukkan bahwa minat masyarakat Kabupaten Bintan dalam berbudidaya dan konsumsi ikan masih sangat tinggi.

Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian IKU Peningkatan Produksi Perikanan tahun 2021 adalah:

**Tabel 2.21**  
**Program dan Kegiatan Pendukung Produksi Perikanan Budidaya dan Tangkap Tahun 2021**

No.	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>	1. Produksi perikanan tangkap	Ton	56.801	31.273,67
		2. Persentase kelompok nelayan aktif	Persen	75	75
1.1	Kegiatan	Meningkatnya Produksi	Ton	56.801	56.801

No.	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Perikanan Tangkap			
1.1.1	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	Paket	51	51
1.2	Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Persentase Kelompok Nelayan Aktif	Persen	75	0
2	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	1. Persentase Kelompok Pembudidayaan Ikan (POKDAKAN) aktif	Persen	75	75
		2. Produksi perikanan budidaya	Ton	2.240,70	2.240,70
2.1	Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya ikan Kecil	Meningkatnya Persentase Kelompok Pembudidaya Ikan Aktif	Persen	75	75
2.1.1	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Kegiatan Pelatihan dan Magang Perikanan Budidaya	Kegiatan	4	4
2.2	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Ton	2240.7	2240.7
2.2.2	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1	Jumlah Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya	Paket	31	31

No.	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	(satu) Daerah Kabupaten/Kota				
2.2.3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Perikanan Budidaya	Paket	11	11

Sumber: LKPJ Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan Tahun 2021

#### Sasaran Strategis 4

Meningkatnya Kualitas Jaringan Jalan dan Prasarana Transportasi serta kapasitas dan fungsi sanitasi air

#### Indikator Kinerja Utama 5: Tingkat Kemantapan Jalan (Mantap Sempurna)

Tabel 2.22  
Capaian Indikator Kinerja Utama  
Tingkat Kemantapan Jalan (Mantap Sempurna) Tahun 2021

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target		Realisasi		Capaian Kinerja (%)		
			RPJMD	RKPD 2021	2020	2021	T-RPJMD	TS (Terhadap Tahun Sebelumnya)	2021
1	Persentase tingkat kemantapan jalan (Mantap Sempurna)	%	54,153	< 54,153	61,55	64,09	118,34986	2,54	118,35

Sumber: LKPJ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021

Tingkat Kemantapan Jalan (Mantap Sempurna) adalah kondisi ruas jalan sedang sampai dengan baik dari aspek kondisi maupun aspek pemanfaatan dan kapasitas. Tingkat Kemantapan Jalan (Mantap Sempurna) Kabupaten Bintan adalah sebesar 64,09 % pada tahun 2021. Tingkat Kemantapan Jalan (Mantap Sempurna) pada tahun

2021, mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2020, yakni sebesar 61,55%. Tingkat Kemantapan Jalan yang meningkat dan lebih baik, dapat dijadikan tolak ukur bahwa pelayanan kepada pengguna jalan di Kabupaten Bintan semakin baik.

Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian IKU Tingkat Kemantapan Jalan (Mantap Sempurna) Tahun 2021 adalah:

**Tabel 2.23**  
**Program dan Kegiatan Pendukung**  
**Tingkat Kemantapan Jalan (Mantap Sempurna) Tahun 2021**

No.	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	km	252,93	252,93
1.1	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya Prasarana Jalan, Menambah Kapasitas Jalan Serta Memperlancar Arus Transportasi Darat	Persen	100	100
1.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan				
1.1.2	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Pengelolaan Pendataan Jalan dan Jembatan Kab. Bintan	Tahun	1	1

No.	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.1.3	Pembangunan Jalan	Jumlah Pembangunan Jalan yang dibangun	km	2.8	2.15
1.1.4	Rekonstruksi Jalan	Jumlah panjang jalan yang direkonstruksi			
1.1.5	Pemeliharaan Berkala Jalan	Jumlah Pemeliharaan Berkala Jalan yang dilaksanakan	m <sup>2</sup>	8.378	6492
7.1.6	Pemeliharaan Rutin Jalan	Jumlah panjang jalan yang di Patching Aspal Jumlah panjang jalan yang di Patching Beton	m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	4.492/ 2000	4.492/ 2000
7.1.7	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah pemeliharaan jembatan yang dilaksanakan	m <sup>2</sup>	2.25	2875
7.1.8	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/ Jembatan	Tersedianya penunjang pengelola pembangunan infrastruktur jalan	Tahun	1	1

Sumber: LKPJ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021

Kondisi infrastruktur jalan dengan karakteristik pulau-pulau dan pesisir di Kabupaten Bintan memiliki tantangan tersendiri dalam pemenuhan kebutuhan dasar bagi memudahkan mobilitas masyarakat serta aksesibilitas yang mendukung pergerakan ekonomi antar wilayah. Pemenuhan ini dilakukan sinergitas lintas pemerintahan baik melalui pemerintah provinsi maupun dukungan pemerintah pusat.

## Sasaran Strategis 5

Meningkatkan keterhubungan antar wilayah dan antar Pulau Untuk mendukung pertumbuhan wilayah secara merata

### Indikator Kinerja Utama 6: Pulau Berpenghuni yang Tercukupi Jaringan Transportasi

Sebagai negara kepulauan, transportasi laut memiliki peranan yang signifikan untuk menjamin kelancaran mobilitas penduduk dan distribusi barang antar pulau di Indonesia, terutama di wilayah kepulauan seperti Kabupaten Bintan. Pelabuhan laut yang menjadi penghubung antar pulau menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam mendukung aktivitas perekonomian di suatu wilayah yang mengandalkan moda transportasi laut. Tabel berikut menunjukkan target dan capaian indikator pulau berpenghuni yang tercukupi jaringan transportasi tahun 2021:

**Tabel 2.24**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Pulau Berpenghuni yang Tercukupi Jaringan Transportasi**  
**Tahun 2021**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target		Realisasi		Capaian Kinerja (%)		
			RPJMD	RKPD 2021	2020	2021	T-RPJMD	TS (Terhadap Tahun Sebelumnya)	2021
1	Jumlah Pulau yang berpenghuni yang tercakupi jaringan transportasi	%	11	11	11	12	109,09091	1,00	22,16

Sumber: LKPJ Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan Tahun 2021

Kabupaten Bintan terdiri dari 240 (dua ratus empat puluh) buah pulau besar dan kecil dari jumlah tersebut 39 (tiga puluh sembilan) pulau merupakan pulau berpenghuni. Diawal RPJMD, jumlah pulau berpenghuni yang dilayani angkutan laut adalah sebanyak 8 (delapan) pulau dan di akhir periode RPJMD jumlah pulau

berpengerhuni yang dilayani angkutan laut ditargetkan menjadi 12 pulau atau 31% dari jumlah pulau berpengerhuni di Kabupaten Bintan.

Pada tahun 2021, jumlah pulau yang tercakupi jaringan transportasi di Kabupaten Bintan adalah sebanyak 12 pulau. Jumlah tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya, yakni 12 pulau. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar jumlah pulau berpengerhuni di Kabupaten Bintan telah terhubung jaringan transportasi dan telah memenuhi target yang ditetapkan. Pulau-pulau tersebut adalah: Pulau Bintan; Pulau Mapur; Pulau Numbing; Pulau Pangkil; Pulau Mantang; Pulau Kelong; Pulau Tambelan; Pulau Air Glubi; Pulau Dendun; Pulau Gin Kecil; Pulau Telang; dan Pulau Gin Besar.

Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian IKU Pulau Berpengerhuni yang Tercukupi Jaringan Transportasi Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.25**  
**Program dan Kegiatan Pendukung**  
**Pulau Berpengerhuni yang Tercukupi Jaringan Transportasi**  
**Tahun 2021**

No.	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</b>	1. Jumlah Orang Yang Melalui Pelabuhan Pertahun 2. Jumlah Orang Yang Melalui Pelabuhan Pertahun	Orang	25.000	25.000
1.1	<b>Kegiatan</b> Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas	Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran	Persen	100	100

No.	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota			
1.1.1	<b>Sub Kegiatan</b> Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Tahun	1	1
1.2	<b>Kegiatan</b> Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Terpeliharanya Pelabuhan/Dermaga	Pelabuhan / Dermaga	8	8
1.2.1	<b>Sub Kegiatan</b> Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dermaga yang Direhabilitasi	Dermaga	2	2
		Jumlah Pelabuhan yang Direhabilitasi	Pelabuhan	2	2
1.2.2	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dermaga Yang Direhabilitasi	Dermaga	3	3
		Jumlah Pelabuhan yang Beroperasi dan Dipelihara	Pelabuhan	2	2

Sumber: LKPJ Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan Tahun 2021

## Sasaran Strategis 6

Meningkatnya Profesionalitas Aparatur akuntabilitas kinerja Pemerintahan serta pengelolaan keuangan dan aset daerah

### Indikator Kinerja Utama 7: Indeks Reformasi Birokrasi

**Tabel 2.26**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2021**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target		Realisasi		Capaian Kinerja (%)		
			RPJMD	RKPD 2021	2020	2021	T-RPJMD	TS (Terhadap Tahun Sebelumnya)	2021
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	46	46	43,07	65,82	143,08696	22,75	143,09

Catatan/Sumber: \*\* Nilai hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan belum dievaluasi oleh Kementerian PAN dan RB



Reformasi birokrasi merupakan upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik. Arah perubahan dalam reformasi birokrasi adalah organisasi, tata kelola, peraturan perundang-undangan, SDM, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, dan *mindset* dan *culture set*.

Ukuran keberhasilan reformasi birokrasi adalah:

- Tidak ada korupsi;
- Tidak ada pelanggaran/sanksi;
- APBN dan APBD baik; semua program selesai dengan baik;
- Semua perizinan selesai dengan cepat dan tepat;
- Komunikasi dengan publik baik;
- Penggunaan waktu (jam kerja) efektif dan produktif;
- Penerapan *reward* dan *punishment* secara konsisten dan berkelanjutan;
- Hasil pembangunan nyata (pro-pertumbuhan, pro-lapangan kerja, dan pro-pengurangan kemiskinan; artinya, menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi kemiskinan, dan memperbaiki kesejahteraan rakyat).

Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi dibagi ke dalam dua komponen, yaitu komponen pengungkit dan hasil. Komponen Pengungkit adalah pengukuran terhadap seluruh upaya perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilakukan oleh pihak internal instansi pemerintah agar mampu memberikan pelayanan yang berkualitas, efektif, efisien, akuntabel dan bebas KKN. Komponen Hasil adalah pengukuran terhadap kapasitas dan akuntabilitas,

integritas (bersih dan bebas KKN), dan kepuasan pengguna layanan;

Bobot Pengukuran diberikan 60% untuk Komponen Pengungkit dan 40% untuk Komponen Hasil. Metode pengukuran/penilaian adalah dengan *self assessment* (penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi) yang dievaluasi oleh Kementerian PAN dan RB melalui wawancara, observasi langsung, pengumpulan bukti- bukti pendukung, survei internal dan eksternal.

Pada tahun 2020, Kabupaten Bintan telah melaksanakan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB). Berdasarkan hasil penilaian Kementerian PAN dan RB, Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Bintan berada pada angka 43,07 poin, sedangkan pada tahun 2021 berdasarkan hasil *self assessment* yang dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi Kabupaten Bintan, maka, diperoleh nilai Reformasi Birokrasi Kabupaten Bintan sebesar 65,80 poin. Namun, nilai ini masih dalam tahap evaluasi oleh Kementerian PAN dan RB.

Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian IKU Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Bintan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.27**  
**Program dan Kegiatan Pendukung**  
**Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2021**

No.	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	1. Cakupan Patroli Siaga, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Rasio	0,90	0,90
			Persen	57,14	57,14

No.	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
		2. Cakupan Penegakan Perda dan Perkada			
1.1	<b>Kegiatan</b> Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Penanganan Gangguan Trantibum	Aktivitas	140	140
1.1.1.	<b>Sub Kegiatan</b> Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah aktivitas pengawasan dan operasi trantibum	Aktivitas	40	40
1.1.2	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah lokasi dalam upaya kerjasama lembaga	Aktivitas	1	1
1.2	<b>Kegiatan</b> Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Meningkatnya Pengawasan dan Penanganan atas Pelanggaran Perda dan Perbup			
1.2.2	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Pengawasan Perda dan Perbup	Kali pengawasan	35	35
2	<b>PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	Tersedianya Administrasi Perkantoran sesuai standar Pelayanan Minimal	Orang	150	150
2.1	<b>Kegiatan</b> Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Terwujudnya pembinaan dan pembauran kebangsaan serta terfasilitasinya LVRI kabupaten Bintang	Persen	100	100
2.1.1	<b>Sub Kegiatan</b> Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi	Terlaksananya Kegiatan LVRI Kabupaten Bintang Terlaksananya Rapat	Orang/Kali Orang	31/2	31/2

No.	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
	Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)		30	30
3	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>	Kegiatan pembinaan politik daerah	Kegiatan	1	1
3.1	<b>Kegiatan</b> Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Terwujudnya Pembinaan Politik Daerah Kabupaten Bintan	Persen	100	100
3.1.1	<b>Sub Kegiatan</b> Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Terlaksananya Pemberian Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	Partai Politik	7	7
3.1.2	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi	Terlaksananya penguatan masyarakat sebagai pemegang kedaulatan yang sadar, kritis, rasional dan	orang	100 - 100	100 - 100

No.	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
	Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	mandiri dalam aktivitas mendukung kebijakan politik daerah Kab. Bintang Terlaksananya penguatan nilai-nilai budaya dan etika politik bagi masyarakat sesuai dengan etika dan budaya bangsa			
3.1.3	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik Daerah Terlaksananya verifikasi dan seleksi administrasi bantuan keuangan kepada Partai Politik Kab. Bintang	Partai Politik	7	7
			Pemantauan	52	52
4	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	Kegiatan	1	0
5	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	Kegiatan pembinaan politik daerah	Kegiatan	1	1
5.1	<b>Kegiatan</b> Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Terwujudnya Deteksi dini dan Cegah Dini situasi Ancaman, GanggUI Hambatan dan Tantangan (AGHT) di Bidang IPOLEKSOSBUDKAM di Kabupaten Bintang	Persen	100	100
5.1.1	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama	Terlaksananya Koordinasi Kerjasama Pemda dan Masyarakat dalam peningkatan	Orang	136	136
			Kali	1	1

No.	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
	Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	kewaspadaan dini Lingkup Pemda Bintang			
6	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	1. Persentase RENJA SKPD yang selaras dengan dokumen perencanaan 2. Tingkat kepuasan pengguna informasi atas data/informasi pembangunan daerah bintang yang disajikan dalam website Pemkab/Bappeda Bintang 3. Persentase dokumen pelaporan yang disusun tepat waktu.	Persen	100	100
6.1	<b>Kegiatan</b> Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Pendanaan	OPD	39	39
6.1.1	<b>Sub Kegiatan</b> Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Teranalisisnya Kondisi Daerah, permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Dokumen	1	1
6.1.2	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Terlaksananya Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Laporan	1	1
6.1.3	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Kegiatan Forum Konsultasi Publik	laporan	1	1
6.1.4	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan	Laporan	1	1

No.	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
		Forum SKPD/Lintas SKPD			
6.1.5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Musrenbang Kabupaten	Laporan	1	1
6.1.6	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Terselenggaranya Musrenbang Kecamatan	Laporan	10	10
6.1.7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	3	3
6.2	<b>Kegiatan</b> Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya Publikasi data pembangunan daerah Kab. Bintan	Bulan	12	12
6.2.1	<b>Sub Kegiatan</b> Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya analisis data dan informasi Perencanaan pembangunan daerah	Dokumen/Paket Data	1/1	1/1
6.2.2	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	1	1
6.3	<b>Kegiatan</b> Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya laporan pelaksanaan pembangunan secara periodik yang tepat waktu, akuntabel, efisien dan efektif sesuai dengan target dan rencana yang telah ditetapkan	Bulan	12	12
6.3.1	<b>Sub Kegiatan</b> Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan penyusunan dokumen laporan bulanan dan tahunan daerah (LKPJ)	Dokumen/Pelaporan, evaluasi	1/1	1/1
7	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	1. Jumlah dokumen perencanaan pembangunan sosial yang dihasilkan 2. Jumlah dokumen perencanaan pembangunan ekonomi yang dihasilkan	Dokumen Dokumen Dokumen	4 3 2	4 3 2

No.	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
		3. Jumlah dokumen perencanaan pembangunan infrastruktur dan SDA yang dihasilkan			
7.1	<b>Kegiatan</b> Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Terkoordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Dokumen	1	1
7.1.1	<b>Sub Kegiatan</b> Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terlaksananya Koordinasi Sub Bidang Pembangunan Manusia	Dokumen	1	1
7.1.2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Tersusunnya Data Terpilah untuk Penganggaran Yang Responsif Gender Tersusunnya Dokumen Potret Pembangunan Manusia Kab.Bintan	Dokumen	1	1
7.1.3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				0
7.1.4	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terlaksananya Koordinasi Sub Bidang Pembangunan Manusia	Dokumen	1	1
7.1.5	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Tersusunnya Data Terpilah untuk Penganggaran Yang Responsif Gender Tersusunnya Dokumen Potret Pembangunan Manusia Kab.Bintan	Dokumen	1	1
7.1.6	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program-Program Penanggulangan Kemiskinan	Dokumen	1	1



No.	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
	Bidang Pembangunan Manusia				
7.2	<b>Kegiatan</b> Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Terkoordinasinya Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Bulan	12	12
7.2.1	<b>Sub Kegiatan</b> Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terlaksananya koordinasi penyusunan dokumen perencanaan daerah bidang perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1	1
7.2.2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Dokumen	1	1
7.2.3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi Penyusunan dokumen pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian	Dokumen	1	1
7.2.4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Dokumen	1	1
7.2.5	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Tersedianya dokumen rencana aksi daerah pangan dan gizi Kabupaten Bintan	Dokumen	1	1
7.2.6	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Laporan	1	1

No.	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
7.3	<b>Kegiatan</b> Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Terkoordinasinya Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Bulan	12	12
7.3.1	<b>Sub Kegiatan</b> Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kegiatan	1	1
3.3.2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	1	1
7.3.3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	1	1
8	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	1. Ketepatan Waktu Penyusunan APBD 2. Presentase SP2D yang terbit kurang dari 2 (dua) hari 3. Laporan Keuangan yang mendapat opini wajar 4. Persentase Desa yang menyampaikan Laporan Keuangan Desa tepat waktu sesuai dengan aturan yang berlaku 5. Laporan Keuangan yang mendapat opini wajar	Tepat waktu Persen WTP- Persen WTP-	Tepat waktu 94 WTP- 100 WTP-	Tepat waktu 94 WTP- 100 WTP-
8.1	<b>Kegiatan</b>	1. Terwujudnya Dokumen Perencanaan Anggaran Daerah	Dokumen	4	4

No.	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				
8.1.1	<b>Sub Kegiatan</b> Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Tersedianya Dokumen KUA dan PPAS Kabupaten Bintang	Dokumen	2	2
8.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Tersedianya Dokumen KUA dan PPAS Kabupaten Bintang	Dokumen	2	2
8.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Tersedianya Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	5	5
8.1.4	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tersedianya Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	4	4
9.2	<b>Kegiatan</b> Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1. Akuntabilitas Data Keuangan Triwulan SKPD	OPD	39	39
9.2.1	<b>Sub Kegiatan</b> Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Pendapatan Asli Daerah	Tahun	1	1
9.2.2.	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	SKPD Se- Kabupaten Bintang	OPD	39	39
9.3	<b>Kegiatan</b> Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Tenaga Akuntansi Pemerintah Kabupaten yang Handal Pada Setiap OPD	OPD	39	39
9.3.1	<b>Sub Kegiatan</b> Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan	Pendapatan Daerah dan Belanja Bantuan PPKD	OPD	39	39

No.	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
	dan Pengeluaran Kas Daerah				
9*.3.2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Rekonsiliasi Pendapatan dan Belanja OPD	OPD	39	39
9.3.3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Transparansi dan informatif tentang pengelolaan keuangan daerah	OPD	39	39
9.3.4	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Perda dan Perbup Pertanggungjawab pelaksanaan APBD	Dokumen	2	2
9.3.5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	TP-TGR dan TPTD	OPD	39	0
9.3.6	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	PPKD dan PPK OPD	OPD	39	39
9.3.7	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Organisasi Pangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Bintang dan Pejabat Tenaga Aparatur yang Akuntabel	OPD	39	39
9.4	<b>Kegiatan</b> Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Transfer Dana Desa Sesuai dengan Ketentuan	Desa	36	36
9.4.1	<b>Sub Kegiatan</b>	Pendapatan Asli Daerah	Desa	36	36

No.	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
	Analisis Investasi Pemerintah Daerah				
9.4.2	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Terlaksananya Analisa Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Desa	36	36
9.4.3	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Terlaksananya Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	desa	36	36
9.5	<b>Kegiatan</b> Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Transparansi dan Informatif Tentang Keuangan Daerah	Tahun	1	1
9.5.1	<b>Sub Kegiatan</b> Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Organisasi Pangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Bintan	OPD	39	39
9.5.2	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Transparansi dan informatif tentang pengelolaan keuangan daerah	Informasi keuangan	2	2
10	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	1. Persentase keakuratan data asset 2.	Persen	90	90
10.1	<b>Kegiatan</b> Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terwujudnya Tertib Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	OPD	39	39
10.1.1	<b>Sub Kegiatan</b> Penyusunan Standar Harga	Tersedianya Dokumen Standar Analisa Belanja Kabupaten Bintan	Dokumen	1	1
10.1.2	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kabupaten Bintan	OPD	39	39
10.1.3	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Aset Kabupaten Bintan	OPD	39	39
10.1.4	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Data Profil Aset Daerah	Kecamatan	2	2
10.1.5	Pengamanan Barang Milik Daerah	Aset Kabupaten Bintan SKPD Se- Kabupaten Bintan	OPD	39	39
10.1.6	Pengawasan dan Pengendalian				

No.	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
	Pengelolaan Barang Milik Daerah				
10.1.7	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Barang Milik Daerah	OPD	39	39
10.1.8	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Pengurus Barang dan Penyimpan Barang SKPD seKabupaten Bintan	OPD	39	39
10.1.9	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	SKPD Se- Kabupaten Bintan	OPD	39	39
11	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	1. Persentase RENJA SKPD yang selaras dengan dokumen perencanaan 2. Tingkat kepuasan pengguna informasi atas data/informasi pembangunan daerah bintan yang disajikan dalam website Pemkab/Bappeda Bintan 3. Persentase dokumen pelaporan yang disusun tepat waktu.	Persen	100	100
11.1	<b>Kegiatan</b> Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Pendanaan	OPD	39	39
11.1.1	<b>Sub Kegiatan</b> Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Teranalisisnya Kondisi Daerah, permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Dokumen	1	1
11.1.2	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Terlaksananya Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Laporan	1	1
2.1.3	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Tersedianya Laporan Pelaksanaan	laporan	1	1

No.	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
		Kegiatan Forum Konsultasi Publik			
11.1.4	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Laporan	1	1
11.1.5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Musrenbang Kabupaten	Laporan	1	1
11.1.6	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Terselenggaranya Musrenbang Kecamatan	Laporan	10	10
11.1.7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	3	3
11.2	<b>Kegiatan</b> Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya Publikasi data pembangunan daerah Kab. Bintan	Bulan	12	12
11.2.1	<b>Sub Kegiatan</b> Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya analisis data dan informasi Perencanaan pembangunan daerah	Dokumen/Paket Data	1/1	1/1
11.2.2	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	1	1
11.3	<b>Kegiatan</b> Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya laporan pelaksanaan pembangunan secara periodik yang tepat waktu, akuntabel, efisien dan efektif sesuai dengan target dan rencana yang telah ditetapkan	Bulan	12	12
11.3.1	<b>Sub Kegiatan</b> Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan penyusunan dokumen laporan bulanan dan tahunan daerah (LKPJ)	Dokumen/Pelaporan, evaluasi	1/1	1/1
12	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN</b>	1. Jumlah dokumen perencanaan	Dokumen	4	4

No.	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
	<b>SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	pembangunan sosial yang dihasilkan	Dokumen	3	3
		2. Jumlah dokumen perencanaan pembangunan ekonomi yang dihasilkan	Dokumen	2	2
		3. Jumlah dokumen perencanaan pembangunan infrastruktur dan SDA yang dihasilkan			
12.1	<b>Kegiatan</b> Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Terkoordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Dokumen	1	1
12.1.1	<b>Sub Kegiatan</b> Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terlaksananya Koordinasi Sub Bidang Pembangunan Manusia	Dokumen	1	1
12.1.2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Tersusunnya Data Terpilah untuk Penganggaran Yang Responsif Gender Tersusunnya Dokumen Potret Pembangunan Manusia Kab.Bintan	Dokumen	1	1
12.1.3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				0
12.1.4	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terlaksananya Koordinasi Sub Bidang Pembangunan Manusia	Dokumen	1	1
12.1.5	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Tersusunnya Data Terpilah untuk Penganggaran Yang Responsif Gender Tersusunnya Dokumen Potret Pembangunan Manusia Kab.Bintan	Dokumen	1	1



No.	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
12.16	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program-Program Penanggulangan Kemiskinan	Dokumen	1	1
12.2	<b>Kegiatan</b> Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Terkoordinasinya Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Bulan	12	12
12.2.1	<b>Sub Kegiatan</b> Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terlaksananya koordinasi penyusunan dokumen perencanaan daerah bidang perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1	1
12.2.2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Dokumen	1	1
12.2.3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian	Dokumen	1	1
12.2.4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Dokumen	1	1
12.2.5	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Tersedianya dokumen rencana aksi daerah pangan dan gizi Kabupaten Bintang	Dokumen	1	1
12.2.6	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan	Terlaksananya koordinasi	Laporan	1	1

No.	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
	Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA			
12.3	<b>Kegiatan</b> Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Terkoordinasinya Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Bulan	12	12
12.3.1	<b>Sub Kegiatan</b> Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kegiatan	1	1
12.3.2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	1	1
12.3.3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	1	1
13	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	1. Persentase rekomendasi temuan internal yang ditindak lanjuti 2. Persentase rekomendasi temuan internal yang ditindak lanjuti	Persen Persen	90 90	90
13.1	<b>Kegiatan</b> Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Terpenuhinya Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persen	100	100
13.1.1	<b>Sub Kegiatan</b> Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	55	55
13.1.2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kali	12	12

No.	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
13.1.3	Reviu Laporan Kinerja	Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Laporan	1	1
13.1.4	Reviu Laporan Keuangan	Terlaksananya Reviu atas Laporan Keuangan	Laporan	1	1
13.1.5	Pengawasan Desa	Terlaksananya Pengawasan Desa	Laporan	16	16
13.1.6	Kerjasama Pengawasan Internal	Terlaksananya Kerjasama Pengawasan Internal	Laporan	4	4
13.1.7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Objek pemeriksaan	50	50
13.2	<b>Kegiatan</b> Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Terpenuhinya Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persen	100	100
13.2.1	<b>Sub Kegiatan</b> Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Terlaksananya Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kali	2	2
13.2.2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	40	40
14	<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	1. Jumlah unit kerja/ OPD yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal kategori CC	OPD	12	12
14.1	<b>Kegiatan</b> Pendampingan dan Asistensi	Terpenuhinya Pendampingan dan Asistensi	Persen	100	100
14.1.1	<b>Sub Kegiatan</b> Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan	1	1
14.1.2	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	OPD	11	11
14.1.3	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Dokumen	1	1
15	<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	1. Persentase penempatan Aparatur sesuai kompetensi	Persen	85	85

No.	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
		2. Persentase penempatan Aparatur sesuai kompetensi	Persen	85	85
		3. Persentase jumlah aparatur yang sudah mengikuti diklat PIM dan Pra jabatan	Persen	98	98
		4. persentase jumlah pegawai dengan nilai SKP > baik	Persen	87	87
15.1	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Terpenuhinya Layanan Kepegawaian ASN	Persen	100	100
15.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Terlaksananya Pengurusan Administrasi Pengadaan dan Pemberhentian Pegawai	Kegiatan	2	2
15.1.2	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Tersusunnya Formasi Calon Praja IPDN dan Calon Taruna STTD Tersusunnya Formasi CPNS	Kegiatan/CPNS	2/335	2/335
15.1.3	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Meningkatnya efektivitas Pelayanan Pensiun PNS Terlaksananya pembekalan pengurusan pensiun	ASN	40	40
15.1.4	Pengelolaan Data Kepegawaian	Terlaksananya Pengurusan Karis Karsu Terlaksananya Pengurusan Kartu Pegawai Terlaksananya Penyusunan LHKPN Bagi Pejabat di Lingkungan Pemkab. Bintan	Kartu ASN	21/11 600	21/11 600
15.2	Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	Terpenuhinya Layanan Kepegawaian ASN	Persen	100	100
15.2.1	Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN	Terlaksananya Mutasi ASN Terlaksananya Sosialisasi Mutasi Kepegawaian	ASN	60/60	60/60
15.2.2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Terbitnya SK Kenaikan Pangkat dan SK pencantuman gelar Terlaksananya	ASN	600/600/600	600/600/600

No.	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
		pembekalan kepegangatan periode April dan Oktober Terlaksananya verifikasi berkas KP periode April dan Oktober			
15.2.3	Pengelolaan Promosi ASN	Terlaksananya Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah	Laporan	1	1
15.3	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	Meningkatnya Kompetensi ASN	Persen	100	100
15.3.1	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Terlaksananya Pelatihan Digitalisasi ASN	ASN	1062	1062
15.3.2	Pengelolaan Assessment Center	Terlaksananya Asessment di lingkungan pemerintah Kabupaten Bintan Terlaksananya Uji Kompetensi Kenaikan Kelas Jabatan Pelaksana di lingkungan Pemerintah Kab. Bintan Terlaksananya Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Bintan Terlaksananya Uji Kompetensi Pindah Tugas di lingkungan Pemerintah Kab. Bintan	ASN	30/30/30/30	30/30/30/30
15.3.3	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Meningkatnya Kompetensi Dasar para CPNS Formasi Tahun 2019 Terlaksananya Pelatihan Dasar bagi CPNS Formasi Tahun 2019	CPNS	145/145	145/145
15.3.4	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Terlaksananya Pemberian Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	Laporan	1	
15.3.5	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Terlaksananya sosialisasi tentang penghitungan angka kredit pada DUPAK dan PAK	ASN	0	0
15.4	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terwujudnya Tertib Administrasi Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persen	100	100

No.	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
15.4.1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terlaksananya Supervisi Administrasi dan Kinerja Pegawai	Laporan	1	1
15.4.2	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Terlaksananya Pemberiaan Penghargaan bagi ASN	ASN	400	400
15.4.3	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Terlaksananya Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kasus	9	9

Sumber: LKPJ Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022; LKPJ Inspektorat Daerah Tahun 2022; Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah

## Sasaran Strategis 7

Terkendalnya pertumbuhan penduduk

### Indikator Kinerja Utama 8: Total Fertility Rate (TFR)

*Total Fertility Rate (TFR)* adalah indikator untuk membandingkan keberhasilan antar wilayah dalam melaksanakan pembangunan sosial ekonomi, menunjukkan tingkat keberhasilan program KB, membantu para perencana program pembangunan untuk mengikatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil dan perawatan anak, serta mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran.

**Tabel 2.28**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Total Fertility Rate Tahun 2021**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target		Realisasi		Capaian Kinerja (%)		
			RPJMD	RKPD 2021	2020	2021	T-RPJMD	TS (Terhadap Tahun Sebelumnya)	2021
1	Total Fertility Rate (TFR)	%	2,8	2,8	2,22	2,25	80,357143	0,03	80,36

Sumber: LKPJ DP3APPKB Kabupaten Bintan Tahun 2021

Pada tahun 2021, realisasi target *Total Fertility Rate (TFR)* Kabupaten Bintan adalah 2,25 dari 3,00 yang ditargetkan, naik 0,03% dari tahun 2020 yang berada pada angka 2,22% namun masih mencapai target yang ditetapkan. TFR sebesar 2,25 berarti bahwa wanita (usia 15-49) secara rata-rata mempunyai 2-3 anak selama masa usia suburnya.

Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian IKU *Total Fertility Rate* Kabupaten Bintan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.29**  
**Program dan Kegiatan Pendukung**  
**Total Fertility Rate Tahun 2021**

No.	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	1. Total Fertility Rate (TFR)	Poin	2,8	2,25
		1. Total Fertility Rate (TFR)	Poin	2,8	2,25
1.1	Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah	Termanfaatnya Data Pembangunan Kependudukan	OPD	39	

No.	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk				
1.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Tersedianya Data Pembangunan Kependudukan	OPD	39	
1.2	Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data dan Informasi dari Aspek Kependudukan yang up to date	Dokumen	1	
1.2.1	Sub Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Terukurnya Keberhasilan dari Program Bangga Kencana	Dokumen	1	
1.2.2	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain				
2	<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	1. Presentase unmet need	Persen	10,20	10,20
		2. Presentase unmet need	Persen	10,20	10,20
		3. Presentase unmet need	Persen	10,20	10,20
		4. Presentase unmet need	Persen	10,20	10,20
2.1	Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Tersedianya Pencacatan dan Pelaporan/ Data KB (up to date)	PPKB dan Sub PPKBD	102	102
2.1.1	Sub Kegiatan Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Terlaksananya Pencatatan dan Pelaporan/	PPKB dan Sub PPKBD	102	102



No.	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Data KB (Up to date)			
2.1.2	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Meningkatnya Partisipasi/ Peran Serta Masyarakat Dalam Program Bangga Kencana	Kecamatan	10	0
2.1.3	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Terlaksananya Operasional Balai Penyuluhan KB	Balai penyuluh KB	5	5
2.1.4	Pengendalian Program KKBPK	Meningkatnya Kinerja Kader PPKBD dan Sub PPKBD	Desa/kelurahan	51	51
2.2	Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Tersedianya Sarana Prasarana Balai Penyuluh KB (DAK Fisik)	Unit	9	9
2.2.1	Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Terlaksananya Pencatatan dan Pelaporan/ Data KB (Up to date)	Desa/kelurahan	51	51
2.3	Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya Pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Akseptor	130	130
2.3.1	Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Alkon yang di Disitribusi	Faskes	16	16
2.3.2	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode	Meningkatnya Aseptor KB	akseptor	130	35

No.	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	(MKJP)			
2.3.3	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Tersedianya Sarana Prasarana Balai Penyuluh KB (DAK Fisik)	Unit Gedung	2	2
2.3	Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Tersedianya Operasional Pergerakan di Kampung KB	Kecamatan	10	10
2.3.1	Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Terlaksananya Operasional Pergerakan di Kampung KB	kecamatan	10	7
3	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	Persentasae Tribina UPPKS dan PIK R Aktif	Persen	100	100
3.1	Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Tersedianya Operasional Pergerakan di Kampung KB	Kecamatan	10	10

Sumber: LKPJ DP3APPKB Kabupaten Bintan Tahun 2021

## Sasaran Strategis 8

Meningkatnya Kualitas Daya Saing dan Penempatan Tenaga Kerja

### Indikator Kinerja Utama 9: Tingkat Pengangguran Terbuka

**Tabel 2.30**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2021**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target		Realisasi		Capaian Kinerja (%)		
			RPJMD	RKPD 2021	2020	2021	T-RPJMD	TS (Terhadap Tahun Sebelumnya)	2021
1	Tingkat pengangguran terbuka	%	5,39	> 5,39	8,86	8,62	159,92579	-0,24	159,93

Sumber: LKPD Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan Tahun 2021

Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Bintan di bidang ketenagakerjaan semakin kompleks dengan adanya pandemi Covid-19 yang berdampak pada perekonomian daerah. Tenaga kerja di wilayah Kabupaten Bintan banyak bekerja di sektor pariwisata dan industri sehingga pandemi Covid-19 sangat berdampak. Pandemi Covid-19 berdampak terhadap sektor pariwisata karena wisatawan baik dari dalam maupun luar negeri tidak dapat melakukan perjalanan wisata karena adanya himbuan pembatasan kerumunan orang. Disamping itu, setiap negara juga memberlakukan berbagai aturan protokol kesehatan untuk menghentikan penularan dan penyebarluasan virus tersebut sehingga berimbas kepada menurunnya jumlah wisatawan dan industri yang mengalami penurunan omset sehingga berakibat pada tutupnya beberapa perusahaan dan pengurangan jumlah karyawan di sektor pariwisata dan industri.

Namun begitu, Pemerintah Kabupaten Bintan berhasil menekan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berbanding tahun sebelumnya hingga turun menjadi 8,62% pada tahun 2021. Upaya yang dilakukan antara lain dengan melakukan kolaborasi penyerapan tenaga kerja lokal dengan bekerjasama antara disnaker dan sektor industri serta penguatan bersama BP Kawasan Bintan. Selain itu, terobosan dilakukan melalui penempatan tenaga kerja lokal terintegrasi (PENTALOGI) serta optimalisasi pemanfaatan media sosial Dinas Tenaga Kerja dalam menginformasikan lowongan kerja (Lowongan Kerja Berbasis Media Sosial-LOKMED).

Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian IKU Tingkat Penangguran Terbuka Kabupaten Bintan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.31**  
**Program dan Kegiatan Pendukung**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2021**

No.	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	1. Tingkat partisipasi angkatan kerja 2. Tingkat partisipasi angkatan kerja	Persen	100	100
1.1.	<b>Kegiatan</b> Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Terciptanya Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Jenis	1	1
1.1.1.	<b>Sub Kegiatan</b> Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Pelatihan Kerja yang Memiliki Kompetensi	Orang	20	20
2.	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	1. Persentase kasus yang terselesaikan	Persen	100	100

No.	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		dengan perjanjian bersama (PB) 2. Persentase kasus perselisihan pengusaha pekerja yang terselesaikan			
2.1.	<b>Kegiatan</b> Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1
2.1.1.	<b>Sub Kegiatan</b> Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Dokumen Peraturan Perusahaan antara Pekerja dan Perusahaan Yang Telah Disahkan	Perusahaan	20	20
2.1.2.	Penyelenggara an Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Dokumen Penyusunan Upah Minimum Kabupaten (UMK)	Dokumen	1	1
2.2.	<b>Kegiatan</b> Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Terciptanya Pencegahan dan Penyelesaian Hubungan Industrial. Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Kasus	15	15
2.2.1.	<b>Sub Kegiatan</b> Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Mogok Kerja. dan Penutupan	Jumlah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Kasus	15	15

No.	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Perusahaan yang Berakibat/Ber dampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				
2.2.2.	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi Dalam Kerjasama Tripartit	Dokumen	1	1

Sumber: LKPJ Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan Tahun 2021

### Sasaran Strategis 9

Meningkatnya Kelestarian nilai-nilai dan seni budaya melayu sebagai kekayaan Budaya Daerah

### Indikator Kinerja Utama 10: Kelestarian Nilai dan Seni Budaya Melayu

**Tabel 2.32**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Peraturan yang Mendukung Kelestarian Nilai dan Seni Budaya Melayu Kabupaten Bintan Tahun 2021**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target		Realisasi		Capaian Kinerja (%)		
			RPJMD	RKPD 2021	2020	2021	T-RPJMD	TS (Terhadap Tahun Sebelumnya)	2021
1	Peraturan yang mendukung kelestarian nilai dan seni budaya melayu	Jumlah Peraturan	7	7	4	4	57,142857	0,00	66,67

Sumber: LKPJ Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan Tahun 2021

Guna melestarikan nilai dan seni budaya Melayu, maka, Pemerintah Kabupaten Bintan menetapkan IKU Peraturan yang Mendukung Kelestarian Nilai dan Seni Budaya Melayu. Hal ini dimaksudkan agar seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bintan, serta masyarakat Kabupaten Bintan pada umumnya, dapat secara bersama-sama bahu membahu dalam upaya melestarikan kebudayaan Melayu di Kabupaten Bintan.

IKU Peraturan yang Mendukung Kelestarian Nilai Seni dan Budaya Melayu tercapai sebesar 3 Peraturan dari target yang ditetapkan sebanyak 10 Peraturan. Dengan demikian capaian ini tidak melampaui target yang ditetapkan. Adapun 4 peraturan tersebut adalah:

1. Peraturan Bupati Bintan Nomor: 413/VIII/2019 Tentang Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Bintan.
2. Peraturan Bupati Bintan Nomor: 301/V/2017 Tentang Penetapan Situs dan Bangunan Cagar Budaya Kabupaten Bintan.
3. Peraturan Bupati Bintan Nomor: 414/VIII/2019 Tentang Penetapan Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Bintan.
4. Peraturan Bupati Bintan Nomor: 9 Tahun 2016 tentang Hari Kerja dan Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan, di mana setiap hari Jumat ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan diwajibkan menggunakan Baju Adat Melayu.

Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian IKU Peraturan yang Mendukung Kelestarian Nilai Seni dan Budaya Melayu Kabupaten Bintan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.33**  
**Program dan Kegiatan Pendukung**  
**Peraturan yang Mendukung Kelestarian Nilai dan Seni Budaya**  
**Melayu Tahun 2021**

No.	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>	Persentase grup kesenian yang dibina	Group	44	44
1.1	Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	100
1.1.1	Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia. Lembaga. dan Pranata Kebudayaan	Terlaksananya Pengembangan Seni dan Budaya Bintang Terlaksananya Pentas Kesenian Rakyat	Kegiatan	1-1	1-1
1.2	Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	0
1.3	Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	100
1.3.1	Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia. Lembaga. dan Pranata Adat	Terlaksananya Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Bulan	12	12
2	<b>PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA</b>	Persentase Benda. Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Unit	53	53
2.1	Kegiatan	Terwujudnya Pengelolaan Cagar	Persen	100	100



No.	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			
2.1.1	Sub Kegiatan Pelindungan Cagar Budaya	Terlaksananya Pelindungan Cagar Budaya	Situs Cagar Budaya	3	3

Sumber: LKPJ Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan Tahun 2021

## Sasaran Strategis 10

Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat

### Indikator Kinerja Utama 11: Indeks Pembangunan Manusia

**Tabel 2.34**  
**Capaian Indikator Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten**  
**Bintan Tahun 2021**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target		Realisasi		Capaian Kinerja (%)		
			RPJMD	RKPD 2021	2020	2021	T-RPJMD	TS (Terhadap Tahun Sebelumnya)	2021
1	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	> 70	> 70	74,31	74,57	106,52	0,26	106,53

Sumber: BPS Bintan, Tahun 2022

Tingkat pencapaian pembangunan manusia diukur melalui indikator-indikator IPM yang merupakan indeks gabungan dari tiga komponen yang terdiri dari bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi yang mengindikasikan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Bintan. Jika ketiga komponen tersebut memiliki nilai yang baik, tentunya sumber daya manusia secara umum juga memiliki kualitas yang baik dengan mengacu pada kategori IPM yang telah ditetapkan. IPM dikelompokkan ke dalam beberapa kategori,  $IPM < 60$  (rendah),  $60 \leq IPM < 70$  (sedang),  $70 \leq IPM < 80$

(tinggi), IPM  $\geq$  80 (sangat tinggi). Bagi suatu wilayah, angka IPM yang diperoleh menggambarkan kemajuan pembangunan manusia di daerah tersebut dan merupakan tantangan yang harus dihadapi serta upaya apa yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia.

**Tabel 2.35**  
**Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bintan**  
**Tahun 2016–2021**

<b>Komponen IPM</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Angka Harapan Hidup	70,02	70,12	70,21	70,3	70,38	70,46
Harapan Lama Sekolah	12,27	12,6	12,75	12,95	13,10	13,26
Rata-rata Lama Sekolah	8,33	8,34	8,35	8,36	8,44	8,67
Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (ribu Rupiah)	13.667	13.828	14.256	14.730	14.482	14.393
<b>Bintan</b>	<b>72,38</b>	<b>72,91</b>	<b>73,41</b>	<b>73,98</b>	<b>74,13</b>	<b>74,57</b>

*Catatan/ Sumber: BPS, Seri Publikasi Indeks Pembangunan Manusia*

Capaian IPM Kabupaten Bintan adalah sebesar 74,57 pada tahun 2021. Jika dibandingkan dengan IPM pada tahun 2020, terdapat peningkatan sebesar 0,44 dari sebelumnya tercatat sebesar 74,13. Dengan begitu, IPM Kabupaten Bintan masuk dalam Kategori Tinggi.

### **Kesehatan**

Indeks kesehatan dapat direfleksikan dari perhitungan Angka Harapan Hidup (AHH) di suatu daerah dan didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH Kabupaten Bintan mencapai 70,46

tahun. Hal ini berarti bahwa bayi yang lahir pada tahun 2020 dapat hidup hingga mencapai usia 70 tahun 6 bulan dengan syarat besarnya kematian atau kondisi kesehatan yang ada tidak berubah. Jika dibandingkan dengan masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau secara keseluruhan, rata-rata penduduk Kabupaten Bintan masih mempunyai harapan hidup yang lebih tinggi dibandingkan dengan harapan hidup rata-rata penduduk di Kepulauan Riau secara keseluruhan.

### **Pendidikan**

Indeks pendidikan terdiri atas dua indikator penyusun yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Kedua indikator tersebut dianggap memiliki bobot yang sama dalam penentuan besarnya Indeks Pendidikan. Nilai HLS Kabupaten Bintan berada pada rentang 11,08 hingga 13,26 tahun dalam rentang waktu 2010 hingga 2021. Hal ini berarti bahwa lamanya sekolah yang dapat diharapkan oleh anak-anak di Kabupaten Bintan pada masa mendatang berkisar antara 11 hingga 13 tahun, atau sampai pendidikan hingga tingkat SMA. Hal ini berarti pembangunan sistem pendidikan di Kabupaten Bintan masih bisa dioptimalkan, misalnya dengan cara meningkatkan ketersediaan fasilitas pendidikan. Namun demikian, pada tahun 2021, angka HLS Kabupaten Bintan berada di atas angka HLS

Kepulauan Riau. Sehingga diharapkan anak di masa mendatang dapat mengenyam pendidikan hingga tingkat perguruan tinggi. Nilai HLS anak usia sekolah Kabupaten Bintan pada tahun 2020 sebesar 13,10 dibandingkan dengan nilai HLS tahun 2021 yang berada pada angka 13,26 naik 0,16 poin.

Nilai rata-rata lama sekolah anak di Kabupaten Bintan pada tahun 2020 adalah sebesar 8,44 sedangkan pada tahun 2021 berada pada angka 8,67 atau naik sebesar 0,23 poin. Angka RLS menunjukkan bahwa penduduk di wilayah di Kabupaten Bintan rata-rata hanya mengenyam pendidikan formal selama 8,67 tahun, atau setara dengan kelas dua Sekolah Menengah Pertama (SMP).

### **Pengeluaran Per Kapita**

Indeks Pengeluaran dihitung berdasarkan data pengeluaran per kapita yang disesuaikan menjadi Paritas Daya Beli/*Purchasing Power Parity* (PPP). PPP merupakan teknik yang digunakan untuk menentukan nilai relatif suatu barang di berbagai daerah. PPP mengandung makna banyaknya rupiah yang dikeluarkan untuk membeli sejumlah kebutuhan barang dan jasa di suatu daerah. Sejumlah barang tersebut dapat dibeli dengan sejumlah rupiah di daerah lain, sehingga angka ini dapat menunjukkan keterbandingan daya beli antar daerah. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa seharusnya suatu barang memiliki proporsi harga

jual yang sama dibandingkan dengan harga jual di daerah lain.

Dilihat dari tingkat kesejahteraan penduduk yang diukur melalui angka pengeluaran per kapita yang disesuaikan didapatkan bahwa angka pengeluaran per kapita per tahun disesuaikan pada tahun 2020 mencapai 14.482 juta rupiah. Pada tahun 2021 berada pada angka 14.393 juta rupiah, angka ini mengalami sedikit penurunan sekitar 89 ribu rupiah. Hal ini masih wajar mengingat pandemi Covid-19 yang menghantam seluruh sektor ekonomi global maupun nasional dan Kabupaten Bintan pun turut merasakan dampaknya.

Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian IKU Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bintan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.36**  
**Program dan Kegiatan Pendukung**  
**Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2021**

No.	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	1. APK SD/MI/SLB/Paket A 2. APK SMP/MTs/Paket B 3. APK PAUD 3-6 Tahun 4. Angka Melek Huruf (AMH)	Persen Persen Persen Persen	102,50 120 61,10 100	102,50 120 61,10 100
1.1	<b>Kegiatan</b> Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Meningkatnya Pelayanan Pendidikan Sekolah Dasar			
1.1.1	<b>Sub Kegiatan</b> Penambahan Ruang Kelas Baru	JUmlah Ruang Kelas yang dibangun APBD JUmlah Ruang Kelas yang dibangun DAK	Ruang Ruang	3 15	3 15

No.	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.1.4	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang UKS yang dibangun DAK	Ruang	10	10
1.1.5	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah RUang Perpustakaan yang dbangun	Ruang	8	8
1.1.6	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Jamban yang dibangun Jumlah Sekolah	Unit Sekolah	1	1
		Jumlah Sekolah yang dibangun pagar	Sekolah	5	5
		Jumlah Sekolah yang dipasang paving blok	Sekolah	1	1
		Jumlah Sekolah yang disemenisasi	Sekolah	1	1
1.1.7	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang yang direhabilitasi APBD	Ruang	1	1
		Jumlah Ruang yang direhabilitasi DAK	Ruang	61	61
1.1.8	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru Yang Direhabilitasi (APBD) Jumlah Ruang Guru Yang Direhabilitasi (DAK)	Unit	1-7	1-7
1.1.9	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Yang direhabilitasi (DAK)	Unit	14	14
1.1.10	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	JUmlah Jamban yang direhabilitasi (DAK) Jumlah Mushola yang direhab	Unit	28-2	28-2
1.1.11	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebeler yang disediakan	Set	875	875
1.1.12	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah sekolah yang di pasang teralis	Sekolah	2	2
1.1.13	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Siswa Penerima Perlengkapan Sekolah	Siswa	3160	3160
1.1.14	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlahn Sekolah Penerima Peralatan MEDIA PendiidaiKn Jumlahn Sekolah Penerima Peralatan TIK Jumlah Sekolah Penerima Drum Band	Sekolah	11-9-2	11-9-2
1.1.15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pesertan yang mengikuti DIKLaT CAKEP Jumlah Peserta yang mengikuti PPGDJ		3265	3265

No.	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.1.16	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah	Sekolah	92	92
1.2	<b>Kegiatan</b> Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Meningkatnya Pelayanan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Sekolah	32	120
1.2.1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sekolah yang dibangun pagar Jumlah Sekolah yang dipasang drainase Jumlah Sekolah yang dipasang paving blok	Sekolah	1-1-2	1-1-2
1.2.2	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang yang direhabilitasi	Ruang	29	29
1.2.3	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru yang direhabilitasi	Ruang	1	1
1.2.4	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang UKS yang direhabilitasi	Ruang	1	1
1.2.5	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Ruang Perpustakaan yang direhabilitasi	Ruang	2	2
1.2.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang direhab	Ruang	7	7
1.2.7	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/ Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Guru Yang direhabilitasi	Unit	1	1
1.2.8	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Jamban yang direhab APBD Jumlah Ruang Tata Usaha yang direhabilitasi DAK Jumlah Rumah Ibadah Yang direhab	Unit Ruang	1-3 2	1-3 2
1.2.9	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah sekolah penerima mebel rehab ruang guru jumlah sekolah penerima mebel rehab ruang kelas jumlah sekolah penerima mebel rehab ruang labor ipa jumlah sekolah penerima	Sekolah	1-9-7-2-2-1-1	1-9-7-2-2-1-1

No.	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		mebel rehab ruang perpustakaan jumlah sekolah penerima mebel rehab ruang tata usaha jumlah sekolah penerima mebel rehab ruang uks jumlah sekolah penerima mebel rehab rumah dinas			
1.2.10	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah penerima perlengkapan sekolah	Stel	2695	2695
1.2.11	Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa	Jumlah sekolah penerima peralatan Biologi Jumlah sekolah penerima peralatan fisika Jumlah sekolah penerima peralatan Media Pendidikan Jumlah sekolah penerima peralatan TIK	Sekolah	2-2-4-4	2-2-4-4
1.2.12	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta	jumlah sarana transportasi laut	Unit	20	20
1.2.13	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah peserta yang mengikuti lomba sains nasional Jumlah	Orang	105-120	105-120
1.2.14	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah guru yang mengikuti pelatihan	Orang	130	130
1.2.15	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Tersedianya Bantuan Operasional Sekolah bagi Sekolah	Sekolah	28	28
1.3	<b>Kegiatan</b> Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Meningkatnya Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini	Persen	61,10	61,10
1.3.1	<b>Sub Kegiatan</b> Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah ruang kelas yang dibangun	Ruang	2	2
1.3.2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Awning yang dibangun Jumlah Jamban yang dibangun Jumlah Pagar yang dibangun Jumlah Paving Blok Jumlah Ruang Serba Guna yang dibangun	Lembaga Unit	4-3-3-2 1	4-3-32 1



No.	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.3.3	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Bangunan yang di rehab	Unit	1	1
1.3.4	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Terlaksananya Rehab Jamban	Lembaga	2	2
1.3.5	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Tersedianya Layar Projector Tersedianya Proyektor Tersedianya Tripod Projector	Unit	0	0
1.3.6	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Tersedianya Baju Batik	Stel	210-210-	210-210- 210-210-210
		Tersedianya Baju Khusus		210-210- 210	
		Tersedianya Baju Kurung Melayu/Daerah Tersedianya Baju Olahraga Tersedianya Baju Wajib (Topi Dan Dasi)	Pasang	210	
		Tersedianya Sepatu Sekolah Tersedianya Tas Ransel	Buah	210	
1.3.7	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Tersedianya Alat Permainan Kedokteran Tersedianya Alat Permainan Memasak Tersedianya Alat Permainan Pertukangan Tersedianya Boneka Gender Tersedianya Ular Tangga Anak Uk. 1m x 1m	Unit	10-10-10- 10-10	10-10-10-10- 10
1.3.8	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah Peserta yang mengikuti Penerima DAK Non Fisik	Orang	300	300
1.3.9	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Tersedianya BOS TK Negeri Pembina Tersedianya BOS TK/PAUD/KB SWASTA	Lembaga	156	156
			Sekoah	3	3
1.4	<b>Kegiatan</b> Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Meningkatnya Pelayanan Pendidikan Non Formal	Lembaga	10	10
1.4.1	<b>Sub Kegiatan</b> Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Terlaksananya pembangunan Ruang Praktik SKB (DAK REGULER) Tersedianya Peralatan Salon	Meter	96	96
			Item	0	0
1.4.2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Terlaksananya pembangunan JAMBAN Terlaksananya	meter unit	16-36 8-41-7-37	16-36

No.	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Nonformal/Ke setaraan	pembangunan RUANG KELAS BAR Tersedianya Connector Tersedianya Laptop (Tersedianya LAYAR PROYEKTOR Tersedianya Printer Tersedianya Proyek Tersedianya Sarana Prasarana Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaran Tersedianya Scann tersedianya Wirele Router	buah unit	0 25	8-41-7-37 0 25
1.4.3	Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Lembaga Penerima Mebel Tersedianya Kursi Rias Tersedianya Meja Rias Tersedianya Washbak Kursi Keramas	Lembaga Unit	1 1-1-1	1 1-1-1
1.4.4	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Ke setaraan	Tersedianya Komputer SKB Tersedianya Teralis SKB	Unit M2	4 30	4 30
1.4.5	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	Tersedianya peralatan praktik Keterampilan Tersedianya peralatan praktik menjahit Tersedianya peralatan TIK	Item	6-8-11	6-8-11
1.4.6	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Ke setaraan	Lembaga	10	10
1.4.7	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Terlaksananya Operasional SPNF	Tahun	1	1
1.4.8	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	TERSEDIANYA BOP KESETARAAN SWASTA (PKBM)	Lembaga	10	10
2	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN</b>	Persentase guru SD bersertifikat profesi	Persen	76,35	76,35
2.1	<b>Kegiatan</b> Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Tertatanya Proses Perizinan Pendidikan Dasar	Tahun	1	1

No.	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.1.1	<b>Sub Kegiatan</b> Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Terlaksananya Pembinaan Guru Se Kabupaten Bintan	Tahun	1	1
2.2	<b>Kegiatan</b> Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Meningkatnya Kinerja IGTKI Kabupaten Bintan	Lembaga	1	1
2.2.1	<b>Sub Kegiatan</b> Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Meningkatnya Kinerja IGTKI Kabupaten Bintan Terlaksananya Pembinaan TK PAUD di Kabupaten Bintan	Lembaga	1-159	1-159
3	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (DINAS KESEHATAN)</b>	1. PKM Akre, Akre RS, Tipe RS di PKM, Alkes PKM 2. Desa Ttn Kwsn Sht, Yan Rer RS, IKM RS, ASI Eklus Gi Kur, AKB, ANC Bumil, Linnakes, KF, A Dsr, Kec API, IR DBD TB, Cak HIV, P KM PTM, Cak JKN 3. Desa Ttn Kwsn Sht, Yan Rem RS, IKM RS, ASI Eklu GiKur, AKB, ANC Bumil, Linnakes, KF, A Dsr, Kec API, IR DBD TB, Cak HIV, PKM PTM, Cak JKN 4. PKM Akre, Akre RS, Tipe RS di PKM, Alkes PKM,			
3.1	<b>Kegiatan</b> Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tahun	1	1
3.1.1	<b>Sub Kegiatan</b> Pembangunan Puskesmas	Tersedianya Pusat Kesehatan Masyarakat di wilayah Bintan yang sesuai standar menurut peraturan yang berlaku	Tahun	1	1

No.	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.1.2	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya				
3.1.3	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan		Paket	2	2
3.1.4	Pengembangan Puskesmas				
3.1.5	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Unit	1	1
3.1.6	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Paket	1	1
3.1.7	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan				
3.1.8	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan				
3.1.9	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan				
3.2	<b>Kegiatan</b> Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	100
3.2.1	<b>Sub Kegiatan</b> Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Ibu hamil	3182	3182
3.2.2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		Ibu bersalin/ibu bersalin	3043/3043	3043/3043
3.2.3	Pengelolaan Pelayanan		Bayi	2895	2895

No.	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Kesehatan Bayi Baru Lahir				
3.2.4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		Balita	12884	12884
3.2.5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		Sekolah	165	165
3.2.6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		remaja	22532	22532
3.2.7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		lansia	12069	12069
3.2.8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		Orang/Puskesmas	11750/15	11750/15
3.2.9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		Orang	1603	1603
3.2.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				
3.2.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV				
3.2.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		Persen	100	100
3.2.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana		1Tahun	1	1

No.	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.2.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Puskesmas	15	15
3.2.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				
3.2.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				
3.2.17	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				
3.2.18	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya		Asman/Hatra	20/24	20/24
3.2.19	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Puskesmas/Desa/Kel/Persen/Tahun	15/51/100/1	15/51/100/1
3.2.20	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA		Puskesmas	15	15
3.2.21	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus		orang	240	240
3.2.22	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan		Kali	20	20
3.2.23	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				
3.2.24	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		Jiwa	20000	20000
3.2.25	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				
3.2.26	Operasional Pelayanan Rumah Sakit		Bulan	12	12

No.	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.2.27	Operasional Pelayanan Puskesmas		Bulan	12	12
3.2.28	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Faskes	7	7
3.2.29	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota		Puskesmas	15	15
3.2.30	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		Puskesmas/ Puskesmas	15/15	15/15
3.2.31	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				
3.3	<b>Kegiatan</b> Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Terselenggaranya Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persen	100	100
3.3.1	<b>Sub Kegiatan</b> Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan		Buku	25	25
3.3.2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		Dinkes/Puskesmas	1/15	1/15
3.4	<b>Kegiatan</b> Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	100
3.4.1	<b>Sub Kegiatan</b> Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan		Puskesmas/RS UD	15/5	15/5
4	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA</b>	Jumlah Puskesmas yang Minimal Memiliki 5 Jenis Tenaga Kesehatan			

No.	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<b>MANUSIA KESEHATAN</b>				
4.1	<b>Kegiatan</b> Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Tersedianya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	100
4.1.1	<b>Sub Kegiatan</b> Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Puskesmas yang memiliki minimal 9 jenis tenaga kesehatan Tersedianya Insentif tenaga kesehatan penanganan Covid 19	Puskesmas/ Bulan	9/12	9/12
4.1.2	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terlaksananya bimbingan teknis dan supervise, pengawasan terhadap SDM Kesehatan Terlaksananya bimbingan teknis dan supervise, pengawasan terhadap SDM Kesehatan	RSUD/Puskesmas	1/15	1/15
4.2	<b>Kegiatan</b> Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Berkembangnya Mutu dan Meningkatnya Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Orang	5	5
4.2.1	<b>Sub Kegiatan</b> Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan			
5	<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>	Persentase kesediaan obat dan vaksin di Puskesmas, Jumlah Puskesmas yang Memiliki 70% Alat Kesehatan Sesuai Permenkes 75 Tahun 2014			
5.1	<b>Kegiatan</b>	Tersedianya Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat	Persen	100	100



No.	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			
5.1.1	<b>Sub Kegiatan</b> Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut pengawasan Apotek, Toko Obat dan Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Toko Alat kesehatan dan Optikal Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut pengawasan Apotek, Toko Obat dan Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Toko Alat kesehatan dan Optikal Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut pengawasan Apotek, Toko Obat dan Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Toko Alat kesehatan dan Optikal	Apotik/Toko/Obat/Pengelola Obat	17/17/20	17/17/20
5.2	<b>Kegiatan</b> Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Tersedianya Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Persen	100	100
5.2.1	<b>Sub Kegiatan</b> Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu				

No.	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Perusahaan Rumah Tangga				
5.3	<b>Kegiatan</b> Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Tersedianya Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persen	100	100
5.3.1	<b>Sub Kegiatan</b> Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				
5.4	<b>Kegiatan</b> Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Tersedianya Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	0
6	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	Persentase Desa yang melaksanakan PHBS, Persentase Desa Siaga Aktif			
6.1	<b>Kegiatan</b> Advokasi, Pemberdayaan,				

No.	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
6.1.1	<b>Sub Kegiatan</b> Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				
6.2	<b>Kegiatan</b> Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terselegarannya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Persen	100	0
6.3	<b>Kegiatan</b> Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	100
6.3.1	<b>Sub Kegiatan</b> Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				
7	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	1. Tingkat partisipasi angkatan kerja 2. Tingkat partisipasi angkatan kerja	Persen	100	100
7.1	<b>Kegiatan</b> Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Terciptanya Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Jenis	1	1
7.1.1.	<b>Sub Kegiatan</b> Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Pelatihan Kerja yang Memiliki Kompetensi	Orang	20	20

No.	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	berdasarkan Klaster Kompetensi				
8	<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	1. Tingkat pengangguran terbuka 2. Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan			0
9	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	1. Persentase kasus yang terselesaikan dengan perjanjian bersama (PB) 2. Persentase kasus perselisihan pengusaha pekerja yang terselesaikan	Persen	100	100
9.1	<b>Kegiatan</b> Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1
9.1.1.	<b>Sub Kegiatan</b> Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Dokumen Peraturan Perusahaan antara Pekerja dan Perusahaan Yang Telah Disahkan	Perusahaan	20	20
9.1.2.	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Dokumen Penyusunan Upah Minimum Kabupaten (UMK)	Dokumen	1	1
9.2	<b>Kegiatan</b> Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di	Terciptanya Pencegahan dan Penyelesaian Hubungan Industrial. Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Kasus	15	15

No.	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Daerah Kabupaten/Kota				
9.2.1	<b>Sub Kegiatan</b> Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Mogok Kerja. dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Kasus	15	15
9.2.2.	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi Dalam Kerjasama Tripartit	Dokumen	1	1
9.1.3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksannay Pengukuhan oengurus Karang Taruna kabupaten Bintan Terlaksananya bantuan sosial operasionla LKSA dan FKKPD Terlaksananya kegiatan pembinaan PSKS Terlaksananya kegiatan penyerahan bantuan sembako dan kursi roda Terlaksanya rapat kerja tahunan karang taruna	Orang/LKSA/PSKS/PMKS/orang	50/11/30/1200/50	50/11/30/1200/50
9.1.4	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Terlaksananya pembinaan pengurus LKS terlaksananya Penjangkauan Klien LK3	Peserta/klien	15/10	
10	<b>PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN</b>	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	%	100	100
10.1	<b>Kegiatan</b>	Terwujudnya fasilitasi pemulangan Warga negara	orang	9	9

No.	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	korban tindak kekerasan ke daerah asal			
10.1.1	<b>Sub Kegiatan</b> Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Terlaksananya koordinasi dengan daerah asal warga negara migran korban tindak kekerasan	Orang	9	9
11	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	1. Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan sosial 2. Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan sosial	%	78	78
11.1	<b>Kegiatan</b> Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan, Pengemis di Luar Panti	%	100	100
11.1.1	<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Permakanan	Tersedianya kebutuhan permakanan	Lansia/anak	420	420
11.1.2	Penyediaan Sandang	Tersedianya pakaian bagi lanjut usia dan pengurus LKS LU	Lansia/anak	48	0
11.1.3	Penyediaan Alat Bantu	tersedianya kebutuhan alat bantu bagi penanganan lanjut usia terlantar dan penyandang disabilitas	LKSU dan Disabilitas	3	3

No.	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11.1.4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Terlaksananya pelayanan reunifikasi bagi lansia terlanta dan anak bermasalah	Lansia dan anak	14	14
11.1.5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Terpenuhinya kebutuhan bimbingan fisik, mental, spiritual bagi anak Terlantar Terpenuhinya kebutuhan bimbingan fisik, mental, spiritual bagi Disabilitas Terpenuhinya kebutuhan bimbingan fisik, mental, spiritual bagi Lansia Terlantar	Orang/disabilitas/lansia	100/30/950	100/30/950
11.1.6	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	tersedianya kebutuhan kesehatan dasar bagi lanjut usia terlantar di luar panti	lansia	800	800
11.1.7	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Tersedianya data Gelandangan pengemis dan laporan tahunan kegiatan rehabilitasi Lanjut Usia terlantar, anak terlantar dan penyandang disabilitas	Buku	4	4
11.1.8	Pemberian Layanan Kedaruratan	Tersedianya insentif bagi pengelola LKSLU	pengelola	11	11
11.1.9	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Terlaksananya pelayanan penelusuran lansia terlantar dan anak bermasalah sosial	Lansia dan anak	14	14
11.1.10	Pemberian Layanan Rujukan	Terlaksananya pelayanan rujukan bagi Anak yang membutuhkan Terlaksananya pelayanan rujukan bagi disabilitas yang membutuhkan Terlaksananya pelayanan rujukan bagi Lanjut usia yang membutuhkan	Anak/disabilitas/lansia	2/1/10	2/1/10
11.2	<b>Kegiatan</b> Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Terwujudnya penanganan dan Rehabilitasi Sosial Bagi PMKS Lainnya Bukan HIV/AIDS	Persen	100	100

No.	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11.2.1	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Tersedianya layanan rukukan bagi KPO, Tuna Susia dan Kelompok Minoritas lainnya	PMKS	10	0
11.2.2	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Terpenuhinya kebutuhan fisik mental dan spritual bagi PMKS, KPO dan Kelompok MInoritas lainnya Terpenuhinya kebutuhan fisik mental dan spritual bagi PMKS, KPO dan Kelompok MInoritas lainnya	Kel minoritas/OD GJ	30/80	30/80
11.2.3	Pemberian Layanan Rujukan	Tersedianya layanan rujukan bagi PMKS lainnya	PMKS	10	10
12	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	1. Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar 2. Persentase masyarakat yang mendapatkan bantuan jaminan sosial	%	55,48	55,48
12.1	<b>Kegiatan</b> Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Tersedianya data anak terlantar	Persen	100	0
12.2	<b>Kegiatan</b> Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tersediannya data kemiskinan, Terpenuhinya kebutuhan Bagi Orang tidak Mampu	Persen	100	100
12.2.1	<b>Sub Kegiatan</b> Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya pemutakhiran Data Kemiksinan Tercapainya Verval KPM BST Terlaksananya Verifikasi dan Validasi Peserta PBI	RTM/KPM/jiwa	9650/5148/51276	9650/5148/51276
12.2.2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemberian bantuan pengobatan dan beasiswa pendidikan	Kecamatan	10	0
12.2.3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Terpenuhinya kebutuhan operasional distribusi BSP Sembako Terpenuhinya Kebutuhna Verifikasi data, Labelisasi dan Pembinaan PEserta PKH	KPM/KPM	5148/3108	5148/3108
12.2.4	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Terlaksananya Bimtek Pendamping dan Pengurus KUBE	Orang/KUBE/KUBE/pendamping/outlet	50/1228/7/20/1	50/1228/7/20/1



No.	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Terlaksananya pembinaan dan monitoring KUBE dan UEP Terlaksananya penyaluran bantuan KUBE bagi Masyarakat Tidak Mampu Terpenuhinya operasional pendamping KUBE Tersedian Outlet KUBE			
13	<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA</b>	1. Persentase PADes	Persen	60	60
13.1	<b>Kegiatan</b> Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Terwujudnya Kerja Sama Antar Desa	Desa	36	36
13.1.1	<b>Sub Kegiatan</b> Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Kerja Sama	Desa	10	10
14	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>	1. Tingkat kesesuaian perencanaan Desa dengan pelaksanaan di lapangan	Persen	97	97
14.1	<b>Kegiatan</b> Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Terlaksananya Pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan desa	Persen	100	100
14.1.1	<b>Sub Kegiatan</b> Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa				0
14.1.2	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan	Dokumen	36	36
14.1.3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen APBDes	Dokumen	36	36
14.1.4	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Terlaksananya pembinaan kapasitas aparatur pemerintahan desa	Desa	36	36
14.1.5	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan	Jumlah BUMDes	BUMDEs	36	36

No.	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Lembaga Kerja sama antar Desa				
14.1.6	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Desa yang disosialisasi	Desa	23	23
14.1.7	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Profil Desa dan Kelurahan	Dokumen	51	51
14.1.8	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Aset Desa	Dokumen	36	36
14.1.9	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa dan Kelurahan yang di Evaluasi	Desa/Kel	51	51
15	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	1. Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Persen	80	80
15.1	<b>Kegiatan</b> Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang di bina	Desa	36	36
15.1.1	<b>Sub Kegiatan</b> Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendaaygunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa	Desa	36	36

No.	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	(RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				
15.1.2	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Lembaga Usaha Ekonomi	Desa	36	36
15.1.3	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Temuan TTG	Desa	36	36
15.1.4	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Desa Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong	Desa	1	1
15.1.5	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Desa	Desa	2	2
15.1.6	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah PKK	PKK	36	36

Sumber: LKPJ Dinas Pendidikan Tahun 2021; LKPJ Dinas Kesehatan Tahun 2021; LKPJ Dinas Sosial Tahun 2021

## Sasaran Strategis 11

Meningkatnya Kesetaraan dan keadilan Gender dalam Pembangunan

### Indikator Kinerja Utama 13: Kemiskinan

**Tabel 2.37**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bintan Tahun 2021**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target		Realisasi		Capaian Kinerja (%)		
			RPJMD	RKPD 2021	2020	2021	T-RPJMD	TS (Terhadap Tahun Sebelumnya)	2021
1	Persentase penduduk miskin	%	< 6,5	> 6,5	6,36	6,42	100,3125	0,06	98,77

Sumber: BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2022

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penghitungan garis kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan.

**Tabel 2.38**  
**Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin**  
**Kabupaten Bintan Tahun 2010–2021**

<b>Tahun</b>	<b>Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)</b>	<b>Jumlah Penduduk Miskin (ribu)</b>	<b>Persentase Penduduk Miskin</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
2021	424.426	10,50	6,42
2020	417.654	10,20	6,36
2019	384.396	10,10	6,37
2018	367.294	10,40	6,61
2017	354.012	9,40	6,01
2016	341.812	9,90	6,43
2015	313.277	9,30	6,07
2014	301.829	9,30	6,09
2013	298.916	9,30	6,23
2012	290.994	10,0	6,30
2011	286.007	9,30	6,04
2010	274.721	10,50	7,33

*Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)*

Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian IKU Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bintan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.39**  
**Program dan Kegiatan Pendukung**  
**Tingkat Kemiskinan Tahun 2021**

No	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	1. APK SD/MI/SLB/Paket A 2. APK SMP/MTs/Paket B 3. APK PAUD 3-6 Tahun 4. Angka Melek Huruf (AMH)	Persen Persen Persen Persen	102,50 120 61,10 100	102,50 120 61,10 100
1.1	<b>Kegiatan</b> Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Meningkatnya Pelayanan Pendidikan Sekolah Dasar			
1.1.1	<b>Sub Kegiatan</b> Penambahan Ruang Kelas Baru	JUmlah Ruang Kelas yang dibangun APBD JUmlah Ruang Kelas yang dibangun DAK	Ruang Ruang	3 15	3 15
1.1.4	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang UKS yang dibangun DAK	Ruang	10	10
1.1.5	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah RUang Perpustakaan yang dibangun	Ruang	8	8
1.1.6	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Jamban yang dibangun Jumlah Sekolah yang dibangun pagar Jumlah Sekolah yang dipasang paving blok Jumlah Sekolah yang disemenisasi	Unit Sekolah Sekolah Sekolah	1 5 1 1	1 5 1 1
1.1.7	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang yang direhabilitasi APBD Jumlah Ruang yang direhabilitasi DAK	Ruang Ruang	1 61	1 61
1.1.8	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru Yang Direhabilitasi (APBD) Jumlah Ruang Guru Yang Direhabilitasi (DAK)	Unit	1-7	1-7
1.1.9	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Yang direhabilitasi (DAK)	Unit	14	14

No	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.1.10	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	JUmlah Jamban yang direhabilitasi (DAK) Jumlah Mushola yang direhab	Unit	28-2	28-2
1.1.11	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebeler yang disediakan	Set	875	875
1.1.12	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah sekolah yang di pasang teralis	Sekolah	2	2
1.1.13	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Siswa Penerima Perlengkapan Sekolah	Siswa	3160	3160
1.1.14	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlahn Sekolah Penerima Peralatan MEdia Pendiaki Jumlahn Sekolah Penerima Peralatan TIK Jumlah Sekolah PEnerima Drum Band	Sekolah	11-9-2	11-9-2
1.1.15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pesertan yang mengikuti DIKLaT CAKEP Jumlah Peserta yang mengikuti PPGDJ		3265	3265
1.1.16	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah SEkolah PEneroima Bantuan Operasional SEkolah	Sekolah	92	92
1.2	<b>Kegiatan</b> Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Meningkatny Pelayanan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Sekolah	32	120
1.2.1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sekolah yang dibangun pagar Jumlah Sekolah yang dipasang drainase Jumlah Sekolah yang dipasang paving blok	Sekolah	1-1-2	1-1-2
1.2.2	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang yang direhabilitasi	Ruang	29	29
1.2.3	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah RUang Guru yang drehabilitasi	Ruang	1	1
1.2.4	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang UKS yang direhabilitasi	Ruang	1	1
1.2.5	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Ruang Per[pustakaan yang direhabilitasi	Ruang	2	2

No	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.2.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang direhab	Ruang	7	7
1.2.7	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/ Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Guru Yang direhabilitasi	Unit	1	1
1.2.8	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Jamban yang direhab APBD Jumlah Ruang Tata Usaha yang direhabilitasi DAK Jumlah Rumah Ibadah Yang direhab	Unit Ruang	1-3 2	1-3 2
1.2.9	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah sekolah penerima mebel rehab ruang guru jumlah sekolah penerima mebel rehab ruang kelas jumlah sekolah penerima mebel rehab ruang labor ipa jumlah sekolah penerima mebel rehab ruang perpustakaan jumlah sekolah penerima mebel rehab ruang tata usaha jumlah sekolah penerima mebel rehab ruang uks jumlah sekolah penerima mebel rehab rumah dinas	Sekolah	1-9-7-2-2-1-1	1-9-7-2-2-1-1
1.2.10	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah penerima perlengkapan sekolah	Stel	2695	2695
1.2.11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah sekolah penerima peralatan Biologi Jumlah sekolah penerima peralatan fisika Jumlah sekolah penerima peralatan Media Pendidikan Jumlah sekolah penerima peralatan TIK	Sekolah	2-2-4-4	2-2-4-4
1.2.12	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta	jumlah sarana transportasi laut	Unit	20	20
1.2.13	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah peserta yang mengikuti lomba sains nasional Jumlah	Orang	105-120	105-120
1.2.14	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan	Jumlah guru yang mengikuti pelatihan	Orang	130	130



No	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Sekolah Menengah Pertama				
1.2.15	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Tersedianya Bantuan Operasional Sekolah bagi Sekolah	Sekolah	28	28
1.3	<b>Kegiatan</b> Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Meningkatnya Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini	Persen	61,10	61,10
1.3.1	<b>Sub Kegiatan</b> Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah ruang kelas yang dibangun	Ruang	2	2
1.3.2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Awning yang dibangun Jumlah Jamban yang dibangun Jumlah Pagar yang dibangun Jumlah Paving Blok Jumlah Ruang Serba Guna yang dibangun	Lembaga Unit	4-3-3-2 1	4-3-32 1
1.3.3	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Bangunan yang di rehab	Unit	1	1
1.3.4	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Terlaksananya Rehab Jamban	Lembaga	2	2
1.3.5	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Tersedianya Layar Projector Tersedianya Proyektor Tersedianya Tripod Projector	Unit	0	0
1.3.6	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Tersedianya Baju Batik Tersedianya Baju Khusus Tersedianya Baju Kurung Melayu/Daerah Tersedianya Baju Olahraga Tersedianya Baju Wajib (Topi Dan Dasi) Tersedianya Sepatu Sekolah Tersedianya Tas Ransel	Stel Pasang Buah	210-210-210-210-210 210 210	210-210-210-210-210 210 210

No	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.3.7	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Tersedianya Alat Permainan Kedokteran Tersedianya Alat Permainan Memasak Tersedianya Alat Permainan Pertukangan Tersedianya Boneka Gender Tersedianya Ular Tangga Anak Uk. 1m x 1m	Unit	10-10-10-10-10	10-10-10-10-10
1.3.8	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah Peserta yang mengikuti Penerima DAK Non Fisik	Orang	300	300
1.3.9	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Tersedianya BOS TK Negeri Pembina Tersedianya BOS TK/PAUD/KB SWASTA	Lembaga Sekoah	156 3	156 3
1.4	<b>Kegiatan</b> Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Meningkatnya Pelayanan Pendidikan Non Formal	Lembaga	10	10
1.4.1	<b>Sub Kegiatan</b> Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Terlaksananya pembangunan Ruang Praktik SKB (DAK REGULER) Tersedianya Peralatan Salon	Meter Item	96 0	96 0
1.4.2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Terlaksananya pembangunan JAMBAN Terlaksananya pembangunan RUANG KELAS BAR Tersedianya Connector Tersedianya Lapto( Tersedianya LAYAF PROYEKTOR Tersedianya Printer Tersedianya Proyek Tersedianya Sarana Prasarana Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetar Tersedianya Scann tersedianya Wirele Router	meter unit buah unit	16-36 8-41-7-37 0 25	16-36 8-41-7-37 0 25
1.4.3	Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Lembaga Penerima Mebel Tersedianya Kursi Rias Tersedianya Meja Rias Tersedianya Washbak Kursi Keramas	Lembaga Unit	1 1-1-1	1 1-1-1
1.4.4	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan	Tersedianya Komputer SKB Tersedianya Teralis SKb	Unit M2	4 30	4 30

No	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Nonformal/Ke setaraan				
1.4.5	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	Tersedianya peralatan praktik Keterampilan Tersedianya peralatan praktik menjahit Tersedianya peralatan TIK	Item	6-8-11	6-8-11
1.4.6	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Ke setaraan	Lembaga	10	10
1.4.7	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Terlaksananya Operasional SPNF	Tahun	1	1
1.4.8	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	TERSEDIANYA BOP KESETARAAN SWASTA ( PKBM )	Lembaga	10	10
2	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN</b>	Persentase guru SD bersertifikat profesi	Persen	76,35	76,35
2.1	<b>Kegiatan</b> Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Tertatanya Proses Perizinan Pendidikan Dasar	Tahun	1	1
2.1.1	<b>Sub Kegiatan</b> Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Terlaksananya Pembinaan Guru Se Kabupaten Bintan	Tahun	1	1
2.2	<b>Kegiatan</b> Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Meningkatnya Kinerja IGTKI Kabupaten Bintan	Lembaga	1	1
2.2.1	<b>Sub Kegiatan</b> Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang	Meningkatnya Kinerja IGTKI Kabupaten Bintan Terlaksananya Pembinaan TK PAUD di Kabupaten Bintan	Lembaga	1-159	1-159

No	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Diselenggarakan oleh Masyarakat				
3	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (DINAS KESEHATAN)</b>	1. PKM Akre, Akre RS, Tipe RS di PKM, Alkes PKM 2. Desa Ttn Kwsn Sht, Yan Rer RS, IKM RS, ASI Eklus Gi Kur, AKB, ANC Bumil, Linnakes, KF, A Dsr, Kec API, IR DBD TB, Cak HIV, P KM PTM, Cak JKN 3. Desa Ttn Kwsn Sht, Yan Rem RS, IKM RS, ASI Eklu GiKur, AKB, ANC Bumil, Linnakes, KF, A Dsr, Kec API, IR DBD TB, Cak HIV, PKM PTM, Cak JKN 4. PKM Akre, Akre RS, Tipe RS di PKM, Alkes PKM,			
3.1	<b>Kegiatan</b> Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tahun	1	1
3.1.1	<b>Sub Kegiatan</b> Pembangunan Puskesmas	Tersedianya Pusat Kesehatan Masyarakat di wilayah Bintang yang sesuai standar menurut peraturan yang berlaku	Tahun	1	1
3.1.2	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya				
3.1.3	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan		Paket	2	2
3.1.4	Pengembangan Puskesmas				
3.1.5	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Unit	1	1
3.1.6	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Paket	1	1
3.1.7	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas				

No	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pelayanan Kesehatan				
3.1.8	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan				
3.1.9	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan				
3.2	<b>Kegiatan</b> Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	100
3.2.1	<b>Sub Kegiatan</b> Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Ibu hamil	3182	3182
3.2.2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		Ibu bersalin/ibu bersalin	3043/3043	3043/3043
3.2.3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		Bayi	2895	2895
3.2.4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		Balita	12884	12884
3.2.5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		Sekolah	165	165
3.2.6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		remaja	22532	22532
3.2.7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		lansia	12069	12069

No	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.2.8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		Orang/Puskesmas	11750/15	11750/15
3.2.9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		Orang	1603	1603
3.2.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				
3.2.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV				
3.2.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		Persen	100	100
3.2.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana		1Tahun	1	1
3.2.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Puskesmas	15	15
3.2.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				
3.2.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				
3.2.17	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				
3.2.18	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan		Asman/Hatra	20/24	20/24

No	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya				
3.2.19	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Puskesmas/Desa/Kel/Persen/Tahun	15/51/100/1	15/51/100/1
3.2.20	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA		Puskesmas	15	15
3.2.21	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus		orang	240	240
3.2.22	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan		Kali	20	20
3.2.23	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				
3.2.24	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		Jiwa	20000	20000
3.2.25	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				
3.2.26	Operasional Pelayanan Rumah Sakit		Bulan	12	12
3.2.27	Operasional Pelayanan Puskesmas		Bulan	12	12
3.2.28	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Faskes	7	7
3.2.29	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota		Puskesmas	15	15
3.2.30	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		Puskesmas/Puskesmas	15/15	15/15

No	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.2.31	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				
3.3	<b>Kegiatan</b> Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Terselenggaranya Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persen	100	100
3.3.1	<b>Sub Kegiatan</b> Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan		Buku	25	25
3.3.2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		Dinkes/Puskesmas	1/15	1/15
3.4	<b>Kegiatan</b> Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	100
3.4.1	<b>Sub Kegiatan</b> Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan		Puskesmas/RS UD	15/5	15/5
4	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	Jumlah Puskesmas yang Minimal Memiliki 5 Jenis Tenaga Kesehatan			
4.1	<b>Kegiatan</b> Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Tersedianya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	100
4.1.1	<b>Sub Kegiatan</b> Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Puskesmas yang memiliki minimal 9 jenis tenaga kesehatan Tersedianya Insentif tenaga kesehatan penanganan Covid 19	Puskesmas/Bulan	9/12	9/12



No	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.1.2	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terlaksananya bimbingan teknis dan supervise, pengawasan terhadap SDM Kesehatan Terlaksananya bimbingan teknis dan supervise, pengawasan terhadap SDM Kesehatan	RSUD/Puskesmas	1/15	1/15
4.2	<b>Kegiatan</b> Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Berkembangnya Mutu dan Meningkatnya Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Orang	5	5
4.2.1	<b>Sub Kegiatan</b> Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan			
5	<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>	Persentase kesediaan obat dan vaksin di Puskesmas, Jumlah Puskesmas yang Memiliki 70% Alat Kesehatan Sesuai Permenkes 75 Tahun 2014			
5.1	<b>Kegiatan</b> Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Tersedianya Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persen	100	100
5.1.1	<b>Sub Kegiatan</b> Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut pengawasan Apotek, Toko Obat dan Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Toko Alat kesehatan dan Optikal Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut pengawasan Apotek, Toko Obat dan Usaha Mikro Obat	Apotik/Toko/Obat/Pengelola Obat	17/17/20	17/17/20

No	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Tradisional (UMOT), Toko Alat kesehatan dan Optikal Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut pengawasan Apotek, Toko Obat dan Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Toko Alat kesehatan dan Optikal			
5.2	<b>Kegiatan</b> Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Tersedianya Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Persen	100	100
5.2.1	<b>Sub Kegiatan</b> Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga				
5.3	<b>Kegiatan</b> Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Tersedianya Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persen	100	100
5.3.1	<b>Sub Kegiatan</b> Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut				

No	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				
5.4	<b>Kegiatan</b> Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Tersedianya Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	0
6	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	Persentase Desa yang melaksanakan PHBS, Persentase Desa Siaga Aktif			
6.1	<b>Kegiatan</b> Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
6.1.1	<b>Sub Kegiatan</b> Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				
6.2	<b>Kegiatan</b> Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terselegarannya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Persen	100	0

No	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6.3	<b>Kegiatan</b> Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	100
6.3.1	<b>Sub Kegiatan</b> Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				
7	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	3. Tingkat partisipasi angkatan kerja 4. Tingkat partisipasi angkatan kerja	Persen	100	100
7.1	<b>Kegiatan</b> Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Terciptanya Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Jenis	1	1
7.1.1.	<b>Sub Kegiatan</b> Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Pelatihan Kerja yang Memiliki Kompetensi	Orang	20	20
8	<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	3. Tingkat pengangguran terbuka 4. Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan			0
9	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	3. Persentase kasus yang terselesaikan dengan perjanjian bersama (PB) 4. Persentase kasus perselisihan pengusaha pekerja yang terselesaikan	Persen	100	100
9.1	<b>Kegiatan</b> Pengesahan Peraturan	Terwujudnya Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja	Dokumen	1	1

No	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			
9.1.1.	<b>Sub Kegiatan</b> Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Dokumen Peraturan Perusahaan antara Pekerja dan Perusahaan Yang Telah Disahkan	Perusahaan	20	20
9.1.2.	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Dokumen Penyusunan Upah Minimum Kabupaten (UMK)	Dokumen	1	1
9.2	<b>Kegiatan</b> Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Terciptanya Pencegahan dan Penyelesaian Hubungan Industrial. Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Kasus	15	15
9.2.1	<b>Sub Kegiatan</b> Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Mogok Kerja. dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Ber dampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Kasus	15	15
9.2.2.	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama	Jumlah Dokumen Koordinasi Dalam Kerjasama Tripartit	Dokumen	1	1

No	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Tripartit Daerah Kabupaten/Kota				
9.1.3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksanannay Pengukuhan oengurus Karang Taruna kabupaten Bintan Terlaksananya bantuan sosial operasionla LKSA dan FKKPD Terlaksananya kegiatan pembinaan PSKS Terlaksananya kegiatan penyerahan bantuan sembako dan kursi roda Terlaksanya rapat kerja tahunan karang taruna	Orang/LKSA/PSKS/PMKS/orang	50/11/30 /1200/50	50/11/30/1 200/50
9.1.4	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Terlaksananya pembinaan pengurus LKS terlaksananya Penjangkauan Klien LK3	Peserta/klien	15/10	
10	<b>PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN</b>	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	%	100	100
10.1	<b>Kegiatan</b> Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Terwujudnya fasilitasi pemulangan Warga negara korban tindak kekerasan ke daerah asal	orang	9	9
10.1.1	<b>Sub Kegiatan</b> Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan	Terlaksananya koordinasi dengan daerah asal warga negara migran korban tindak kekerasan	Orang	9	9

No	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	ke Desa/Kelurahan Asal				
11	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	1. Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan sosial 2. Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan sosial	%	78	78
11.1	<b>Kegiatan</b> Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan, Pengemis di Luar Panti	%	100	100
11.1.1	<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Permakanan	Tersedianya kebutuhan permakanan	Lansia/anak	420	420
11.1.2	Penyediaan Sandang	Tersedianya pakaian bagi lanjut usia dan pengurus LKS LU	Lansia/anak	48	0
11.1.3	Penyediaan Alat Bantu	tersedianya kebutuhan alat bantu bagi penanganan lanjut usia terlantar dan penyandang disabilitas	LKSU dan Disabilitas	3	3
11.1.4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Terlaksananya pelayanan reunifikasi bagi lansia terlanta dan anak bermasalah	Lansia dan anak	14	14
11.1.5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Terpenuhinya kebutuhan bimbingan fisik, mental, spiritual bagi anak Terlantar Terpenuhinya kebutuhan bimbingan fisik, mental, spiritual bagi Disabilitas Terpenuhinya kebutuhan bimbingan fisik, mental, spiritual bagi Lansia Terlantar	Orang/disabilitas/lansia	100/30/950	100/30/950
11.1.6	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	tersedianya kebutuhan kesehatan dasar bagi lanjut usia terlantar di luar panti	lansia	800	800

No	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11.1.7	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Tersedianya data Gelandangan pengemis dan laporan tahunan kegiatan rehabilitasi Lanjut Usia terlantar, anak terlantar dan penyandang disabilitas	Buku	4	4
11.1.8	Pemberian Layanan Kedaruratan	Tersedianya insentif bagi pengelola LKSLU	pengelola	11	11
11.1.9	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Terlaksananya pelayanan penelusuran lansia terlantar dan anak bermasalah sosial	Lansia dan anak	14	14
11.1.10	Pemberian Layanan Rujukan	Terlaksananya pelayanan rujukan bagi Anak yang membutuhkan Terlaksananya pelayanan rujukan bagi disabilitas yang membutuhkan Terlaksananya pelayanan rujukan bagi Lanjut usia yang membutuhkan	Anak/disabilitas/lansia	2/1/10	2/1/10
11.2	<b>Kegiatan</b> Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Terwujudnya penanganan dan Rehabilitasi Sosial Bagi PMKS Lainnya Bukan HIV/AIDS	Persen	100	100
11.2.1	<b>Sub Kegiatan</b> Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Tersedianya layanan rujukan bagi KPO, Tuna Susia dan Kelompok Minoritas lainnya	PMKS	10	0
11.2.2	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Terpenuhinya kebutuhan fisik mental dan spritual bagi PMKS, KPO dan Kelompok Minoritas lainnya Terpenuhinya kebutuhan fisik mental dan spritual bagi PMKS, KPO dan Kelompok Minoritas lainnya	Kel minoritas/OD GJ	30/80	30/80
11.2.3	Pemberian Layanan Rujukan	Tersedianya layanan rujukan bagi PMKS lainnya	PMKS	10	10
12	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	1. Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan sosial	%	55,48	55,48



No	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		untuk pemenuhan kebutuhan dasar 2. Persentase masyarakat yang mendapatkan bantuan jaminan sosial			
12.1	<b>Kegiatan</b> Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Tersedianya data anak terlantar	Persen	100	0
12.2	<b>Kegiatan</b> Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tersediannya data kemiskinan, Terpenuhinya kebutuhan Bagi Orang tidak Mampu	Persen	100	100
12.2.1	<b>Sub Kegiatan</b> Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya pemutakhiran Data Kemiskinan Tercapainya Verval KPM BST Terlaksananya Verifikasi dan Validasi Peserta PBI	RTM/KPM/jiwa	9650/5148/51276	9650/5148/51276
12.2.2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemberian bantuan pengobatan dan beasiswa pendidikan	Kecamatan	10	0
12.2.3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Terpenuhinya kebutuhan operasional distribusi BSP Sembako Terpenuhinya Kebutuhna Verifikasi data, Labelisasi dan Pembinaan PEserta PKH	KPM/KPM	5148/3108	5148/3108
12.2.4	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Terlaksananya Bimtek Pendamping dan Pengurus KUBE Terlaksananya pembinaan dan monitoring KUBE dan UEP Terlaksananya penyaluran bantuan KUBE bagi Masyarakat Tidak Mampu Terpenuhinya operasional pendamping KUBE Tersedian Outlet KUBE	Orang/KUBE/KUBE/pendamping/outlet	50/1228/7/20/1	50/1228/7/20/1
13	<b>PROGRAM</b> <b>PENINGKATAN</b> <b>KERJASAMA DESA</b>	1. Persentase PADes	Persen	60	60
13.1	<b>Kegiatan</b> Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Terwujudnya Kerja Sama Antar Desa	Desa	36	36
13.1.1	<b>Sub Kegiatan</b> Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Kerja Sama	Desa	10	10

No	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	dalam Kabupaten/Kota				
14	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>	1. Tingkat kesesuaian perencanaan Desa dengan pelaksanaan di lapangan	Persen	97	97
14.1	<b>Kegiatan</b> Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Terlaksananya Pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan desa	Persen	100	100
14.1.1	<b>Sub Kegiatan</b> Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa				0
14.1.2	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan	Dokumen	36	36
14.1.3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen APBDes	Dokumen	36	36
14.1.4	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Terlaksananya pembinaan kapasitas aparatur pemerintahan desa	Desa	36	36
14.1.5	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah BUMDes	BUMDEs	36	36
14.1.6	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Desa yang disosialisasi	Desa	23	23
14.1.7	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Profil Desa dan Kelurahan	Dokumen	51	51
14.1.8	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Aset Desa	Dokumen	36	36
14.1.9	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa dan Kelurahan yang di Evaluasi	Desa/Kel	51	51
15	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA</b>	1. Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Persen	80	80

No	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<b>KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>				
15.1	<b>Kegiatan</b> Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang di bina	Desa	36	36
15.1.1	<b>Sub Kegiatan</b> Fasilitasi Penataan, Pemberdayaa n dan Pendayaguna an Kelembagaan Lembaga Kemasyarakat an Desa/Keluraha n (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Keluraha n dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa	Desa	36	36
15.1.2	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Lembaga Usaha Ekonomi	Desa	36	36
15.1.3	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan	Jumlah Temuan TTG	Desa	36	36

No	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Teknologi Tepat Guna				
15.1.4	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Desa Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong	Desa	1	1
15.1.5	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Desa	Desa	2	2
15.1.6	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah PKK	PKK	36	36

Sumber: LKPJ Dinas Pendidikan Tahun 2021; LKPJ Dinas Kesehatan Tahun 2021; LKPJ Dinas Sosial Tahun 2021; LKPJ Dinas Pemberdayaan Desa Tahun 2022

## Sasaran Strategis 11

Meningkatnya Kesetaraan dan keadilan Gender dalam Pembangunan

### Indikator Kinerja Utama 12: Indeks Pembangunan Gender

Tabel 2.40

#### Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Bintang Tahun 2021

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target		Realisasi		Capaian Kinerja (%)		
			RPJMD	RKPD 2021	2020	2021	T-RPJMD	TS (Terhadap Tahun Sebelumnya)	2021
1	Indeks Pembangunan Gender	%	92,41	92,41	93,1	93,12	100,76832	0,02	133,03

Sumber: LKPJ DP3KB Kabupaten Bintang Tahun 2021

Istilah gender digunakan untuk menjelaskan perbedaan peran perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan. Gender adalah perbedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat.

Gender tidak sama dengan kodrat. Kodrat adalah sesuatu yang ditetapkan oleh Tuhan YME, sehingga manusia tidak mampu untuk merubah atau menolak. Sementara itu, kodrat bersifat universal, misalnya melahirkan, menstruasi dan menyusui adalah kodrat bagi perempuan, sementara mempunyai sperma adalah kodrat bagi laki-laki.

Ketidakadilan gender merupakan kondisi tidak adil akibat dari sistem dan struktur sosial, sehingga perempuan maupun laki-laki menjadi korban dari sistem tersebut. Laki-laki dan perempuan berbeda hanya karena kodrat antara laki-laki dan perempuan berbeda. Keadilan gender akan dapat terjadi jika tercipta suatu kondisi di mana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis.

Indeks Pembangunan Gender ini digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. IPG adalah ukuran kesenjangan pembangunan manusia terpilah, IPG merupakan rasio dari IPM laki-laki terhadap IPM Perempuan. Semakin dekat angka IPG ke 100, maka, semakin kecil kesenjangan gender. IPG Kabupaten Bintan pada tahun 2021 sebesar 93,12 meningkat 0,02 dibanding capaian tahun 2020 yaitu 93,10.

Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian IKU IPG Kabupaten Bintan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.41**  
**Program dan Kegiatan Pendukung**  
**Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2021**

No.	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	92,41	92,41
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	70,00	70,00
		. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	70,00	70,00
1.1	<b>Kegiatan</b> Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kelembagaan PUG dan Anggaran yang Responsif Gender (ARG)	OPD	39	39
1.1.1	<b>Sub Kegiatan</b> Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Seluruh OPD dapat membuat ARG/PPRG dan Penguatan Kelembagaan PUG	OPD	39	39
1.2	<b>Kegiatan</b> Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Pelaku Industri Rumahan dalam Upaya Peningkatan Produktifitas Ekonomi Perempuan	Kecamatan	10	10
1.2.1	<b>Sub Kegiatan</b> Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di	Pembinaan Perempuan Pelaku	Kecamatan	10	10

No.	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Industri Rumahan			
1.3	<b>Kegiatan</b> Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Organisasi Perempuan Yang Tergabung Dalam Nauangan Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Bintan	Organisasi	24	24
1.3.1	<b>Sub kegiatan</b> Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pembinaan Organisasi Perempuan Yang Tergabung Dalam Nauangan Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Bintan	Organisasi wanita	24	24
2	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	Persentase penyelesaian kasus tindak kekerasan terhadap perempuan	Persen	100	100
2.1	<b>Kegiatan</b> Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Tertangani Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Kasus	40	40
2.1.1	<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan	kasus	40	40

No.	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	dan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak			
2.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan di Kabupaten Bintang	kasus	40	40

Sumber: LKPJ DP3KB Kabupaten Bintang Tahun 2021

## Sasaran Strategis 12

Meningkatnya peran generasi muda dan prestasi Olahraga

### Indikator Kinerja Utama 14: Organisasi Kepemudaan yang Aktif

**Tabel 2.42**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Organisasi Kepemudaan yang Aktif Kabupaten Bintang**  
**Tahun 2021**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target		Realisasi		Capaian Kinerja (%)		
			RPJMD	RKPD 2021	2020	2021	T-RPJMD	TS (Terhadap Tahun Sebelumnya)	2021
1	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	%	80	80	85	85	106,25	0,00	106,25

Sumber: LKPJ Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintang Tahun 2021

Salah satu agenda strategis pembangunan kepemudaan adalah menciptakan generasi penerus masa depan bangsa yang tangguh,



mandiri, dan berdaya saing. Terlebih lagi adanya peluang bonus demografi menuntut pemuda untuk pandai dalam mengambil peran dan peluang. Menyadari pentingnya peran dan fungsi yang melekat pada pemuda Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas Pemuda dan Olahraga melakukan pembinaan melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemudaan di segala bidang sebagai bagian dari pembangunan nasional.

Organisasi pemuda yang aktif merupakan wadah paling efektif dalam melakukan pengembangan kepemudaan. Diharapkan dengan aktifnya pemuda di dalam organisasi kepemudaan, dapat meningkatkan kapasitas dan kapabilitas mereka. Untuk itu, pada tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Bintan menargetkan 80% Organisasi Kepemudaan di Kabupaten Bintan menjadi Organisasi Pemuda yang aktif melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi daerah. Organisasi Kepemudaan di Kabupaten Bintan menjadi Organisasi pemuda yang aktif melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi daerah, telah tercapai melebihi target yang telah ditetapkan dengan realisasi sebesar 85%.

Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian IKU Organisasi Kepemudaan yang Aktif Kabupaten Bintan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.43**  
**Program dan Kegiatan Pendukung**  
**Organisasi Kepemudaan yang Aktif Tahun 2021**

No.	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>	Jumlah Pemuda yang mandiri dan berdaya saing	Orang	63	63

No.	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.1	Kegiatan Penyerahan, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Terlaksananya Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Tahun	1	1
1.1.1	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Kegiatan	1	1
1.1.2	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Terlaksananya Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Kegiatan	1	1
1.2	Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Orang	100	100
1.2.1	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Kegiatan	1	1

Sumber: LKPJ Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan Tahun 2021

### Sasaran Strategis 13

Meningkatnya ketersediaan pangan masyarakat di seluruh wilayah

#### Indikator Kinerja Utama 15: Ketersediaan Pangan Masyarakat

**Tabel 2.44**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Ketersediaan Pangan Masyarakat Kabupaten Bintan**  
**Tahun 2021**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target		Realisasi		Capaian Kinerja (%)		
			RPJMD	RKPD 2021	2020	2021	T-RPJMD	TS (Terhadap Tahun Sebelumnya)	2021
1	Persentase Ketersediaan Pangan Masyarakat	%	100	100	118	100	100	-18,00	100

Sumber: LKPJ Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan Tahun 2021

Pada Tahun 2021, IKU Ketersediaan Pangan Masyarakat Kabupaten Bintan mencapai 100%, dengan target sebesar 100%. Ketersediaan Pangan Masyarakat meliputi 11 bahan pokok kebutuhan masyarakat, yaitu: beras, gula, jagung, minyak goreng, telur, bawang merah, bawang putih, daging ayam, daging sapi, cabe besar, dan cabe rawit.

Pada tahun 2021, capaian produksi tanaman pangan sebesar 3.935,80 ton. Dengan kondisi pandemi pada tahun 2021, dengan luas tanam dan luas panen yang diperoleh serta produktivitas yang dihasilkan, dapat meningkatkan produktivitas tanaman pangan.

Adapun capaian produksi tanaman pangan dapat tergambar dari tabel di bawah ini:

**Tabel 2.45**  
**Capaian Produksi Pangan Kabupaten Bintan**  
**Tahun 2021**

No.	Komoditas	Luas Tanam (ha)	Luas Panen (ha)	Jumlah Produksi (ton)
1	Jagung	174,30	16,80	84
2	Kedelai	0	0	0
3	Ubi Kayu	167,60	182	3.276
4	Ubi Jalar	23	24,10	241
5	Kacang Tanah	18,50	21,50	172
6	Kacang Hijau	0	0	0
7	Talas	10	8	40
8	Padi	37,40	30,7	122,80
	<b>Tahun 2021</b>	<b>765</b>	<b>283,10</b>	<b>3.935,80</b>
	<b>Tahun 2020</b>	<b>597,70</b>	<b>549,50</b>	<b>8.120,80</b>
	<b>Tahun 2019</b>	<b>406,30</b>	<b>349,50</b>	<b>8.394</b>

*Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan, Tahun 2021*

Pencapaian Produktivitas Tanaman Pangan (jumlah produksi dibagi jumlah luas panen dikali seratus persen) pada tahun 2021 dengan target adalah 13,90 ton/ha dan realisasi pencapaian sebesar 13,90 ton/ha. Hal tersebut dapat diartikan bahwa produktivitas tanaman pangan tercapai target (naik 157,95%).

#### **Jumlah Produksi Daging dan Telur (Ton)**

Pada tahun 2021, target jumlah produksi daging dan telur adalah sebesar 2.572,80 ton (daging) dan 1.790,20 ton (telur) terealisasi

sebesar 3.068,94 ton (daging) dan 3.225,83 ton (telur). Jumlah ini meningkat, dibandingkan target jumlah produksi daging dan telur untuk tahun 2020 adalah 2.571,90 ton (daging) dan 1.790,10 ton (telur) terealisasi sebesar 3.007,93 ton (daging) dan 2.936,23 ton (telur).

Meningkatnya jumlah populasi daging dan telur ini dikarenakan meningkatnya jumlah populasi ternak di Kabupaten Bintan. Kondisi ini didukung dengan tersedianya petugas di lapangan sehingga kesehatan hewan dapat terawasi dan populasi ternak dapat ditingkatkan. Populasi keseluruhan ternak di Kabupaten Bintan tahun 2020 tercatat sebagai berikut: ternak sapi 1.072 ekor, babi 3.197 ekor, kambing 1.976 ekor, ayam ras petelur 314.500 ekor, ayam ras pedaging 741.000 ekor, ayam buras 188.982 ekor, itik 9.967 ekor, dan puyuh 16.400 ekor.

Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian IKU Ketersediaan Pangan Masyarakat Kabupaten Bintan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.46**  
**Program dan Kegiatan Pendukung**  
**Ketersediaan Pangan Masyarakat Tahun 2021**

No.	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	Produktivitas Tanaman Hortikultura Unggulan Daerah (ton/ha)	ton/ha	6,1	6,1

No.	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Produktivitas tanaman perkebunan unggulan daerah (ton/ha)	ton/ha	11	11
		Jumlah Produksi Daging dan Telur	ton	2.572,8/1.790,2	2.572,8/1.790,2
1.1	Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Tersediannya penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Persen	100	100
1.1.1	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah sarana pertanian yang disalurkan	Kegiatan	1	1
1.2	Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersediannya Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persen	100	100
1.2.1	Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Tersediannya bibit kelapa dan kurma yang disalurkan	Kegiatan	1	1
1.2.2	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah bibit yang dikembangkan	Kegiatan	1	1
1.3	Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Tersediannya penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Persen	100	100
1.3.1	Sub Kegiatan Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Ternak yang disalurkan	Kegiatan	1	1
2	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN</b>	Persentase ketersediaan prasarana dan sarana pertanian	Persen	75,05	75,05

No.	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<b>PRASARANA PERTANIAN</b>	Persentase ketersediaan prasarana dan sarana pertanian			
		Jumlah Produksi Daging dan Telur (ton)			
2.1	Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian	Tersedianya Pengembangan Prasarana Pertanian	Persen	100	100
2.1.1	Sub Kegiatan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B	Tersedianya sarana produksi tanaman pangan	Kegiatan	1	1
2.2	Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	Tersedianya Pembangunan Prasarana Pertanian	Persen	100	100
2.2.1	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Tersedianya prasarana irigasi pertanian	Kegiatan	1	1
2.2.2	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Prasana Pertanian yang disalurkan	Kegiatan	1	1
2.2.3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasana Pertanian yang disalurkan	Kegiatan	1	1
2.3	Kegiatan Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam	Tersedianya Penyediaan dan Pengembangan Prasarana	Persen	100	100

No.	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Daerah Kabupaten/ Kota				
2.3. 1	Sub Kegiatan Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Terlaksananya pengembangan ternak unggas	Kegiatan	1	1
3	<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>	Persentase pengendalian, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular strategis dan zoonosis /PHMSZ dan Terlaksananya penanganan kasus Penyakit Hewan/Ternak melalui Puskesmas (Pusat Kesehatan Hewan) Kabupaten Bintan (Ekor / Kasus)	Persen	100	100
3.1	Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten	Tersedianya Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persen	100	100
3.1. 1	Sub Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Terlaksananya pengamanan ternak daerah	Kegiatan	1	1
3.2	Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persen	100	100



No.	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Kegiatan	1	1
3.3	Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Tersedianya Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner			0
4	<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	1. Jumlah Kelompok Tani yang meningkat kapasitasnya (Kelompok)	Kelompok	100	100
4.1	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Tersedianya Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persen	100	100
4.1.2	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Penyuluh Pertanian lapangan yang meningkat kapasitasnya	Kegiatan	1	1

Sumber: LKPJ Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintang Tahun 2021

## Sasaran Strategis 14

Meningkatnya Kebersihan Lingkungan Serta Upaya meningkatnya Kualitas Lingkungan hidup secara

### Indikator Kinerja Utama 16: Indeks Kualitas Air

**Tabel 2.47**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Indeks Kualitas Air Kabupaten Bintang Tahun 2021**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target		Realisasi		Capaian Kinerja (%)		
			RPJMD	RKPD 2021	2020	2021	T-RPJMD	TS (Terhadap Tahun Sebelumnya)	2021
1	Hasil pengukuran indeks kualitas air	Poin	70	70	52,71	55,56	79,371429	2,85	79,37

Sumber: LKPJ Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bintang Tahun 2021

Capaian Indeks Kualitas Air (IKA) di Kabupaten Bintang adalah sebesar 55,56 poin dari 70 poin yang ditargetkan untuk dicapai di tahun 2021, menunjukkan IKA Kabupaten Bintang berada dalam kategori sedang dengan capaian kinerja sebesar 79,37%.

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003, bahwa salah satu metode untuk menentukan indeks kualitas air digunakan metode indeks pencemaran air sungai (PIj). Indeks pencemaran air dapat digunakan untuk menilai kualitas badan air, dan kesesuaian peruntukan badan air tersebut. Informasi indeks pencemaran juga dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas badan air apabila terjadi penurunan kualitas dikarenakan kehadiran senyawa pencemar.

Guna meningkatkan kualitas air di Kabupaten Bintang, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bintang selalu melakukan pemantauan kualitas lingkungan melalui program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup. Selain itu, Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan juga melakukan Pengawasan Pengelolaan B3 dan Limbah B3, Penataan Hukum Lingkungan Hidup, Pelaksanaan Pemantauan dan Penanggulangan Lingkungan Hidup, Pengendalian Pencemaran Lingkungan

Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian IKU Indeks Kualitas Air Kabupaten Bintan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.48**  
**Program dan Kegiatan Pendukung**  
**Indeks Kualitas Air Tahun 2021**

No.	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	Tersusunnya Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)	Status	7	0
		Tersusunnya RPPLH	Dokumen	ada	ada
1.1	<b>Kegiatan</b> Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Tersedianya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persen	100	0
1.2	<b>Kegiatan</b> Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Tersedianya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Persen	100	100
1.2.1	<b>Sub Kegiatan</b> Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Terlaksananya penyusunan KLHS RDTR Kota Kijang	Dokumen	1	1 Dokumen
1.2.2	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Terlaksananya penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Bintan	Dokumen	1	1 Dokumen
2	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	Indeks	70	70
		Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	Indeks	70	0
2.1	<b>Kegiatan</b>	Tersedianya pencegahan	Persen	100	100

No.	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/Kota			
2.1.1	<b>Sub Kegiatan</b> Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Terlaksananya pemantauan kualitas lingkungan Tersedianya data sumber pencemar di Kabupaten Bintan	Titik-Kecamatan	22-1	22-1
2.2	<b>Kegiatan</b> Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Tersedianya data penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/Kota	Persen	100	0
3	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>	Persentase Ruang Terbuka Hijau yang dikelola	Persen	100	100
3.1	<b>Kegiatan</b> Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Tersedianya pengelolaan keanekaragaman hayati Kabupaten/Kota	Persen	100	100
3.1.1	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Tersedianya operasional dan sarana prasarana ruang terbuka hijau (RTH)	Tahun	1	1 Tahun

Sumber: LKPJ Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan Tahun 2021

Pencemaran udara merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh beberapa wilayah perkotaan di dunia dan tidak terkecuali di Indonesia. Kecenderungan penurunan kualitas udara di beberapa kota besar di Indonesia telah terlihat dalam beberapa dekade terakhir yang dibuktikan dengan data hasil pemantauan khususnya partikel (PM10, PM2.5) dan oksidan/ozon (O3) yang semakin meningkat. Selain itu kebutuhan akan transportasi dan energi semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah

penduduk. Peningkatan penggunaan transportasi dan konsumsi energi akan meningkatkan pencemaran udara yang akan berdampak pada kesehatan manusia dan lingkungan. Penyusunan dan penghitungan indeks kualitas udara ditujukan:

1. sebagai pelaporan kualitas udara yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan informasi yang mudah dipahami kepada masyarakat tentang kondisi kualitas udara; dan
2. sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan pengelolaan kualitas udara yang tujuannya melindungi manusia dan ekosistem.

Indeks kualitas udara pada umumnya dihitung berdasarkan lima pencemar utama yaitu oksidan/ozon di permukaan, bahan partikel, karbon monoksida (CO), sulfur dioksida (SO<sub>2</sub>) dan nitrogen dioksida (NO<sub>2</sub>). Namun pada saat ini penghitungan indeks kualitas udara menggunakan dua parameter yaitu NO<sub>2</sub> dan SO<sub>2</sub>. Parameter NO<sub>2</sub> mewakili emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin, dan SO<sub>2</sub> mewakili emisi dari industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar serta bahan bakar yang mengandung sulfur lainnya.

Indeks kualitas udara nasional dihitung dari Indeks kualitas udara masing - masing provinsi di Indonesia setelah data konsentrasi rata-rata tahunan parameter pencemar udara berupa SO<sub>2</sub> dan NO<sub>2</sub> dari hasil pengukuran kualitas udara ambien kabupaten/kota. Pengukuran kualitas udara ambien di kabupaten/kota dilakukan pada 4 (empat) lokasi yang mewakili wilayah industri, pemukiman, transportasi, dan perkantoran dengan metode manual passive sampler dengan persyaratan dan kriteria yang telah ditetapkan. Pengumpulan data tersebut dilakukan melalui 2 (dua) mekanisme yaitu :

1. pengukuran kualitas udara ambien dengan metode passive sampler yang dilakukan dengan APBN melalui mekanisme dekonsentrasi kepada provinsi;
2. pengukuran kualitas udara ambien yang dilakukan oleh daerah dengan menggunakan APBD.

Metodologi perhitungan IKU mengadopsi Program European Union melalui European Regional Development Fund pada Regional Initiative Project, yaitu “Common Information to European Air” (Citeair II) dengan Judul CAQI Air Quality Index : Comparing Urban Air Quality accros Borders-2012. Common Air Quality Index (CAQI) ini digunakan melalui [www.airqualitynow.eu](http://www.airqualitynow.eu) sejak 2006. Indeks ini dikalkulasi untuk data rata-rata perjam, harian dan tahunan.

Penghitungan Indeksnya adalah dengan membandingkan nilai rata-rata tahunan terhadap standar European Union (EU) Directives. Apabila nilai indeks  $> 1$ , berarti bahwa kualitas udara tersebut melebihi standar UE. Sebaliknya apabila nilai indeks  $\leq 1$  artinya kualitas udara memenuhi standar EU.

Air Quality	Index Value (IEU)
EU Standards are exceed ed by one pollutant or more	$>1$
EU Standards are fulfilled on average	1
The situation is better than the norms requirements on average	$<1$

Indeks Kualitas Udara Kabupaten Bintan pada tahun 2021 tercatat diangka 1 poin artinya kualitas udara di Kabupaten Bintan memenuhi standar EU. Angka ini sesuai target yang ditetapkan di Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bintan yakni 1 poin dengan capaian kinerja 100% ini Kabupaten Bintan harus mempertahankan Kualitas Udaranya.

## Indikator Kinerja Utama 17: Indeks Kualitas Udara

**Tabel 2.49**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Indeks Kualitas Udara Kabupaten Bintan Tahun 2021**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target		Realisasi		Capaian Kinerja (%)		
			RPJMD	RKPD 2021	2020	2021	T-RPJMD	TS (Terhadap Tahun Sebelumnya)	2021
1	Hasil pengukuran indeks kualitas Udara	Poin	1	88,55	1	93,43	100	100	105,51

Sumber: LKPJ Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan Tahun 2021

Capaian Indeks Kualitas Udara (IKU) di Kabupaten Bintan adalah sebesar 93,43 poin dari 88,55 poin yang ditargetkan untuk dicapai di tahun 2021. Indikator hasil pengukuran IKU sebesar 93,43 poin dari 1 IKU pada penetapan target sebelumnya mengalami penyesuaian dalam menetapkan target dengan adanya Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 4/Menlhk/Setjen/KUM.1/4/2021 tentang Penetapan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berwawasan Lingkungan, maka, untuk target tahun 2021 di konversikan sesuai Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu untuk tahun 2021, target IKU Kabupaten Bintan adalah sebesar 88,55 poin.

Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian IKU Indeks Kualitas Udara Kabupaten Bintan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.50**  
**Program dan Kegiatan Pendukung**  
**Indeks Kualitas Udara Tahun 2021**

No.	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	Tersusunnya Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)	Status	7	0
		Tersusunnya RPPLH	Dokumen	ada	ada
1.1	<b>Kegiatan</b> Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Tersedianya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persen	100	0
1.2	<b>Kegiatan</b> Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Tersedianya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Persen	100	100
1.2.1	<b>Sub Kegiatan</b> Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Terlaksananya penyusunan KLHS RDTR Kota Kijang	Dokumen	1	1 Dokumen
1.2.2	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Terlaksananya penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Bintan	Dokumen	1	1 Dokumen
2	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	Indeks	70	70
		Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	Indeks	70	0
2.1	<b>Kegiatan</b> Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	Tersedianya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/Kota	Persen	100	100
2.1.1	<b>Sub Kegiatan</b> Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Terlaksananya pemantauan kualitas lingkungan Tersedianya data sumber pencemar di Kabupaten Bintan	Titik-Kecamatan	22-1	22-1



No.	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.2	<b>Kegiatan</b> Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Tersediannya data penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/Kota	Persen	100	0
3	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>	Persentase Ruang Terbuka Hijau yang dikelola	Persen	100	100
3.1	<b>Kegiatan</b> Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Tersedianya pengelolaan keanekaragaman hayati9 kabupaten/Kota	Persen	100	100
3.1.1	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Tersedianya operasional dan sarana prasarana ruang terbuka hijau (RTH)	Tahun	1	1 Tahun

Sumber: LKPJ Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan Tahun 2021

### 2.3.5 Analisa Efisiensi Sumber Daya terhadap Pencapaian Kinerja Daerah

Optimalisasi sumber daya dalam pelaksanaan urusan pemerintahan serta kinerja daerah mesti didukung dengan sumber keuangan daerah yang terakumulasi dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Posisi sumber daya keuangan daerah sepanjang tahun 2021 diarahakan pencapaian urgensi ketahanan sosial masyarakat dalam menghadapi pandemic covid-19.

Dari 14 sasaran strategis yang kemudian menjadi 17 indikator kinerja utama kepala daerah dan juga terdapat indikator kinerja perangkat daerah dalam masa perkembangan 5 tahun RPJMD Kabupaten Bintan 2016-2021 menunjukkan perkembangan positif. Hal ini tidak lepas juga dari komitmen penganggaran terhadap prioritas nasional, provinsi kepulauan riau serta khususnya sinkronisasi dari visi-misi kepala daerah terhadap kebijakan.

Urgensi utama tentunya dalam mengakomodir pada anggaran daerah terletak pada kesejahteraan masyarakat.

Optimalisasi dari sisi belanja daerah sebagaimana telah disampaikan pada BAB I LPPD Kabupaten Bintan tahun 2021 telah menguraikan belanja daerah yang mempertimbangkan aspek secara multidimensional. Selain itu juga perubahan kebijakan nasional ditambah lagi guncangan global dengan adanya pandemic covid-19 berimplikasi langsung terhadap kemampuan keuangan daerah dari sisi pendapatan dan pembiayaan. Kemampuan keuangan daerah Kabupaten Bintan dalam membiayai belanja daerah yang berisikan program-kegiatan-sub kegiatan tentunya mesti menjawab tantangan kesejahteraan masyarakat, daya saing daerah serta dilakukan melalui terobosan inovasi birokrasi.

Berdasarkan pada peraturan perundang-undangan serta produk hukum daerah seperti tersebut di atas dan pelaksanaan APBD tahun 2021 serta perkembangan perekonomian lokal, regional dan kondisi eksisting maka dilakukan perubahan APBD tahun 2021. Perubahan APBD Kabupaten Bintan tahun 2021 berdasarkan evaluasi pelaksanaan APBD 2021 sampai dengan bulan April tahun 2021. Beberapa indikator yang menjadi pertimbangan untuk dilakukan perubahan APBD antara lain:

1. Bahwa dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA Tahun 2021 adanya perubahan pada beberapa pos pendapatan dan belanja daerah dari yang telah ditetapkan pada Penetapan APBD;
2. Bahwa dengan penyesuaian APBD sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya;

3. Bahwa sesuai dengan penyesuaian Pendapatan Daerah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021, disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya;
4. Menyesuaikan perubahan prediksi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain pendapatan yang sah;
5. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 906/923/keuda hal Hasil inventaris dan pemetaan klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah terkait Penggunaan DBH-CHT, DAK Fisik, DAK Non Fisik untuk kegiatan PK2UKM, B2LPS, BOKB dan FPM dan DID, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 yang harus disesuaikan dalam Perubahan APBD Tahun 2021;
6. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 906/1351/keuda hal Hasil Inventaris dan Pemetaan (*Mapping*) Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait

DAK Fisik Bidang Pendidikan, Sanitasi dan Lingkungan Hidup serta DAK Non Fisik Jenis Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak yang juga harus disesuaikan dalam Perubahan APBD Tahun 2021;

7. Bahwa dengan keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja adalah:
  - a. Adanya pergeseran antar kegiatan dalam rangka penyesuaian atau perbaikan atas kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan untuk diganti dengan kegiatan penting lainnya yang bisa dilaksanakan;
  - b. Adanya pergeseran antar jenis belanja berupa perbaikan kode rekening.
8. Terkait dengan SiLPA tahun sebelumnya yang dapat digunakan dalam tahun berjalan hasil audit BPK RI;
9. Upaya percepatan pencapaian target RPJMD 2016-2021.

Dengan adanya perubahan target pendapatan, belanja dan pembiayaan maka diperlukan penyesuaian struktur APBD tahun 2021 pada Perubahan APBD tahun 2021.

Kinerja APBD Kabupaten Bintan tahun anggaran 2021 ditengah situasi krusial covid-19 mesti menelaah soal ketahanan anggaran terutama persoalan realokasi dan refocusing anggaran untuk penanganan dan dampak pandemi. Oleh karena itu APBD TA.2021 mengedepankan manajemen pengelolaan keuangan daerah yang lebih adil, rasional, transparan, partisipatif dan akuntabel telah mengalami perubahan fundamental yang signifikan pada berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kebijakan keuangan daerah erat sekali kaitannya dengan keberhasilan program

pembangunan daerah. Oleh karena itu kebijakan keuangan daerah harus sesuai dengan arahan kebijakan pembangunan, untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan itu sendiri.

Dengan tata kelola keuangan daerah yang baik akan sangat menentukan keberhasilan dari realisasi program-program yang dicanangkan. Salah satu laporan kepala daerah didalam LKPJ berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan ini menyangkut pengelolaan sumber pendapatan daerah (pos pendapatan), pengeluaran belanja (pos belanja) dan sumber-sumber pembiayaan (pos biaya). Kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah guna memberikan petunjuk dan ketentuan- ketentuan umum yang telah disepakati bersama sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta merupakan instrument dalam penyusunan perencanaan anggaran serta sebagai dasar penilaian kinerja keuangan daerah. Dengan kaedah-kaedah kehati-hatian ini senantiasa dijaga agar menyasar pada program-program yang telah direncanakan tetap terpadu.

Dampak tersebut secara riil memberikan efek besar terhadap capaian hasil dari indikator kinerja kunci keluaran, indikator kinerja kunci hasil maupun juga indikator kinerja kunci fungsi penunjang. Secara garis besar dapat disampaikan bahwa seluruh indikator kinerja kunci dapat berjalan sebagaimana mestinya ditengah tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan baik wajib pelayanan dasar, non pelayanan dasar, penunjang serta pilihan.

Khusus untuk pendapatan Guna memenuhi pencapaian target Kemandirian daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah salah satunya ditunjukkan dengan inovasi

pada optimalisasi pendapatan daerah. Kabupaten Bintan sepanjang tahun anggaran 2021. Upaya intensifikasi maupun ekstensifikasi dan beberapa kegiatan lainnya, diantaranya:

- a) Melaksanakan penataan pengelolaan maupun potensi komponen pendapatan;
- b) Pendataan pada tempat-tempat usaha wajib pajak untuk meyakini omzet yang dilaporkan oleh Wajib Pajak;
- c) Melaksanakan pendataan administrasi pajak dan retribusi daerah;
- d) Pembinaan wajib pajak yang meliputi cara pengisian SPTPD yang baik dan benar, kewajiban membayar pajak secara periodik, perhitungan omzet yang kena pajak;
- e) Pemeriksaan wajib pajak pada wajib pajak yang menghitung sendiri (MPS) dan dilakukan secara rutin;
- f) Sosialisasi peraturan perpajakan daerah;
- g) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap administrasi pengelolaan pungutan PBB sektor pedesaan dan perkotaan;
- h) Melakukan monitoring atas pendapatan daerah secara periodik untuk dilakukan evaluasi dan merumuskan rencana tindaknya;
- i) Melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Pusat maupun Propinsi dalam rangka perolehan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU);
- j) Melaksanakan rekonsiliasi dengan Pemerintah Pusat maupun Propinsi tentang penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak;

- k) Melaksanakan koordinasi dengan instansi yang terkait agar kegiatan operasional dapat berlangsung dengan efektif baik secara horizontal maupun vertikal antar level pemerintahan serta kalangan profesi yang memiliki pengaruh terhadap upaya peningkatan penerimaan daerah.

Kebijakan Umum Anggaran tahun 2021 pada target pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp. 1.077.644.954.892,00,- dan untuk angka realisasi pada tahun ini meningkat hingga Rp. 1.106.147.234.756,92,- atau 102,64 %. Walaupun begitu realisasi ini masih belum mengimbangi kondisi realisasi tahun anggaran 2020, pendapatan daerah Kabupaten Bintan mencapai Rp. 1.206.127.115.886,45,-.

Gambaran daripada Target dan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Bintan pada tahun anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.51**  
**Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2021**

No.	Uraian	Target	Realisasi	(%)	Realisasi 2020
1	<b>PENDAPATAN</b>	<b>1.077.644.954.892,00</b>	<b>1.106.147.234.756,92</b>	<b>102,64</b>	<b>1.206.127.115.886,45</b>
1.1	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>199.884.059.562,00</b>	<b>195.902.264.544,92</b>	<b>98,01</b>	<b>191.512.028.537,45</b>
1.2	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>848.503.369.330,00</b>	<b>870.158.338.817,00</b>	<b>102,55</b>	<b>970.985.065.362,00</b>
1.3	<b>Lain-lainnya Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>29.257.526.000,00</b>	<b>40.086.631.395,00</b>	<b>137,01</b>	<b>43.630.021.987,00</b>

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bintan (Unaudited) Tahun Anggaran 2021

Ditinjau dari sisi kontribusi pembentuk pendapatan daerah menunjukkan situasi membaik pada sisi pendapatan asli daerah di

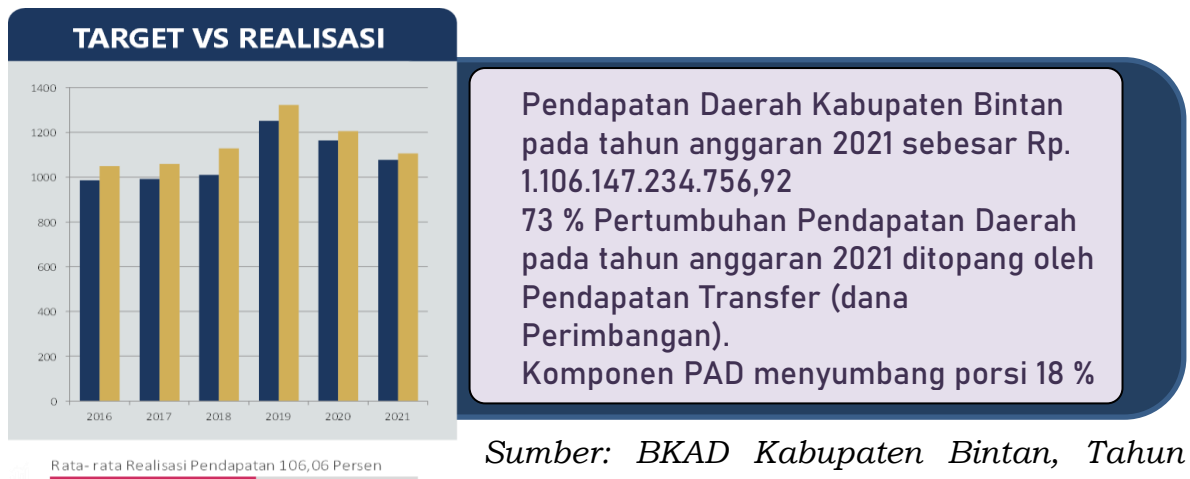
tahun 2021 yang mencapai Rp. 195.902.264.544,92 dibandingkan tahun 2020 Rp. 191.512.028.537,45 dengan pertumbuhan 2,29 %. Dari komponen PAD meningkat realisasi kecuali sektor lain-lain PAD yang sah menurun pada tahun 2021.

Selanjutnya kebijakan daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Bintan, antara lain sebagai berikut:

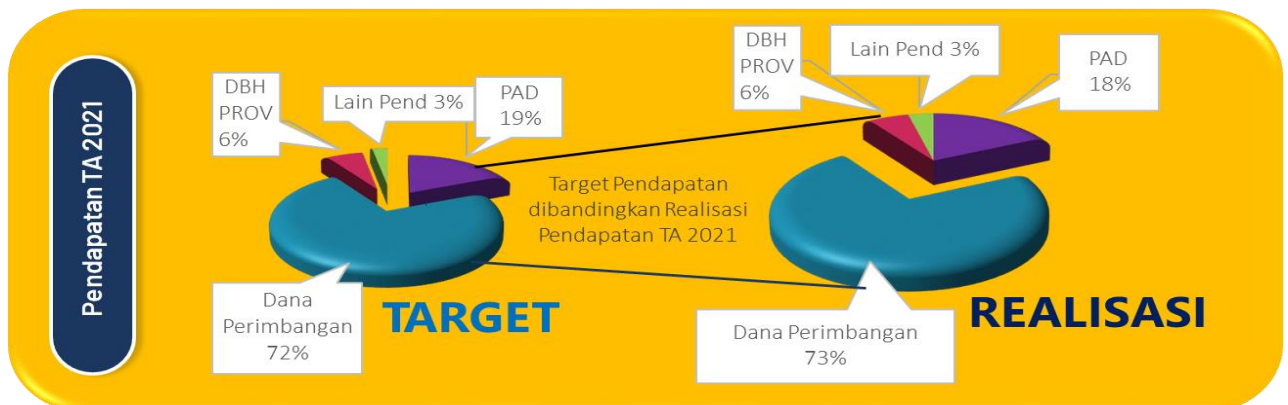
1. Diadakan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum tentang pajak daerah secara intensif dan berkesinambungan kepada masyarakat dengan dilanjutkan upaya penegakan hukum (law enforcement) secara periodik bersama-sama Tim Pembina Samsat Provinsi Kepulauan Riau (Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Direktorat Lalu lintas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau dan PT. Jasa Raharja di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau);
2. Peningkatan pelaksanaan online system dalam akurasi data wajib pajak khususnya terhadap pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah yang memberikan dampak terhadap pelayanan kepada masyarakat;
3. Peningkatan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah penghasil terutama dalam penyediaan sarana dan prasarana dalam menunjang pemungutan retribusi daerah serta dalam rangka menggali potensi retribusi baru.
4. Peningkatan koordinasi dengan instansi Pemerintah Pusat antara lain: Kementerian Keuangan, Ditjen Pajak, Kementerian ESDM, BP Migas dan Kantor Perwakilan Pajak di Batam dan Kota Tanjungpinang.



**Gambar 2.4**  
**Kinerja Pendapatan daerah Kabupaten Bintan tahun 2021**



Sumber: BKAD Kabupaten Bintan, Tahun



Sektor pajak dan retribusi daerah khususnya di Kabupaten Bintan sepanjang tahun 2021 dapat dikatakan tidak lepas dari situasi tekanan berat yang dihadapi perekonomian daerah, kebijakan pendapatan daerah khususnya dari sisi perpajakan juga diprioritaskan untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi daerah sejalan dengan penyelamatan lapangan usaha. Salah satu kebijakan pemerintah sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai target, adalah memberikan fasilitas perpajakan bagi sektor-sektor usaha tertentu dan kegiatan-kegiatan tertentu.

Selanjutnya untuk menggambarkan kondisi penganggaran daerah terhadap kinerja dapat terlihat dari kebijakan-kebijakan pengelolaan belanja daerah.

Kebijakan Umum Belanja Daerah diprioritaskan untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing satuan kerja perangkat daerah serta untuk memenuhi kebutuhan anggaran sesuai dengan prioritas yang ditetapkan. Selanjutnya dengan mempertimbangkan keberhasilan pembangunan yang telah dicapai pada tahun sebelumnya serta permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi, maka pada tahun 2021 kebijakan yang dilaksanakan melalui peningkatan belanja prioritas untuk:

- a) Peningkatkan aksesabilitas pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat miskin dan masyarakat berpendapatan rendah;
- b) Pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat usaha ekonomi lemah seperti pedagang, usaha kecil dan menengah, petani, serta nelayan;
- c) Pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, sanitasi, air bersih, serta listrik di wilayah kantong-kantong kemiskinan, desa-desa dan pulau terpencil;
- d) Peningkatan kapasitas, kompetensi, dan kinerja aparatur pemerintah daerah khususnya dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Keempat prioritas di atas menjadi sasaran utama dalam pembangunan Kabupaten Bintan tahun 2021. Disamping prioritas tersebut pemerintah daerah juga memperhatikan beberapa prioritas yang perlu menjadi perhatian daerah sejalan dengan prioritas nasional, prioritas dimaksud adalah:

- a) Penguatan ketahanan ekonomi;

- b) Pengembangan wilayah;
- c) Peningkatan SDM;
- d) Peningkatan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
- e) Penguatan infrastruktur;
- f) Pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
- g) Stabilitas politik hukum dan transformasi pada publik.

Berbagai prioritas tersebut merupakan upaya untuk mengarahkan program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2021 dalam rangka pencapaian visi, misi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan didalam RPJMD tahun 2016-2021 serta RKPD tahun 2021 yang selanjutnya diformulasikan kedalam Kebijakan Umum APBD.

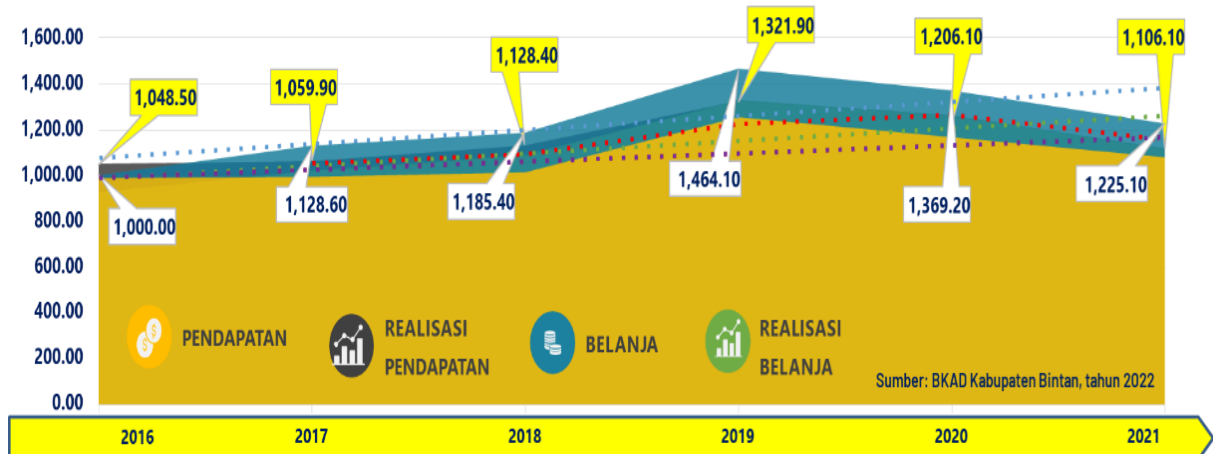
Secara umum adapun gambaran perkembangan daripada kondisi realisasi Belanja daerah Kabupaten Bintan pada tahun anggaran 2021 sebesar Rp. Rp 1.116.857.494.607,31,- atau 91,16 % dari perencanaan awal belanja daerah pada tahun 2021 sebesar Rp. 1.225.133.748.261,68,- yang terdiri dari 4 (Empat) Komponen utama yaitu belanja operasional, belanja modal dan belanja tak terduga dan belanja transfer. Adapun uraian daripada realisasi belanja daerah di Kabupaten Bintan pada tahun anggaran 2021 tertera pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.52**  
**Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2021**

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
1	Belanja Daerah	1.225.133.748.261,68	1.116.857.494.607,31	(108.276.253.654,37)
1.1	Belanja Operasi	940.086.490.634,68	853.483.115.172,98	(86.603.375.461,70)
1.2	Belanja Modal	166.054.936.680,00	149.418.347.825,33	(16.636.588.854,67)
1.3	Belanja Tidak Terduga	10.189.062.247,00	5.674.118.343,00	(4.514.943.904,00)
1.4	Belanja Transfer	108.803.258.700,00	108.281.913.266,00	(521.345.434,00)

Sedangkan untuk kinerja APBD Kabupaten Bintan dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

**Gambar 2.5**  
**Kinerja APBD Kabupaten Bintan tahun 2021**



**Perkembangan APBD Kabupaten Bintan dari Tahun 2016 s.d 2021**

- Tren pertumbuhan APBD cenderung Naik kemudian Turun lagi, APBD tertinggi pada tahun 2019 Rp.1.464.158.403.537,- , dan realisasi pendapatan tertinggi juga pada tahun 2019 Rp.1.321.912.600.208,- (Dampak pandemi covid 19)
- Proses penyusunan APBD setiap tahunnya mengalami defisit, atau tidak berimbang dimana jumlah belanja lebih besar dari pendapatan.
- Rata-rata penyerapan/realisasi belanja sebesar 91,48 persen dan realisasi pendapatan sebesar 106,06 persen atau melampaui target, sehingga setiap tahunnya terdapat Surplus atau Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Adapun klasifikasi Belanja Daerah Berdasarkan Pasal 55 PP Nomor 12 tahun 2019, terdiri atas: (a) Belanja operasi yang merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, (b) Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi, (c) Belanja tidak terduga; dan Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan (d) Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

**Tabel 2.53**

**Alokasi Anggaran Berdasarkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kabupaten Bintan Tahun 2021**

<b>Uraian</b>	<b>Realisasi Anggaran (Rp)</b>	<b>Persentase (%)</b>
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR - Kesehatan</b>	251.763.878.620	22,54
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR - Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat</b>	26.490.012.955	2,37
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR - Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	60.262.213.298	5,40
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR - Pendidikan</b>	272.454.437.501	24,39
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR - Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman</b>	43.425.991.145	3,89
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR - Sosial</b>	10.725.842.460	0,96
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR -Administrasi Kependudukan dan Capil</b>	7.464.211.554	0,67

Uraian	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR -Kebudayaan	6.745.575.494	0,60
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR -Kepemudaan dan Olah Raga	7.497.123.075	0,67
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR -Komunikasi dan Informatika	9.492.677.978	0,85
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR -Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	6.617.017.587	0,59
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR -Lingkungan Hidup	21.946.454.772	1,97
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR -Pangan	10.414.811.445	0,93
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR -Pemberdayaan Masyarakat Desa	6.110.857.264	0,55
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR -Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.122.926.424	0,46
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR -Penanaman Modal	6.537.828.940	0,59
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR -Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.454.100.413	0,22
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR -Perhubungan	16.053.162.153	1,44
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR -Perpustakaan	4.761.001.058	0,43
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR -Persandian	21.669.920	0,0019
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR -Pertanahan	27.180.450	0,0024
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR -Statistik	24.613.657	0,0022
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR -Tenaga Kerja	3.764.070.210	0,34
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Kepegawaian	11.248.702.314	1,01
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Keuangan	122.255.753.881	10,95
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Penelitian dan Pengembangan	1.008.784.292	0,09
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Pengelola Perbatasan Daerah	133.776.675	0,01
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Perencanaan	11.865.568.558	1,06
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN Kelautan dan Perikanan	22.263.144.827	1,99
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN Pariwisata	1.346.809.196	0,12
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN Perdagangan	637.509.816	0,06

Uraian	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN Perindustrian	5.259.081.910	0,47
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN Pertanian	4.001.147.658	0,36
UNSUR KEWILAYAHAN Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)	58.325.036.757	5,22
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM Kesatuan Bangsa dan Politik	5.779.898.890	0,52
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN Sekretariat Daerah	54.560.539.380	4,89
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN Sekretariat DPRD	29.017.837.083	2,60
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN Inspektorat	8.976.244.997	0,80

Sumber: BKAD Kabupaten Bintan, Tahun 2021

Untuk menggambarkan perkembangan keuangan daerah khususnya pada perangkat daerah yang menaungi kewangan berdasarkan urusan pemerintahan pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.54**  
**Rekap Realisasi Keuangan Kegiatan APBD Kabupaten Bintan**  
**Tahun Anggaran 2021 Posisi Triwulan IV**

No.	Nama OPD	Pagu Dana (Rp)	Bobot (%)	Keuangan			
				Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1	Dinas Pendidikan	286.818.971.387	23,41	286.818.971.387	100,00	272.454.437.500	94,99
2	Dinas Kesehatan	238.002.184.131	19,43	238.002.184.131	100,00	209.396.699.285	87,98
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	63.160.447.351	5,16	63.160.447.351	100,00	60.262.273.240	95,41
4	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	45.150.887.457	3,69	45.150.887.457	100,00	43.425.991.145	96,18
5	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	6.164.446.468	0,50	6.164.446.468	100,00	5.779.898.890	93,76

No.	Nama OPD	Pagu Dana (Rp)	Bobot (%)	Keuangan			
				Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
6	Satuan Polisi Pamong Praja	19.751.835.181	1,61	19.751.835.181	100,00	19.017.556.041	96,28
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.042.656.413	0,66	8.042.656.413	100,00	7.474.085.214	92,93
8	Dinas Sosial	11.194.751.892	0,91	11.194.751.892	100,00	10.725.842.658	95,81
9	Dinas Tenaga Kerja	4.137.163.588	0,34	4.137.163.588	100,00	3.764.070.210	90,98
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	9.217.772.027	0,75	9.217.772.027	100,00	7.577.026.837	82,20
11	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	15.782.765.855	1,29	15.782.765.855	100,00	14.415.959.103	91,34
12	Dinas Lingkungan Hidup	23.247.803.597	1,90	23.247.803.597	100,00	21.946.454.772	94,40
13	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	8.233.247.463	0,67	8.233.247.463	100,00	7.465.666.682	90,68
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	6.716.230.929	0,55	6.716.230.929	100,00	6.110.857.264	90,99
15	Dinas Perhubungan	16.902.465.985	1,38	16.902.465.985	100,00	16.062.019.253	95,03
16	Dinas Komunikasi Dan Informatika	10.012.024.657	0,82	10.012.024.657	100,00	9.541.711.555	95,30
17	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian Dan Perdagangan	13.371.121.650	1,09	13.371.121.650	100,00	12.513.609.313	93,59
18	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan	7.187.688.082	0,59	7.187.688.082	100,00	6.537.828.940	90,96



No.	Nama OPD	Pagu Dana (Rp)	Bobot (%)	Keuangan			
				Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
	<b>Terpadu Satu Pintu</b>						
19	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	7.831.183.967	0,64	7.831.183.967	100,00	7.497.123.075	95,73
20	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	8.755.713.837	0,71	8.755.713.837	100,00	8.092.384.690	92,42
21	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah	5.050.149.144	0,41	5.050.149.144	100,00	4.761.001.058	94,27
22	Dinas Kelautan Dan Perikanan	22.884.469.775	1,87	22.884.469.775	100,00	22.263.144.827	97,13
23	Sekretariat Daerah	66.534.968.531	5,43	66.534.968.531	100,00	54.813.783.540	90,25
24	Sekretariat DPRD	33.367.345.257	2,72	33.367.345.257	100,00	29.017.837.083	86,96
25	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	14.439.193.901	1,18	14.439.193.901	100,00	12.874.352.850	89,16
26	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	160.227.979.451	13,08	160.227.979.451	100,00	150.400.829.991	93,87
27	Badan Pendapatan Daerah	17.139.492.733,00	1,40	17.139.492.733	100,00	14.222.103.225,00	82,98
28	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	13.444.072.396	1,10	13.444.072.396	100,00	11.278.840.714	83,89
29	Inspektorat Daerah	10.627.091.567	0,87	10.627.091.567	100,00	8.976.244.997	84,47
30	Kecamatan Bintan Utara	13.194.505.245	1,08	13.194.505.245	100,00	10.061.937.578	76,26
31	Kecamatan Bintan Pesisir	3.048.213.412	0,25	3.048.213.412	100,00	2.696.012.097	88,45
32	Kecamatan Tambelan	5.068.458.247	0,41	5.068.458.247	100,00	3.888.650.475	76,72
33	Kecamatan Mantang	3.026.433.036	0,25	3.026.433.036	100,00	2.744.709.839	90,69

No.	Nama OPD	Pagu Dana (Rp)	Bobot (%)	Keuangan			
				Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
34	Kecamatan Toapaya	6.069.066.630	0,50	6.069.066.630	100,00	5.345.975.191	88,09
35	Kecamatan Teluk Sebong	5.750.158.874	0,47	5.750.158.874	100,00	5.098.630.719	88,67
36	Kecamatan Teluk Bintan	5.747.417.155	0,47	5.747.417.155	100,00	4.971.138.725	86,49
37	Kecamatan Gunung Kijang	7.105.649.004	0,58	7.105.649.004	100,00	6.331.992.648	89,11
38	Kecamatan Bintan Timur	14.825.057.160	1,21	14.825.057.160	100,00	10.665.368.804	71,94
39	Kecamatan Seri Kuala Lobam	7.902.669.500	0,65	7.902.669.500	100,00	6.523.269.661	82,55
<b>Jumlah</b>		<b>1.225.133.752.935</b>	<b>100,00</b>	<b>1.225.133.752.935</b>	<b>100,00</b>	<b>1.116.997.319.689</b>	<b>89,72</b>

Sumber: SIMONEV Triwulan IV

Komponen lainnya didalam APBD adalah pembiayaan yang menjadi tolak ukur keuangan daerah. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan dalam pembiayaan daerah adalah terdiri atas: (1) penerimaan pembiayaan dan (2) pengeluaran pembiayaan serta pembiayaan daerah yang kemudian dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, jenis, objek, dan rincian objek pembiayaan daerah.

Untuk realisasi Penggunaan SILPA APBD Tahun 2021 sebesar Rp 149.093.793.369,68 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp 149.093.793.369,68 dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp 5.000.000,00. Sedangkan dalam TA 2021 realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) adalah sebesar Rp136.783.533.519,29,-.

**Tabel 2.55**  
**Capaian Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Bintan**  
**Tahun Anggaran 2021**

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
1.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>149.088.793.369,68</b>	<b>149.093.793.369,68</b>	<b>5.000.000,00</b>
1.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	149.088.793.369,68	149.088.793.369,68	0,00
1.1.2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
1.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>1.600.000.000,00</b>	<b>1.600.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	Penyertaan Modal Daerah	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	0,00
<b>Pembiayaan Netto</b>		<b>147.488.793.369,68</b>	<b>147.493.793.369,68</b>	<b>5.000.000,00</b>
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)</b>		<b>0,00</b>	<b>136.783.533.519,29</b>	<b>136.783.533.519,29</b>

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bintan (Unaudited) Tahun Anggaran 2021

### **2.3.6 Analisa Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Kinerja**

Selanjutnya untuk program-program maupun kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis daerah Kabupaten Bintan telah mempertimbangkan arah kebijakan nasional, pemerintah provinsi dengan dilakukan sinkronisasi didalam penjabaran program pembangunan daerah khususnya pada rencana kerja pemerintah daerah tahun 2021 termasuk beberapa penyesuaian dalam RPJMD Kabupaten Bintan. Hal ini dilakukan terkait dengan optimalisasi target dengan pertimbangan kondisi serta situasi regional, nasional maupun global.

Hal ini telah diuraikan pada bagian awal LPPD seluruh program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kabupaten Bintan.

**Tabel 2.56**

**Uraian Program dan Kegiatan Pendukung Kinerja  
Pemerintahan Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021**

No	Program dan Kegiatan
<b>Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar</b>	
<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan</b>	
<b>1</b>	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
<b>1.1</b>	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
<b>1.2</b>	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
<b>1.3</b>	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
<b>1.4</b>	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
<b>2</b>	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN
<b>2.1</b>	Kegiatan Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
<b>2.2</b>	Kegiatan Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
<b>Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar</b>	
<b>Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan</b>	
<b>1</b>	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (DINAS KESEHATAN)
<b>1.1</b>	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
<b>1.2</b>	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
<b>1.3</b>	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
<b>1.4</b>	Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
<b>2</b>	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN (DINAS KESEHATAN)
<b>2.1</b>	Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
<b>2.2</b>	Kegiatan

No	Program dan Kegiatan
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
<b>3</b>	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN (DINAS KESEHATAN )
<b>3.1</b>	Kegiatan
	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
<b>3.2</b>	Kegiatan
	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
<b>3.3</b>	Kegiatan
	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
<b>3.4</b>	Kegiatan
	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
<b>4</b>	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN (DINAS KESEHATAN )
<b>4.1</b>	Kegiatan
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
<b>4.2</b>	Kegiatan
	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
<b>4.3</b>	Kegiatan
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
<b>5</b>	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS BERAKIT)
<b>5.1</b>	Kegiatan
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
<b>5.2</b>	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi *
<b>6</b>	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN (PUSKESMAS BERAKIT)
<b>6.1</b>	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota *
<b>7</b>	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN (PUSKESMAS BERAKIT)
<b>7.1</b>	Kegiatan
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota *
<b>7.2</b>	Kegiatan

No	Program dan Kegiatan
	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota *
<b>7.3</b>	Kegiatan
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota *
<b>8</b>	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS TOAPAYA)
<b>8.1</b>	Kegiatan
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
<b>8.2</b>	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi *
<b>9</b>	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN (PUSKESMAS TOAPAYA)
<b>9.1</b>	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
<b>10</b>	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN (PUSKESMAS TOPAYA)
<b>10.1</b>	Kegiatan
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
<b>10.2</b>	Kegiatan
	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
<b>10.3</b>	Kegiatan
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota *
<b>11</b>	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS TELUK SASAH)
<b>11.1</b>	Kegiatan
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
<b>11.2</b>	Kegiatan
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
<b>12</b>	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN (PUSKESMAS TELUK SASAH)
<b>12.1</b>	Kegiatan
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
<b>13</b>	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN (PUSKESMAS TELUK SASAH)
<b>13.1</b>	Kegiatan
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
<b>13.2</b>	Kegiatan

No	Program dan Kegiatan
	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
13.3	Kegiatan
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
14	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS KIJANG )
14.1	Kegiatan
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
14.2	Kegiatan
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
15	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN (PUSKESMAS KIJANG)
15.1	Kegiatan
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
16	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN PUSKESMAS KIJANG
16.1	Kegiatan
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
16.2	Kegiatan
	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
16.3	Kegiatan
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
17	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (TANJUNG UBAN )
17.1	Kegiatan
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
17.2	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi *
18	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TANJUNG UBAN
18.1	Kegiatan
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
19	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN TANJUNG UBAN
19.1	Kegiatan
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

No	Program dan Kegiatan
19.2	Kegiatan
	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
19.3	Kegiatan
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
20	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
	SEI LEKOP
20.1	Kegiatan
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
20.2	Kegiatan
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
21	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
	SEI LEKOP
21.1	Kegiatan
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
22	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
	SEI LEKOP
22.1	Kegiatan
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
22.2	Kegiatan
	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
22.3	Kegiatan
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
23	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
	NUMBING
23.1	Kegiatan
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
23.2	Kegiatan
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
24	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
	NUMBING
24.1	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota *
25	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
	NUMBING
25.1	Kegiatan



No	Program dan Kegiatan
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
25.2	Kegiatan
	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
25.3	Kegiatan
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota *
26	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
	KELONG
26.1	Kegiatan
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
26.2	Kegiatan
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
27	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
	KELONG
27.1	Kegiatan
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
28	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
	KELONG
28.1	Kegiatan
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
28.2	Kegiatan
	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
28.3	Kegiatan
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
29	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
	KAWAL
29.1	Kegiatan
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
29.2	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi *
30	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
	(KAWAL)
30.1	Kegiatan
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
31	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
	(KAWAL)

No	Program dan Kegiatan
31.1	Kegiatan
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
31.2	Kegiatan
	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
31.3	Kegiatan
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
32	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN
	TELUK BINTAN
32.1	Kegiatan
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
32.2	Kegiatan
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
33	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
	TELUK BINTAN
33.1	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota *
34	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
	TELUK BINTAN
34.1	Kegiatan
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
34.2	Kegiatan
	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
34.3	Kegiatan
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
35	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
	SRI BINTAN
35.1	Kegiatan
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
35.2	Kegiatan
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
36	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
	SRI BINTAN
36.1	Kegiatan

No	Program dan Kegiatan
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
<b>37</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>
	SRI BINTAN
<b>37.1</b>	Kegiatan
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
<b>37.2</b>	Kegiatan
	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
<b>37.3</b>	Kegiatan
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
<b>38</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>
	TAMBELAN
<b>38.1</b>	Kegiatan
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
<b>38.2</b>	Kegiatan
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
<b>39</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>
	TAMBELAN
<b>39.1</b>	Kegiatan
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
<b>40</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>
	TAMBELAN
<b>40.1</b>	Kegiatan
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
<b>40.2</b>	Kegiatan
	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
<b>40.3</b>	Kegiatan
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
<b>41</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>
	KUALA SEMPANG
<b>41.1</b>	Kegiatan
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
<b>41.2</b>	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi *
<b>42</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>

No	Program dan Kegiatan
	KUALA SEMPANG
42.1	Kegiatan
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
43	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
	KUALA SEMPANG
43.1	Kegiatan
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
43.2	Kegiatan
	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
43.3	Kegiatan
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
44	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
	MANTANG
44.1	Kegiatan
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
44.2	Kegiatan
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
45	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
	MANTANG
45.1	Kegiatan
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
46	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
	MANTANG
46.1	Kegiatan
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
46.2	Kegiatan
	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
46.3	Kegiatan
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
47	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
	TELUK SEBONG
48.1	Kegiatan
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
48.2	Kegiatan

No	Program dan Kegiatan
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
<b>49</b>	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
	TELUK SEBONG
<b>49.1</b>	Kegiatan
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
<b>50</b>	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
	TELUK SEBONG
<b>50.1</b>	Kegiatan
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
<b>50.2</b>	Kegiatan
	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
<b>50.3</b>	Kegiatan
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
<b>51</b>	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
	RSUD
<b>51.1</b>	Kegiatan
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
<b>51.2</b>	Kegiatan
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
<b>51.3</b>	Kegiatan
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
<b>51.4</b>	Kegiatan
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
<b>52</b>	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
	RSUD
<b>52.1</b>	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota *
<b>52.2</b>	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota *
<b>53</b>	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
	(RSUD)
<b>53.1</b>	Kegiatan
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
<b>54</b>	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
	(UPT BALAI PENGELOLAAN FARMASI DAN ALKES)
<b>54.1</b>	Kegiatan

No	Program dan Kegiatan
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
<b>54.2</b>	Kegiatan
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
<b>Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar</b>	
<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	
<b>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	
<b>1</b>	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
<b>1.1</b>	Kegiatan
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
<b>2</b>	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
<b>2.1</b>	Kegiatan
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
<b>3</b>	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
<b>3.1</b>	Kegiatan
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
<b>4</b>	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
<b>4.1</b>	Kegiatan
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
<b>5</b>	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
<b>5.1</b>	Kegiatan
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
<b>6</b>	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
<b>6.1</b>	Kegiatan
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
<b>7</b>	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
<b>7.1</b>	Kegiatan
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
<b>7.2</b>	Kegiatan
	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
<b>8</b>	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
<b>8.1</b>	Kegiatan
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
<b>8.2</b>	Kegiatan
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

No	Program dan Kegiatan
8.3	Kegiatan
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
<b>Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar</b>	
<b>Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman</b>	
<b>Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman</b>	
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
1.1	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
2	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
2.1	Kegiatan
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
2.2	Kegiatan
	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
2.3	Kegiatan
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
3	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
3.1	Kegiatan
	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
4	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
4.1	Kegiatan
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
<b>Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar</b>	
<b>Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat</b>	
<b>Satuan Polisi Pamong Praja</b>	
1.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
1.1	Kegiatan
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
1.2	Kegiatan
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
<b>Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar</b>	
<b>Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat</b>	
<b>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bintang</b>	
1	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
1.1	Kegiatan
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

No	Program dan Kegiatan
2	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
2.1	Kegiatan
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
3.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
4.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
5	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
5.1	Kegiatan
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
<b>Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar</b>	
<b>Urusan Pemerintahan Ketentraman, Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat</b>	
<b>Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah</b>	
1	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
1.1	Kegiatan
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
1.2	Kegiatan
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
1.3	Kegiatan
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
2	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
2.1	Kegiatan
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
2.2	Kegiatan
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
<b>Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar</b>	
<b>Urusan Pemerintahan Bidang Sosial</b>	
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
1.1	Kegiatan
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
2	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN
2.1	Kegiatan



No	Program dan Kegiatan
	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal
<b>3</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>
<b>3.1</b>	Kegiatan
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
<b>3.2</b>	Kegiatan
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
<b>4</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>
<b>4.1</b>	Kegiatan
	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar
<b>4.2</b>	Kegiatan
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
<b>5</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>
<b>5.1</b>	Kegiatan
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
<b>6</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>
<b>6.1</b>	Kegiatan
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional

Dalam hal mendukung target-target kinerja didalam RPJMD Kabupaten tahun 2016-2021 serta RKPD Kabupaten Bintan tahun 2021 seluruh kinerja terlaksana dan hasilnya terukur dilaporkan dalam pencapaian anggaran, fisik maupun kondisi riil.



# LPPD 2021

LAPORAN  
PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH  
KABUPATEN BINTAN

## BAB III

### CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN





## BAB III

# CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan memiliki dasar hukum yang melandasi dalam penyelenggaraan dan pelaporan yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4406);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LKPJ, AMJ dan ILPPD;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Petunjuk Teknis Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di lingkungan Departemen Dalam Negeri;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

156/Pmk.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 18).

Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan selain melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan kabupaten juga melaksanakan sebagian urusan pemerintahan tertentu melalui tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Penyelenggaraan tugas pembantuan adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi penugasan. Sebagian urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada Pemerintah Kabupaten Bintan tersebut dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang ditugaskan.

Tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan

asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan umum. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah. Tugas pembantuan yang diberikan oleh level pemerintahan di atasnya meliputi sebagian urusan pemerintahan yang apabila dilaksanakan oleh daerah akan lebih efisien dan efektif.

Penyelenggaraan tugas pembantuan sebagaimana diuraikan di atas memberikan konsekuensi terhadap pengaturan pendanaan. Seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat harus didanai dari APBN. Pengaturan pendanaan kewenangan Pemerintah Pusat melalui APBN mencakup salah satunya pendanaan sebagian urusan pemerintahan yang akan ditugaskan kepada daerah otonom berdasarkan asas tugas pembantuan. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan atas penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Pengalokasian dana tugas pembantuan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan pencapaian kinerja, efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pembangunan di daerah. Selain itu, alokasi dana tugas pembantuan dimaksudkan untuk menciptakan keselarasan dan

sinergitas secara nasional antara program dan kegiatan tugas pembantuan yang didanai dari APBN dengan program dan kegiatan desentralisasi yang didanai dari APBD.

Tugas Pembantuan dilaksanakan oleh 2 Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan, yakni:

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.728.850.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.659.936.243 atau (96%).
2. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.866.810.000 dengan realisasi anggaran sebesar 100%.

### **3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten**

Anggaran Tugas Pembantuan berasal dari Kementerian Dalam Negeri RI melalui Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk terfasilitasinya pada Dana ALokasi Khusus (DAK) Non Fisik, Program/kegiatan ini sebagai dana pendukung pelaksanaan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.728.850.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.659.936.243 atau (96%).

Hasil dari kegiatan ini adalah terpenuhinya fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan, yang mana dilaksanakan diantaranya:

- a. Penyusunan laporan pengelolaan kegiatan penyelenggaraan adminduk Kabupaten/Kota;
- b. Koordinasi dan konsultasi Administrasi Kependudukan;



- c. Monitoring dan evaluasi ke Kecamatan;
- d. Pengelolaan akuntansi administrasi kependudukan;
- e. Sosialisasi kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil;
- f. Pelayanan dokumen kependudukan;
- g. Penerbitan dokumen kependudukan;
- h. Pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan; dan
- i. Sarana pendukung pelayanan.

### **3.2 Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten**

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan pada tahun 2021 mendapatkan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Tugas Pembantuan dari Propinsi Kepulauan Riau kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.866.810.000 dengan realisasi fisik 100%. Alokasi anggaran serta realisasi Tugas Pembantuan, dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.1**  
**Alokasi Anggaran dan Realisasi Tugas Pembantuan Tahun 2021**

<b>No</b>	<b>Perangkat Daerah</b>	<b>Program</b>	<b>Pagu (Rp)</b>	<b>Realisasi Fisik (%)</b>	<b>Penyerapan (%)</b>
<b>1</b>	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	22.500.000	100	91,47
<b>2</b>	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Program Dukungan Manajemen Satker	25.950.000	100	88,23

No	Perangkat Daerah	Program	Pagu (Rp)	Realisasi Fisik (%)	Penyerapan (%)
3	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	44.200.000	100	94,95
4	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	744.060.000	100	100
5	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	1.030.100.000	100	100
<b>Total</b>			1.866.810.000		

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan , 2021

### 3.3 Permasalahan dan Kendala

Beberapa permasalahan dan solusi terkait dengan pelaksanaan tugas pembantuan pada 2 Perangkat Daerah Kabupaten Bintan adalah sebagai berikut:

#### 1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsetrasi dan Tugas Pembantuan, pada pasal 39 dinyatakan bahwa rumusan pemberian Tugas Pembantuan yang akan ditugaskan ke daerah ditetapkan oleh kementerian dan lembaga di pusat dan dibahas pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas). Namun kondisi saat ini menunjukkan sebagian besar Tugas Pembantuan dalam bentuk program/kegiatan (DIPA) yang sudah jadi/final,

termasuk dalam hal Petunjuk Operasional Keegiatannya (POK), sehingga mengakibatkan seringnya ditemui kesulitan dalam pelaksanaan di lapangan. Dana yang dialokasikan dari beberapa kementerian ada yang menurun dari tahun sebelumnya sehingga banyak target/sasaran yang belum bisa dicapai. Kedepan diharapkan pemerintah pusat dapat mencairkan anggaran yang telah disusun sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Serta dana yang diberikan pemerintah pusat ke daerah semakin meningkat dari tahun ketahunnya.

## 2. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Permasalahan yang dihadapi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan adalah sebagai berikut:

- a. Paket bantuan masih terasa minim khususnya saprodi, mengingat kondisi geografis dan kondisi tanah yang relatif tidak subur harus membutuhkan saprodi yang memadai;
- b. Rendahnya nilai paket bantuan, mengingat kondisi Kabupaten Bintan yang jauh dari sumber-sumber bibit dan saprodi sehingga harga-harga bibit dan saprodi menjadi mahal sehingga terjadi defisit antara standar harga Kementerian dan harga di lapangan;
- c. Minimnya bahkan tidak tersedianya biaya operasional monitoring dan pembinaan pada kegiatan Tugas Pembantuan sehingga pengawasan kegiatan tidak optimal;
- d. Pengangkutan bibit kurang mematuhi SOP sehingga bibit sampai di Kabupaten Bintan dalam keadaan kurang bagus; dan

- e. Terbatasnya Sumber Daya Manusia teknis di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.

### **3.4 Saran dan Tindak Lanjut**

Untuk mengatasi permasalahan seperti yang disebutkan di atas dalam pelaksanaan tugas pembantuan, maka dapat dilakukan beberapa upaya berikut ini:

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
  - a. Percepatan pelaksanaan kegiatan, dengan tetap mempedomani petunjuk teknis yang diterbitkan Kementerian/Lembaga pemberi penugasan;
  - b. Pembangunan sarana pendukung pelayanan, perekaman KTP-el dan jaringan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), hal ini mengingat pentingnya dokumen kependudukan bagi Masyarakat Kabupaten Bintan;
  - c. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pemerintah yang mempunyai kualitas dan inovatif dalam perencanaan pembangunan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil sehingga dapat bersaing dengan daerah-daerah lainnya;
  - d. Perlu upaya meningkatkan kerjasama dalam koordinasi dan persepsi terhadap penanganan kependudukan dan pencatatan sipil bagi aparatur pemerintah baik pusat, provinsi kabupaten/kota lainnya, masyarakat, tokoh dan ormas kepemudaan;
  - e. Peningkatan anggaran program kegiatan, baik itu sarana dan prasarana pendukung dalam penertiban Administrasi

Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berbasis teknologi sesuai dengan persaingan global yang berkembang; dan

- f. Pentingnya pengawasan melalui koordinasi dan informasi yang mampu dalam memotivasi mempercepat kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, sehingga Masyarakat Kabupaten Bintan benar-benar sadar akan arti pentingnya dokumen kependudukan dalam hak-haknya sebagai warga Negara Indonesia yang baik.

## 2. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

- a. Mohon paket bantuan dapat dilengkapi dengan saprodi yang memadai dengan menggunakan standar di Kabupaten Bintan;
- b. Nilai paket bantuan mohon dapat disesuaikan dengan kondisi harga di Kabupaten Bintan;
- c. Mohon disediakan anggaran monitoring dan pembinaan petani penerima bantuan baik dari sumber dana tugas pembantuan maupun APBD Kabupaten Bintan;
- d. Jika sumber bibit dari luar, diharapkan pengiriman dapat dilaksanakan sesuai SOP sehingga kualitas bibit akan tetap terjaga dengan baik; dan
- e. Mengalokasikan Sumber Daya Manusia yang kompeten.

### **3.5 Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan bersumber dari Dana Alokasi Khusus**

KANWIL DITJEN Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2021 kembali menyalurkan Dana Alokasi Khusus (DAK) kepada Pemerintah Kabupaten Bintan. Melalui DAK yang merupakan salah satu kewajiban pemerintah

pusat kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal, pada dasarnya bertujuan untuk percepatan pembangunan di daerah. Adapun DAK memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan dana perimbangan lainnya, yaitu karakteristik *Specific Grants*, artinya dana transfer DAK memiliki tujuan khusus yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang menjadi prioritas nasional dan menjadi urusan daerah

DAK terbagi dari 2 (Dua) jenis yaitu DAK fisik dan non fisik. DAK fisik yaitu dana yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah. DAK fisik terdiri atas DAK reguler, afirmasi, dan penugasan. DAK non fisik tidak jauh berbeda definisinya dengan DAK fisik, hanya saja DAK non fisik digunakan untuk mendanai kegiatan khusus non fisik. DAK non fisik terdiri atas Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB), Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM (PK2UKM), dan Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk).

DAK Penugasan terdiri atas (tiga) program utama bersifat lintas sektor dalam mendukung pencapaian sasaran proyek besar dan Prioritas Nasional tertentu. Ini sejalan dengan tema RKP Tahun 2021 mengenai ‘meningkatkan industri, pariwisata, dan investasi di berbagai wilayah didukung oleh SDM dan infrastruktur untuk pertumbuhan berkualitas’. Program – program tersebut mencakup antara lain:

Pertama, Penurunan Stunting. Terdiri atas kegiatan: (1) Kesehatan; (2) Air minum; dan (3) Sanitasi. Kedua, Penanggulangan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan. Terdiri dari kegiatan: (1) Irigasi; (2) Pertanian; (3) Kelautan dan Perikanan; (4) Jalan; (5) Perumahan & permukiman; (6) Air Minum; dan (7) Sanitasi. Ketiga, penyediaan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan. Terdiri dari kegiatan: (1) Jalan; (2) Pariwisata; (3) Industri Kecil dan Menengah (IKM); dan (4) Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Akan tetapi, peningkatan baik dari sisi besaran alokasi maupun dari cakupan bidang yang didanai melalui DAK ternyata masih banyak menemui kendala dan permasalahan, baik di pusat maupun daerah. Permasalahan tersebut antara lain terkait mismatch antara menu kegiatan yang tidak sesuai dengan kebutuhan daerah, petunjuk pelaksanaan yang terlambat, realisasi fisik yang terhambat oleh pihak ketiga atau masalah tender. Sehingga menyebabkan capaian output dan outcome DAK di daerah tidak maksimal. Sehubungan dengan itu, telah ditempuh berbagai upaya untuk menyempurnakan kebijakan DAK Fisik yang mencakup proses, siklus, dan mekanisme pengelolaan DAK, salah satunya DAK berbasis proposal. Berdasarkan arahan pemerintah pusat maka Arah Kebijakan DAK Fisik TA 2021 adalah sebagai berikut:

1. Refocusing dan simplikasi jenis, bidang, dan kegiatan DAK Fisik untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan pemenuhan kesenjangan layanan dasar Pendidikan, Kesehatan dan Konektivitas.
2. Peningkatan dan pemerataan penyediaan infrastruktur pelayanan publik.
3. Peningkatan sinergi dengan belanja K/L dan sumber dana

lainnya.

4. DAK Fisik Penugasan bersifat lintas sektor berdasar tema/program yg mendukung pencapaian sasaran major project dan prioritas tertentu:
  - a. Tema Penurunan Kematian Ibu dan Stunting.
  - b. Tema Penanggulangan Kemiskinan
  - c. Tema Ketahanan Pangan
  - d. Tema Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan
5. DAK Fisik Reguler pada tahun 2021 sebanyak 5 bidang yaitu Pendidikan, Kesehatan dan KB sert tema konektivitas meliputi: Jalan, Transportasi Pedesaan serta Transportasi perairan/laut.
6. DAK Fisik Penugasan 2021 terdapat 11 Bidang dengan 4 Tema
  - a. Tema Penurunan Kematian Ibu dan Stunting meliputi: Kesehatan dan KB, Sanitasi, Air Minum dan LHK
  - b. Tema Penanggulangan Kemiskinan Meliputi: Sanitasi, Air Minum dan Perumahan Pemukiman.
  - c. Tema Ketahanan Pangan meliputi: Pertanian, Perikanan, Irigasi, Jalan dan LHK,
  - d. Tema Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan meliputi: IKM, Pariwisata, Jalan dan LHK

Perlu juga disampaikan terkait dengan Kendala DAK Fisik adalah sebagai berikut:

1. Penyesuaian kodefikasi DAK Fisik pada SIPD, sehingga perlu penyesuaian nomenklatur dan perubahan APBD
2. Penyesuaian aplikasi SIPD terkait program kegiatan dan sub kegiatan tidak terkoneksi dengan Sistem Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) sehingga harus diinput manual dan lebih



lambat.

3. Keterlambatan proses PBJ:
  - a. Menunggu penetapan DPA/Revisi DPA
  - b. Keterlambatan penunjukan pejabat pengadaan
  - c. Jenis barang yang akan dibeli tidak muncul/terlambat muncul dalam e-katalog
4. Reviu APIP atas laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output sebagai syarat penyaluran. Sehingga harus melihat kesesuaian: Daftar kontrak kegiatan, Titik koordinat pada foto, Daftar BAST, Nilai rencana kebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatan, Jumlah sisa di RKUD dan penggunaan sisa
5. Keterlambatan Jukop oleh beberapa K/L 6.
6. Kendala pelaksanaan akibat pembatasan kegiatan karena pandemic Covid-19 7.
7. Realisasi penyerapan belum menjadi IKU kepala SKPD

Kebijakan DAK Non Fisik merupakan Bagian dari Dana Transfer Khusus, yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang bersifat operasional agar dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik yang merupakan urusan daerah sesuai kebutuhan dan prioritas daerah, serta selaras dengan prioritas nasional. Secara prinsipil kebijakan pada tahun 2021 adalah:

1. Membantu dan melengkapi kekurangan pendanaan kegiatan operasional dalam rangka pelaksanaan pelayanan dasar publik berdasarkan standar pelayanan minimal (SPM) yang selaras dengan program prioritas nasional dan menjadi kewenangan urusan pemerintah daerah.

2. Dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah, sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam APBN.
3. Dapat berupa pengalihan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan yang merupakan bagian dari anggaran kementerian negara/lembaga yang digunakan untuk melaksanakan urusan yang menurut peraturan perundangundangan menjadi urusan Daerah.

Pada tahun anggaran 2021 pemerintah Kabupaten Bintan mengikuti arah kebijakan pusat didalam kebijakan DAK Non Fisik yaitu:

1. Mendukung upaya pemulihan ekonomi pada sektor yang mendukung penyerapan tenaga kerja dan investasi.
2. Peningkatan dan pemerataan kemampuan pelayanan kesehatan untuk mendukung pencegahan dan penanganan krisis kesehatan.
3. Penambahan DAK Nonfisik jenis baru: a. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak; b. Dana Fasilitasi Penanaman Modal; dan c. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian.
4. Meningkatkan pengelolaan DAK Nonfisik melalui: a. Perencanaan dan penganggaran berbasis output dan outcome. b. Penyaluran berbasis kinerja penyerapan dan laporan penggunaan. c. Penguatan sinergi dengan DAK Fisik maupun Belanja K/L. d. Integrasi pemantauan melalui integrasi aplikasi.
5. Terdapat jenis DAK Nonfisik baru meliputi:
  - a. Dana Fasilitasi Penanaman Modal untuk membantu

peningkatan realisasi investasi dan kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan pelaksanaan penanaman modal termasuk mendapatkan kemudahan perizinan berusaha di masing-masing daerah.

- b. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak untuk mendanai peningkatan kualitas layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
- c. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian untuk mendukung keberdayaan masyarakat memenuhi kebutuhan pangan dari hasil pekarangannya sendiri dengan membantu pemerintah daerah dalam menyukseskan program Pekarangan Pangan Lestari (P2L).

**Tabel 3.2**

**Penyerapan Dak Fisik Kabupaten Bintang Tahun Anggaran 2021**

JENIS - BIDANG SUBBIDANG	PAGU	NILAI KONTRAK	SELISIH KONTRAK	PENYALURAN	TOTAL SP2D BUD TAHAP 3	OMSPAN TAHAP 3	TOTAL PENYERAPAN S.D TAHAP 3	SELISIH/SISA
<b>DAK Fisik</b>	<b>98.679.016.000,00</b>	<b>90.559.965.804,00</b>	<b>8.119.050.196,00</b>	<b>90.479.520.346,00</b>	<b>36.147.729.858,00</b>	<b>36.400.621.609,00</b>	<b>90.194.068.943,00</b>	<b>285.451.403,00</b>
<b>DAK Fisik Reguler</b>	<b>81.506.021.000,00</b>	<b>74.745.323.168,00</b>	<b>6.760.697.832,00</b>	<b>74.678.718.475,00</b>	<b>3.167.843.164.400,00</b>	<b>31.919.205.625,00</b>	<b>74.465.602.862,00</b>	<b>213.115.613,00</b>
<b>Pendidikan</b>								
<i>Sekolah Dasar SO)</i>	22.760.093.000,00	20.910.982.235,00	1.849.110.765,00	20.863.464.745,00	5.766.389.022,00	5.766.389.022,00	20.863.314.745,00	150,00
<i>Sekolah Menengah Pertama SMP)</i>	12.312.543.000,00	11.057.136.669,00	1.255.406.331,00	11.056.583.889,00	3.532.546.090,00	3.532.546.090,00	11.056.583.889,00	-
<i>Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)</i>	1.357.000.000,00	1.223.904.829,00	133.095.171,00	1.219.507.672,00	347.545.937,00	347.545.937,00	1.219.507.672,00	-
<i>Perpustakaan Daerah</i>	300.000.000,00	296.395.000,00	3.605.000,00	296.395.000,00	94.435.000,00	94.435.000,00	296.395.000,00	-
<b>Kesehatan dan Keluaraa Berencana</b>								
<i>Pelawatan Dasar</i>	11.549.793.000,00	11.211.790.348,00	338.002.652,00	11.211.674.248,00	5.865.297.148,00	5.865.297.148,00	11.210.771.485,00	902.763,00
<i>Pelayanan Rujukan</i>	8.190.468.000,00	6.823.543.503,00	1.366.924.491,00	6.823.543.503,00	6.823.543.503,00	6.823.543.503,00	6.823.543.503,00	-
<i>Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Habis Pakai</i>	3.057.147.000,00	2.717.694.489,00	339.452.511,00	2.717.694.489,00	2.294.717.659,00	2.544.157.539,00	2.544.157.539,00	173.536.950,00
<i>Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan</i>	390.000.000,00	387.000.000,00	3.000.000,00	387.000.000,00	387.000.000,00	387.000.000,00	387.000.000,00	-
<i>Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (Reguler)</i>	1.322.279.000,00	1.077.159.838,00	245.119.162,00	1.063.300.670,00	435.449.175,00	403.105.110,00	1.030.956.605,00	32 344 065

JENIS - BIDANG SUBBIDANG	PAGU	NILAI KONTRAK	SELISIH KONTRAK	PENYALURAN	TOTAL SP2D BUD TAHAP 3	OMSPAN TAHAP 3	TOTAL PENYERAPAN S.D TAHAP 3	SELISIH/SISA
<i>Jalan (Reguler)</i>	9.466.698.000,00	8.920.450.100,00	546.247.900,00	8.920.450.100,00	2.610.442.630,00	2.610.442.630,00	8.920.450.100,00	-
<i>Transportasi Perdesaan</i>	4.800.000.000,00	4.594.964.869,00	205.035.131,00	4.594.942.869,00	1.658.817.106,00	1.652.635.272,00	4.588.761.035,00	6.181.834,00
<i>Transportasi Laut</i>	6.000.000.000,00	5.524.301.288,00	475.698.712,00	5.524.161.290,00	1.862.248.374,00	1.892.108.374,00	5.524.161.289,00	1,00
<b>DAK Fisik Penugasan</b>	<b>17.172.995.000,00</b>	<b>15.814.642.636,00</b>	<b>1.358.352.364,00</b>	<b>15.800.801.871,00</b>	<b>4.469.298.214,00</b>	<b>4.481.415.984,00</b>	<b>15.728.466.081,00</b>	<b>72.335.790,00</b>
<i>Jalan (Ekonomi Berkelanjutan)</i>	3.398.889.000,00	3.197.565.207,00	201.323.793,00	3.197.565.207,00	909.377.649,00	909.377.649,00	3.197.565.205,00	2,00
<i>Pertanian (Ketahanan Panaan)</i>	1.627.087.000,00	983.028.500,00	644.058.500,00	983.028.500,00	48.853.000,00	-	911.828.500,00	71.200.000,00
<i>Kelautan dan Perikanan /Ketahanan Panaanl</i>	2.369.000.000,00	2.283.372.425,00	85.627.575,00	2.274.316.662,00	608.462.891,00	668.568.663,00	2.274.216.162,00	100.500,00
<i>Industri Kedd dan Menengah (EkonomiBerkelanjutan)</i>	5.000.487.000,00	4.837.491.537,00	162.995.463,00	4.837.491.537,00	1.558.040.144,00	1.558.905.144,00	4.837.491.537,00	-
<i>Air Minum (Penanggulangan Kemiskrnan)</i>	3.773.674.000,00	3.509.759.967,00	263.914.033,00	3.509.759.965,00	1.045.134.530,00	1.045.134.528,00	3.508.724.677,00	1.035.288,00
<i>Perumahan dan Permukiman (Penanaaulanaan Kemiskin</i>	1.003.858.000,00	1.003.425.000,00	433.000,00	998.640.000,00	299.430.000,00	299.430.000,00	998.640.000,00	-

Sumber: Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan, Tahun 2022

### **3.6 Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan bersumber dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Bintan**

Undang-Undang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Setiap tahun Pemerintah Pusat telah menyalurkan Dana Desa (DD) dan pemerintan daerah menyalurkan Alokasi Dana Desa (ADD) yang cukup besar untuk disalurkan kepada Desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan penjabaran kebutuhan daerah dalam membangun desa sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa yaitu Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa tersebut dikelola dalam 1 (satu) tahun anggaran yaitu mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban, sampai dengan pengawasan pengelolaan tersebut.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan sebuah representasi bagaimana pemerintahan desa akan mencapai tujuan-tujuan spesifik dalam membangun dan mengatur desanya. Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tersebut terakomodir semua program dan kegiatan pemerintahan desa termasuk pembangunan desa, sehingga dipandang sangat perlu adanya pelibatan masyarakat dalam proses penyusunan, perencanaan, penetapan dan

pelaksanaannya.

Pada tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Bintan menerima Dana Desa pada tahun Rp. 40.186.161.200,00,- . Kemudian melalui Peraturan Bupati Bintan Nomor 2 Tahun 2021 diatur Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Untuk Setiap Desa Di Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2021.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Rincian Dana Desa setiap dialokasikan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja;
- d. Alokasi Formula

Selanjutnya berdasarkan data APBDes Kabupaten Bintan tahun 2021 yang bersumber dari, terserap sebesar 93 %. Serapan tersebut merupakan akumulasi dari 36 desa di Kabupaten Bintan. Adapun desa yang serapan belanja desa  $\geq 90$  % yaitu yaitu: Pemerintah Desa Mantang Baru, Pemerintah Desa Busung, Pemerintah Desa Pangkil, Pemerintah Desa Kukup, Pemerintah Desa Pengujan, Pemerintah Desa Kuala Sempang, Pemerintah Desa Malang Rapat, Pemerintah Desa E kang Anculai Dan Pemerintah Desa Teluk Bakau. Selebihnya berada pada 60-89 % untuk tingkat serapan APBDes pada tahun anggaran 2021 Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.3**

**Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Bintan Tahun 2021**

NAMA KECAMATAN/DESA	PENDAPATAN			BELANJA DESA			PEMBIAYAAN NETTO			SILPA TAHUN BERJALAN		
	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
<b>KECAMATAN GUNUNG KIJANG</b>	<b>8.779.910.350</b>	<b>8.793.851.318</b>	<b>100,2</b>	<b>9.906.413.933</b>	<b>8.566.951.987</b>	<b>86,5</b>	<b>1.148.853.583</b>	<b>1.162.784.458</b>	<b>101,2</b>	<b>22.350.000</b>	<b>1.389.683.790</b>	<b>217,8</b>
Pemerintah Desa Gunung Kijang	3.175.155.000	3.182.530.908	100,2	3.703.067.617	2.882.863.925	77,9	550.262.617	550.262.617	100,0	22.350.000	849.929.600	802,8
Pemerintah Desa Malang Rapat	2.621.926.350	2.626.095.700	100,2	2.956.384.956	2.726.638.055	92,2	334.458.606	348.389.481	104,2	0	247.847.126	0,0
Pemerintah Desa Teluk Bakau	2.982.829.000	2.985.224.710	100,1	3.246.961.360	2.957.450.007	91,1	264.132.360	264.132.360	100,0	0	291.907.063	0,0
<b>KECAMATAN BINTAN UTARA</b>	<b>4.178.898.305</b>	<b>4.165.925.574</b>	<b>99,7</b>	<b>4.559.566.848</b>	<b>3.875.768.078</b>	<b>85,0</b>	<b>380.668.543</b>	<b>380.668.543</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>670.826.039</b>	<b>0,0</b>
Pemerintah Desa Lancang Kuning	4.178.898.305	4.165.925.574	99,7	4.559.566.848	3.875.768.078	85,0	380.668.543	380.668.543	100,0	0	670.826.039	0,0
<b>KECAMATAN TELUK BINTAN</b>	<b>12.503.987.200</b>	<b>12.533.958.673</b>	<b>100,2</b>	<b>14.003.587.575</b>	<b>11.612.155.443</b>	<b>82,9</b>	<b>1.499.600.375</b>	<b>1.828.400.342</b>	<b>121,9</b>	<b>0</b>	<b>2.750.203.572</b>	<b>952,0</b>
Pemerintah Desa Bintang Buyu	2.641.331.000	2.646.517.510	100,2	3.251.280.880	2.303.568.750	70,9	609.949.880	680.949.880	111,6	0	1.023.898.639	056,0
Pemerintah Desa Pangkil	2.712.126.800	2.708.538.985	99,9	2.793.845.612	2.624.135.689	93,9	81.718.812	81.718.812	100,0	0	166.122.108	0,0
Pemerintah Desa Penaga	2.493.068.000	2.508.578.635	100,6	3.000.992.387	2.193.664.208	73,1	507.924.387	636.480.804	125,3	0	951.395.231	0,0
Pemerintah Desa Pengujan	2.224.931.000	2.237.201.383	100,6	2.201.270.630	2.042.965.385	92,8	(23.660.370)	105.583.180	46,2)	0	299.819.178	680,0
Pemerintah Desa Tembeling	2.432.530.400	2.433.122.160	100,0	2.756.198.066	2.447.821.411	88,8	323.667.666	323.667.666	100,0	0	308.968.415	0,0
<b>KECAMATAN TAMBELAN</b>	<b>16.624.131.869</b>	<b>16.630.132.445</b>	<b>100,0</b>	<b>18.448.010.018</b>	<b>16.022.987.883</b>	<b>86,9</b>	<b>1.836.149.769</b>	<b>2.002.272.569</b>	<b>109,0</b>	<b>12.271.620</b>	<b>2.609.417.131</b>	<b>263,8</b>
Pemerintah Desa Batu Lepuk	1.856.609.400	1.855.002.185	99,9	2.115.024.361	1.869.682.621	88,4	258.414.961	258.414.961	100,0	0	243.734.525	0,0



NAMA KECAMATAN/DESA	PENDAPATAN			BELANJA DESA			PEMBIAYAAN NETTO			SILPA TAHUN BERJALAN		
	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
Pemerintah Desa Kampung Hilir	3.066.617.239	3.071.822.332	100,2	3.592.363.808	3.070.147.520	85,5	525.746.569	525.746.569	100,0	0	527.421.381	0,0
Pemerintah Desa Kampung Melayu	2.189.189.000	2.188.651.908	100,0	2.599.761.814	2.121.231.101	81,6	410.572.814	410.572.814	100,0	0	477.993.621	0,0
Pemerintah Desa Pulau Mentebung	2.587.134.810	2.591.437.522	100,2	3.030.486.434	2.716.934.844	89,7	443.351.624	448.988.024	101,3	0	323.490.702	0,0
Pemerintah Desa Pulau Pinang	2.588.266.400	2.589.692.130	100,1	2.167.933.666	1.796.477.851	82,9	(420.332.734)	(320.332.734)	76,2	0	472.881.545	0,0
Pemerintah Desa Kukup	1.954.519.400	1.954.320.709	100,0	2.358.622.265	2.209.204.603	93,7	404.102.865	404.102.865	100,0	0	149.218.971	0,0
Pemerintah Desa Pengikik	2.381.795.620	2.379.205.659	99,9	2.583.817.670	2.239.309.343	86,7	214.293.670	274.780.070	128,2	12.271.620	414.676.386	379,1
<b>KECAMATAN TELOK SEBONG</b>	<b>22.638.684.357</b>	<b>22.257.241.611</b>	<b>98,3</b>	<b>24.046.651.084</b>	<b>18.265.446.762</b>	<b>76,0</b>	<b>1.407.966.727</b>	<b>1.504.285.665</b>	<b>106,8</b>	<b>0</b>	<b>5.496.080.514</b>	<b>0,0</b>
Pemerintah Desa Berakit	3.351.555.600	3.037.236.555	90,6	3.720.989.370	2.165.734.666	58,2	369.433.770	369.433.770	100,0	0	1.240.935.659	0,0
Pemerintah Desa Ekan Aculai	4.523.134.800	4.523.698.164	100,0	4.593.505.226	4.208.031.827	91,6	70.370.426	70.370.426	100,0	0	386.036.763	800,0
Pemerintah Desa Pengudang	3.219.090.300	3.233.915.213	100,5	3.218.845.596	2.377.658.262	73,9	(244.704)	(244.704)	100,0	0	856.012.247	0,0
Pemerintah Desa Sebong Lagoi	3.573.684.000	3.472.958.160	97,2	3.990.604.697	2.531.004.317	63,4	416.920.697	416.920.697	100,0	0	1.358.874.540	0,0
Pemerintah Desa Sebong Perih	2.931.743.657	2.943.824.690	100,4	3.085.626.648	2.381.285.996	77,2	153.882.991	250.201.929	162,6	0	812.740.623	0,0
Pemerintah Desa Sri Bintan	5.039.476.000	5.045.608.829	100,1	5.437.079.547	4.601.731.694	84,6	397.603.547	397.603.547	100,0	0	841.480.682	0,0
<b>KECAMATAN TOAPAYA</b>	<b>11.759.467.511</b>	<b>11.767.983.770</b>	<b>100,1</b>	<b>11.779.094.884</b>	<b>9.770.842.375</b>	<b>83,0</b>	<b>19.627.373</b>	<b>29.483.960</b>	<b>150,2</b>	<b>0</b>	<b>2.026.625.355</b>	<b>0,0</b>
Pemerintah Desa Toapaya	4.253.913.021	4.260.030.424	100,1	4.515.177.861	3.512.959.338	77,8	261.264.840	261.264.840	100,0	0	1.008.335.926	0,0
Pemerintah Desa Toapaya Utara	4.100.879.088	4.101.222.560	100,0	3.731.496.703	3.335.444.989	89,4	(369.382.385)	(359.525.798)	97,3	0	406.251.773	0,0
Pemerintah Desa Toapaya Selatan	3.404.675.402	3.406.730.786	100,1	3.532.420.320	2.922.438.048	82,7	127.744.918	127.744.918	100,0	0	612.037.656	0,0

NAMA KECAMATAN/DESA	PENDAPATAN			BELANJA DESA			PEMBIAYAAN NETTO			SILPA TAHUN BERJALAN		
	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
<b>KECAMATAN MANTANG</b>	<b>10.733.203.194</b>	<b>10.777.686.573</b>	<b>100,4</b>	<b>11.789.432.671</b>	<b>10.521.246.315</b>	<b>89,2</b>	<b>1.056.229.477</b>	<b>1.051.548.414</b>	<b>99,6</b>	<b>0</b>	<b>1.307.988.672</b>	<b>0,0</b>
Pemerintah Desa Mantang Baru	3.239.698.750	3.279.803.525	101,2	3.538.721.303	3.414.155.418	96,5	299.022.553	299.022.553	100,0	0	164.670.660	0,0
Pemerintah Desa Mantang Besar	3.037.283.444	3.042.254.881	100,2	3.273.798.595	2.806.292.773	85,7	236.515.151	231.834.088	98,0	0	467.796.196	712,0
Pemerintah Desa Mantang Lama	2.243.195.000	2.241.245.242	99,9	2.478.523.012	2.192.023.221	88,4	235.328.012	235.328.012	100,0	0	284.550.033	0,0
Pemerintah Desa Dendun	2.213.026.000	2.214.382.925	100,1	2.498.389.761	2.108.774.903	84,4	285.363.761	285.363.761	100,0	0	390.971.783	0,0
<b>KECAMATAN BINTAN PESISIR</b>	<b>11.330.869.284</b>	<b>11.338.300.752</b>	<b>100,1</b>	<b>12.516.162.922</b>	<b>10.779.056.509</b>	<b>86,1</b>	<b>1.185.293.638</b>	<b>1.185.293.638</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>1.744.537.881</b>	<b>0,0</b>
Pemerintah Desa Kelong	2.637.858.733	2.640.087.119	100,1	2.958.507.106	2.434.465.553	82,3	320.648.373	320.648.373	100,0	0	526.269.939	0,0
Pemerintah Desa Mapur	2.372.950.951	2.373.390.365	100,0	2.442.155.459	2.075.770.851	85,0	69.204.508	69.204.508	100,0	0	366.824.022	0,0
Pemerintah Desa Numbing	3.867.688.600	3.871.004.322	100,1	4.060.014.524	3.621.836.617	89,2	192.325.924	192.325.924	100,0	0	441.493.629	0,0
Pemerintah Desa Air Gelubi	2.452.371.000	2.453.818.946	100,1	3.055.485.833	2.646.983.488	86,6	603.114.833	603.114.833	100,0	0	409.950.291	0,0
<b>KECAMATAN SERI KUALA LOBAM</b>	<b>10.795.260.052</b>	<b>10.867.100.384</b>	<b>100,7</b>	<b>11.292.118.170</b>	<b>10.285.048.080</b>	<b>91,1</b>	<b>496.865.818</b>	<b>500.169.109</b>	<b>100,7</b>	<b>7.700</b>	<b>1.082.221.413</b>	<b>823,5</b>
Pemerintah Desa Busung	3.329.009.000	3.330.076.459	100,0	3.439.641.541	3.305.130.202	96,1	110.632.541	110.632.541	100,0	0	135.578.798	0,0
Pemerintah Desa Teluk Sasah	3.588.186.352	3.659.085.737	102,0	3.800.779.304	3.231.402.267	85,0	212.592.952	212.592.952	100,0	0	640.276.422	0,0
Pemerintah Desa Kuala Sempang	3.878.064.700	3.877.938.188	100,0	4.051.697.325	3.748.515.611	92,5	173.640.325	176.943.616	101,9	7.700	306.366.193	781,7
<b>JUMLAH</b>	<b>109.344.412.122</b>	<b>109.132.181.100</b>	<b>99,8</b>	<b>118.341.038.105</b>	<b>99.699.503.432</b>	<b>84,2</b>	<b>9.031.255.303</b>	<b>9.644.906.698</b>	<b>106,8</b>	<b>34.629.320</b>	<b>19.077.584.366</b>	<b>090,8</b>

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bintan, Tahun 2022

Disisi lainnya bahwa terdapat implikasi positif daripada capaian kinerja APBDes di Kabupaten Bintan yang terus menunjukkan perbaikan dari tahun ke tahun. Hal ini di tunjukan dari meningkatnya nilai Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Bintan. adapun perkembangan IDM Kabupaten Bintan dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 3.4**  
**Indeks Desa Membangun (IDM)**  
**Berdasarkan Katagori Desa di Kabupaten Bintan Tahun 2021**

Kategori Desa	Tahun 2020		Tahun 2021	
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
Mandiri	0	0	0	0
Maju	11	30,56%	13	36,11%
Berkembang	25	69,44%	26	72,22%
Tertinggal	0	0	0	0
Sangat Tertinggal	0	0	0	0

Sumber: Diolah dari Peringkat Status Indeks Desa Membangun Provinsi Kabupaten Kecamatan dan Desa, Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa-Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Tahun 2022

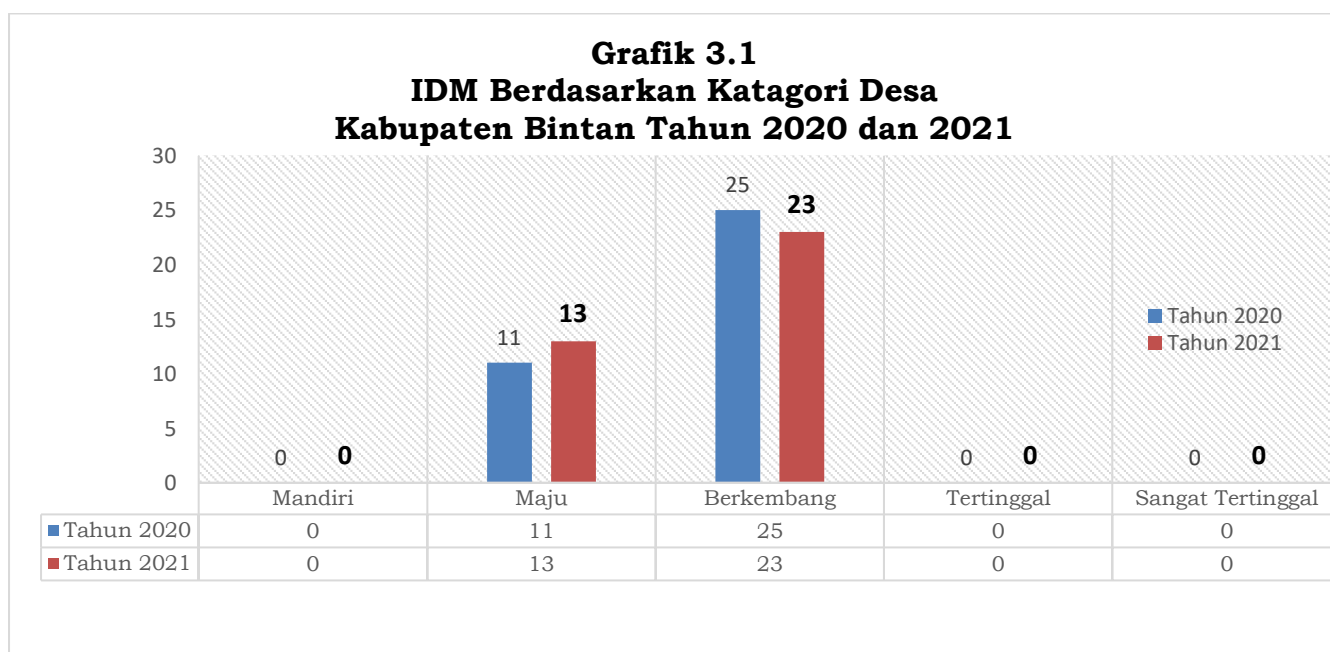
**Tabel 3.5**  
**Rekapitulasi Indeks Desa Membangun di Kabupaten Bintan**  
**Tahun 2021**

No	Kecamatan	Nama Desa	Nilai IDM 2020	Nilai IDM 2021	Perbandingan
1	Gunung Kijang	Gunung Kijang	0,7183	0,7259	0,0076
2		Malang Rapat	0,8013	0,779	-0,0223
3		Teluk Bakau	0,7852	0,756	-0,0292
4	Bintan Utara	Lancang Kuning	0,7711	0,7317	-0,0394
5	Teluk Bintan	Bintan Buyu	0,7276	0,7238	-0,0038
6		Pangkil	0,6383	0,6383	0

No	Kecamatan	Nama Desa	Nilai IDM 2020	Nilai IDM 2021	Perbandingan
7		Penaga	0,6587	0,6797	0,021
8		Pengujan	0,6298	0,6356	0,0058
9		Tembeling	0,6162	0,6086	-0,0076
10	Tambelan	Batu Lepuk	0,6729	0,6729	0
11		Kampung Hilir	0,6543	0,6686	0,0143
12		Kampung Melayu	0,7038	0,7038	0
13		Pulau Mentebung	0,6286	0,6286	0
14		Pulau Pinang	0,6629	0,6406	-0,0223
15		Kukup	0,6498	0,6537	0,0039
16		Pengikik	0,6062	0,671	0,0648
17	Teluk Seborg	Berakit	0,7187	0,7187	0
18		Ekang Anculai	0,7114	0,7578	0,0464
19		Pengudang	0,7106	0,6884	-0,0222
20		Seborg Lagoi	0,7135	0,723	0,0095
21		Seborg peroh	0,6819	0,6483	-0,0336
22		Sri Bintang	0,6965	0,7206	0,0241
23	Toapaya	Toapaya	0,6589	0,6589	0
24		Toapaya Utara	0,6533	0,6051	-0,0482
25		Toapaya Selatan	0,7229	0,7154	-0,0075
26	Mantang	Mantang Baru	0,7025	0,7235	0,021
27		Mantang Besar	0,7616	0,7413	-0,0203
28		Mantang Lama	0,6675	0,67	0,0025
29		Dendun	0,6181	0,6348	0,0167
30	Bintang Pesisir	Kelong	0,701	0,701	0
31		Mapur	0,6573	0,6629	0,0056
32		Numbing	0,6763	0,7081	0,0318

No	Kecamatan	Nama Desa	Nilai IDM 2020	Nilai IDM 2021	Perbandingan
33		Air Gelubi	0,6683	0,6387	-0,0296
34	Sri Kuala Lobam	Busung	0,7025	0,6746	-0,0279
35		Teluk Sasah	0,6838	0,6838	0
36		Kuala Sempang	0,6854	0,6762	-0,0092

Sumber: <https://idm.kemendes.go.id/> , Tahun 2021



Sumber: Diolah dari Peringkat Status Indeks Desa Membangun Provinsi Kabupaten Kecamatan dan Desa, Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa-Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Tahun 2022

Berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Bintan yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa-Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia terkait dengan peringkat status IDM pada tahun 2021 bahwa tidak terdapat desa dengan kategori tertinggal maupun sangat tertinggal di Kabupaten Bintan.

Dari 36 Desa yang ada saat ini 13 Desa masuk dalam kategori “Maju” meningkat dari sebelumnya pada tahun 2020 berjumlah 11 (Sebelas) Desa masuk dalam kategori “Maju” dan 23 lainnya masuk kategori “Berkembang” pada tahun 2021.



# LPPD 2021

LAPORAN  
PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH  
KABUPATEN BINTAN

## BAB IV

PENERAPAN DAN  
PENCAPAIAN STANDAR  
PELAYANAN MINIMAL





## BAB IV

# PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

Penerapan SPM dan pemenuhan pelayanan dasar tersebut dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan serta diposisikan untuk menjawab hal-hal penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam penyediaan pelayanan dasar yang bermuara pada penciptaan kesejahteraan rakyat. Karena kesejahteraan rakyat merupakan tujuan bernegara yang



dijamin oleh konstitusi. Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari pemerintah daerah sesuai dengan indikator-indikator yang ditetapkan oleh pemerintah. Berikut adalah potret pelaksanaan SPM di Kabupaten Bintan pada tahun 2021:

#### **4.1 Urusan Pendidikan**

##### **4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar**

Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), bahwa Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pendidikan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

1. Pendidikan anak usia dini;
2. Pendidikan dasar; dan
3. Pendidikan kesetaraan.

Pemenuhan SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Bintan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan. Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar yaitu Warga Negara dengan ketentuan:

1. Usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan anak usia dini;
2. Usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan dasar; dan
3. Usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan kesetaraan.

#### 4.1.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian SPM Bidang Pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan pada tahun 2021, baik untuk layanan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, maupun pendidikan kesetaraan, adalah 100%. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.1**  
**Target SPM Kabupaten Bintan Bidang Pendidikan Tahun 2021**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan	Target
1	Pendidikan anak usia dini	WNI usia 5-6 tahun	2.721 Org 100%
2	Pendidikan dasar	WNI usia 7-15 tahun	26.172 Org 100%
3	Pendidikan kesetaraan	WNI usia 7-18 tahun	304 Org 100%

Akses terhadap Pendidikan bagi masyarakat Kabupaten Bintan merupakan prioritas utama pemerintah daerah. Untuk mendukung hal tersebut pemerintah berupaya mendukung dari sisi penganggaran maupun kolaborasi multi pihak dalam mewujudkan Pendidikan berkeadilan.

#### 4.1.3 Realisasi

Berdasarkan pada target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan pada tahun 2021, capaian SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Bintan pada 3 jenis layanan dasar telah mencapai 100%. Capaian SPM Bidang Pendidikan oleh Dinas

Pendidikan Kabupaten Bintan tahun 2021 dengan rincian capaian serta jenis pelayanan, adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**Realisasi SPM Kabupaten Bintan Bidang Pendidikan Tahun 2021**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target	Realisasi
1	Pendidikan anak usia dini	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini	2.721 Org 100%	2.721 Org 100%
2	Pendidikan dasar	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	26.172 Org 100%	26.172 Org 100%
3	Pendidikan kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	304 Org 100%	304 Org 100%

#### 4.1.4 Alokasi Anggaran

Capaian SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Bintan pada tahun 2021 sudah mencapai 100%. Salah satu faktor pendukung tercapainya target tersebut adalah karena dukungan anggaran. Anggaran pemenuhan SPM Bidang Pendidikan berasal dari APBD Kabupaten Bintan.

Pagu awal belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan yang digunakan untuk pemenuhan SPM Bidang Pendidikan tahun 2021 adalah sebesar Rp. 72.681.257.369,-. Pagu tersebut

digunakan untuk membiayai 3 Program yang berkaitan dengan SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Bintan. Dalam pelaksanaannya total pagu yang telah dialokasikan tersebut mengalami perubahan menjadi sebesar Rp. 66.805.700.567,-. Berikut adalah tabel pengalokasian anggaran tahun 2021 untuk SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Bintan.

**Tabel 4.3**  
**Alokasi Anggaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan**  
**dalam Pelaksanaan SPM Bidang Pendidikan Tahun 2021**

No	Jenis Layanan Dasar	Program	Kegiatan	Sumber Dana	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
1	Pendidikan anak usia dini	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	APBD	398.980.000	395.511.861
			Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/ Ruang Guru PAUD	APBD	49.340.000	46.044.578
			Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	APBD	109.005.200	98.816.860
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	APBD	68.750.000	67.021.000
			Pengelolaan Dana BOP PAUD	APBD	2.890.200.000	2.734.800.000
2	Pendidikan dasar	Pengelolaan Pendidikan Dasar	Penambahan Ruang Kelas baru	APBD	4.323.038.576	3.476.996.591
			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	APBD	979.024.000	976.911.714

No	Jenis Layanan Dasar	Program	Kegiatan	Sumber Dana	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
			Pembangunan Perpustakaan Sekolah	APBD	1.996.560.000	1.821.434.053
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	APBD	9.533.084.640	8.370.878.506
			Pengadaan Perlengkapan Siswa	APBD	1.386.513.172	1.327.043.200
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	APBD	2.783.876.961	2.765.202.090
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APBD	20.891.876.626	20.267.543.906,38
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	APBD	5.276.833.600	4.574.491.083
			Pengadaan perlengkapan Siswa	APBD	1.147.684.050	1.110.579.500
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	APBD	2.213.252.049	2.166.153.630
			Penyelenggaraa n Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	APBD	1.680.491.727	1.171.804.200
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	APBD	100.000.000	89.649.608
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah	APBD	11.723.748.368	10.675.618.744

No	Jenis Layanan Dasar	Program	Kegiatan	Sumber Dana	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
3	Pendidikan kesetaraan		Menengah Pertama			
			Pengadaan Mebel	APBD	1.202.492.400	1.131.843.900
			Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	APBD	2.308.812.000	2.021.038.007
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Non formal/Kesetaraan	APBD	389.598.165	304.133.000
			Pengadaan Mebel	APBD	21.995.835	21.995.222
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan	APBD	490.000.000	479.152.414
			Penyelenggaraan Proses Belajar Non formal/ Kesetaraan	APBD	80.000.000	74.936.900
			Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	APBD	636.100.000	636.100.000

#### 4.1.5 Dukungan Personil

Dalam pemenuhan SPM Bidang Pendidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan melibatkan personil dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 4.4**  
**Dukungan Personil dalam Pelaksanaan**  
**SPM Bidang Pendidikan Tahun 2021**

No	Jenis Layanan Dasar	Program	Jumlah Personil (Orang)
1	Pendidikan anak usia dini	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	508 Orang
2	Pendidikan dasar	Pengelolaan Pendidikan Dasar	1.302 Guru
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	685 Guru
3	Pendidikan kesetaraan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	36 Orang

#### 4.1.6 Permasalahan dan Solusi

Berikut adalah beberapa permasalahan dan alternatif solusi dalam pemenuhan SPM Bidang Pendidikan tahun 2021 oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan:

**Tabel 4.5**  
**Permasalahan dan Solusi dalam Pelaksanaan SPM Bidang**  
**Pendidikan Tahun 2021**

No	Jenis Layanan Dasar	Program	Permasalahan	Solusi
1	Pendidikan anak usia dini	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Tidak Ada	Tidak Ada
		Pengelolaan Pendidikan Dasar	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Pendidikan dasar	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Tidak Ada	Tidak Ada
3	Pendidikan kesetaraan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Tidak Ada	Tidak Ada

## 4.2 Urusan Kesehatan

### 4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan pada Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), bahwa Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pendidikan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

1. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
4. Pelayanan kesehatan balita;
5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;



8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus), yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif.

SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Bintan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan. Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar yaitu Warga Negara dengan ketentuan:

**Tabel 4.6**  
**Penerima Layanan SPM Bidang Kesehatan**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Ibu hamil
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Ibu bersalin
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Bayi baru lahir
4	Pelayanan kesehatan balita	Balita
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Usia pendidikan dasar
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Usia produktif
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Usia lanjut
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Penderita hipertensi

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Penderita diabetes melitus
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Orang dengan gangguan jiwa berat
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Orang terduga tuberkulosis
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia ( <i>Human Immunodeficiency Virus</i> ), yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif	Orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia ( <i>Human Immunodeficiency Virus</i> )

#### 4.2.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian SPM Bidang kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan pada tahun 2021 pada 12 jenis layanan dasar, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.7**  
**Target SPM Kabupaten Bintan Bidang Kesehatan Tahun 2021**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	3.158 Org 100%
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan	3.015 Org 100%
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan	2.871 Org 100%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target
		layanan kesehatan sesuai standar	
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	13.957 Org 100%
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	6.930 Org 100%
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	59.074 Org 100%
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	11.959 Org 100%
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	41.706 Org 100%
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3.380 Org 100%
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	145 Org 100%
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	634 Org 100%
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia ( <i>Human Immunodeficiency Virus</i> ), yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif.	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	5.387 Org 100%

### 4.2.3 Realisasi

Berdasarkan pada target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan pada tahun 2021, capaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Bintan pada 12 jenis layanan dasar dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.8**  
**Realisasi SPM Kabupaten Bintan Bidang Kesehatan**  
**Tahun 2021**

No	Indikator	Rumus	Perhitungan	Capaian (100%)
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	$\frac{\text{Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan}}{\text{Jumlah ibu hamil di kabupaten}} \times 100\%$	$3.091 / 3.158 \times 100\% = 97,88 \%$	97,88%
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	$\frac{\text{Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan}}{\text{Jumlah ibu bersalin di kabupaten}} \times 100\%$	$2.906 / 3.015 \times 100\% = 96,38\%$	96,38%
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	$\frac{\text{Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah bayi baru lahir di kabupaten}} \times 100\%$	$2.844 / 2.871 \times 100\% = 99,06\%$	99,06%
4	Pelayanan kesehatan balita	$\frac{\text{Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah balita di kabupaten}} \times 100\%$	$12.933 / 13.957 \times 100\% = 92.66\%$	92.66%

No	Indikator	Rumus	Perhitungan	Capaian (100%)
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	$\frac{\text{Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten}} \times 100\%$	$6.008 / 6.787 \times 100\% = 88,52\%$	88,52%
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	$\frac{\text{Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten}} \times 100\%$	$45.456 / 105.666 \times 100\% = 43,02\%$	43,02%
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	$\frac{\text{Jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah orang warga negara usia 60 tahun di kabupaten}} \times 100\%$	$8.426 / 11.959 \times 100\% = 70,46\%$	70,46%
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	$\frac{\text{Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah penderita hipertensi di kabupaten}} \times 100\%$	$12.799 / 15.359 \times 100\% = 83,33\%$	83,33%
9	Pelayanan kesehatan	$\frac{\text{Jumlah penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan}}{\text{Jumlah penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan}} \times 100\%$	$3.380 / 3.380 \times 100\% = 100\%$	100%

No	Indikator	Rumus	Perhitungan	Capaian (100%)
10	penderita diabetes melitus	$\frac{\text{pelayanan kesehatan sesuai standar}}{100\% \text{ Jumlah penderita Diabetes Mellitus di kabupaten}} \times 100\%$		
	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	$\frac{\text{Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{100\% \text{ Jumlah penderita ODGJ di kabupaten}} \times 100\%$	$\frac{145}{145} \times 100\% = 100\%$	100%
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	$\frac{\text{Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{100\% \text{ Jumlah penderita TBC di kabupaten}} \times 100\%$	$\frac{218}{218} \times 100\% = 100\%$	100%
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia ( <i>Human Immunodeficiency Virus</i> ), yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif.	$\frac{\text{Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar}}{100\% \text{ Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV di kabupaten}} \times 100\%$	$\frac{4.814}{5.387} \times 100\% = 89,36\%$	89,36%

#### **4.2.4 Alokasi Anggaran**

Capaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Bintan pada tahun 2021 menunjukkan pencapaian yang bervariasi dengan realisasi SPM tertinggi adalah sebesar 100% dan realisasi SPM terendah adalah sebesar 43,02%. Salah satu faktor pendukung tercapainya sebagian target SPM adalah karena adanya dukungan anggaran. Anggaran pemenuhan SPM Bidang Kesehatan berasal dari APBN Pemerintah Republik Indonesia, APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan, dan sumber dana lain yang sah.

Selanjutnya untuk pagu anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan yang digunakan untuk pemenuhan SPM Bidang Kesehatan tahun 2021 adalah sebesar Rp. 983.608.714,-. Pagu anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 12 program yang berkaitan dengan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Bintan. Dalam pelaksanaannya, besaran pagu anggaran yang terealisasi adalah sebesar Rp. 462.790.940,-. Berikut adalah tabel pengalokasian anggaran tahun 2021 untuk SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Bintan.

**Tabel 4.9**  
**Alokasi Anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan**  
**dalam Pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan Tahun 2021**

No	Jenis Layanan Dasar	Program	Kegiatan	Sumber Dana	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Program Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil: Terlaksananya Pelayanan Ibu Hamil minimal 4 kali (K4) dengan Pelayanan 10T, dan Terlaksananya pelayanan kesehatan untuk ibu hamil	APBD/ APBN	46.165.164	31.582.000
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin: Semua Ibu Bersalin ditolong oleh Tenaga Kesehatan, Semua Ibu Bersalin di Fasilitas Kesehatan, Terlaksananya pelayanan kesehatan bagi ibu bersalin	APBN	709.703.000	284.273.000



No	Jenis Layanan Dasar	Program	Kegiatan	Sumber Dana	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir: Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	APBN	8.095.750	8.090.000
4	Pelayanan kesehatan balita		Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita: Semua Balita (0-59 bulan) yang mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar, terlaksananya pelayanan kesehatan Balita	APBN	20.626.600	10.100.000
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar		Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar: Persentase Usia Pendidikan Dasar yang mendapat Pelayanan Kesehatan,	APBD	52.252.850	17.954.000

No	Jenis Layanan Dasar	Program	Kegiatan	Sumber Dana	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar			
			Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif: Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Remaja usia 10-18 tahun, Cakupan Pelayanan Akseptor KB Aktif, Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	APBD	13.000.000	12.700.000

No	Jenis Layanan Dasar	Program	Kegiatan	Sumber Dana	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut		Kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut: Meningkatnya Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut, Terlaksananya Pembinaan Puskesmas Santun Lansia, Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	APBN	19.569.400	15.267.000
8	Pelayanan Jumlah Warga Negara penderita hipertensi		Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi: Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi di Puskesmas, Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	APBD	46.118.100	36.188.167

No	Jenis Layanan Dasar	Program	Kegiatan	Sumber Dana	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus		Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus: Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus di Puskesmas, Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penderita DM	APBD	28.816.700	25.148.258
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat		Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat: Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	APBD	43.524.000	24.324.085
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis		Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis: Terlaksananya Pengobatan	Sumber dana lain yang sah	22.490.000	21.789.430

No	Jenis Layanan Dasar	Program	Kegiatan	Sumber Dana	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
12			Pasien TB sesuai standar			
	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia ( <i>Human Immunodeficiency Virus</i> )		Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV: Terlaksananya Monev, Penyuluhan dan Pemeriksaan di Kelompok Resiko HIV/AIDS	APBD/ Sumber dana lain yang sah	25.500.000	24.329.000

#### 4.2.5 Dukungan Personil

Dalam pelaksanaan pemenuhan SPM Bidang Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan melibatkan personil dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 4.10**  
**Dukungan Personil dalam Pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan Tahun 2021**

No.	Jenis Layanan Dasar	Program	Jumlah Personil
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Program Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	18 Orang
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		73 Orang
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		18 Orang

No.	Jenis Layanan Dasar	Program	Jumlah Personil
4	Pelayanan kesehatan balita		18 Orang
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar		50 Orang
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif		45 Orang
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut		18 Orang
8	Pelayanan Jumlah Warga Negara penderita hipertensi		120 Orang
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus		120 Orang
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat		30 Orang
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis		16 Orang
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)		16 Orang

#### 4.2.6 Permasalahan dan Solusi

Berikut adalah beberapa permasalahan dan alternatif solusi dalam pemenuhan SPM Bidang Kesehatan tahun 2021 oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan:

**Tabel 4.11**  
**Permasalahan dan Solusi dalam Pelaksanaan SPM Bidang**  
**Kesehatan Tahun 2021**

No	Jenis Layanan Dasar	Program	Permasalahan	Solusi
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Program Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tidak ada	Tidak ada
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		Walaupun masyarakat yang terdaftar BPJS dengan status tidak aktif/ tertunggak, tetap tidak dapat dibantu dengan Jampersal karena terkendala oleh Permenkes No. 12 Tahun 2021 tentang Juknis DAK Non Fisik Bidang Kesehatan	Agar Program Jampersal tetap dapat diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan, walaupun sudah terdaftar di BPJS dengan status tidak aktif/tertunggak
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		Tidak ada	Tidak ada
4	Pelayanan kesehatan balita		Adanya masa Pandemi Covid-19 mengakibatkan ruang gerak kegiatan terbatas seperti kegiatan diluar gedung (Posyandu Balita, Kelas Ibu Balita, SDIDTK, dll). Sehingga pelayanan kesehatan balita kurang optimal	Menghimbau dan memotivasi bidan agar melakukan sweeping dalam upaya pencapaian program tercapai dan masyarakat terpenuhi pelayanan kesehatannya walau di era Pandemi Covid-19.

No	Jenis Layanan Dasar	Program	Permasalahan	Solusi
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar		Anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan masih belum mencapai target karena dampak pandemi covid-19, sehingga kegiatan tidak bisa dilaksanakan dikarenakan pembelajaran tatap muka belum 100%	Meningkatkan sosialisasi dengan sekolah dan orangtua siswa untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di sekolah
	Pelayanan kesehatan pada usia produktif		Kondisi pandemi COVID-19 yang menjadi kendala untuk mengumpulkan masyarakat untuk dilakukan skrining PTM di Posbindu dab adanya budaya malu bagi WUS untuk diperiksa IVA (Inspeksi Visual dengan Asam Asetat ) sehingga menolak dilakukan pemeriksaan	Meningkatkan promosi dan KIE dan melibatkan kader untuk menjaring masyarakat untuk datang ke Posbindu PTM, atau melakukan skrining dengan kunjungan ke rumah-rumah. Untuk skrining IVA dengan pendekatan melalui kader pada WUS agar termotivasi
	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut		Masih terbatasnya tenaga medis (dokter) di Puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan khususnya di luar gedung (posyandu	Mengusulkan tambahan tenaga medis (dokter) ke SDMK untuk puskesmas, agar pelayanan



No	Jenis Layanan Dasar	Program	Permasalahan	Solusi
8			lansia), sehingga pelayanan kesehatan diluar gedung kurang optimal, 2. Adanya masa Pandemi Covid-19, mengakibatkan ruang gerak kegiatan terbatas. Banyak kegiatan pelayanan kesehatan yang berlangsung di masyarakat ditunda sebagai upaya pemutus mata rantai penularan Covid-19.	kesehatan diluar gedung bisa optimal, 2. dilakukan sweeping saat kegiatan di masyarakat sudah diperbolehkan pemerintah , tetapi masih belum bisa optimal
	Pelayanan Jumlah Warga Negara penderita hipertensi		Menurunnya kunjungan penderita hipertensi ke fasilitas pelayanan kesehatan karena kondisi pandemi sehingga berdampak pada rendahnya kepatuhan minum obat dan cek berkala pada penderita hipertensi.	Melakukan kunjungan rumah pada penderita Hipertensi bekerjasama dengan program PIS PK
	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus		Rendahnya kepatuhan minum obat dan cek berkala pada penderita Diabetes Melitus	Melakukan kunjungan rumah pada penderita Diabetes Melitus bekerjasama dengan program PIS PK
10	Pelayanan kesehatan orang dengan		Kurang kerjasama/dukungan dari pihak keluarga dan menurunnya kinerja tenaga	Meningkatkan koordinasi dan kerjasama serta peran aktif dari lintas sektor

No	Jenis Layanan Dasar	Program	Permasalahan	Solusi
11	gangguan jiwa berat		pengelola program ODGJ karena terkonsentrasi pada penanggulangan pandemi COVID-19	terkait dalam penanganan kasus ODGJ baik dari Dinas Sosial, Satpol PP, Perangkat Desa, sampai ke tingkat RT/RW, khususnya bagi keluarga penderita yang kurang mendukung pelayanan ODGJ.
	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis		peningkatan kasus covid 19 sehingga <i>screaning</i> tb tidak berjalan optimal, Kurangnya SDM Kesehatan karena covid 19	Penambahan SDM Kesehatan
	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)		peningkatan kasus Pandemi covid 19 sehingga <i>screaning</i> HIV tidak berjalan optimal, Kurangnya SDM Kesehatan karena covid 19	Penambahan SDM Kesehatan

### 4.3 Urusan Pekerjaan Umum

#### 4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan pada Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), bahwa Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pekerjaan Umum Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

1. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Bintan diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bintan sebagai berikut:

**Tabel 4.12**  
**Penerima Layanan SPM Bidang Pekerjaan Umum**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik

#### 4.3.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bintan pada tahun 2021, baik layanan penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari, maupun penyediaan

pelayanan pengolahan air limbah domestik, adalah 100%. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.13**  
**Target SPM Kabupaten Bintang Bidang Pekerjaan Umum**  
**Tahun 2021**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan	Target
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100% (49.989 SR)
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik	Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100% (49.989 SR)

#### 4.3.3 Realisasi

Berdasarkan pada target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bintang pada tahun 2021, capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bintang pada 2 jenis layanan dasar dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.14**  
**Realisasi SPM Kabupaten Bintang Bidang Pekerjaan Umum**  
**Tahun 2021**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target	Realisasi
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100% (49.989 SR)	73,02% (36.505 SR)
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100% (49.989 SR)	88,65% (44.317 SR)

#### **4.3.4 Alokasi Anggaran**

Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Bintan pada tahun 2021 menunjukkan pencapaian yang bervariasi dari 2 jenis pelayanan dasar yang ada, yakni 73,02% atau 36.505 SR untuk Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan 88, 65% atau 44.317 SR untuk Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik. Salah satu faktor pendukung tercapainya target SPM adalah karena adanya dukungan anggaran. Anggaran pemenuhan SPM Bidang Pekerjaan Umum berasal dari APBN Pemerintah Republik Indonesia, APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan, dan sumber dana lain yang sah.

Pagu anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bintan yang digunakan untuk pemenuhan SPM Bidang Pekerjaan Umum tahun 2021 adalah sebesar Rp. Rp.7.839.463.652,-. Pagu anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 2 program yang berkaitan dengan SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Bintan. Dalam pelaksanaannya, besaran pagu anggaran yang terealisasi adalah sebesar Rp. Rp.7.439.310.193,-. Berikut adalah tabel pengalokasian anggaran tahun 2021 untuk SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Bintan.

**Tabel 4.15**  
**Alokasi Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bintan dalam Pelaksanaan SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2021**

No	Jenis Layanan Dasar	Program	Kegiatan	Sumber Dana	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	APBD & Sumber dana lain yang sah	3.773.637.875	7.044.861.846
			Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	APBD	816.572.650	
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	APBD	791.340.984	
			Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ Perluasan/ Perbaikan SPAM	APBD	263.055.397	
			Operasi dan Pemeliharaan SPAM Kawasan Perdesaan	APBD	1.789.337.188	
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah Kabupaten/Kota		APBD	405.519.558	394.448.397

#### 4.3.5 Dukungan Personil

Dalam pelaksanaan pemenuhan SPM Bidang Pekerjaan Umum, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bintan melibatkan personil dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 4.16**  
**Dukungan Personil dalam Pelaksanaan**  
**SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2021**

No.	Jenis Layanan Dasar	Program	Jumlah Personil
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	7 Orang
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah Kabupaten/Kota	7 Orang

#### 4.3.6 Permasalahan dan Solusi

Berikut adalah beberapa permasalahan dan alternatif solusi dalam pemenuhan SPM Bidang Pekerjaan Umum tahun 2021 oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bintan:

**Tabel 4.17**  
**Permasalahan dan Solusi dalam Pelaksanaan SPM Bidang**  
**Pekerjaan Umum Tahun 2021**

No	Jenis Layanan Dasar	Program	Permasalahan	Solusi
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Kemampuan APBD yang terbatas, masih ada permasalahan lahan dengan masyarakat, dan jarak antar pipa distribusi yang jauh	- Dibutuhkan waktu dan koordinasi dengan masyarakat

No	Jenis Layanan Dasar	Program	Permasalahan	Solusi
2			dengan rumah masyarakat, sehingga biaya menjadi lebih mahal dari perencanaan.	tentang lahan.  - Dibutuhkan perencanaan yang matang
	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah Kabupaten/Kota	Kemampuan APBD yang terbatas, dan masih ada permasalahan lahan dengan masyarakat.	Dibutuhkan waktu dan koordinasi dengan masyarakat terkait lahan.

#### 4.4 Urusan Perumahan Rakyat

##### 4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), bahwa Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Perumahan Rakyat Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupate/kota.

Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud diatas, adalah Warga Negara dengan ketentuan:



1. Korban bencana provinsi yang memiliki rumah terkena dampak bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi;
2. Masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi;
3. Korban bencana kabupaten/kota yang memiliki rumah terkena dampak bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan
4. Masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

SPM Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Bintan diselenggarakan oleh 1 (satu) perangkat daerah, yakni, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan.

#### **4.4.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah**

Target pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan pada tahun 2021, baik untuk layanan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten, maupun fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program

Pemerintah Daerah kabupaten, adalah 100%. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.18**  
**Target SPM Kabupaten Bintang Bidang Perumahan Rakyat**  
**Tahun 2021**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan	Target
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten	Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	28 unit 100%
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten	Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Tidak ada 100%

#### 4.4.3 Realisasi

Berdasarkan pada target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bintang pada tahun 2021, capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Bintang pada 2 jenis layanan dasar telah tercapai. Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintang tahun 2021 dengan rincian capaian serta jenis pelayanan, adalah sebagai berikut:

Berdasarkan pada target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bintang pada tahun 2021, capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintang pada 2 jenis layanan dasar dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.19**  
**Realisasi SPM Kabupaten Bintang Bidang Perumahan Rakyat**  
**Tahun 2021**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target	Realisasi
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100% (28 Unit)	92,86% (26 Unit)
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	Tidak ada rumah yang terkena relokasi program pemerintah

#### 4.4.4 Alokasi Anggaran

Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Bintang pada tahun 2021 menunjukkan pencapaian yang bervariasi. Khusus Pelayanan Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten dengan indikator capaian Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni sebanyak 28 unit telah teralisasi dari total target 46 unit. Salah satu faktor pendukung tercapainya target SPM adalah karena adanya dukungan anggaran. Anggaran pemenuhan SPM Bidang Perumahan Rakyat berasal dari APBN Pemerintah Republik Indonesia, APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Bintang, dan sumber dana lain yang sah.

Pagu anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintang yang digunakan untuk pemenuhan SPM

Bidang Perumahan Rakyat tahun 2021 adalah sebesar Rp. 300.000.000 untuk Program Penanggulangan Bencana. Berikut adalah tabel pengalokasian anggaran tahun 2021 untuk SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Bintan.

**Tabel 4.20**  
**Alokasi Anggaran pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan dalam Pelaksanaan SPM Bidang Perumahan Rakyat tahun 2021**

No	Jenis Layanan Dasar	Program	Kegiatan	Sumber Dana	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	APBD	300.000.000	77.314.000
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten	-	-	-	-	-

#### 4.4.5 Dukungan Personil

Dalam pemenuhan SPM Bidang Perumahan Rakyat, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan melibatkan personil dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 4.21**  
**Dukungan Personil dalam Pelaksanaan**  
**SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2021**

No.	Jenis Layanan Dasar	Program	Jumlah Personil
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten	Program Penanggulangan Bencana	12 Orang
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten	-	-

#### 4.4.6 Permasalahan dan Solusi

Berikut adalah beberapa permasalahan dan alternatif solusi dalam pemenuhan SPM Bidang Perumahan Rakyat tahun 2021 oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan:

**Tabel 4.22**  
**Permasalahan dan Solusi dalam Pelaksanaan SPM Bidang**  
**Perumahan Rakyat Tahun 2021**

No	Jenis Layanan Dasar	Program	Permasalahan	Solusi
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan belum melaksanakan kegiatan terkait	Mohon penyediaan anggaran terkait pelayanan dasar tersebut

No	Jenis Layanan Dasar	Program	Permasalahan	Solusi
2	bencana kabupaten		Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana kabupaten/kota, dan Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di tahun 2021 dikarenakan belum adanya anggaran.	untuk peningkatan realisasi capaian SPM Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan
	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten	-		

#### **4.5 Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

##### **4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar**

Berdasarkan pada Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), bahwa Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Daerah kabupaten/kota adalah pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum kabupaten/kota.

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

1. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
2. Pelayanan informasi rawan bencana;

3. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
4. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
5. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

SPM bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Bintan diselenggarakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bintan.

#### **4.5.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah**

Target pencapaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bintan pada tahun 2021, baik untuk pelayanan ketentraman dan ketertiban umum; pelayanan informasi rawan bencana; pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; serta, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, adalah 100%. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut

**Tabel 4.23**  
**Target SPM Kabupaten Bintan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2021**

<b>No</b>	<b>Jenis Pelayanan Dasar</b>	<b>Penerima Pelayanan</b>	<b>Target</b>
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	264 Org 100%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan	Target
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	168.754 Org 100%
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	168.754 Org 100%
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	14.366 org 100%
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	168 Org 100%

#### 4.5.3 Realisasi

Berdasarkan pada target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan pada tahun 2021, capaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bintan pada 5 jenis layanan dasar dapat dilihat pada tabel berikut:



**Tabel 4.24**  
**Realisasi SPM Kabupaten Bintang Bidang Ketenteraman,**  
**Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun**  
**2021**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target	Realisasi
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	264 Org 100%	264 Org 100%
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	168.754 Org 100%	168.754 Org 100%
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	168.754 Org 100%	168.754 Org 100%
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	14.366 org 100%	14.366 org 100%
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	168 Org 100%	168 Org 100%

#### **4.5.4 Alokasi Anggaran**

Capaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bintan pada tahun 2021 menunjukkan pencapaian sebesar 100%. Salah satu faktor pendukung tercapainya target SPM adalah karena adanya dukungan anggaran. Anggaran pemenuhan SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat berasal dari APBN Pemerintah Republik Indonesia dan APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan.

Pagu anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bintan yang digunakan untuk pemenuhan SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat tahun 2021 adalah sebesar Rp. 224.009.440,- (Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan) dan Rp. 382.749.640,- (Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bintan) sehingga total anggaran SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Bintan sebesar Rp. 606.759.080. Pagu anggaran tersebut digunakan untuk membiayai program-program beserta kegiatan yang berkaitan dengan SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bintan. Dalam pelaksanaannya, besaran pagu anggaran yang terealisasi adalah sebesar Rp. 209.009.250,- (Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan) dan sebesar Rp. 337.357.564,- (Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bintan). Berikut adalah tabel pengalokasian anggaran tahun 2021 untuk SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bintan.

**Tabel 4.25**  
**Alokasi Anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja dan**  
**Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bintan**  
**dalam Pelaksanaan SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban**  
**Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2021**

No	Jenis Layanan Dasar	Program	Kegiatan	Sumber Dana	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	APBD	154.000.000	153.040.800
		Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah dini, Pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan	APBD	49.996.573	38.087.450
			Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	APBD	20.012.867	17.881.000
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Program Penanggulangan Bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	APBD	40.129.860	34.182.295
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana	APBD	41.050.000	34.875.754

No	Jenis Layanan Dasar	Program	Kegiatan	Sumber Dana	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
4	terhadap bencana		Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kot a			
	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kot a	APBD	13.559.500	13.327.522
			Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kot a	APBD	77.011.080	76.646.021
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kot a	APBD	210.999.200	178.325.772

#### 4.5.5 Dukungan Personil

Dalam pemenuhan SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bintan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bintan melibatkan personil dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 4.26**  
**Dukungan Personil dalam Pelaksanaan SPM Bidang**  
**Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan**  
**Masyarakat Tahun 2021**

No	Jenis Layanan Dasar	Program	Jumlah Personil
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	178 Orang
		Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	178 Orang
			178 Orang
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Program Penanggulangan Bencana	25 Orang
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		28 Orang
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		28 Orang
			24 Orang
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

#### 4.5.6 Permasalahan dan Solusi

Berikut adalah beberapa permasalahan dan alternatif solusi dalam pemenuhan SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat tahun 2021 oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan:

**Tabel 4.27**  
**Permasalahan dan Solusi dalam Pelaksanaan SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2021**

No	Jenis Layanan Dasar	Program	Permasalahan	Solusi
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Belum adanya standar biaya ganti rugi atas kerugian materil dan fisik warga negara yang terkena dampak	Mengajukan usulan ke Bapelitbang Kabupaten Bintan untuk melakukan kajian terhadap standar biaya ganti rugi
		Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Perlengkapan keamanan dalam mendukung operasi penegakan hukum Perda/Perkada belum maksimal	Mengajukan usulan pengadaan perlengkapan keamanan
			SDM petugas masih kurang profesional	Melakukan pembinaan/pelatihan personil
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Program Penanggulangan Bencana	Tidak Ada	Tidak Ada
3	Pelayanan pencegahan dan		Tidak Ada	Tidak Ada

No	Jenis Layanan Dasar	Program	Permasalahan	Solusi
4	kesiapsiagaan terhadap bencana			
	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		Tidak Ada	Tidak Ada
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Tidak Ada	Tidak Ada

## 4.6 Urusan Sosial

### 4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), bahwa Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Sosial Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti;
2. Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti;
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti;
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan

5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

Pemenuhan SPM Bidang Sosial di Kabupaten Bintan, dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bintan.

#### 4.6.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian SPM Bidang Sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bintan pada tahun 2021, baik untuk, adalah 100%. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.28**  
**Target SPM Kabupaten Bintan Sosial Tahun 2021**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan	Target
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	301 Org 100%
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	493 Org 100%
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	5.660 Org 100%
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	10 Org 100%



No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan	Target
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	17.211 Org 100%

#### 4.6.3 Realisasi

Berdasarkan pada target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan pada tahun 2021, capaian SPM Bidang Sosial oleh Dinas Sosial Kabupaten Bintan pada 5 jenis layanan dasar dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.29**  
**Realisasi SPM Kabupaten Bintan Bidang Sosial Tahun 2021**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target	Realisasi
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	301 Org 100%	301 Org 100%
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	493 Org 100%	493 Org 100%
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	5.660 Org 100%	5.660 Org 100%
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial	10 Org 100%	8 Org 100%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target	Realisasi
5	pengemis di luar panti	dasar tuna sosial diluar panti		
	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	17.211 Org 100%	17.211 Org 100%

#### 4.6.4 Alokasi Anggaran

Capaian SPM Bidang Sosial Kabupaten Bintan pada tahun 2021 menunjukkan pencapaian yang bervariasi dengan realisasi SPM tertinggi adalah sebesar 283% dan realisasi SPM terendah adalah sebesar 80%. Salah satu faktor pendukung tercapainya target SPM adalah karena adanya dukungan anggaran. Anggaran pemenuhan SPM Bidang Sosial berasal dari APBN Pemerintah Republik Indonesia, APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan, dan sumber dana lain yang sah.

Pagu anggaran Dinas Sosial Kabupaten Bintan yang digunakan untuk pemenuhan SPM Bidang Sosial tahun 2021 adalah sebesar Rp. 5.471.532.296,-. Pagu anggaran tersebut digunakan untuk membiayai program-program yang berkaitan dengan SPM Bidang Sosial Kabupaten Bintan. Dalam pelaksanaannya, besaran pagu anggaran yang terealisasi adalah sebesar Rp. 5.155.429.389,-. Berikut adalah tabel pengalokasian anggaran tahun 2021 untuk SPM Bidang Sosial Kabupaten Bintan.

**Tabel 4.30**  
**Alokasi Anggaran pada Dinas Sosial Kabupaten Bintan dalam**  
**Pelaksanaan SPM Bidang Sosial Tahun 2021**

No	Jenis Layanan Dasar	Program	Kegiatan	Sumber Dana	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	APBD/ APBN/ Sumber dana lain yang sah	227.200.000 dan CSR dalam bentuk alat bantu dan paket sembako	227.200.000 dan CSR dalam bentuk alat bantu dan paket sembako
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	APBD/ APBN	130.000.000	230.000.000
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	APBD/ APBN	4.490.000.637.096	4.799.999.389
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	APBD	65.000.000	16.166.883
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Program Penanganan Bencana Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	APBD	108.695.200	77.088.00

#### 4.6.5 Dukungan Personil

Dalam pemenuhan SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bintan, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan melibatkan personil dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 4.31**  
**Dukungan Personil dalam Pelaksanaan**  
**SPM Bidang Sosial Tahun 2021**

No	Jenis Layanan Dasar	Program	Jumlah Personil
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Program Rehabilitasi Sosial	9 Orang
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti		7 Orang
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti		20 Orang
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti		7 Orang
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Program Penanganan Bencana Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	7 Orang

#### 4.6.6 Permasalahan dan Solusi

Berikut adalah beberapa permasalahan dan alternatif solusi dalam pemenuhan SPM Bidang Sosial tahun 2021 oleh Dinas Sosial Kabupaten Bintan:

**Tabel 4.32**  
**Permasalahan dan Solusi dalam Pelaksanaan SPM Bidang Sosial Tahun 2021**

No	Jenis Layanan Dasar	Program	Permasalahan	Solusi
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Program Rehabilitasi Sosial	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Minimnya akses pelayanan dasar bagi penyandang disabilitas seperti:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) pendidikan (sekolah luar biasa, Loka Bina karya, pusat keterampilan); b) Kesehatan (pusat layanan terapi bagi disabilitas); c) Transportasi (bus sekolah bagi penyandang disabilitas);</li> </ol> </li> <li>2. Untuk mendapatkan bantuan dari pusat, syarat dan ketentuan berlaku, yakni data harus sesuai lengkap dengan titik koordinat, sementara untuk beberapa desa terutama di wilayah pesisir masih sangat sulit</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pentingnya dibuat regulasi yang mengikat guna mengatur pemberian pelayanan terhadap penyandang disabilitas;</li> <li>2. Pe merataan jaringan internet di semua wilayah;</li> <li>3. Melibatkan dunia usaha dan masyarakat dalam pemberian bantuan ke penyandang disabilitas</li> </ol>

No	Jenis Layanan Dasar	Program	Permasalahan	Solusi
2			untuk menentukan titik koordinat, sehingga mengakibatkan data tidak lengkap dan tidak memenuhi persyaratan untuk menerima bantuan sumber dana APBN; dan 3. Terbatasnya anggaran	
	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti		1. Belum tersedianya panti rujukan/Rumah Aman bagi anak yang mengalami permasalahan hukum yang memerlukan perlindungan khusus; 2. Anggaran yang terbatas.	Menggunakan LKSA yang ada
	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti		-	-
	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti		1. Anggaran yang sangat terbatas; 2. Belum tersedianya panti rujukan bagi gelandangan pengemis yang berasal dari luar Kabupaten Bintan	1. Menjalin komunikasi dan koordinasi dengan Dinas Sosial asal gelandangan pengemis berasal,

No	Jenis Layanan Dasar	Program	Permasalahan	Solusi
5				<p>khususnya jika berasal dari luar Kabupaten Bintan, terkait pemulangan ke daerah asal;</p> <p>2. Untuk sementara ditempatkan di rumah singgah dengan kapasitas yang terbatas, Perlunya pembangunan Panti di tingkat Provinsi</p>
	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kabupaten kebakaran	Program Penanganan Bencana Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Bantuan logistik dari Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Provinsi sangat terbatas dibandingkan dengan jumlah korban bencana	Menggunakan Program Secanting Beras

## 4.7 Program dan Kegiatan

### 4.7.1 Program dan Kegiatan Urusan Pendidikan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai SPM Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.33**  
**Program dan Kegiatan dalam Pelaksanaan SPM Bidang Pendidikan Tahun 2021**

No	Program	Kegiatan	Sumber Dana	Anggaran (Rp)
1	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	APBD	398.980.000
		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	APBD	49.340.000
		Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	APBD	109.005.200
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	APBD	68.750.000
		Pengelolaan Dana BOP PAUD	APBD	2.890.200.000
2	Pengelolaan Pendidikan Dasar	Penambahan Ruang Kelas baru	APBD	4.323.038.576
		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	APBD	979.024.000,00
		Pembangunan Perpustakaan Sekolah	APBD	1.996.560.000
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	APBD	9.533.084.640
		Pengadaan Perlengkapan Siswa	APBD	1.386.513.172
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	APBD	2.783.876.961



No	Program	Kegiatan	Sumber Dana	Anggaran (Rp)
3	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APBD	20.891.876.626
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	APBD	5.276.833.600
		Pengadaan perlengkapan Siswa	APBD	1.147.684.050
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	APBD	2.213.252.049
		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	APBD	1.680.491.727
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	APBD	100.000.000
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	APBD	11.723.748.368
		Pengadaan Mebel	APBD	1.202.492.400
		Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	APBD	2.308.812.000
		4	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan
Pengadaan Mebel	APBD			21.995.835
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	APBD			490.000.000
Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	APBD			80.000.000
Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	APBD			636.100.000

#### 4.7.2 Program dan Kegiatan Urusan Kesehatan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai SPM Bidang Kesehatan adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.34**  
**Program dan Kegiatan dalam Pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan Tahun 2021**

No	Program	Kegiatan	Sumber Dana	Anggaran (Rp)
1	Program Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil: Terlaksananya Pelayanan Ibu Hamil minimal 4 kali (K4) dengan Pelayanan 10T, dan Terlaksananya pelayanan kesehatan untuk ibu hamil	APBD/ APBN	46.165.164
		Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin: Semua Ibu Bersalin ditolong oleh Tenaga Kesehatan, Semua Ibu Bersalin di Fasilitas Kesehatan, Terlaksananya pelayanan kesehatan bagi ibu bersalin	APBN	709.703.000
		Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir: Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	APBN	8.095.750
		Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita: Semua Balita (0-59 bulan) yang mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai	APBN	20.626.600

No	Program	Kegiatan	Sumber Dana	Anggaran (Rp)
		Standar, terlaksananya pelayanan Kesehatan Balita		
		Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar: Persentase Usia Pendidikan Dasar yang mendapat Pelayanan Kesehatan, Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar	APBD	52.252.850
		Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif: Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Remaja usia 10-18 tahun, Cakupan Pelayanan Akseptor KB Aktif, Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	APBD	13.000.000
		Kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut: Meningkatnya Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut, Terlaksananya Pembinaan Puskesmas Santun Lansia, Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	APBN	19.569.400
		Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi: Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi di	APBD	46.118.100

No	Program	Kegiatan	Sumber Dana	Anggaran (Rp)
		Puskesmas, Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		
		Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus: Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Maelitus di Puskesmas, Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penderita DM	APBD	28.816.700
		Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat: Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	APBD	43.524.000
		Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis: Terlaksananya Pengobatan Pasien TB sesuai standar	Sumber dana lain yang sah	22.490.000
		Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV: Terlaksananya Monev, Penyuluhan dan Pemeriksaan di Kelompok Resiko HIV/AIDS	APBD/ Sumber dana lain yang sah	25.500.000

### 4.7.3 Program dan Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum

Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai SPM Bidang Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.35**  
**Program dan Kegiatan dalam Pelaksanaan SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2021**

No	Jenis Layanan Dasar	Program	Kegiatan	Sumber Dana	Anggaran (Rp)
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	APBD & Sumber dana lain yang sah	3.773.637.875
			Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	APBD	816.572.650
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	APBD	791.340.984
			Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	APBD	263.055.397
			Operasi dan Pemeliharaan SPAM Kawasan Perdesaan	APBD	1.789.337.188
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah Kabupaten/Kota		APBD	405.519.558

#### 4.7.4 Program dan Kegiatan Urusan Perumahan Rakyat

Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai SPM Bidang Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.36**  
**Program dan Kegiatan dalam Pelaksanaan SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2021**

No	Jenis Layanan Dasar	Program	Kegiatan	Sumber Dana	Anggaran (Rp)
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	APBD	300.000.000
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten	-	-	-	-

#### 4.7.5 Program dan Kegiatan Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.37**  
**Program dan Kegiatan dalam Pelaksanaan SPM Bidang**  
**Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan**  
**Masyarakat Tahun 2021**

No	Program	Kegiatan	Sumber Dana	Anggaran (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	APBD	154.000.000
2	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah dini, Pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan	APBD	49.996.573
		Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	APBD	20.012.867
3	Program Penanggulangan Bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	APBD	40.129.860
		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	APBD	41.050.000

No	Program	Kegiatan	Sumber Dana	Anggaran (Rp)
4		Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	APBD	13.559.500
		Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	APBD	77.011.080
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	APBD	210.999.200

#### 4.7.6 Program dan Kegiatan Urusan Sosial

Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai SPM Bidang Sosial adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.38**  
**Program dan Kegiatan dalam Pelaksanaan SPM Bidang Sosial**  
**Tahun 2021**



No	Program	Jenis Layanan Dasar	Kegiatan	Sumber Dana	Anggaran (Rp)
1	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	APBD/ APBN/ Sumber dana lain yang sah	227.200.000 dan CSR dalam bentuk alat bantu dan paket sembako
		Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	APBD/ APBN	230.000.000
		Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	APBD/ APBN	4.490.000.637.096
		Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	APBD	65.000.000

No	Program	Jenis Layanan Dasar	Kegiatan	Sumber Dana	Anggaran (Rp)
5	Program Penanganan Bencana Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	APBD	108.695.200



# LPPD 2021

LAPORAN  
PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH  
KABUPATEN BINTAN

## BAB V

P E N U T U P





## BAB V PENUTUP

Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bintang Tahun 2021 menitikberatkan pada Agenda rencana kerja pemerintah daerah tahun 2021 yang mengusung tema “Peningkatan Daya Saing dan Pembangunan Berkelanjutan Menuju Bintang Gemilang”. Prioritas tersebut seiring usaha massif untuk penanganan Pandemi Covid 19 yang terjadi secara global, nasional dan daerah. Fokus utama Kabupaten Bintang di tahun 2021 pada dasarnya sangat menitikberatkan pada “Bintang Bangkit” dalam rangkap pemulihan ekonomi kerakyatan yang berketahanan sosial. Sepanjang tahun tersebut begitu banyak tantangan dalam mewujudkan agenda strategis daerah seiring dengan memberikan atensi khusus dalam

menghadapi kondisi pandemi. Pemerintah daerah Bersama dengan seluruh stakeholder terkait tentu merespon secara sigap dan sinergis memastikan bahwa kondisi sosial kemasyarakatan dapat terus terjaga

Situasi ini mendorong pemerintah daerah mesti inovatif dalam rangka kemajuan daerah. Kemajuan suatu daerah sejatinya memiliki keterpautan yang erat dengan kesejahteraan masyarakatnya. Daerah yang maju adalah daerah yang masyarakatnya sejahtera. Upaya pemerintah untuk memajukan daerah adalah juga langkah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya, yang dicirikan oleh peningkatan capaian kinerja di berbagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Begitu juga Kabupaten Bintan sebagai dalam penerapan visi dan misi sebagai wujud komitmen mensejahterakan masyarakat Kabupaten Bintan.

Selain itu, kemajuan suatu daerah juga diindikasikan oleh capaian pengembangan inovasi daerah, penerapan good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, posisi kinerja daerah dalam konstelasi nasional, serta penghargaan yang diterima oleh daerah sebagai wujud pengakuan dari pemerintah dan masyarakat atas kinerja yang telah diwujudkan. Tercatat 19 penghargaan prestisius diraih Kabupaten Bintan sepanjang tahun 2021.

Dari sudut pandang indikator makro capaian kinerja daerah terkait kesejahteraan masyarakat seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya walaupun kenaikan tersebut memberikan sinyalemen positif dan signifikan dari 74,13 pada tahun 2020 menjadi 74,57 di tahun 2021. Selanjutnya keberhasilan Kabupaten Bintan menekan angka kemiskinan sepanjang tahun 2021 memiliki efek penting pada

indikator angka kemiskinan, intervensi kebijakan terhadap kemiskinan daerah pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 sebesar 0,06 % menempatkan kabupaten bintang pada posisi ke-2 terbaik dalam menekan angka kemiskinan daerah.

Pada tahun 2021, kondisi ketenaga kerjaan menunjukkan perkembangan baik ditunjukkan dengan turunnya angka pengangguran jika dibandingkan tahun 2020. Angka pengangguran pada tahun 2020 sebesar 8.86 menjadi 8.62 pada tahun 2021. Begitu juga indikator pertumbuhan ekonomi mulai menunjukkan arah peningkatan. Setelah sebelumnya pada tahun 2020 laju pertumbuhan ekonomi berada pada angka -4,28% karena harus berjibaku dalam penanganan pandemi covid-19. Di tahun 2021, laju pertumbuhan ekonomi sudah berada pada nilai positif yakni 0,23%. Sinyal ini yang kemudian mendorong semangat “Bintang Bangkit” untuk pemulihan ekonomi, Kesehatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk indikator pendapatan per kapita, masih bertahan pada posisi 86,47 juta. Sedangkan untuk indikator ketimpangan pendapatan (gini rasio) Kabupaten Bintang pada tahun 2021 berada pada angka 0.272.

Selain disampaikan penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi, fungsi penunjang urusan, dan tugas pembantuan, di dalam LPPD aspek-aspek lainnya yang dinilai adalah capaian kinerja makro, capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren, fungsi penunjang urusan yang Indikator Kinerja Kuncinya telah ditentukan oleh Pemerintah, capaian hasil penerapan Standar Pelayanan Minimal dan capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah.

Pada tahun 2021 Indikator Kinerja Kunci tersebut menggunakan pola outcome dan output, yang terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan, dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan.

Dimana total Indikator Kinerja Kunci (IKK) berjumlah IKK Outcome 124 dan IKK Output 473 IKK. Sementara untuk IKK Makro yang berkaitan dengan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan berjumlah 6 IKK. Capaian kinerja di 6 urusan wajib terkait pelayanan dasar tersebut adalah Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini 2.721 (100%), Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs) 26.172 (100%), dan Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan 304 (100%).

Untuk urusan kesehatan, Pelayanan kesehatan ibu hamil dengan capaian 97,88%, Pelayanan kesehatan ibu bersalin dengan capaian 96,38%, Pelayanan kesehatan bayi baru lahir dengan capaian 99,06%, Pelayanan kesehatan balita dengan capaian 92,66%, Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar dengan capaian 88,52%, Pelayanan kesehatan pada usia produktif dengan capaian 86,04%, Pelayanan kesehatan pada usia lanjut dengan capaian 70,46%, Pelayanan kesehatan penderita hipertensi dengan capaian 30,69%, Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus dengan capaian 100%, Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat dengan capaian 100%, Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis dengan capaian 100%, Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh

manusia (*Human Immunodeficiency Virus*), yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif dengan capaian 95,45%.

Pada Urusan Pekerjaan Umum, Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari dengan capaian 73,02%, dan Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik dengan capain 88,65%.

Pada Urusan Perumahan Rakyat, Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten dengan capaian 60,87%. Namun, tidak terdapat rumah yang terkena relokasi program pemerintah di Kabupaten Bintan.

Untuk Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum dengan capain kinerja 100%, Pelayanan informasi rawan bencana dengan capain kinerja 100%, Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dengan capain kinerja 100%, Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dengan capaian kinerja 100%, dan Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban dengan capaian kinerja juga 100%.

Sedangkan Urusan Sosial, Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti dengan capain kinerja 100%, Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti dengan capain kinerja 100%, Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti dengan capain kinerja 100%, Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti dengan capain kinerja 100%, dan Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota dengan capain kinerja 100%.



Hasil penyelenggaraan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah ini berjalan dengan dinamika pemerintahan yang tidak lepas dari kekurangan. Berdasarkan LPPD tahun 2021 ini akan menjadi koreksi dan bahan masukan untuk mengarahkan perbaikan-perbaikan penyelenggaraan pemerintahan ke depannya.

Kunci penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah sinergitas multi kelembagaan menjadi trigger agar upaya memastikan kinerja tetap berjalan. Mulai dari optimalisasi dari level pemerintahan tingkat bawah hingga kolaborasi aktif antara pimpinan daerah. Kinerja tersebut kemudian mesti memperhatikan arah kebijakan pemerintah pusat maupun provinsi agar selaras antara satu dengan lainnya dalam dukungan pemerintahan demi masyarakat yang berkeadilan.

Seluruh pencapaian keberhasilan diraih atas kerjasama dan sejatinya tidak dapat lepas atas kerjasama serta peran serta seluruh komponen Pemerintahan Daerah, yaitu jajaran Eksekutif (Pemerintah Daerah), Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Bintan, Kecamatan, Kelurahan, Desa dan segenap rekan kerja Pemerintah Kabupaten Bintan di unsur Legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan tentunya seluruh elemen masyarakat. Pimpinan daerah di Kabupaten Bintan pada kesempatan ini juga memberikan sekalung penghargaan serta apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih kepada seluruh komponen pemangku kepentingan dan masyarakat Kabupaten Bintan yang bersama-sama selalu mendukung situasi dan kondisi tetap terjaga kondusif sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dapat berjalan tertib, lancar dan sukses.

“

*Anak raja merdu melantun  
Tuan puteri beremas suasa  
Selaksa kata telah disusun  
Semoga negeri maju sentosa*

*Dari Mentigi pergi berkelah  
Membawa intan darilah kota  
Bangun negeri membangun marwah  
Demi bintang rumah kita*

“





# PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN

Jalan Raya Tanjungpinang-Tanjung Uban KM. 42  
Telp. (0771) 808054 Fax. (0771) 8080053 Website: [www.bintankab.go.id](http://www.bintankab.go.id)  
**BANDAR SERI BENTAN**

